SALINAN

WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan laporan keuangan yang memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
    a. pendapatan;
    b. belanja dan transfer;
    c. surplus/defisit; dan
    d. pembiayaan.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp660.041.274.325,93 (enam ratus enam puluh miliar empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).
(3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp628.120.872.693,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(4) Surplus/defisit . . .

(4) Surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp31.920.401.632,93 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).
(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    a. penerimaan pembiayaan; dan
    b. pengeluaran pembiayaan.
(6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp9.375.282.776,21 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh satu sen).
(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp20.559.091.300,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
(8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), direalisasikan sebesar minus Rp11.183.808.523,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
c. selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit;
d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
e. selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto.

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar Rp680.553.581.828,00 (enam ratus delapan puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp660.041.274.325,93 (enam ratus enam puluh miliar empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).

(3) Selisih . . .

(3) Selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp20.512.307.502,07 (dua puluh miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah tujuh sen).

Pasal 6

(1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar Rp669.365.341.767,21 (enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen).
(2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp628.120.872.693,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3) Selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp41.244.469.074,21 (empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 7

(1) Anggaran surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan anggaran surplus/defisit setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar minus Rp11.188.240.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).
(2) Realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp31.920.401.632,93 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).
(3) Selisih anggaran surplus/defisit terhadap realisasi surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp20.732.161.572,14 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah empat belas sen).

Pasal 8

(1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
    a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar Rp9.381.759.939,21 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen); dan

b. anggaran . . .

b. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar Rp20.570.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

(2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp9.375.282.776,21 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh satu sen); dan
b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp20.559.091.300,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

(3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, sebesar Rp6.477.163,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan neto setelah perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebesar minus Rp11.188.204.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).

(2) Realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar minus Rp11.183.808.523,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen).

(3) Selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp4.431.537,00 (empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2025, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp9.381.759.939,21 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen);
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp9.375.282.776,21 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh satu sen);

c. SiLPA, sebesar Rp20.736.593.109,14 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah empat belas sen); dan
d. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp20.736.593.109,14 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah empat belas sen).

Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:
a. jumlah aset, sebesar Rp1.711.263.406.020,42 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua puluh rupiah empat puluh dua sen);
b. jumlah kewajiban, sebesar Rp97.212.311.959,19 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan belas sen); dan
c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.614.051.094.061,23 (satu triliun enam ratus empat belas miliar lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 12

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:
a. jumlah pendapatan, sebesar Rp671.085.936.971,96 (enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen);
b. jumlah beban, sebesar Rp616.240.374.293,40 (enam ratus enam belas miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen);
c. surplus/defisit dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebesar Rp54.845.562.678,56 (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen);
d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, sebesar Rp21.786.537.163,63 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen);
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa yang merupakan selisih antara surplus/defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, sebesar Rp33.059.025.514,93 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah sembilan puluh tiga sen);

f. surplus/defisit . . .

f. surplus/defisit dari pos luar biasa, sebesar Rp4.513.321.480,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan
g. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp28.545.704.034,93 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 13

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:
a. kas di kas daerah, sebesar Rp20.154.955.442,14 (dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah empat belas sen);
b. kas di bendahara penerimaan, sebesar Rp713.659,00 (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
c. kas di bendahara pengeluaran, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d. kas di badan layanan umum daerah, sebesar Rp145.537.145,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah);
e. kas dana bantuan operasional sekolah, sebesar Rp63.937.275,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
f. kas dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan, sebesar Rp11.460.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
h. kas dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat, sebesar Rp576.304.450,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
i. kas lainnya, sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
j. saldo akhir kas, sebesar Rp20.952.907.971,14 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah empat belas sen).

Pasal 14

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:
a. ekuitas awal, sebesar Rp1.588.841.668.862,43 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);

b. surplus/defisit . . .

b. surplus/defisit laporan operasional, sebesar Rp28.545.704.034,93 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tiga sen);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar Rp3.336.278.836,13 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah tiga belas sen); dan
d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.614.051.094.061,23 (satu triliun enam ratus empat belas miliar lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 15

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 16

(1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
        1. Lampiran I.1 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
        2. Lampiran I.2 yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
        3. Lampiran I.3 yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
        4. Lampiran I.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
    b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
    d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
    e. Lampiran V yang memuat neraca;
    f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
    g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
    h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
    i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran . . .

j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m. Lampiran XII yang I memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX yang memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah, terdiri atas:
    1. Lampiran XX.1 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
    2. Lampiran XX.2 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA: (4/W.II/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan keuangan pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja perangkat Daerah selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan pemerintah Daerah merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang paling sedikit memuat 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah Daerah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pertanggungjawaban keuangan Daerah ini digunakan sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Disamping itu, pertanggungjawaban keuangan Daerah dapat menjadi alat untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperbaiki baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran di tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4

DAFTAR ISI

Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	1 - 12
Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	13 – 15
Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	16 – 257
Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;	258 – 292
Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;	293
Lampiran III Laporan Operasional;	294 – 295
Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;	296
Lampiran V Neraca;	297 – 298
Lampiran VI Laporan Arus Kas;	299 – 300
Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;	301 – 522
Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;	523 – 525
Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;	526 – 528
Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;	529
Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;	530
Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;	531 – 544
Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;	545
Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;	546 – 547
Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;	548 – 555
Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;	556
Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;	557

Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;	558
Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;	559
Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;	560
Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;	561

Lampiran I.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2025

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			PENDAPATAN	680.553.581.828,00	660.041.274.325,93	(20.512.307.502,07)	96,99
1			*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	28.096.788.160,00	22.019.627.302,00	(6.077.160.858,00)	78,37
	1.01		**PENDIDIKAN**	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23
		1-01.2-22.0-00.01.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23
	1.02		**KESEHATAN**	26.895.434.000,00	21.651.195.885,00	(5.244.238.115,00)	80,50
		1-02.0-00.0-00.01.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	26.895.434.000,00	21.651.195.885,00	(5.244.238.115,00)	80,50
	1.03		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71
		1-03.0-00.0-00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71
2			*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	2.451.000.000,00	1.403.410.860,00	(1.047.589.140,00)	57,26
	2.11		**LINGKUNGAN HIDUP**	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73
		2-11.0-00.0-00.01.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73
	2.15		**PERHUBUNGAN**	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77
		2-15.0-00.0-00.01.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.665.145.000,00	658.360.000,00	(1.006.785.000,00)	39,54
3	3.26		**PARIWISATA**	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89
		3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	3.27		**PERTANIAN**	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-
		3-27.3-25.0-00.01.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	648.340.648.668,00	635.959.876.163,93	(12.380.772.504,07)	98,09
5	5.02		**KEUANGAN**	648.340.648.668,00	635.959.876.163,93	(12.380.772.504,07)	98,09
		5-02.0-00.0-00.01.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	648.340.648.668,00	635.959.876.163,93	(12.380.772.504,07)	98,09
			BELANJA	669.365.341.767,21	628.120.872.693,00	(41.244.469.074,21)	93,84
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	336.886.479.040,00	318.544.135.852,00	(18.342.343.188,00)	94,56
1	1.01		**PENDIDIKAN**	120.882.533.253,00	116.037.918.960,00	(4.844.614.293,00)	95,99
		1-01.2-22.0-00.01.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	120.882.533.253,00	116.037.918.960,00	(4.844.614.293,00)	95,99
			BELANJA OPERASI	118.865.087.128,00	114.159.775.164,00	(4.705.311.964,00)	96,04
			Belanja Pegawai	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57
			Belanja Barang dan Jasa	15.664.377.628,00	12.975.140.077,00	(2.689.237.551,00)	82,83
			Belanja Hibah	11.038.950.000,00	10.934.566.388,00	(104.383.612,00)	99,05
			Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	-	(600.000.000,00)	-
			BELANJA MODAL	2.017.446.125,00	1.878.143.796,00	(139.302.329,00)	93,10
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.037.250,00	684.874.696,00	(44.162.554,00)	93,94
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	756.327.150,00	704.772.700,00	(51.554.450,00)	93,18
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	532.081.725,00	488.496.400,00	(43.585.325,00)	91,81
	1.02		**KESEHATAN**	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	(8.642.081.550,00)	93,30
		1-02.0-00.0-00.01.000	DINAS KESEHATAN DAERAH	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	(8.642.081.550,00)	93,30
			BELANJA OPERASI	112.540.543.115,25	107.344.475.497,00	(5.196.067.618,25)	95,38
			Belanja Pegawai	53.703.383.400,00	53.536.368.222,00	(167.015.178,00)	99,69
			Belanja Barang dan Jasa	58.487.159.715,25	53.458.107.275,00	(5.029.052.440,25)	91,40
			Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
			BELANJA MODAL	16.530.960.058,75	13.084.946.127,00	(3.446.013.931,75)	79,15
			Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.559.798.483,00	4.601.563.794,00	(2.958.234.689,00)	60,87
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.346.161.575,75	8.067.382.333,00	(278.779.242,75)	96,66
	1.03		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	(2.205.460.130,00)	95,79
		1-03.0-00.0-00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	(2.205.460.130,00)	95,79
			BELANJA OPERASI	13.723.913.304,00	12.797.573.568,00	(926.339.736,00)	93,25
			Belanja Pegawai	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63
			Belanja Barang dan Jasa	9.090.685.304,00	8.320.658.350,00	(770.026.954,00)	91,53
			BELANJA MODAL	38.622.109.229,00	37.342.988.835,00	(1.279.120.394,00)	96,69
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.707.000,00	160.894.500,00	(7.812.500,00)	95,37
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.528.500.000,00	3.510.219.400,00	(18.280.600,00)	99,48
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.924.902.229,00	33.671.874.935,00	(1.253.027.294,00)	96,41
	1.04		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	(526.843.702,00)	89,58
		1-04.0-00.0-00.01.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	(526.843.702,00)	89,58
			BELANJA OPERASI	4.597.027.433,00	4.076.658.723,00	(520.368.710,00)	88,68
			Belanja Pegawai	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61
			Belanja Barang dan Jasa	1.728.228.858,00	1.326.553.398,00	(401.675.460,00)	76,76
			Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	907.337.793,00	(92.662.207,00)	90,73
			BELANJA MODAL	458.214.780,00	451.739.788,00	(6.474.992,00)	98,59
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.214.780,00	2.600.000,00	(5.614.780,00)	31,65
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000,00	449.139.788,00	(860.212,00)	99,81
	1.05		**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	21.227.177.545,00	19.685.647.312,00	(1.541.530.233,00)	92,74
		1-05.0-00.0-00.01.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.411.964.125,00	4.094.096.952,00	(317.867.173,00)	92,80
			BELANJA OPERASI	4.312.124.380,00	3.994.257.218,00	(317.867.162,00)	92,63
			Belanja Pegawai	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65
			Belanja Barang dan Jasa	1.324.132.708,00	1.016.592.132,00	(307.540.576,00)	76,77

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			BELANJA MODAL	99.839.745,00	99.839.734,00	(11,00)	100,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.839.745,00	99.839.734,00	(11,00)	100,00
		1-05.0-00.0-00.02.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.815.213.420,00	15.591.550.360,00	(1.223.663.060,00)	92,72
			BELANJA OPERASI	16.802.359.720,00	15.579.190.510,00	(1.223.169.210,00)	92,72
			Belanja Pegawai	7.302.026.110,00	6.852.507.862,00	(449.518.248,00)	93,84
			Belanja Barang dan Jasa	9.500.333.610,00	8.726.682.648,00	(773.650.962,00)	91,86
			BELANJA MODAL	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16
	1.06		**SOSIAL**	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	(581.813.280,00)	92,99
		1-06.0-00.0-00.01.000	DINAS SOSIAL DAERAH	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	(581.813.280,00)	92,99
			BELANJA OPERASI	6.822.002.672,00	6.288.271.342,00	(533.731.330,00)	92,18
			Belanja Pegawai	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39
			Belanja Barang dan Jasa	3.357.656.824,00	3.195.641.300,00	(162.015.524,00)	95,17
			Belanja Bantuan Sosial	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91
			BELANJA MODAL	1.481.997.650,00	1.433.915.700,00	(48.081.950,00)	96,76
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.687.650,00	174.429.700,00	(15.257.950,00)	91,96
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	76.480.404.139,00	69.262.105.911,00	(7.218.298.228,00)	90,56
2	2.07		**TENAGA KERJA**	9.295.620.676,00	9.095.650.067,00	(199.970.609,00)	97,85
		2-07.3-29.0-00.01.000	DINAS TENAGA KERJA	9.295.620.676,00	9.095.650.067,00	(199.970.609,00)	97,85
			BELANJA OPERASI	9.265.762.576,00	9.065.950.067,00	(199.812.509,00)	97,84
			Belanja Pegawai	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02
			Belanja Barang dan Jasa	6.718.723.867,00	6.543.943.312,00	(174.780.555,00)	97,40
			BELANJA MODAL	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47
	2.08		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	(839.567.292,00)	82,52

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		2-08.0-00.0-00.01.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	(839.567.292,00)	82,52
			BELANJA OPERASI	4.704.660.424,00	3.865.408.832,00	(839.251.592,00)	82,16
			Belanja Pegawai	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41
			Belanja Barang dan Jasa	2.448.364.396,00	1.803.009.540,00	(645.354.856,00)	73,64
			BELANJA MODAL	97.884.300,00	97.568.600,00	(315.700,00)	99,68
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.884.300,00	97.568.600,00	(315.700,00)	99,68
	2.09		**PANGAN**	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	(393.933.918,00)	90,83
		2-09.0-00.0-00.01.000	DINAS PANGAN DAERAH	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	(393.933.918,00)	90,83
			BELANJA OPERASI	4.282.140.037,00	3.888.261.919,00	(393.878.118,00)	90,80
			Belanja Pegawai	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28
			Belanja Barang dan Jasa	1.597.185.337,00	1.276.278.371,00	(320.906.966,00)	79,91
			BELANJA MODAL	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63
	2.11		**LINGKUNGAN HIDUP**	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	(548.305.562,00)	94,95
		2-11.0-00.0-00.01.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	(548.305.562,00)	94,95
			BELANJA OPERASI	8.990.536.282,00	8.690.578.030,00	(299.958.252,00)	96,66
			Belanja Pegawai	2.699.770.990,00	2.690.198.110,00	(9.572.880,00)	99,65
			Belanja Barang dan Jasa	6.290.765.292,00	6.000.379.920,00	(290.385.372,00)	95,38
			BELANJA MODAL	1.869.095.500,00	1.620.748.190,00	(248.347.310,00)	86,71
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.669.095.500,00	1.620.748.190,00	(48.347.310,00)	97,10
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-
	2.12		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	(206.052.364,00)	95,26
		2-12.0-00.0-00.01.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	(206.052.364,00)	95,26
			BELANJA OPERASI	4.126.537.627,00	3.948.866.573,00	(177.671.054,00)	95,69
			Belanja Pegawai	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47
			Belanja Barang dan Jasa	1.236.139.383,00	1.131.728.581,00	(104.410.802,00)	91,55

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			BELANJA MODAL	221.841.400,00	193.460.090,00	(28.381.310,00)	87,21
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.841.400,00	193.460.090,00	(28.381.310,00)	87,21
	2.14		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	(806.773.855,00)	87,87
		2-14.0-00.0-00.01.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	(806.773.855,00)	87,87
			BELANJA OPERASI	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	(806.773.855,00)	87,87
			Belanja Pegawai	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69
			Belanja Barang dan Jasa	4.320.827.464,00	3.591.271.162,00	(729.556.302,00)	83,12
	2.15		**PERHUBUNGAN**	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	(1.341.985.463,00)	87,46
		2-15.0-00.0-00.01.000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	(1.341.985.463,00)	87,46
			BELANJA OPERASI	9.154.630.220,00	8.066.781.307,00	(1.087.848.913,00)	88,12
			Belanja Pegawai	3.478.870.600,00	3.431.616.423,00	(47.254.177,00)	98,64
			Belanja Barang dan Jasa	5.675.759.620,00	4.635.164.884,00	(1.040.594.736,00)	81,67
			BELANJA MODAL	1.548.256.350,00	1.294.119.800,00	(254.136.550,00)	83,59
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.014.900,00	172.915.800,00	(92.099.100,00)	65,25
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.757.000,00	130.425.000,00	(46.332.000,00)	73,79
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-
	2.16		**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	(480.404.799,00)	94,53
		2-16.2-20.2-21.01.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	(480.404.799,00)	94,53
			BELANJA OPERASI	8.082.559.174,00	7.811.433.973,00	(271.125.201,00)	96,65
			Belanja Pegawai	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95
			Belanja Barang dan Jasa	4.782.660.774,00	4.546.253.527,00	(236.407.247,00)	95,06
			BELANJA MODAL	700.130.500,00	490.850.902,00	(209.279.598,00)	70,11
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.130.500,00	490.850.902,00	(209.279.598,00)	70,11
	2.17		**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	(673.532.949,00)	81,41

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		2-17.0-00.0-00.01.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	(673.532.949,00)	81,41
			BELANJA OPERASI	3.586.976.208,00	2.919.824.359,00	(667.151.849,00)	81,40
			Belanja Pegawai	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57
			Belanja Barang dan Jasa	1.368.747.808,00	844.204.819,00	(524.542.989,00)	61,68
			BELANJA MODAL	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42
	2.18		**PENANAMAN MODAL**	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	(151.128.967,00)	96,54
		2-18.0-00.0-00.01.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	(151.128.967,00)	96,54
			BELANJA OPERASI	3.929.517.480,00	3.782.479.773,00	(147.037.707,00)	96,26
			Belanja Pegawai	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39
			Belanja Barang dan Jasa	1.044.413.480,00	914.968.855,00	(129.444.625,00)	87,61
			BELANJA MODAL	441.229.900,00	437.138.640,00	(4.091.260,00)	99,07
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.919.900,00	260.987.640,00	(3.932.260,00)	98,52
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91
	2.19		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	(452.380.005,00)	90,28
		2-19.0-00.0-00.01.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	(452.380.005,00)	90,28
			BELANJA OPERASI	4.238.574.654,00	3.795.734.849,00	(442.839.805,00)	89,55
			Belanja Pegawai	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71
			Belanja Barang dan Jasa	1.600.388.754,00	1.163.366.850,00	(437.021.904,00)	72,69
			Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
			BELANJA MODAL	416.479.200,00	406.939.000,00	(9.540.200,00)	97,71
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.479.200,00	196.359.000,00	(9.120.200,00)	95,56
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80
	2.24		**KEARSIPAN**	4.090.956.652,00	2.966.694.207,00	(1.124.262.445,00)	72,52
		2-24.2-23.0-00.01.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4.090.956.652,00	2.966.694.207,00	(1.124.262.445,00)	72,52
			BELANJA OPERASI	4.003.336.322,00	2.946.825.207,00	(1.056.511.115,00)	73,61

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			Belanja Pegawai	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80
			Belanja Barang dan Jasa	1.603.363.012,00	599.553.049,00	(1.003.809.963,00)	37,39
			BELANJA MODAL	87.620.330,00	19.869.000,00	(67.751.330,00)	22,68
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.620.330,00	19.869.000,00	(67.751.330,00)	22,68
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30.638.295.517,00	27.735.098.129,00	(2.903.197.388,00)	90,52
3	3.26		**PARIWISATA**	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	(271.817.775,00)	96,70
		3-26.0-00.0-00.01.000	DINAS PARIWISATA DAERAH	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	(271.817.775,00)	96,70
			BELANJA OPERASI	7.679.042.277,00	7.410.759.983,00	(268.282.294,00)	96,51
			Belanja Pegawai	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52
			Belanja Barang dan Jasa	4.779.284.577,00	4.611.855.223,00	(167.429.354,00)	96,50
			BELANJA MODAL	558.249.400,00	554.713.919,00	(3.535.481,00)	99,37
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.249.400,00	6.300.000,00	(1.949.400,00)	76,37
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71
	3.27		**PERTANIAN**	17.492.703.990,00	15.462.656.566,00	(2.030.047.424,00)	88,39
		3-27.3-25.0-00.01.000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	17.492.703.990,00	15.462.656.566,00	(2.030.047.424,00)	88,39
			BELANJA OPERASI	16.800.357.605,05	15.172.931.257,00	(1.627.426.348,05)	90,31
			Belanja Pegawai	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68
			Belanja Barang dan Jasa	7.808.641.174,05	6.659.659.930,00	(1.148.981.244,05)	85,29
			BELANJA MODAL	692.346.384,95	289.725.309,00	(402.621.075,95)	41,85
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.346.384,95	90.525.309,00	(1.821.075,95)	98,03
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20
	3.30		**PERDAGANGAN**	4.908.299.850,00	4.306.967.661,00	(601.332.189,00)	87,75
		3-30.3-31.0-00.01.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	4.908.299.850,00	4.306.967.661,00	(601.332.189,00)	87,75
			BELANJA OPERASI	4.689.299.650,00	4.096.281.811,00	(593.017.839,00)	87,35
			Belanja Pegawai	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05
			Belanja Barang dan Jasa	1.876.521.850,00	1.422.775.292,00	(453.746.558,00)	75,82
			BELANJA MODAL	219.000.200,00	210.685.850,00	(8.314.350,00)	96,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.000.200,00	210.685.850,00	(8.314.350,00)	96,20
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	95.608.727.867,00	89.584.841.810,00	(6.023.886.057,00)	93,70
4	4.01		**SEKRETARIAT DAERAH**	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	(3.619.848.964,00)	93,74
		4-01.0-00.0-00.01.000	SEKRETARIAT DAERAH	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	(3.619.848.964,00)	93,74
			BELANJA OPERASI	54.228.965.390,50	51.862.189.991,00	(2.366.775.399,50)	95,64
			Belanja Pegawai	21.062.456.033,00	19.860.913.147,00	(1.201.542.886,00)	94,30
			Belanja Barang dan Jasa	31.166.509.357,50	30.091.276.844,00	(1.075.232.513,50)	96,55
			Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50
			BELANJA MODAL	3.601.270.640,50	2.348.197.076,00	(1.253.073.564,50)	65,20
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.318.270.640,50	2.071.571.852,00	(1.246.698.788,50)	62,43
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.000.000,00	215.665.268,00	(6.334.732,00)	97,15
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93
	4.02		**SEKRETARIAT DPRD**	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	(2.404.037.093,00)	93,64
		4-02.0-00.0-00.01.000	SEKRETARIAT DPRD	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	(2.404.037.093,00)	93,64
			BELANJA OPERASI	36.453.793.436,00	34.200.009.255,00	(2.253.784.181,00)	93,82
			Belanja Pegawai	14.260.940.885,00	13.892.459.452,00	(368.481.433,00)	97,42
			Belanja Barang dan Jasa	22.192.852.551,00	20.307.549.803,00	(1.885.302.748,00)	91,50
			BELANJA MODAL	1.324.698.400,00	1.174.445.488,00	(150.252.912,00)	88,66
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.698.400,00	586.702.500,00	(127.995.900,00)	82,09
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	610.000.000,00	587.742.988,00	(22.257.012,00)	96,35
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	55.664.044.579,21	51.883.546.249,00	(3.780.498.330,21)	93,21
5	5.01		**PERENCANAAN**	8.355.277.572,00	7.161.201.191,00	(1.194.076.381,00)	85,71
		5-01.5-05.0-00.01.000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.355.277.572,00	7.161.201.191,00	(1.194.076.381,00)	85,71
			BELANJA OPERASI	7.945.155.350,00	6.936.631.002,00	(1.008.524.348,00)	87,31
			Belanja Pegawai	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50
			Belanja Barang dan Jasa	2.806.992.381,00	1.824.316.280,00	(982.676.101,00)	64,99
			BELANJA MODAL	410.122.222,00	224.570.189,00	(185.552.033,00)	54,76

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.122.222,00	224.570.189,00	(5.552.033,00)	97,59
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-
	5.02		**KEUANGAN**	40.087.332.696,21	38.073.646.053,00	(2.013.686.643,21)	94,98
		5-02.0-00.0-00.01.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	40.087.332.696,21	38.073.646.053,00	(2.013.686.643,21)	94,98
			BELANJA OPERASI	32.026.508.025,50	31.300.869.590,00	(725.638.435,50)	97,73
			Belanja Pegawai	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92
			Belanja Barang dan Jasa	14.489.007.673,50	14.083.779.898,00	(405.227.775,50)	97,20
			Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
			BELANJA MODAL	2.082.043.127,50	2.041.294.808,00	(40.748.319,50)	98,04
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.247.043.127,50	1.209.635.565,00	(37.407.562,50)	97,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	835.000.000,00	831.659.243,00	(3.340.757,00)	99,60
			BELANJA TIDAK TERDUGA	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
			Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
			BELANJA TRANSFER	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
			Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
	5.03		**KEPEGAWAIAN**	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	(572.735.306,00)	92,07
		5-03.5-04.0-00.01.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	(572.735.306,00)	92,07
			BELANJA OPERASI	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	(572.735.306,00)	92,07
			Belanja Pegawai	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83
			Belanja Barang dan Jasa	2.522.040.511,00	2.051.073.927,00	(470.966.584,00)	81,33
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	(979.353.307,00)	90,29
6	6.01		**INSPEKTORAT**	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	(979.353.307,00)	90,29
		6-01.0-00.0-00.01.000	INSPEKTORAT DAERAH	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	(979.353.307,00)	90,29
			BELANJA OPERASI	9.661.010.831,00	8.699.199.324,00	(961.811.507,00)	90,04
			Belanja Pegawai	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65
			Belanja Barang dan Jasa	3.979.174.127,00	3.151.123.529,00	(828.050.598,00)	79,19

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			BELANJA MODAL	420.392.250,00	402.850.450,00	(17.541.800,00)	95,83
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.392.250,00	203.540.450,00	(16.851.800,00)	92,35
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66
			UNSUR KEWILAYAHAN	55.565.554.528,00	53.711.697.238,00	(1.853.857.290,00)	96,66
7	7.01		**KECAMATAN**	55.565.554.528,00	53.711.697.238,00	(1.853.857.290,00)	96,66
		7-01.0-00.0-00.01.000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	12.482.194.566,00	11.966.943.509,00	(515.251.057,00)	95,87
			BELANJA OPERASI	11.458.193.266,00	10.957.007.136,00	(501.186.130,00)	95,63
			Belanja Pegawai	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88
			Belanja Barang dan Jasa	5.319.522.066,00	4.886.870.438,00	(432.651.628,00)	91,87
			BELANJA MODAL	1.024.001.300,00	1.009.936.373,00	(14.064.927,00)	98,63
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.001.300,00	10.550.000,00	(13.451.300,00)	43,96
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94
		7-01.0-00.0-00.02.000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	11.504.954.516,00	11.180.918.574,00	(324.035.942,00)	97,18
			BELANJA OPERASI	10.604.954.516,00	10.281.277.574,00	(323.676.942,00)	96,95
			Belanja Pegawai	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13
			Belanja Barang dan Jasa	4.053.894.116,00	3.786.923.985,00	(266.970.131,00)	93,41
			BELANJA MODAL	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96
		7-01.0-00.0-00.03.000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	14.336.009.265,00	13.888.467.604,00	(447.541.661,00)	96,88
			BELANJA OPERASI	13.110.362.255,00	12.728.228.139,00	(382.134.116,00)	97,09
			Belanja Pegawai	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77
			Belanja Barang dan Jasa	5.468.633.700,00	5.103.772.480,00	(364.861.220,00)	93,33
			BELANJA MODAL	1.225.647.010,00	1.160.239.465,00	(65.407.545,00)	94,66
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.351.500,00	-	(28.351.500,00)	-
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.197.295.510,00	1.160.239.465,00	(37.056.045,00)	96,91
		7-01.0-00.0-00.04.000	KECAMATAN TOMOHON BARAT	9.851.449.692,00	9.581.963.508,00	(269.486.184,00)	97,26
			BELANJA OPERASI	9.015.651.524,00	8.760.935.126,00	(254.716.398,00)	97,17
			Belanja Pegawai	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
			Belanja Barang dan Jasa	3.916.712.924,00	3.725.651.653,00	(191.061.271,00)	95,12
			BELANJA MODAL	835.798.168,00	821.028.382,00	(14.769.786,00)	98,23
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.752.000,00	33.336.400,00	(3.415.600,00)	90,71
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.046.168,00	787.691.982,00	(11.354.186,00)	98,58
		7-01.0-00.0-00.05.000	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	7.390.946.489,00	7.093.404.043,00	(297.542.446,00)	95,97
			BELANJA OPERASI	6.874.806.362,00	6.610.064.973,00	(264.741.389,00)	96,15
			Belanja Pegawai	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14
			Belanja Barang dan Jasa	2.851.795.962,00	2.661.747.540,00	(190.048.422,00)	93,34
			BELANJA MODAL	516.140.127,00	483.339.070,00	(32.801.057,00)	93,64
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.651.500,00	5.100.000,00	(11.551.500,00)	30,63
			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	499.488.627,00	478.239.070,00	(21.249.557,00)	95,75
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31
8	8.01		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31
		8-01.0-00.0-00.01.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31
			BELANJA OPERASI	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31
			Belanja Pegawai	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90
			Belanja Barang dan Jasa	4.186.302.462,62	4.076.157.643,00	(110.144.819,62)	97,37
			Belanja Hibah	1.274.634.853,38	1.274.634.852,00	(1,38)	100,00
(SURPLUS/DEFISIT)				11.188.240.060,79	31.920.401.632,93	-	-

Lampiran I.2

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	89,50	32.408.637.666,50
Retribusi Daerah	25.243.145.000,00	18.860.687.942,00	74,72	2.817.579.468,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	81,07	2.680.085.246,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.490.169.160,00	4.072.932.013,93	90,71	18.704.066.178,66
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**76.508.899.806,00**	**64.479.356.868,93**	**84,28**	**56.610.368.559,16**
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.899.138.000,00	559.360.392.123,00	99,20	607.975.488.514,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	88,24	28.364.838.292,00
Jumlah Pendapatan Transfer	**593.406.248.022,00**	**585.396.264.982,00**	**98,65**	**636.340.326.806,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	95,56	7.991.355.070,00

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	**10.638.434.000,00**	**10.165.652.475,00**	**95,56**	**7.991.355.070,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**680.553.581.828,00**	**660.041.274.325,93**	**96,99**	**700.942.050.435,16**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	307.247.559.230,00	301.200.368.052,00	98,03	294.191.910.833,00
Belanja Barang dan Jasa	255.257.799.266,92	230.514.032.515,00	90,31	260.092.565.976,32
Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	98,87	5.750.485.843,00
Belanja Hibah	15.263.584.853,38	15.069.201.240,00	98,73	45.015.997.813,00
Belanja Bantuan Sosial	2.400.329.223,00	1.378.837.793,00	57,44	4.136.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	**584.889.808.726,30**	**552.829.607.107,00**	**94,52**	**609.186.960.465,32**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	66,56	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95	13.516.328.111,00	72,99	7.364.439.874,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75	16.441.807.851,00	95,13	45.044.739.743,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.823.216.984,00	39.497.951.569,00	96,75	25.092.690.093,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.132.081.725,00	687.696.400,00	60,75	536.827.700,00
Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	0,00	0,00	149.750.000,00
Jumlah Belanja Modal	**78.496.751.497,70**	**70.559.783.931,00**	**89,89**	**78.188.447.410,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	78,60	4.490.000.000,00
Jumah Belanja Tidak Terduga	**5.828.781.543,21**	**4.581.481.655,00**	**78,60**	**4.490.000.000,00**
Jumlah Belanja	**669.215.341.767,21**	**627.970.872.693,00**	**93,84**	**691.865.407.875,32**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Jumah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota				
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**669.365.341.767,21**	**628.120.872.693,00**	**93,84**	**691.865.407.875,32**
SURPLUS/DEFISIT	**11.188.240.060,79**	**31.920.401.632,93**	**0,00**	**9.076.642.559,84**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	99,93	20.864.208.679,37
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**9.381.759.939,21**	**9.375.282.776,21**	**99,93**	**20.864.208.679,37**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	99,93	16.559.091.300,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**20.570.000.000,00**	**20.559.091.300,00**	**99,95**	**20.559.091.300,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**(11.188.240.060,79)**	**(11.183.808.523,79)**	**99,96**	**305.117.379,37**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**20.736.593.109,14**	**0,00**	**9.381.759.939,21**

Lampiran I.3

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.354.160,00	-	(51.354.160,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	120.882.533.253,00	116.037.918.960,00	(4.844.614.293,00)	95,99	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.606.088.754,00	91.431.248.238,00	(2.174.840.516,00)	97,68	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.568.669.500,00	90.256.904.699,00	(1.311.764.801,00)	98,57	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.651.825,00	183.012.100,00	(28.639.725,00)	86,47	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.346.850,00	75.572.800,00	(11.774.050,00)	86,52	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.346.500,00	14.263.500,00	(83.000,00)	99,42	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.346.500,00	14.263.500,00	(83.000,00)	99,42	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.721.054,00	653.133.978,00	(801.587.076,00)	44,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.185.000,00	110.098.607,00	(20.086.393,00)	84,57	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.870.000,00	4.150.000,00	(9.720.000,00)	29,92	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	3.150.000,00	(9.720.000,00)	24,48	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	3.150.000,00	(9.720.000,00)	24,48	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.198.479.549,00	19.913.469.242,00	(2.285.010.307,00)	89,71	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.236.760.104,00	10.117.924.412,00	(1.118.835.692,00)	90,04	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.042.685.000,00	82.426.506,00	(960.258.494,00)	7,91	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.042.685.000,00	82.426.506,00	(960.258.494,00)	7,91	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.685.000,00	82.426.506,00	(610.258.494,00)	11,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.25.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.058.180.000,00	8.009.258.481,00	(48.921.519,00)	99,39	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	7.606.695.275,00	7.574.740.581,00	(31.954.694,00)	99,58	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.045.275,00	1.594.829.075,00	(14.216.200,00)	99,12	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5.997.650.000,00	5.979.911.506,00	(17.738.494,00)	99,70	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	451.484.725,00	434.517.900,00	(16.966.825,00)	96,24	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.957.000,00	196.059.500,00	26.102.500,00	115,36	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	281.527.725,00	238.458.400,00	(43.069.325,00)	84,70	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.43.5.1	BELANJA OPERASI	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.48.5.1	BELANJA OPERASI	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.48.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.802.959.545,00	6.883.391.530,00	(919.568.015,00)	88,22	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	258.541.825,00	139.371.325,00	(119.170.500,00)	53,91	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.022.846.620,00	364.956.873,00	(657.889.747,00)	35,68	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.022.846.620,00	364.956.873,00	(657.889.747,00)	35,68	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.846.620,00	364.956.873,00	(407.889.747,00)	47,22	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.38.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.337.050.000,00	6.262.602.832,00	(74.447.168,00)	98,83	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	5.840.404.000,00	5.766.765.832,00	(73.638.168,00)	98,74	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.734.000,00	1.847.638.750,00	(18.095.250,00)	99,03	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	3.974.670.000,00	3.919.127.082,00	(55.542.918,00)	98,60	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	496.646.000,00	495.837.000,00	(809.000,00)	99,84	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.525.000,00	269.716.000,00	(809.000,00)	99,70	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	226.121.000,00	226.121.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.55.5.1	BELANJA OPERASI	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.55.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.907.145.500,00	2.688.108.300,00	(219.037.200,00)	92,47	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	48.931.100,00	-	(48.931.100,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.931.100,00	-	(48.931.100,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.058.760.000,00	1.066.032.800,00	7.272.800,00	100,69	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.051.535.000,00	1.058.807.800,00	7.272.800,00	100,69	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000,00	448.384.750,00	(51.615.250,00)	89,68	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.30.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.30.5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.30.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.46.5.1	BELANJA OPERASI	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.03.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	251.614.400,00	224.045.000,00	(27.569.400,00)	89,04	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	247.420.000,00	224.045.000,00	(23.375.000,00)	90,55	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	210.921.000,00	187.546.000,00	(23.375.000,00)	88,92	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.27.5.1	BELANJA OPERASI	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.04.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150.205.300,00	137.306.600,00	(12.898.700,00)	91,41	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	(325.431.037,00)	92,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	(325.431.037,00)	92,90	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	204.986.650,00	184.028.696,00	(20.957.954,00)	89,78	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.778.650,00	167.336.696,00	(20.441.954,00)	89,11	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79	
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 DINAS KESEHATAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	26.895.434.000,00	21.651.195.885,00	(5.244.238.115,00)	80,50	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.007.000.000,00	16.461.150.598,00	(3.545.849.402,00)	82,28	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	(3.546.514.335,00)	82,25	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	30.664.933,00	664.933,00	102,22	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	(8.642.081.550,00)	93,30	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.463.921.403,00	77.226.282.979,00	(4.237.638.424,00)	94,80	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.649.492.900,00	53.481.638.222,00	(167.854.678,00)	99,69	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.044.329,00	299.186.042,00	(14.858.287,00)	95,27	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000,00	-	(450.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	-	(450.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	-	(450.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.825.853,00	1.155.378.211,00	(278.447.642,00)	80,58	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	(3.775.827.817,00)	85,41	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	(3.775.827.817,00)	85,41	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.008.922.598,00	18.918.474.478,00	(1.090.448.120,00)	94,55	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	5.864.577.402,00	3.179.197.705,00	(2.685.379.697,00)	54,21	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.485.286.771,00	41.405.147.604,00	(4.080.139.167,00)	91,03	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	15.037.130.571,00	13.536.401.506,00	(1.500.729.065,00)	90,02	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	745.000.000,00	534.992.000,00	(210.008.000,00)	71,81	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.2.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.599.236.571,00	8.339.971.567,00	(259.265.004,00)	96,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	553.074.995,25	534.953.004,00	(18.121.991,25)	96,72	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.074.995,25	534.953.004,00	(18.121.991,25)	96,72	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.196.781.200,00	27.617.798.598,00	(2.578.982.602,00)	91,46	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	66.200.000,00	58.625.000,00	(7.575.000,00)	88,56	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	66.200.000,00	58.625.000,00	(7.575.000,00)	88,56	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	8.625.000,00	(7.575.000,00)	53,24	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.746.000,00	223.609.750,00	(9.136.250,00)	96,07	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	182.746.000,00	174.547.750,00	(8.198.250,00)	95,51	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.746.000,00	174.547.750,00	(8.198.250,00)	95,51	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	486.000.000,00	476.846.000,00	(9.154.000,00)	98,12	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	486.000.000,00	476.846.000,00	(9.154.000,00)	98,12	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.000.000,00	376.846.000,00	(9.154.000,00)	97,63	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.29.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.720.605.500,00	6.919.577.220,00	(1.801.028.280,00)	79,35	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	7.893.901.219,00	6.369.241.861,00	(1.524.659.358,00)	80,69	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.893.901.219,00	6.369.241.861,00	(1.524.659.358,00)	80,69	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	826.704.281,00	550.335.359,00	(276.368.922,00)	66,57	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	826.704.281,00	550.335.359,00	(276.368.922,00)	66,57	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.375.000,00	50.947.500,00	(427.500,00)	99,17	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	376.806.200,00	108.181.086,00	(268.625.114,00)	28,71	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.806.200,00	108.181.086,00	(268.625.114,00)	28,71	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	04.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97	
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	(2.205.460.130,00)	95,79	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.575.165.351,00	10.072.395.948,00	(502.769.403,00)	95,25	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.262.700,00	6.550.000,00	(15.712.700,00)	29,42	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.053.253.050,00	4.873.395.218,00	(179.857.832,00)	96,44	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.563.025,00	28.045.000,00	(7.518.025,00)	78,86	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.725,00	-	(58.725,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	58.725,00	-	(58.725,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.725,00	-	(58.725,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.707.268,00	359.627.160,00	(78.080.108,00)	82,16	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.722.061.501,00	3.701.408.801,00	(20.652.700,00)	99,45	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.07.5.2	BELANJA MODAL	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.678.121.401,00	3.659.117.801,00	(19.003.600,00)	99,48	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.307.207,00	253.031.950,00	(168.275.257,00)	60,06	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.010.600,00	850.337.819,00	(32.672.781,00)	96,30	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.000.000,00	693.301.446,00	(1.698.554,00)	99,76	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.220.667.852,00	6.198.340.088,00	(22.327.764,00)	99,64	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.695.570.453,00	2.673.257.690,00	(22.312.763,00)	99,17	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.651.791.840,00	1.632.488.540,00	(19.303.300,00)	98,83	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	99.471.840,00	99.471.540,00	(300,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.471.840,00	99.471.540,00	(300,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.18	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.24	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	885,00	-	(885,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	885,00	-	(885,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885,00	-	(885,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.89.5.1	BELANJA OPERASI	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.89.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.93.5.2	BELANJA MODAL	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.01.93.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.525.097.399,00	3.525.082.398,00	(15.001,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.461.215.136,00	2.461.215.136,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	13.029.315.666,00	12.057.938.150,00	(971.377.516,00)	92,54	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	13.029.315.666,00	12.057.938.150,00	(971.377.516,00)	92,54	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.906.750.000,00	4.612.276.900,00	(294.473.100,00)	94,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	253.850.000,00	231.969.400,00	(21.880.600,00)	91,38	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.850.000,00	231.969.400,00	(21.880.600,00)	91,38	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.28.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.072.565.666,00	6.395.661.250,00	(676.904.416,00)	90,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.32.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	03.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	(212.339.750,00)	93,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	(212.339.750,00)	93,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.39.5.1	BELANJA OPERASI	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	05.2.01.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	(41.957.500,00)	97,01	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	(41.957.500,00)	97,01	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	06.2.01.31.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	319.887.800,00	259.477.500,00	(60.410.300,00)	81,12	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.887.800,00	259.477.500,00	(60.410.300,00)	81,12	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	27.628.300,00	27.528.000,00	(100.300,00)	99,64	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	08.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.628.300,00	27.528.000,00	(100.300,00)	99,64	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	(89.799.727,00)	99,46	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	(89.799.727,00)	99,46	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.32	Pembangunan Jalan	6.610.017.754,00	6.588.543.100,00	(21.474.654,00)	99,68	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.32.5.1	BELANJA OPERASI	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	6.210.238.854,00	6.189.865.100,00	(20.373.754,00)	99,67	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.210.238.854,00	6.189.865.100,00	(20.373.754,00)	99,67	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	3.970.502.272,00	3.911.840.899,00	(58.661.373,00)	98,52	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.33.5.1	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.33.5.2	BELANJA MODAL	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.33.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.34.5.2	BELANJA MODAL	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.34.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.38.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	4.174.278.900,00	4.174.101.200,00	(177.700,00)	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.40.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.43.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	10.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	827.807.850,00	523.429.980,00	(304.377.870,00)	63,23	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	498.376.325,00	348.239.480,00	(150.136.845,00)	69,87	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	126.860.341,00	92.889.500,00	(33.970.841,00)	73,22	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	121.584.441,00	92.889.500,00	(28.694.941,00)	76,40	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.584.441,00	92.889.500,00	(28.694.941,00)	76,40	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	82.560.500,00	82.029.000,00	(531.500,00)	99,36	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	82.560.500,00	82.029.000,00	(531.500,00)	99,36	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	370.500,00	-	(370.500,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.500,00	-	(370.500,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	82.190.000,00	82.029.000,00	(161.000,00)	99,80	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.190.000,00	82.029.000,00	(161.000,00)	99,80	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	223.684.225,00	74.744.500,00	(148.939.725,00)	33,42	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	31.664.825,00	21.175.500,00	(10.489.325,00)	66,87	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.992.125,00	12.129.000,00	(9.863.125,00)	55,15	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.992.125,00	12.129.000,00	(9.863.125,00)	55,15	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.07.5.2	BELANJA MODAL	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-	
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	12.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1-04.0-00.0-00.01.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	(526.843.702,00)	89,58	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.739.742.338,00	2.563.216.930,00	(176.525.408,00)	93,56	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.899.350,00	13.082.000,00	(4.817.350,00)	73,09	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.613.975,00	1.995.868.532,00	(32.745.443,00)	98,39	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.919.650,00	19.240.000,00	(2.679.650,00)	87,78	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.411.350,00	4.240.000,00	(1.171.350,00)	78,35	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.978.421,00	150.103.086,00	(40.875.335,00)	78,60	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.046.042,00	102.899.912,00	(80.146.130,00)	56,22	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.284.900,00	282.023.400,00	(15.261.500,00)	94,87	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.920.000,00	8.200.000,00	(4.720.000,00)	63,47	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.990.000,00	4.870.000,00	(3.120.000,00)	60,95	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.06.06	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	02.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	453.837.300,00	347.789.362,00	(106.047.938,00)	76,63	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	353.837.300,00	346.679.362,00	(7.157.938,00)	97,98	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	302.595.000,00	301.809.388,00	(785.612,00)	99,74	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.595.000,00	2.220.000,00	(375.000,00)	85,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	2.220.000,00	(375.000,00)	85,55	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	03.2.03.12.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	976.479.450,00	869.592.819,00	(106.886.631,00)	89,05	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	976.479.450,00	869.592.819,00	(106.886.631,00)	89,05	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	872.263.125,00	739.599.400,00	(132.663.725,00)	84,79	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	872.263.125,00	739.599.400,00	(132.663.725,00)	84,79	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	861.393.125,00	739.599.400,00	(121.793.725,00)	85,86	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	706.508.495,00	590.049.000,00	(116.459.495,00)	83,52	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.508.495,00	590.049.000,00	(116.459.495,00)	83,52	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	154.884.630,00	149.550.400,00	(5.334.230,00)	96,56	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.884.630,00	-	(4.884.630,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.550.400,00	(449.600,00)	99,70	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-	
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.411.964.125,00	4.094.096.952,00	(317.867.173,00)	92,80	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.967.982.725,00	3.757.499.228,00	(210.483.497,00)	94,70	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000,00	5.622.400,00	(1.177.600,00)	82,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.206.772,00	3.086.802.086,00	(10.404.686,00)	99,66	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.500.170,00	108.459.720,00	(3.040.450,00)	97,27	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.309.783,00	137.598.534,00	(153.711.249,00)	47,23	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.185.000,00	362.811.488,00	(22.373.512,00)	94,19	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	443.981.400,00	336.597.724,00	(107.383.676,00)	75,81	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	302.417.200,00	209.811.755,00	(92.605.445,00)	69,38	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	130.097.100,00	125.556.410,00	(4.540.690,00)	96,51	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	32.796.900,00	28.256.221,00	(4.540.679,00)	86,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.796.900,00	28.256.221,00	(4.540.679,00)	86,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	97.300.200,00	97.300.189,00	(11,00)	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.300.200,00	97.300.189,00	(11,00)	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	136.500.000,00	84.255.345,00	(52.244.655,00)	61,73	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	134.727.655,00	82.483.000,00	(52.244.655,00)	61,22	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.727.655,00	82.483.000,00	(52.244.655,00)	61,22	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.414.300,00	8.347.500,00	(66.800,00)	99,21	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	8.414.300,00	8.347.500,00	(66.800,00)	99,21	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04.13.5.2	BELANJA MODAL	767.200,00	767.200,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	03.2.04.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.200,00	767.200,00	-	100,00	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16.815.213.420,00	15.591.550.360,00	(1.223.663.060,00)	92,72	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.902.514.750,00	7.494.914.200,00	(407.600.550,00)	94,84	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.433.030.500,00	7.030.587.862,00	(402.442.638,00)	94,59	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.273.450,00	86.916.320,00	(2.357.130,00)	97,36	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.017.532,00	67.847.818,00	(2.169.714,00)	96,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.782.698.670,00	7.979.953.160,00	(802.745.510,00)	90,86	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.660.174.970,00	7.889.308.510,00	(770.866.460,00)	91,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	8.545.174.970,00	7.774.363.510,00	(770.811.460,00)	90,98	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.545.174.970,00	7.774.363.510,00	(770.811.460,00)	90,98	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	49.835.610,00	-	(49.835.610,00)	-	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.495.339.360,00	7.774.363.510,00	(720.975.850,00)	91,51	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	14.523.700,00	12.359.850,00	(2.163.850,00)	85,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03.02	Pembentukan Sekretariat PPNS	14.523.700,00	12.359.850,00	(2.163.850,00)	85,10	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	130.000.000,00	116.683.000,00	(13.317.000,00)	89,76	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76	
1	1.05	1-05.0-00.0-00.02.000	04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 DINAS SOSIAL DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	(581.813.280,00)	92,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.327.014.379,00	5.163.797.642,00	(163.216.737,00)	96,94	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.767.325,00	110.850.100,00	(6.917.225,00)	94,13	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.917.752,00	2.797.355.592,00	(65.562.160,00)	97,71	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.961.150,00	411.667.460,00	(9.293.690,00)	97,79	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.633.500,00	65.826.910,00	(806.590,00)	98,79	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.338.100,00	56.172.910,00	(165.190,00)	99,71	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.338.100,00	56.172.910,00	(165.190,00)	99,71	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000,00	242.302.000,00	(7.698.000,00)	96,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	203.502.000,00	198.102.000,00	(5.400.000,00)	97,35	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.502.000,00	198.102.000,00	(5.400.000,00)	97,35	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.2	BELANJA MODAL	46.498.000,00	44.200.000,00	(2.298.000,00)	95,06	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.498.000,00	44.200.000,00	(2.298.000,00)	95,06	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.618.152,00	256.165.690,00	(38.452.462,00)	86,95	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.617.150.000,00	1.577.758.800,00	(39.391.200,00)	97,56	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.436.200.000,00	1.398.679.500,00	(37.520.500,00)	97,39	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	143.890.000,00	139.193.500,00	(4.696.500,00)	96,74	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.890.000,00	139.193.500,00	(4.696.500,00)	96,74	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	139.471.800,00	120.088.600,00	(19.383.200,00)	86,10	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	139.471.800,00	120.088.600,00	(19.383.200,00)	86,10	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.850.000,00	85.667.600,00	(18.182.400,00)	82,49	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.034.400,00	85.667.600,00	(9.366.800,00)	90,14	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.034.400,00	85.667.600,00	(9.366.800,00)	90,14	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	8.815.600,00	-	(8.815.600,00)	-	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.815.600,00	-	(8.815.600,00)	-	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	820.803.920,00	782.098.800,00	(38.705.120,00)	95,28	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	688.023.920,00	661.659.800,00	(26.364.120,00)	96,17	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02	Penyediaan Sandang	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	132.780.000,00	120.439.000,00	(12.341.000,00)	90,71	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.04	Penyediaan Sandang	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	(341.118.923,00)	79,55	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	(341.118.923,00)	79,55	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.665.329.223,00	1.327.110.300,00	(338.218.923,00)	79,69	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.583.159.673,00	1.248.177.300,00	(334.982.373,00)	78,84	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.830.450,00	776.677.300,00	(6.153.150,00)	99,21	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	82.169.550,00	78.933.000,00	(3.236.550,00)	96,06	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	05.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.169.550,00	78.933.000,00	(3.236.550,00)	96,06	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	348.481.000,00	329.091.700,00	(19.389.300,00)	94,44	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.01.01	Penyediaan Makanan	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	268.000.000,00	265.609.700,00	(2.390.300,00)	99,11	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	268.000.000,00	265.609.700,00	(2.390.300,00)	99,11	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	246.588.400,00	244.442.000,00	(2.146.400,00)	99,13	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.588.400,00	244.442.000,00	(2.146.400,00)	99,13	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	21.411.600,00	21.167.700,00	(243.900,00)	98,86	
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	06.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.411.600,00	21.167.700,00	(243.900,00)	98,86	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KERJA
Organisasi : 2-07.3-29.0-00.01.000 DINAS TENAGA KERJA

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.295.620.676,00	9.095.650.067,00	(199.970.609,00)	97,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.560.144.566,00	3.493.279.680,00	(66.864.886,00)	98,12	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.774.900,00	200.445.845,00	(4.329.055,00)	97,89	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.704.104.379,00	2.668.553.405,00	(35.550.974,00)	98,69	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.765.620,00	429.144.171,00	(8.621.449,00)	98,03	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.727.060,00	174.121.500,00	(605.560,00)	99,65	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.868.960,00	144.421.500,00	(447.460,00)	99,69	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.868.960,00	144.421.500,00	(447.460,00)	99,69	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.030.642,00	102.290.659,00	(14.739.983,00)	87,41	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.791.725,00	84.345.600,00	(2.446.125,00)	97,18	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	580.298.360,00	505.585.952,00	(74.712.408,00)	87,13	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	579.298.750,00	505.585.952,00	(73.712.798,00)	87,28	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	(249.610,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	(249.610,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.610,00	-	(249.610,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.610,00	-	(249.610,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.051.363.700,00	1.021.255.540,00	(30.108.160,00)	97,14	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.099.735.250,00	4.071.640.895,00	(28.094.355,00)	99,31	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.061.600,00	30.963.350,00	(1.098.250,00)	96,57	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.067.673.650,00	4.040.677.545,00	(26.996.105,00)	99,34	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.078.800,00	3.888.000,00	(190.800,00)	95,32	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.078.800,00	3.888.000,00	(190.800,00)	95,32	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80	
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2-08.0-00.0-00.01.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	(839.567.292,00)	82,52	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.779.614,00	2.590.483.355,00	(436.296.259,00)	85,59	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.973.398,00	2.132.719.292,00	(200.254.106,00)	91,42	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.029.810,00	89.722.363,00	(2.307.447,00)	97,49	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.635.706,00	195.269.500,00	(219.366.206,00)	47,09	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.200.000,00	33.318.600,00	(20.881.400,00)	61,47	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.565.700,00	14.893.000,00	(20.672.700,00)	41,87	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.565.700,00	14.893.000,00	(20.672.700,00)	41,87	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	18.634.300,00	18.425.600,00	(208.700,00)	98,88	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.634.300,00	18.425.600,00	(208.700,00)	98,88	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.785.600,00	141.737.000,00	(12.048.600,00)	92,17	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	145.208.900,00	137.643.486,00	(7.565.414,00)	94,79	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	197.517.795,00	86.315.100,00	(111.202.695,00)	43,70	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	870.750.000,00	665.361.337,00	(205.388.663,00)	76,41	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.750.000,00	665.361.337,00	(205.388.663,00)	76,41	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	79.250.000,00	79.143.000,00	(107.000,00)	99,86	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.250.000,00	79.143.000,00	(107.000,00)	99,86	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	212.433.415,00	201.904.600,00	(10.528.815,00)	95,04	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	270.605.000,00	202.126.554,00	(68.478.446,00)	74,69	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19	
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	07.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN
Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS PANGAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	(393.933.918,00)	90,83	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.063.457,97	3.050.188.993,00	(177.874.464,97)	94,49	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.372.774,00	35.201.300,00	(7.171.474,00)	83,08	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.860.450,00	2.641.352.948,00	(74.507.502,00)	97,26	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.415.831,97	116.465.768,00	(66.950.063,97)	63,50	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.464.606,97	42.032.500,00	(4.432.106,97)	90,46	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.042.852,00	134.488.327,00	(19.554.525,00)	87,31	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.909.750,00	89.280.650,00	(4.629.100,00)	95,07	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	901.061.379,03	733.586.896,00	(167.474.483,03)	81,41	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	202.056.000,00	107.985.601,00	(94.070.399,00)	53,44	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.037.700,00	21.185.303,00	(42.852.397,00)	33,08	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17	
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	(548.305.562,00)	94,95	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.655.471.081,00	3.507.208.120,00	(148.262.961,00)	95,94	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.142.803,00	15.132.600,00	(5.010.203,00)	75,13	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.182.960,00	2.863.575.710,00	(19.607.250,00)	99,32	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.699.799.240,00	2.690.198.110,00	(9.601.130,00)	99,64	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.699.799.240,00	2.690.198.110,00	(9.601.130,00)	99,64	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.699.770.990,00	2.690.198.110,00	(9.572.880,00)	99,65	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.250,00	-	(28.250,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.846.474,00	156.995.220,00	(12.851.254,00)	92,43	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.370.742,00	3.000.000,00	(6.370.742,00)	32,01	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.410.242,00	3.000.000,00	(4.410.242,00)	40,48	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.410.242,00	3.000.000,00	(4.410.242,00)	40,48	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.405.241,00	228.122.590,00	(57.282.651,00)	79,93	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.226.000,00	24.773.890,00	(452.110,00)	98,21	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.045.000,00	22.000.000,00	(45.000,00)	99,80	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.045.000,00	22.000.000,00	(45.000,00)	99,80	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.171.000,00	37.154.200,00	(2.016.800,00)	94,85	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.171.000,00	37.154.200,00	(2.016.800,00)	94,85	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.881.389.701,00	6.519.692.150,00	(361.697.551,00)	94,74	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.794.889.701,00	6.434.299.150,00	(360.590.551,00)	94,69	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.237.921.701,00	2.965.129.350,00	(272.792.351,00)	91,58	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.385.067.701,00	1.347.155.050,00	(37.912.651,00)	97,26	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.067.701,00	1.347.155.050,00	(37.912.651,00)	97,26	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.852.854.000,00	1.617.974.300,00	(234.879.700,00)	87,32	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.652.854.000,00	1.617.974.300,00	(34.879.700,00)	97,89	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72	
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	11.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	(206.052.364,00)	95,26	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.454.845,00	3.545.815.360,00	(159.639.485,00)	95,69	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.890.508,00	53.936.000,00	(5.954.508,00)	90,06	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.961.406,00	2.906.680.792,00	(73.280.614,00)	97,54	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.008.343,00	199.103.479,00	(1.904.864,00)	99,05	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.584.000,00	69.394.290,00	(189.710,00)	99,73	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	59.584.000,00	59.394.290,00	(189.710,00)	99,68	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.584.000,00	59.394.290,00	(189.710,00)	99,68	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.846.715,00	195.545.189,00	(68.301.526,00)	74,11	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.443.117,00	91.635.900,00	(8.807.217,00)	91,23	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.453.344,00	361.098.903,00	(44.354.441,00)	89,06	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	283.299.934,00	251.153.203,00	(32.146.731,00)	88,65	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36.603.334,00	33.976.800,00	(2.626.534,00)	92,82	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.728.334,00	8.136.000,00	(2.592.334,00)	75,84	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.728.334,00	8.136.000,00	(2.592.334,00)	75,84	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	246.696.600,00	217.176.403,00	(29.520.197,00)	88,03	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	122.153.410,00	109.945.700,00	(12.207.710,00)	90,01	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	147.463.467,00	146.618.700,00	(844.767,00)	99,43	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.610.887,00	41.380.000,00	(230.887,00)	99,45	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	38.978.180,00	38.497.600,00	(480.580,00)	98,77	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	72.958.189,00	72.682.100,00	(276.089,00)	99,62	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	45.006.089,00	44.938.000,00	(68.089,00)	99,85	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50	
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : 2-14.0-00.0-00.01.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	(806.773.855,00)	87,87	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.883.297.155,00	2.695.040.898,00	(188.256.257,00)	93,47	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.812.800,00	4.070.000,00	(5.742.800,00)	41,48	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.388.924.691,00	2.311.707.138,00	(77.217.553,00)	96,77	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.459.400,00	132.754.410,00	(34.704.990,00)	79,28	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.594.565,00	73.134.650,00	(35.459.915,00)	67,35	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.348.790.000,00	1.889.118.302,00	(459.671.698,00)	80,43	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.177.625.000,00	1.808.828.302,00	(368.796.698,00)	83,06	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	309.910.000,00	179.863.900,00	(130.046.100,00)	58,04	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.154.000,00	40.287.900,00	(15.866.100,00)	71,75	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.756.000,00	139.576.000,00	(114.180.000,00)	55,00	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	03.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	(28.799.800,00)	97,40	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	(28.799.800,00)	97,40	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19	
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	04.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	(1.341.985.463,00)	87,46	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.724.775.870,00	4.482.567.543,00	(242.208.327,00)	94,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.135.000,00	10.880.000,00	(5.255.000,00)	67,43	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.650.350.600,00	3.619.396.423,00	(30.954.177,00)	99,15	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	-	(50.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.297.025,00	158.941.590,00	(20.355.435,00)	88,65	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.655.045,00	477.689.530,00	(146.965.515,00)	76,47	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.675.700,00	215.660.000,00	(16.015.700,00)	93,09	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.978.110.700,00	4.878.333.564,00	(1.099.777.136,00)	81,60	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.207.659.925,00	4.481.735.164,00	(725.924.761,00)	86,06	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.076.627.925,00	4.441.225.164,00	(635.402.761,00)	87,48	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.997.143.475,00	3.371.325.364,00	(625.818.111,00)	84,34	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.143.475,00	3.371.325.364,00	(625.818.111,00)	84,34	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	1.079.484.450,00	1.069.899.800,00	(9.584.650,00)	99,11	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.000.000,00	79.120.800,00	(8.879.200,00)	89,91	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	364.911.680,00	269.240.000,00	(95.671.680,00)	73,78	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	262.791.680,00	224.220.000,00	(38.571.680,00)	85,32	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	38.250.680,00	-	(38.250.680,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.680,00	-	(38.250.680,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.2	BELANJA MODAL	224.541.000,00	224.220.000,00	(321.000,00)	99,86	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.034.000,00	93.795.000,00	(239.000,00)	99,75	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	101.750.000,00	44.660.000,00	(57.090.000,00)	43,89	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	44.660.000,00	(10.840.000,00)	80,47	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	44.660.000,00	(10.840.000,00)	80,47	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	260.665.120,00	48.779.000,00	(211.886.120,00)	18,71	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	2.000.000,00	(198.000.000,00)	1,00	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04.5.2	BELANJA MODAL	197.980.900,00	-	(197.980.900,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.980.900,00	-	(82.980.900,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96.285.975,00	78.579.400,00	(17.706.575,00)	81,61	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.14.5.1	BELANJA OPERASI	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.15.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.17.5.1	BELANJA OPERASI	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.06.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.10.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.10.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.11.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-	
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.000	02.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	(480.404.799,00)	94,53	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.109.581.524,00	3.956.650.093,00	(152.931.431,00)	96,28	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.818.900,00	12.484.700,00	(2.334.200,00)	84,25	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.276.300,00	3.396.107.446,00	(41.168.854,00)	98,80	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.854.665,00	77.741.420,00	(3.113.245,00)	96,15	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.472.759,00	345.222.427,00	(104.250.332,00)	76,81	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.018.600,00	124.037.100,00	(1.981.500,00)	98,43	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.524.815.600,00	3.414.969.892,00	(109.845.708,00)	96,88	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.524.815.600,00	3.414.969.892,00	(109.845.708,00)	96,88	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.14	Relasi Media	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.021.790.000,00	912.491.672,00	(109.298.328,00)	89,30	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	500.546.250,00	421.640.770,00	(78.905.480,00)	84,24	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.546.250,00	421.640.770,00	(78.905.480,00)	84,24	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	521.243.750,00	490.850.902,00	(30.392.848,00)	94,17	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	02.2.01.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.243.750,00	490.850.902,00	(30.392.848,00)	94,17	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.148.292.550,00	930.664.890,00	(217.627.660,00)	81,05	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.145.042.550,00	927.472.929,00	(217.569.621,00)	81,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	227.240.000,00	48.000.000,00	(179.240.000,00)	21,12	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	48.353.250,00	48.000.000,00	(353.250,00)	99,27	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.353.250,00	48.000.000,00	(353.250,00)	99,27	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	178.886.750,00	-	(178.886.750,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.24.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.886.750,00	-	(178.886.750,00)	-	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.30.5.1	BELANJA OPERASI	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59	
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	03.2.02.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2-17.0-00.0-00.01.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	(673.532.949,00)	81,41	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.829.451.008,00	2.641.743.059,00	(187.707.949,00)	93,37	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.838.400,00	2.175.760.740,00	(147.077.660,00)	93,67	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.376.720,00	172.677.739,00	(6.698.981,00)	96,27	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.787.039,00	63.404.700,00	(6.382.339,00)	90,85	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.436.084,00	104.128.180,00	(33.307.904,00)	75,76	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.633.804,00	182.014.600,00	(619.204,00)	99,66	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	192.535.800,00	191.635.800,00	(900.000,00)	99,53	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	192.535.800,00	191.635.800,00	(900.000,00)	99,53	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286.325.000,00	15.500.000,00	(270.825.000,00)	5,41	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	286.325.000,00	15.500.000,00	(270.825.000,00)	5,41	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	07.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-	
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	(151.128.967,00)	96,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.937.976.605,00	3.839.581.273,00	(98.395.332,00)	97,50	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.064.600,00	30.892.600,00	(7.172.000,00)	81,16	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	591.200,00	591.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	591.200,00	591.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.200,00	591.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.525.200,00	2.924.041.618,00	(21.483.582,00)	99,27	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.335.000,00	19.496.600,00	(838.400,00)	95,88	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.525.000,00	1.554.900,00	(970.100,00)	61,58	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.584.250,00	198.754.682,00	(6.829.568,00)	96,68	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.779.200,00	394.863.100,00	(3.916.100,00)	99,02	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.395.400,00	208.722.100,00	(2.673.300,00)	98,74	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	202.259.600,00	199.922.100,00	(2.337.500,00)	98,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.259.600,00	199.922.100,00	(2.337.500,00)	98,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.383.800,00	176.151.000,00	(232.800,00)	99,87	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	73.800,00	-	(73.800,00)	-	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.800,00	-	(73.800,00)	-	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.539.955,00	177.920.537,00	(42.619.418,00)	80,67	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.623.400,00	92.057.236,00	(14.566.164,00)	86,34	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65.457.549,00	37.540.700,00	(27.916.849,00)	57,35	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.513.899,00	29.793.800,00	(20.720.099,00)	58,98	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.513.899,00	29.793.800,00	(20.720.099,00)	58,98	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.554.799,00	12.366.800,00	(20.187.999,00)	37,99	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.554.799,00	12.366.800,00	(20.187.999,00)	37,99	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.544.251,00	159.281.700,00	(9.262.551,00)	94,50	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.544.251,00	159.281.700,00	(9.262.551,00)	94,50	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.056.975,00	89.057.100,00	(9.999.875,00)	89,90	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99.056.975,00	89.057.100,00	(9.999.875,00)	89,90	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	57.038.000,00	50.977.600,00	(6.060.400,00)	89,37	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.083.700,00	39.045.100,00	(6.038.600,00)	86,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.083.700,00	39.045.100,00	(6.038.600,00)	86,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	20.340.550,00	18.075.700,00	(2.264.850,00)	88,87	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.477.150,00	15.223.000,00	(2.254.150,00)	87,10	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.477.150,00	15.223.000,00	(2.254.150,00)	87,10	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.917.300,00	74.773.100,00	(1.144.200,00)	98,49	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.917.300,00	74.773.100,00	(1.144.200,00)	98,49	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61	
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61	

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2-19.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	(452.380.005,00)	90,28	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.053.854,00	2.742.595.399,00	(62.458.455,00)	97,77	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.571.700,00	12.210.800,00	(360.900,00)	97,13	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.726.800,00	2.032.835.999,00	(5.890.801,00)	99,71	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.155.550,00	182.726.340,00	(20.429.210,00)	89,94	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.400,00	-	(68.400,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	68.400,00	-	(68.400,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400,00	-	(68.400,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.147.954,00	378.590.400,00	(32.557.554,00)	92,08	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	325.000.000,00	201.186.850,00	(123.813.150,00)	61,90	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	98.010.000,00	71.417.800,00	(26.592.200,00)	72,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	226.990.000,00	129.769.050,00	(97.220.950,00)	57,17	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	169.269.350,00	129.769.050,00	(39.500.300,00)	76,66	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	161.529.750,00	122.110.050,00	(39.419.700,00)	75,60	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.529.750,00	122.110.050,00	(39.419.700,00)	75,60	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.425.000.000,00	1.158.891.600,00	(266.108.400,00)	81,33	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	584.271.600,00	(40.728.400,00)	93,48	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	625.000.000,00	584.271.600,00	(40.728.400,00)	93,48	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	401.000.000,00	399.280.000,00	(1.720.000,00)	99,57	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	701.916.700,00	500.000.000,00	(201.916.700,00)	71,23	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	701.916.700,00	500.000.000,00	(201.916.700,00)	71,23	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	694.177.100,00	500.000.000,00	(194.177.100,00)	72,03	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.177.100,00	-	(194.177.100,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	03.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.24 KEARSIPAN
Organisasi : 2-24.2-23.0-00.01.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.090.956.652,00	2.966.694.207,00	(1.124.262.445,00)	72,52	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.181.318.863,00	2.785.116.771,00	(396.202.092,00)	87,55	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.862.900,00	2.875.000,00	(13.987.900,00)	17,05	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.548.439,00	2.397.144.687,00	(71.403.752,00)	97,11	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.986.298,00	81.593.720,00	(98.392.578,00)	45,33	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.061.000,00	-	(68.061.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.061.000,00	-	(68.061.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	368.500,00	-	(368.500,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.500,00	-	(368.500,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	67.692.500,00	-	(67.692.500,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.692.500,00	-	(67.692.500,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.080.226,00	158.003.184,00	(112.077.042,00)	58,50	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.100.000,00	122.555.180,00	(22.544.820,00)	84,46	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	709.446.007,00	125.719.000,00	(583.727.007,00)	17,72	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.446.007,00	47.614.000,00	(61.832.007,00)	43,50	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	70.217.522,00	42.604.000,00	(27.613.522,00)	60,67	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.289.692,00	22.735.000,00	(27.554.692,00)	45,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.289.692,00	22.735.000,00	(27.554.692,00)	45,21	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	19.927.830,00	19.869.000,00	(58.830,00)	99,70	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.927.830,00	19.869.000,00	(58.830,00)	99,70	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	78.105.000,00	(521.895.000,00)	13,02	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	41.019.060,00	10.046.400,00	(30.972.660,00)	24,49	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	41.019.060,00	10.046.400,00	(30.972.660,00)	24,49	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04	
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
Organisasi : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	(271.817.775,00)	96,70	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.858.707.016,00	3.634.577.517,00	(224.129.499,00)	94,19	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.162,00	18.309.000,00	(2.058.162,00)	89,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.071.289.200,00	2.958.634.760,00	(112.654.440,00)	96,33	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.187.800,00	20.740.000,00	(447.800,00)	97,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.415.138,00	172.924.844,00	(3.490.294,00)	98,02	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.460.538,00	12.086.500,00	(3.374.038,00)	78,18	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	8.249.400,00	6.300.000,00	(1.949.400,00)	76,37	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.249.400,00	6.300.000,00	(1.949.400,00)	76,37	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.032.716,00	392.874.353,00	(96.158.363,00)	80,34	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.415.000,00	71.094.560,00	(9.320.440,00)	88,41	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	948.258.000,00	940.821.817,00	(7.436.183,00)	99,22	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	938.258.000,00	931.671.817,00	(6.586.183,00)	99,30	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	598.258.000,00	595.681.717,00	(2.576.283,00)	99,57	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.258.000,00	47.267.798,00	(990.202,00)	97,95	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.258.000,00	47.267.798,00	(990.202,00)	97,95	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	(35.356.881,00)	98,35	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	(35.356.881,00)	98,35	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.289.859.500,00	1.284.964.288,00	(4.895.212,00)	99,62	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.040.034.100,00	1.035.324.288,00	(4.709.812,00)	99,55	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93	
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
Organisasi : 3-27.3-25.0-00.01.000 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	17.492.703.990,00	15.462.656.566,00	(2.030.047.424,00)	88,39	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.070.843.172,09	9.508.414.252,00	(562.428.920,09)	94,42	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.660.152,00	18.040.000,00	(620.152,00)	96,68	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.235.259.706,00	8.750.126.727,00	(485.132.979,00)	94,75	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.090.600,00	9.600.000,00	(4.490.600,00)	68,13	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.880.075,00	74.519.125,00	(11.360.950,00)	86,77	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.325.600,00	27.750.000,00	(575.600,00)	97,97	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	325.600,00	-	(325.600,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.600,00	-	(325.600,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.534.338,30	505.106.900,00	(55.427.438,30)	90,11	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.885.293.038,00	3.149.130.520,00	(736.162.518,00)	81,05	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.938.818.000,00	1.619.742.840,00	(319.075.160,00)	83,54	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.241.915.281,00	1.227.437.680,00	(14.477.601,00)	98,83	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	587.085.795,00	584.212.080,00	(2.873.715,00)	99,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	578.694.995,00	575.842.080,00	(2.852.915,00)	99,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.694.995,00	575.842.080,00	(2.852.915,00)	99,51	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	704.559.757,00	301.950.000,00	(402.609.757,00)	42,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	704.559.757,00	301.950.000,00	(402.609.757,00)	42,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.559.757,00	102.750.000,00	(1.809.757,00)	98,27	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.559.757,00	102.750.000,00	(1.809.757,00)	98,27	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	02.2.06.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.594.753.068,36	1.414.489.550,00	(180.263.518,36)	88,70	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	285.000.018,36	223.124.550,00	(61.875.468,36)	78,29	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.309.753.050,00	1.191.365.000,00	(118.388.050,00)	90,96	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	645.000,00	-	(645.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	645.000,00	-	(645.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	03.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.000,00	-	(645.000,00)	-	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	290.470.100,00	271.189.961,00	(19.280.139,00)	93,36	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	290.470.100,00	271.189.961,00	(19.280.139,00)	93,36	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.470.100,00	246.402.751,00	(19.067.349,00)	92,82	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	262.470.100,00	243.402.952,00	(19.067.148,00)	92,74	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.470.100,00	243.402.952,00	(19.067.148,00)	92,74	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.129.296.276,60	674.935.700,00	(454.360.576,60)	59,77	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.296.276,60	674.935.700,00	(454.360.576,60)	59,77	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	32.405.584,95	32.097.060,00	(308.524,95)	99,05	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.405.584,95	32.097.060,00	(308.524,95)	99,05	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	414.642.750,00	339.364.979,00	(75.277.771,00)	81,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	414.642.750,00	339.364.979,00	(75.277.771,00)	81,85	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	143.001.250,00	129.075.179,00	(13.926.071,00)	90,26	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	124.001.250,00	111.315.179,00	(12.686.071,00)	89,77	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.001.250,00	111.315.179,00	(12.686.071,00)	89,77	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47	
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	07.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN
Organisasi : 3-30.3-31.0-00.01.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.908.299.850,00	4.306.967.661,00	(601.332.189,00)	87,75	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.569.945.750,00	3.379.511.558,00	(190.434.192,00)	94,67	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.966.840,00	6.902.340,00	(9.064.500,00)	43,23	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.988.431.160,00	2.847.968.519,00	(140.462.641,00)	95,30	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.983.832,00	209.871.880,00	(28.111.952,00)	88,19	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.711.607,00	37.742.280,00	(15.969.327,00)	70,27	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.273.907,00	25.964.780,00	(15.309.127,00)	62,91	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.273.907,00	25.964.780,00	(15.309.127,00)	62,91	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	12.437.700,00	11.777.500,00	(660.200,00)	94,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.437.700,00	11.777.500,00	(660.200,00)	94,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.009.900,00	7.940.400,00	(69.500,00)	99,13	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.883.068,00	126.899.352,00	(5.983.716,00)	95,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.500.750,00	176.617.512,00	(3.883.238,00)	97,85	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	612.501.400,00	514.147.503,00	(98.353.897,00)	83,94	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.501.400,00	514.147.503,00	(98.353.897,00)	83,94	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	43.600.000,00	39.606.000,00	(3.994.000,00)	90,84	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	39.606.000,00	(3.994.000,00)	90,84	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	450.000.000,00	226.971.250,00	(223.028.750,00)	50,44	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	380.000.000,00	167.140.500,00	(212.859.500,00)	43,98	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	180.000.000,00	167.140.500,00	(12.859.500,00)	92,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.550.000,00	67.684.500,00	(11.865.500,00)	85,08	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.550.000,00	67.684.500,00	(11.865.500,00)	85,08	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	100.450.000,00	99.456.000,00	(994.000,00)	99,01	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.450.000,00	99.456.000,00	(994.000,00)	99,01	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	59.830.750,00	(10.169.250,00)	85,47	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	70.000.000,00	59.830.750,00	(10.169.250,00)	85,47	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.650.000,00	32.691.250,00	(9.958.750,00)	76,65	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.650.000,00	32.691.250,00	(9.958.750,00)	76,65	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	27.350.000,00	27.139.500,00	(210.500,00)	99,23	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	04.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.350.000,00	27.139.500,00	(210.500,00)	99,23	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	41.030.000,00	30.260.200,00	(10.769.800,00)	73,75	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	41.030.000,00	30.260.200,00	(10.769.800,00)	73,75	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	33.001.400,00	27.706.700,00	(5.294.700,00)	83,96	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.111.400,00	27.706.700,00	(3.404.700,00)	89,06	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.111.400,00	27.706.700,00	(3.404.700,00)	89,06	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	127.555.000,00	59.012.600,00	(68.542.400,00)	46,26	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.555.000,00	59.012.600,00	(68.542.400,00)	46,26	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	32.512.500,00	32.006.850,00	(505.650,00)	98,44	
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	07.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.512.500,00	32.006.850,00	(505.650,00)	98,44	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	(3.619.848.964,00)	93,74	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.757.507.889,00	43.508.752.439,00	(3.248.755.450,00)	93,05	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.347.040,00	134.922.750,00	(1.424.290,00)	98,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.431.450,00	78.605.000,00	(826.450,00)	98,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.931.450,00	67.727.000,00	(204.450,00)	99,70	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.931.450,00	67.727.000,00	(204.450,00)	99,70	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.345.085.871,00	19.639.811.688,00	(705.274.183,00)	96,53	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.266.777.271,00	19.561.901.938,00	(704.875.333,00)	96,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.266.777.271,00	19.561.901.938,00	(704.875.333,00)	96,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	19.659.487.271,00	18.964.811.938,00	(694.675.333,00)	96,47	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.290.000,00	597.090.000,00	(10.200.000,00)	98,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.998.100,00	19.723.400,00	(274.700,00)	98,63	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.550.800,00	193.563.500,00	(4.987.300,00)	97,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.981.600,00	3.832.000,00	(4.149.600,00)	48,01	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.881.600,00	3.832.000,00	(49.600,00)	98,72	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.881.600,00	3.832.000,00	(49.600,00)	98,72	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.468.885.888,00	6.444.408.105,00	(24.477.783,00)	99,62	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.810.178.441,00	1.601.501.350,00	(1.208.677.091,00)	56,99	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.044.820,00	256.625.000,00	(106.419.820,00)	70,69	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	82.849.412,00	73.166.500,00	(9.682.912,00)	88,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.849.412,00	73.166.500,00	(9.682.912,00)	88,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	280.195.408,00	183.458.500,00	(96.736.908,00)	65,48	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.195.408,00	183.458.500,00	(96.736.908,00)	65,48	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.236.942.162,00	5.861.035.181,00	(375.906.981,00)	93,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.039.800.336,00	3.910.011.580,00	(129.788.756,00)	96,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	824.849.300,00	788.214.024,00	(36.635.276,00)	95,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	541.849.300,00	511.588.800,00	(30.260.500,00)	94,42	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.849.300,00	511.588.800,00	(30.260.500,00)	94,42	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	283.000.000,00	276.625.224,00	(6.374.776,00)	97,75	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.000.000,00	215.665.268,00	(6.334.732,00)	97,15	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.948.109.562,00	1.243.761.209,00	(704.348.353,00)	63,84	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.000.000,00	400.000.000,00	(109.000.000,00)	78,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	509.000.000,00	400.000.000,00	(109.000.000,00)	78,59	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	-	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.679.900.169,00	3.678.136.250,00	(1.763.919,00)	99,95	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13	Penataan Organisasi	337.140.870,00	252.526.836,00	(84.614.034,00)	74,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	140.787.150,00	98.503.492,00	(42.283.658,00)	69,97	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	113.592.750,00	88.960.492,00	(24.632.258,00)	78,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.592.750,00	88.960.492,00	(24.632.258,00)	78,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	27.194.400,00	9.543.000,00	(17.651.400,00)	35,09	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.194.400,00	9.543.000,00	(17.651.400,00)	35,09	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	536.568.650,00	529.350.590,00	(7.218.060,00)	98,65	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	81.505.425,00	79.722.800,00	(1.782.625,00)	97,81	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	71.496.250,00	69.907.800,00	(1.588.450,00)	97,78	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.496.250,00	69.907.800,00	(1.588.450,00)	97,78	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.461.724.102,00	9.207.668.321,00	(254.055.781,00)	97,31	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	549.837.420,00	545.711.594,00	(4.125.826,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	185.700.690,00	184.302.290,00	(1.398.400,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.138.990,00	154.210.190,00	(928.800,00)	99,40	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.138.990,00	154.210.190,00	(928.800,00)	99,40	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	30.561.700,00	30.092.100,00	(469.600,00)	98,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.561.700,00	30.092.100,00	(469.600,00)	98,46	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.933.289.342,00	6.722.217.223,00	(211.072.119,00)	96,96	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.719.238.520,00	4.604.154.463,00	(115.084.057,00)	97,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.719.238.520,00	4.604.154.463,00	(115.084.057,00)	97,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.238.520,00	2.694.154.463,00	(25.084.057,00)	99,08	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.137.901.722,00	2.046.631.704,00	(91.270.018,00)	95,73	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.072.301.722,00	1.981.907.604,00	(90.394.118,00)	95,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.072.301.722,00	1.981.907.604,00	(90.394.118,00)	95,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	65.600.000,00	64.724.100,00	(875.900,00)	98,66	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.600.000,00	64.724.100,00	(875.900,00)	98,66	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.514.534.060,00	1.478.936.499,00	(35.597.561,00)	97,65	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	729.561.870,00	722.348.399,00	(7.213.471,00)	99,01	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	665.587.770,00	658.806.449,00	(6.781.321,00)	98,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.587.770,00	658.806.449,00	(6.781.321,00)	98,98	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	63.974.100,00	63.541.950,00	(432.150,00)	99,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.974.100,00	63.541.950,00	(432.150,00)	99,32	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	464.063.280,00	460.803.005,00	(3.260.275,00)	99,30	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	313.423.510,00	311.113.405,00	(2.310.105,00)	99,26	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	302.011.910,00	299.735.905,00	(2.276.005,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.011.910,00	299.735.905,00	(2.276.005,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	149.479.770,00	148.529.600,00	(950.170,00)	99,36	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	103.119.020,00	102.569.600,00	(549.420,00)	99,47	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.119.020,00	102.569.600,00	(549.420,00)	99,47	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	46.360.750,00	45.960.000,00	(400.750,00)	99,14	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.360.750,00	45.960.000,00	(400.750,00)	99,14	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.611.004.040,00	1.493.966.307,00	(117.037.733,00)	92,74	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	489.236.490,00	460.945.987,00	(28.290.503,00)	94,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	552.061.270,00	549.372.420,00	(2.688.850,00)	99,51	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.747.321,00	90.149.340,00	(597.981,00)	99,34	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.634.821,00	60.401.340,00	(233.481,00)	99,61	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.634.821,00	60.401.340,00	(233.481,00)	99,61	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	543.941.130,00	458.165.400,00	(85.775.730,00)	84,23	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125.690.996,00	117.962.519,00	(7.728.477,00)	93,85	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.376.566,00	84.806.819,00	(7.569.747,00)	91,81	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.376.566,00	84.806.819,00	(7.569.747,00)	91,81	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	33.314.430,00	33.155.700,00	(158.730,00)	99,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.314.430,00	33.155.700,00	(158.730,00)	99,52	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	206.170.400,00	135.760.559,00	(70.409.841,00)	65,85	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	169.950.323,00	113.782.559,00	(56.167.764,00)	66,95	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.950.323,00	113.782.559,00	(56.167.764,00)	66,95	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	36.220.077,00	21.978.000,00	(14.242.077,00)	60,68	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.220.077,00	21.978.000,00	(14.242.077,00)	60,68	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	212.079.734,00	204.442.322,00	(7.637.412,00)	96,40	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.983.929,50	52.111.470,00	(872.459,50)	98,35	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.983.929,50	52.111.470,00	(872.459,50)	98,35	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	159.095.804,50	152.330.852,00	(6.764.952,50)	95,75	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.095.804,50	152.330.852,00	(6.764.952,50)	95,75	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.765.150,00	25.482.500,00	(282.650,00)	98,90	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22	
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	(2.404.037.093,00)	93,64	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.802.167.736,00	20.467.075.624,00	(1.335.092.112,00)	93,88	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.064.100,00	18.702.500,00	(3.361.600,00)	84,76	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.510.679.335,00	4.448.748.396,00	(61.930.939,00)	98,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.596.800,00	71.580.000,00	(2.016.800,00)	97,26	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.352.900,00	-	(62.352.900,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283.850,00	-	(283.850,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	283.850,00	-	(283.850,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.850,00	-	(283.850,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.229.735.225,00	1.082.467.214,00	(147.268.011,00)	88,02	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.912.500,00	33.067.500,00	(2.845.000,00)	92,08	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.329.400,00	184.572.850,00	(77.756.550,00)	70,36	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	205.000,00	-	(205.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.000,00	-	(205.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	164.276.000,00	162.322.000,00	(1.954.000,00)	98,81	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	365.300,00	-	(365.300,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	365.300,00	-	(365.300,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.300,00	-	(365.300,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877.734.400,00	728.832.992,00	(148.901.408,00)	83,04	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.602.900,00	398.712.000,00	(127.890.900,00)	75,71	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	280.000,00	-	(280.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	-	(280.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	526.322.900,00	398.712.000,00	(127.610.900,00)	75,75	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.322.900,00	398.712.000,00	(127.610.900,00)	75,75	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.884.706,00	937.228.903,00	(161.655.803,00)	85,29	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.088.850,00	1.452.455.863,00	(131.632.987,00)	91,69	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.822.200,00	398.647.496,00	(10.174.704,00)	97,51	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.822.200,00	-	(8.822.200,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.822.200,00	-	(8.822.200,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.197.974.100,00	10.643.531.056,00	(554.443.044,00)	95,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.163.880.600,00	9.801.466.056,00	(362.414.544,00)	96,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.163.880.600,00	9.801.466.056,00	(362.414.544,00)	96,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.963.880.600,00	9.656.611.056,00	(307.269.544,00)	96,92	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	144.855.000,00	(55.145.000,00)	72,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.145.057.320,00	1.083.528.700,00	(61.528.620,00)	94,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.976.324.100,00	14.907.379.119,00	(1.068.944.981,00)	93,31	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.547.376.300,00	4.519.556.000,00	(27.820.300,00)	99,39	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- U ndangan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	390.157.200,00	321.015.000,00	(69.142.200,00)	82,28	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03	Pembahasan APBD	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	386.491.100,00	354.320.000,00	(32.171.100,00)	91,68	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.974.417.000,00	2.585.586.076,00	(388.830.924,00)	86,93	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500,00	-	(25.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.500,00	-	(25.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500,00	-	(25.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	438.153.300,00	337.240.000,00	(100.913.300,00)	76,97	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	-	(75.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5.854.300,00	-	(5.854.300,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	(25.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	(25.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000,00	-	(25.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000,00	-	(25.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.233.849.900,00	6.789.662.043,00	(444.187.857,00)	93,86	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-	
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.355.277.572,00	7.161.201.191,00	(1.194.076.381,00)	85,71	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.619.539.912,00	6.201.298.825,00	(418.241.087,00)	93,68	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.458.200,00	22.775.000,00	(27.683.200,00)	45,14	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.312.484.164,00	5.268.989.722,00	(43.494.442,00)	99,18	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.848.800,00	15.977.000,00	(871.800,00)	94,83	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.676.344,00	41.663.400,00	(18.012.944,00)	69,82	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.645.724,00	4.195.400,00	(3.450.324,00)	54,87	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.11.5.2	BELANJA MODAL	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.05.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.350.788,00	513.274.482,00	(69.076.306,00)	88,14	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.821.048,00	201.684.673,00	(6.136.375,00)	97,05	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.116.320,00	57.010.000,00	(1.106.320,00)	98,10	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.116.320,00	57.010.000,00	(1.106.320,00)	98,10	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	149.704.728,00	144.674.673,00	(5.030.055,00)	96,64	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.704.728,00	144.674.673,00	(5.030.055,00)	96,64	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.328.465,00	186.185.121,00	(65.143.344,00)	74,08	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.393.151,00	152.434.100,00	(193.959.051,00)	44,01	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.042.495,00	-	(180.042.495,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	42.495,00	-	(42.495,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.495,00	-	(42.495,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.307.147.260,00	655.049.109,00	(652.098.151,00)	50,11	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	581.199.260,00	444.465.000,00	(136.734.260,00)	76,47	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	48.818.000,00	39.600.609,00	(9.217.391,00)	81,12	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.548.609,00	(451.391,00)	96,99	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	451.000,00	-	(451.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.000,00	-	(451.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	14.549.000,00	14.548.609,00	(391,00)	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.549.000,00	14.548.609,00	(391,00)	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	676.610.000,00	170.658.500,00	(505.951.500,00)	25,22	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.366.400,00	92.855.000,00	(58.511.400,00)	61,34	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	277.224.000,00	211.998.257,00	(65.225.743,00)	76,47	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	174.303.200,00	140.497.260,00	(33.805.940,00)	80,61	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166.568.200,00	132.897.260,00	(33.670.940,00)	79,79	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	122.506.600,00	88.895.750,00	(33.610.850,00)	72,56	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.506.600,00	88.895.750,00	(33.610.850,00)	72,56	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	43.080.000,00	23.851.000,00	(19.229.000,00)	55,36	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59.840.800,00	47.649.997,00	(12.190.803,00)	79,63	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.500,00	-	(12.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500,00	-	(12.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500,00	-	(12.500,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	-	(37.500,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.100.000,00	1.999.998,00	(1.100.002,00)	64,52	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	43.540.800,00	39.599.999,00	(3.940.801,00)	90,95	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.390.800,00	24.450.000,00	(3.940.800,00)	86,12	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.390.800,00	24.450.000,00	(3.940.800,00)	86,12	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.08.5.2	BELANJA MODAL	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00	
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	03.2.03.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	648.340.648.668,00	635.959.876.163,93	(12.380.772.504,07)	98,09	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.184.400.646,00	45.588.003.993,93	(5.596.396.652,07)	89,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	(4.510.659.652,00)	89,50	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.408.815.000,00	4.042.267.080,93	(366.547.919,07)	91,69	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	593.406.248.022,00	585.396.264.982,00	(8.009.983.040,00)	98,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.899.138.000,00	559.360.392.123,00	(4.538.745.877,00)	99,20	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	40.087.332.696,21	38.073.646.053,00	(2.013.686.643,21)	94,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.848.329.994,50	18.480.082.184,00	(368.247.810,50)	98,05	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.624.149,00	110.124.050,00	(1.500.099,00)	98,66	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.900.692.699,00	12.633.650.685,00	(267.042.014,00)	97,93	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.302.965,00	28.188.700,00	(1.114.265,00)	96,20	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.439.484.777,50	2.433.460.785,00	(6.023.992,50)	99,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.391.300,00	229.123.500,00	(267.800,00)	99,88	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	219.391.200,00	219.136.000,00	(255.200,00)	99,88	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.391.200,00	219.136.000,00	(255.200,00)	99,88	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.039.000.000,00	1.038.300.000,00	(700.000,00)	99,93	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	842.000.000,00	841.820.000,00	(180.000,00)	99,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.000.000,00	841.820.000,00	(180.000,00)	99,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.2	BELANJA MODAL	197.000.000,00	196.480.000,00	(520.000,00)	99,74	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.06.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000,00	196.480.000,00	(520.000,00)	99,74	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.955.404,00	1.734.597.553,00	(77.357.851,00)	95,73	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.270.000,00	1.540.060.411,00	(15.209.589,00)	99,02	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.980.000,00	483.792.443,00	(9.187.557,00)	98,14	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	376.145.500,00	370.169.855,00	(5.975.645,00)	98,41	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	26.145.500,00	22.303.055,00	(3.842.445,00)	85,30	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.145.500,00	22.303.055,00	(3.842.445,00)	85,30	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	347.866.800,00	(2.133.200,00)	99,39	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	347.866.800,00	(2.133.200,00)	99,39	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.486.695.184,21	16.064.451.982,00	(1.422.243.202,21)	91,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.184.135.490,00	3.125.684.912,00	(58.450.578,00)	98,16	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.513.658.243,00	6.442.708.065,00	(70.950.178,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	421.341.110,00	415.158.301,00	(6.182.809,00)	98,53	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	400.782.010,00	398.658.301,00	(2.123.709,00)	99,47	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.782.010,00	398.658.301,00	(2.123.709,00)	99,47	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	20.559.100,00	16.500.000,00	(4.059.100,00)	80,26	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.559.100,00	16.500.000,00	(4.059.100,00)	80,26	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.874.555.403,00	4.818.957.507,00	(55.597.896,00)	98,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.748.666.153,00	4.694.637.507,00	(54.028.646,00)	98,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.130.000,00	27.470.000,00	(660.000,00)	97,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.1.03	Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.330.370.330,00	1.292.805.880,00	(37.564.450,00)	97,18	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	395.506.500,00	394.789.600,00	(716.900,00)	99,82	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	315.025.500,00	314.592.100,00	(433.400,00)	99,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.025.500,00	314.592.100,00	(433.400,00)	99,86	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	304.669.050,00	297.649.800,00	(7.019.250,00)	97,70	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	294.669.050,00	287.659.800,00	(7.009.250,00)	97,62	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.669.050,00	287.659.800,00	(7.009.250,00)	97,62	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.978.781.543,21	4.731.481.655,00	(1.247.299.888,21)	79,14	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	479.749.578,00	471.771.470,00	(7.978.108,00)	98,34	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	479.749.578,00	471.771.470,00	(7.978.108,00)	98,34	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	273.839.528,00	271.826.720,00	(2.012.808,00)	99,26	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.839.528,00	271.826.720,00	(2.012.808,00)	99,26	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	205.910.050,00	199.944.750,00	(5.965.300,00)	97,10	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	02.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.910.050,00	199.944.750,00	(5.965.300,00)	97,10	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.296.360.233,00	1.280.001.530,00	(16.358.703,00)	98,74	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.296.360.233,00	1.280.001.530,00	(16.358.703,00)	98,74	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	528.983,00	-	(528.983,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	528.983,00	-	(528.983,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.983,00	-	(528.983,00)	-	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	173.100.680,00	167.347.808,00	(5.752.872,00)	96,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	148.111.680,00	142.983.308,00	(5.128.372,00)	96,54	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.111.680,00	142.983.308,00	(5.128.372,00)	96,54	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	(206.836.927,50)	91,58	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	(206.836.927,50)	91,58	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	215.904.420,00	197.065.500,00	(18.838.920,00)	91,27	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	144.815.402,00	130.498.500,00	(14.316.902,00)	90,11	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.815.402,00	130.498.500,00	(14.316.902,00)	90,11	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	71.089.018,00	66.567.000,00	(4.522.018,00)	93,64	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.089.018,00	66.567.000,00	(4.522.018,00)	93,64	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	112.693.899,50	92.641.100,00	(20.052.799,50)	82,21	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	97.340.990,00	78.644.000,00	(18.696.990,00)	80,79	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.340.990,00	78.644.000,00	(18.696.990,00)	80,79	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	457.961.700,00	432.416.795,00	(25.544.905,00)	94,42	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	197.676.300,00	190.374.080,00	(7.302.220,00)	96,31	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.676.300,00	190.374.080,00	(7.302.220,00)	96,31	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.15.5.2	BELANJA MODAL	260.285.400,00	242.042.715,00	(18.242.685,00)	92,99	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	04.2.01.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.285.400,00	242.042.715,00	(18.242.685,00)	92,99	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	29.951.759.939,21	29.934.374.076,21	(17.385.863,00)	99,94	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.570.000.000,00	20.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,95	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00	
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	(572.735.306,00)	92,07	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.576.809.535,00	5.412.826.374,00	(163.983.161,00)	97,06	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.817.780.500,00	4.711.495.078,00	(106.285.422,00)	97,79	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.446.570,00	314.109.574,00	(21.336.996,00)	93,64	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.090.840,00	234.544.602,00	(21.546.238,00)	91,59	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.879.500,00	126.939.520,00	(7.939.980,00)	94,11	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	680.326.046,00	480.412.040,00	(199.914.006,00)	70,61	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	97.895.141,00	92.010.320,00	(5.884.821,00)	93,99	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	172.810.905,00	60.971.000,00	(111.839.905,00)	35,28	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	273.660.000,00	207.341.870,00	(66.318.130,00)	75,77	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.960.000,00	120.088.850,00	(15.871.150,00)	88,33	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34	
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	(979.353.307,00)	90,29	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.550.163.718,00	6.333.842.764,00	(216.320.954,00)	96,70	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.740.506.704,00	5.605.855.795,00	(134.650.909,00)	97,65	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.219.300,00	171.317.849,00	(4.901.451,00)	97,22	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.595.154,00	117.584.159,00	(73.010.995,00)	61,69	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.430.560,00	374.303.621,00	(3.126.939,00)	99,17	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.639.152.363,00	2.185.226.800,00	(453.925.563,00)	82,80	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.527.635.463,00	2.106.226.800,00	(421.408.663,00)	83,33	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	680.164.113,00	606.556.600,00	(73.607.513,00)	89,18	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	497.825.813,00	432.683.400,00	(65.142.413,00)	86,91	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.825.813,00	432.683.400,00	(65.142.413,00)	86,91	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	182.338.300,00	173.873.200,00	(8.465.100,00)	95,36	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.338.300,00	173.873.200,00	(8.465.100,00)	95,36	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.151.270.550,00	944.150.000,00	(207.120.550,00)	82,01	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.134.397.150,00	928.775.000,00	(205.622.150,00)	81,87	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.397.150,00	928.775.000,00	(205.622.150,00)	81,87	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	16.873.400,00	15.375.000,00	(1.498.400,00)	91,12	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.873.400,00	15.375.000,00	(1.498.400,00)	91,12	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	111.516.900,00	79.000.000,00	(32.516.900,00)	70,84	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	892.087.000,00	582.980.210,00	(309.106.790,00)	65,35	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	858.241.000,00	562.640.660,00	(295.600.340,00)	65,56	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	728.763.000,00	466.199.860,00	(262.563.140,00)	63,97	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	707.582.450,00	451.907.610,00	(255.674.840,00)	63,87	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.582.450,00	451.907.610,00	(255.674.840,00)	63,87	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48	
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 KECAMATAN TOMOHON UTARA

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	12.482.194.566,00	11.966.943.509,00	(515.251.057,00)	95,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.253.397.316,00	6.743.010.136,00	(510.387.180,00)	92,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.923.000,00	(77.000,00)	99,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.277.381.800,00	6.201.031.698,00	(76.350.102,00)	98,78	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.244.700,00	196.732.052,00	(512.648,00)	99,74	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.551.300,00	20.550.000,00	(1.300,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	10.551.300,00	10.550.000,00	(1.300,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.551.300,00	10.550.000,00	(1.300,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.460.716,00	284.896.786,00	(419.563.930,00)	40,44	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.860.100,00	47.426.600,00	(433.500,00)	99,09	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	257.997.250,00	255.041.000,00	(2.956.250,00)	98,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	257.997.250,00	255.041.000,00	(2.956.250,00)	98,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.916.600.000,00	4.914.701.373,00	(1.898.627,00)	99,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.916.600.000,00	4.914.701.373,00	(1.898.627,00)	99,96	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 KECAMATAN TOMOHON TENGAH

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.504.954.516,00	11.180.918.574,00	(324.035.942,00)	97,18	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.346.698.630,00	7.046.150.324,00	(300.548.306,00)	95,91	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.669.433.665,00	6.611.613.589,00	(57.820.076,00)	99,13	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.030.400,00	131.384.440,00	(22.645.960,00)	85,30	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.310.965,00	169.938.095,00	(214.372.870,00)	44,22	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.160.000,00	82.664.200,00	(3.495.800,00)	95,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	302.255.886,00	289.080.050,00	(13.175.836,00)	95,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.255.886,00	289.080.050,00	(13.175.836,00)	95,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.796.000.000,00	3.788.299.000,00	(7.701.000,00)	99,80	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.796.000.000,00	3.788.299.000,00	(7.701.000,00)	99,80	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.02.000	05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 KECAMATAN TOMOHON SELATAN

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	14.336.009.265,00	13.888.467.604,00	(447.541.661,00)	96,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.486.235.970,00	8.170.008.259,00	(316.227.711,00)	96,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.651.820,00	-	(4.651.820,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.600,00	-	(65.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.600,00	-	(65.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.600,00	-	(65.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.765.087.427,00	7.736.775.659,00	(28.311.768,00)	99,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.504.302,00	140.041.340,00	(59.462.962,00)	70,19	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.622.745,00	7.400.000,00	(40.222.745,00)	15,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.476.245,00	7.400.000,00	(12.076.245,00)	38,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.476.245,00	7.400.000,00	(12.076.245,00)	38,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	28.146.500,00	-	(28.146.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.146.500,00	-	(28.146.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.997.021,00	236.983.702,00	(219.013.319,00)	51,97	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.995.400,00	56.207.558,00	(4.787.842,00)	92,15	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	437.178.500,00	388.290.730,00	(48.887.770,00)	88,82	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	437.178.500,00	388.290.730,00	(48.887.770,00)	88,82	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	367.178.500,00	321.194.430,00	(45.984.070,00)	87,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	366.973.500,00	321.194.430,00	(45.779.070,00)	87,53	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.973.500,00	321.194.430,00	(45.779.070,00)	87,53	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	205.000,00	-	(205.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.000,00	-	(205.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.352.180.895,00	5.272.281.815,00	(79.899.080,00)	98,51	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.352.180.895,00	5.272.281.815,00	(79.899.080,00)	98,51	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000,00	1.160.239.465,00	(39.760.535,00)	96,69	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.197.295.510,00	1.160.239.465,00	(37.056.045,00)	96,91	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.197.295.510,00	1.160.239.465,00	(37.056.045,00)	96,91	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.373.500,00	57.886.800,00	(2.486.700,00)	95,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.373.500,00	57.886.800,00	(2.486.700,00)	95,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.400,00	-	(40.400,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.400,00	-	(40.400,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40.400,00	-	(40.400,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.400,00	-	(40.400,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.03.000	05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.400,00	-	(40.400,00)	-	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 KECAMATAN TOMOHON BARAT

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.851.449.692,00	9.581.963.508,00	(269.486.184,00)	97,26	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.738.968.322,00	5.517.477.463,00	(221.490.859,00)	96,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	9.905.000,00	(3.095.000,00)	76,19	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.234.728.620,00	5.159.652.473,00	(75.076.147,00)	98,57	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.547.100,00	115.238.640,00	(14.308.460,00)	88,96	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.336.400,00	43.199.400,00	(137.000,00)	99,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	33.336.400,00	33.336.400,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.336.400,00	33.336.400,00	-	100,00	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.415.102,00	136.450.350,00	(116.964.752,00)	53,84	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.761.900,00	91.991.100,00	(7.770.800,00)	92,21	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	296.281.370,00	275.251.063,00	(21.030.307,00)	92,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.281.370,00	275.251.063,00	(21.030.307,00)	92,90	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.761.000.000,00	3.744.354.982,00	(16.645.018,00)	99,56	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.761.000.000,00	3.744.354.982,00	(16.645.018,00)	99,56	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	787.691.982,00	(12.308.018,00)	98,46	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	953.832,00	-	(953.832,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.832,00	-	(953.832,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	799.046.168,00	787.691.982,00	(11.354.186,00)	98,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.046.168,00	787.691.982,00	(11.354.186,00)	98,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.200.000,00	35.140.000,00	(4.060.000,00)	89,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.200.000,00	35.140.000,00	(4.060.000,00)	89,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000,00	9.740.000,00	(6.260.000,00)	60,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000,00	9.740.000,00	(6.260.000,00)	60,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.04.000	05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.390.946.489,00	7.093.404.043,00	(297.542.446,00)	95,97	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.590.603.410,00	4.388.614.473,00	(201.988.937,00)	95,60	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.128.874.400,00	4.049.017.433,00	(79.856.967,00)	98,07	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.414.600,00	113.322.940,00	(13.091.660,00)	89,64	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.933.655,00	5.100.000,00	(8.833.655,00)	36,60	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.525.000,00	-	(7.525.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	137.500,00	-	(137.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.500,00	-	(137.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.408.655,00	5.100.000,00	(1.308.655,00)	79,58	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	46.655,00	-	(46.655,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.655,00	-	(46.655,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.219.711,00	132.210.300,00	(97.009.411,00)	57,68	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.088.900,00	-	(3.088.900,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	186.900,00	-	(186.900,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.900,00	-	(186.900,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	2.902.000,00	-	(2.902.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.902.000,00	-	(2.902.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	305.713.079,00	257.370.000,00	(48.343.079,00)	84,19	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	305.713.079,00	257.370.000,00	(48.343.079,00)	84,19	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.460.600.000,00	2.419.474.570,00	(41.125.430,00)	98,33	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.460.600.000,00	2.419.474.570,00	(41.125.430,00)	98,33	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	500.000.000,00	478.239.070,00	(21.760.930,00)	95,65	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	511.373,00	-	(511.373,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.373,00	-	(511.373,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	499.488.627,00	478.239.070,00	(21.249.557,00)	95,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	499.488.627,00	478.239.070,00	(21.249.557,00)	95,75	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.600.000,00	27.945.000,00	(1.655.000,00)	94,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.600.000,00	27.945.000,00	(1.655.000,00)	94,41	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.430.000,00	-	(4.430.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.430.000,00	-	(4.430.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
7	7.01	7-01.0-00.0-00.05.000	05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.420.362,62	3.429.156.208,00	(88.264.154,62)	97,49	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.115.307.191,00	3.077.623.435,00	(37.683.756,00)	98,79	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.287.330,63	106.507.705,00	(2.779.625,63)	97,46	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.757.484,00	96.512.924,00	(39.244.560,00)	71,09	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	(4.965.140,00)	99,58	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	(4.965.140,00)	99,58	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	612.772.653,38	610.872.652,00	(1.900.001,38)	99,69	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	612.772.653,38	610.872.652,00	(1.900.001,38)	99,69	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	587.190.453,38	587.190.452,00	(1,38)	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	587.190.453,38	587.190.452,00	(1,38)	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.555.600,00	12.555.600,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	228.210.000,00	226.654.700,00	(1.555.300,00)	99,32	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	228.210.000,00	226.654.700,00	(1.555.300,00)	99,32	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	473.360.000,00	471.839.310,00	(1.520.690,00)	99,68	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	473.360.000,00	471.839.310,00	(1.520.690,00)	99,68	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	357.460.000,00	356.040.000,00	(1.420.000,00)	99,60	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	357.460.000,00	356.040.000,00	(1.420.000,00)	99,60	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.460.000,00	106.040.000,00	(1.420.000,00)	98,68	

Kode				Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum
					Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	(44.830.000,00)	98,15	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	(44.830.000,00)	98,15	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.854.260.000,00	1.824.080.000,00	(30.180.000,00)	98,37	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.260.000,00	1.824.080.000,00	(30.180.000,00)	98,37	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.404.260.000,00	1.374.080.000,00	(30.180.000,00)	97,85	
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	

Lampiran I.4

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	277.376.698.652,25	263.992.217.401,00	59.223.421.287,75	54.303.933.830,00	-	-	-	-
1	1.01			PENDIDIKAN	118.578.728.028,00	113.911.790.543,00	2.017.446.125,00	1.878.143.796,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.390.742.254,00	91.216.284.738,00	215.346.500,00	214.963.500,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.568.669.500,00	90.256.904.699,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.305.325,00	168.748.600,00	14.346.500,00	14.263.500,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.306.375,00	2.649.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.000.350,00	61.309.300,00	14.346.500,00	14.263.500,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.914.600,00	18.511.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.344.000,00	73.942.800,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.740.000,00	12.336.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	200.000.000,00	199.700.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	200.000.000,00	199.700.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.721.054,00	653.133.978,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.455.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.178.000,00	66.663.228,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.088.054,00	576.470.750,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.185.000,00	109.098.607,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.315.000,00	105.948.607,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.870.000,00	3.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	20.601.366.574,00	18.434.317.642,00	1.597.112.975,00	1.479.151.600,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.785.275.379,00	9.683.406.512,00	451.484.725,00	434.517.900,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.042.685.000,00	82.426.506,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	112.591.900,00	71.121.825,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.890.000,00	18.692.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7.606.695.275,00	7.574.740.581,00	451.484.725,00	434.517.900,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.102.200,00	36.361.200,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	266.784.900,00	259.349.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.729.500,00	30.751.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	233.966.604,00	203.317.050,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.199.986.395,00	6.281.227.380,00	602.973.150,00	602.164.150,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	152.214.675,00	33.044.175,00	106.327.150,00	106.327.150,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.022.846.620,00	364.956.873,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.254.400,00	53.521.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	21.485.000,00	13.951.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.840.404.000,00	5.766.765.832,00	496.646.000,00	495.837.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.690.000,00	32.792.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.466.100,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.02.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.625.600,00	15.296.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.400.989.400,00	2.282.137.750,00	506.156.100,00	405.970.550,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	1.068.900,00	-	48.931.100,00	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	105.764.700,00	72.187.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	142.711.800,00	122.383.150,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.051.535.000,00	1.058.807.800,00	7.225.000,00	7.225.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.000.000,00	49.639.200,00	450.000.000,00	398.745.550,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.049.909.000,00	979.119.900,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	215.115.400,00	187.546.000,00	36.499.000,00	36.499.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	210.921.000,00	187.546.000,00	36.499.000,00	36.499.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.194.400,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	204.986.650,00	184.028.696,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	204.986.650,00	184.028.696,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	204.986.650,00	184.028.696,00	-	-	-	-
1	1.02			KESEHATAN	112.540.543.115,25	107.344.475.497,00	16.530.960.058,75	13.084.946.127,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.599.344.001,00	74.047.085.274,00	5.864.577.402,00	3.179.197.705,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.649.492.900,00	53.481.638.222,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.239.500,00	32.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.044.329,00	299.186.042,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.732.100,00	149.892.688,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.187.675,00	27.550.600,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.691.800,00	50.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.382.754,00	71.382.754,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.825.853,00	1.155.378.211,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.400.000,00	130.637.786,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.177.425.853,00	984.740.425,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.058.321,00	156.892.321,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.058.321,00	156.892.321,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	20.008.922.598,00	18.918.474.478,00	5.864.577.402,00	3.179.197.705,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.008.922.598,00	18.918.474.478,00	5.864.577.402,00	3.179.197.705,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.821.764.914,25	31.499.399.182,00	10.663.521.856,75	9.905.748.422,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.250.312.995,25	4.230.050.443,00	9.786.817.575,75	9.306.351.063,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	120.000.000,00	118.992.000,00	625.000.000,00	416.000.000,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	553.074.995,25	534.953.004,00	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.320.076.919,00	27.018.401.239,00	876.704.281,00	599.397.359,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	146.901.500,00	148.584.200,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	123.255.000,00	82.566.475,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280.780.500,00	269.027.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	841.234.000,00	741.454.300,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	131.945.000,00	120.589.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.095.000,00	73.043.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.025.000,00	85.575.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	66.200.000,00	58.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	47.688.800,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.817.000,00	156.716.300,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.000.000,00	10.945.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.000.000,00	492.780.274,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	239.645.000,00	239.414.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	182.746.000,00	174.547.750,00	50.000.000,00	49.062.000,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	54.100.000,00	9.907.086,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	486.000.000,00	476.846.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.893.901.219,00	6.369.241.861,00	826.704.281,00	550.335.359,00	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	359.545.600,00	339.295.850,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	43.575.000,00	44.475.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.570.000,00	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.375.000,00	250.947.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251.375.000,00	250.947.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	376.806.200,00	108.181.086,00	2.860.800,00	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	376.806.200,00	108.181.086,00	2.860.800,00	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	376.806.200,00	108.181.086,00	2.860.800,00	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	-	-	-	-	-	-
1	1.02	1-02.0-00.0-00.01.000	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.723.913.304,00	12.797.573.568,00	38.622.109.229,00	37.342.988.835,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.002.725.251,00	6.519.885.548,00	3.572.440.100,00	3.552.510.400,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.262.700,00	6.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.077.375,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.616.375,00	1.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.302.700,00	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.696.750,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.221.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.446.750,00	870.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.901.750,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.053.253.050,00	4.873.395.218,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415.260.000,00	394.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.765.050,00	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.563.025,00	28.045.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.123.300,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.381.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.725,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.707.268,00	359.627.160,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.127.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.664.518,00	42.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.105.750,00	14.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	176.819.000,00	139.617.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.550.000,00	27.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.441.000,00	130.250.160,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	449.621.401,00	448.455.401,00	3.272.440.100,00	3.252.953.400,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	43.940.100,00	42.291.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.621.401,00	448.455.401,00	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.307.207,00	253.031.950,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.326.000,00	34.861.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.400.000,00	14.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.081.207,00	196.170.850,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.010.600,00	550.780.819,00	300.000.000,00	299.557.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.010.600,00	157.036.373,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.000.000,00	393.744.446,00	300.000.000,00	299.557.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	914.616.203,00	911.591.440,00	5.306.051.649,00	5.286.748.648,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	444.782.803,00	441.773.040,00	2.250.787.650,00	2.231.484.650,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	99.471.840,00	99.471.540,00	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01.18	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	245.400.000,00	242.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01.24	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	885,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01.89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99.910.078,00	99.901.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	-	-	698.467.650,00	698.467.650,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	469.833.400,00	469.818.400,00	3.055.263.999,00	3.055.263.998,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	99.833.400,00	99.833.400,00	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	693.882.263,00	693.882.262,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	299.985.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	503.850.000,00	481.580.650,00	12.525.465.666,00	11.576.357.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	503.850.000,00	481.580.650,00	12.525.465.666,00	11.576.357.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	253.850.000,00	231.969.400,00	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250.000.000,00	249.611.250,00	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.810.967.000,00	2.762.627.250,00	500.000.000,00	336.000.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.810.967.000,00	2.762.627.250,00	500.000.000,00	336.000.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.05.2.01.19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-	500.000.000,00	336.000.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.06.2.01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	150.000.000,00	108.843.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	319.887.800,00	259.477.500,00	27.628.300,00	27.528.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	319.887.800,00	259.477.500,00	27.628.300,00	27.528.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	319.887.800,00	259.477.500,00	27.628.300,00	27.528.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.441.197.800,00	1.430.056.700,00	15.189.551.814,00	15.110.893.187,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.441.197.800,00	1.430.056.700,00	15.189.551.814,00	15.110.893.187,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	399.778.900,00	398.678.000,00	6.210.238.854,00	6.189.865.100,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	99.000.000,00	98.623.500,00	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	992.113.613,00	992.113.613,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	140.197.075,00	140.197.075,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	198.778.900,00	198.601.200,00	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	191.919.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	543.640.000,00	542.235.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	730.669.250,00	432.354.480,00	97.138.600,00	91.075.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	493.100.425,00	348.239.480,00	5.275.900,00	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	355.205.124,00	255.349.980,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	16.310.860,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.01.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	121.584.441,00	92.889.500,00	5.275.900,00	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	23.186.800,00	18.417.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	23.186.800,00	18.417.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	370.500,00	-	82.190.000,00	82.029.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	370.500,00	-	82.190.000,00	82.029.000,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	214.011.525,00	65.698.000,00	9.672.700,00	9.046.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	173.585.600,00	53.569.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.04.07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	21.992.125,00	12.129.000,00	9.672.700,00	9.046.500,00	-	-	-	-
1	1.03	1-03.0-00.0-00.01.000	1.03.12.2.04.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	18.433.800,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.597.027.433,00	4.076.658.723,00	458.214.780,00	451.739.788,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.736.412.188,00	2.560.616.930,00	3.330.150,00	2.600.000,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.899.350,00	13.082.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.384.850,00	5.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.313.400,00	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.871.800,00	1.685.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.043.300,00	1.802.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.273.600,00	3.235.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.012.400,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.613.975,00	1.995.868.532,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.170.000,00	147.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.624.900,00	1.644.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.020.500,00	4.387.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.589.500,00	16.640.000,00	3.330.150,00	2.600.000,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.081.200,00	1.640.000,00	3.330.150,00	2.600.000,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.508.300,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.978.421,00	150.103.086,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.757.400,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.299.026,00	39.673.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.173.600,00	14.961.600,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.565.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.477.395,00	17.970.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.706.000,00	71.468.386,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.046.042,00	102.899.912,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.551.296,00	18.308.750,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.494.746,00	70.091.162,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.284.900,00	282.023.400,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.912.825,00	113.504.300,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.432.075,00	164.984.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.940.000,00	3.535.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.920.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.990.000,00	4.870.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	4.078.000,00	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.912.000,00	2.245.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.02.2.06.06	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	153.837.300,00	48.199.974,00	300.000.000,00	299.589.388,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	1.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	1.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	53.837.300,00	47.089.974,00	300.000.000,00	299.589.388,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2.595.000,00	2.220.000,00	300.000.000,00	299.589.388,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.03.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.242.300,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.03.2.03.12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	44.869.974,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	976.479.450,00	869.592.819,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	976.479.450,00	869.592.819,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	26.479.450,00	7.125.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.04.2.01.04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	950.000.000,00	862.467.819,00	-	-	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	717.378.495,00	590.049.000,00	154.884.630,00	149.550.400,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	717.378.495,00	590.049.000,00	154.884.630,00	149.550.400,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	706.508.495,00	590.049.000,00	154.884.630,00	149.550.400,00	-	-	-	-
1	1.04	1-04.0-00.0-00.01.000	1.04.05.2.01.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	10.870.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.114.484.100,00	19.573.447.728,00	112.693.445,00	112.199.584,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.870.497.475,00	11.252.413.428,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000,00	5.622.400,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	3.976.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000,00	1.646.400,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.530.237.272,00	10.117.389.948,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.240.182.172,00	9.830.172.948,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.840.000,00	178.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000,00	104.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.935.100,00	4.857.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.420.000,00	33.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.420.000,00	33.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.561.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.561.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.773.620,00	195.376.040,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.111.975,00	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.237.895,00	45.740.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.419.550,00	26.629.500,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.822.200,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.725.000,00	9.642.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.457.000,00	108.683.840,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.327.315,00	205.446.352,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.998.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.427.160,00	27.737.617,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.900.155,00	171.710.735,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.378.268,00	672.373.688,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.515.000,00	83.051.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	453.913.268,00	448.822.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	154.950.000,00	140.499.988,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.769.844.970,00	7.967.593.310,00	12.853.700,00	12.359.850,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.660.174.970,00	7.889.308.510,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	8.545.174.970,00	7.774.363.510,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	54.945.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	108.000.000,00	78.284.800,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.02.05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	108.000.000,00	78.284.800,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	1.670.000,00	-	12.853.700,00	12.359.850,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.02.2.03.02	Pembentukan Sekretariat PPNS	1.670.000,00	-	12.853.700,00	12.359.850,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	344.141.655,00	236.757.990,00	99.839.745,00	99.839.734,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	89.799.900,00	79.994.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	89.799.900,00	79.994.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	203.344.655,00	110.739.221,00	99.072.545,00	99.072.534,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	32.796.900,00	28.256.221,00	97.300.200,00	97.300.189,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	134.727.655,00	82.483.000,00	1.772.345,00	1.772.345,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	35.820.100,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	43.350.000,00	38.444.469,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.350.000,00	38.444.469,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7.647.100,00	7.580.300,00	767.200,00	767.200,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	7.647.100,00	7.580.300,00	767.200,00	767.200,00	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	130.000.000,00	116.683.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.803.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	80.000.000,00	79.803.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00	36.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.05	1-05.0-00.0-00.01.000	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000,00	36.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06			SOSIAL	6.822.002.672,00	6.288.271.342,00	1.481.997.650,00	1.433.915.700,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.977.910.979,00	3.850.457.642,00	1.349.103.400,00	1.313.340.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.767.325,00	110.850.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.297.325,00	11.296.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.826.250,00	8.232.850,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.678.750,00	8.238.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.333.125,00	8.653.125,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.354.250,00	4.308.200,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.277.625,00	70.121.225,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.917.752,00	2.797.355.592,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.080.000,00	118.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.723.650,00	4.913.650,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.097.477,00	53.231.900,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.167.750,00	357.813.460,00	56.793.400,00	53.854.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.935.200,00	2.935.200,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.093.100,00	13.733.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.338.100,00	56.172.910,00	10.295.400,00	9.654.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.936.250,00	2.936.250,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.527.100,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,00	16.196.100,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.336.000,00	66.237.300,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	203.502.000,00	198.102.000,00	46.498.000,00	44.200.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.600.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.618.152,00	256.165.690,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.200.000,00	26.036.940,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.282.500,00	8.281.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.835.652,00	216.547.750,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.840.000,00	318.272.800,00	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	33.155.300,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.270.000,00	140.244.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.890.000,00	139.193.500,00	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	130.656.200,00	120.088.600,00	8.815.600,00	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	130.656.200,00	120.088.600,00	8.815.600,00	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95.034.400,00	85.667.600,00	8.815.600,00	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.621.800,00	12.421.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	800.306.420,00	761.623.800,00	20.497.500,00	20.475.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	667.526.420,00	641.184.800,00	20.497.500,00	20.475.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	129.124.620,00	124.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	75.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	-	-	20.497.500,00	20.475.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.877.000,00	120.684.800,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	333.524.800,00	330.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	132.780.000,00	120.439.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	112.430.000,00	101.539.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	20.350.000,00	18.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.586.059.673,00	1.248.177.300,00	82.169.550,00	78.933.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.586.059.673,00	1.248.177.300,00	82.169.550,00	78.933.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.583.159.673,00	1.248.177.300,00	82.169.550,00	78.933.000,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	327.069.400,00	307.924.000,00	21.411.600,00	21.167.700,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80.481.000,00	63.482.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	80.481.000,00	63.482.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	246.588.400,00	244.442.000,00	21.411.600,00	21.167.700,00	-	-	-	-
1	1.06	1-06.0-00.0-00.01.000	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	246.588.400,00	244.442.000,00	21.411.600,00	21.167.700,00	-	-	-	-
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	71.299.063.459,00	64.871.019.810,00	5.463.620.980,00	4.635.182.722,00	-	-	-	-
2	2.07			TENAGA KERJA	9.261.683.776,00	9.062.062.067,00	29.858.100,00	29.700.000,00	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.530.286.466,00	3.463.579.680,00	29.858.100,00	29.700.000,00	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.774.900,00	200.445.845,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.246.950,00	14.020.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.428.900,00	13.143.240,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.371.900,00	38.918.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	41.372.750,00	39.457.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.344.700,00	34.097.300,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.450.500,00	14.941.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.795.400,00	23.369.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.01.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	22.763.800,00	22.498.105,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.704.104.379,00	2.668.553.405,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.200.000,00	106.570.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.324.800,00	17.659.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.540.870,00	22.317.450,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.677.300,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.677.300,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.907.520,00	399.444.171,00	29.858.100,00	29.700.000,00	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.595.000,00	13.594.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.868.960,00	144.421.500,00	29.858.100,00	29.700.000,00	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.169.600,00	72.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.800.900,00	40.644.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.175.000,00	13.530.551,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.423.060,00	90.566.520,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.875.000,00	24.677.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.030.642,00	102.290.659,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.612.816,00	14.980.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.617.826,00	76.510.059,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.791.725,00	84.345.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.230.000,00	84.345.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.561.725,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	580.298.360,00	505.585.952,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	579.298.750,00	505.585.952,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	579.048.750,00	505.585.952,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.051.363.700,00	1.021.255.540,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	797.223.700,00	774.457.940,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	797.223.700,00	774.457.940,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.099.735.250,00	4.071.640.895,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.061.600,00	30.963.350,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	16.561.600,00	15.580.950,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	15.500.000,00	15.382.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.067.673.650,00	4.040.677.545,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000,00	15.569.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.07	2-07.3-29.0-00.01.000		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.704.660.424,00	3.865.408.832,00	97.884.300,00	97.568.600,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.008.145.314,00	2.572.057.755,00	18.634.300,00	18.425.600,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.973.398,00	2.132.719.292,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.320.000,00	70.320.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.270,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.257.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.420.000,00	25.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.420.000,00	25.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.029.810,00	89.722.363,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.734.500,00	13.698.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	10.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.295.310,00	65.063.863,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.001.406,00	176.843.900,00	18.634.300,00	18.425.600,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.727.072,00	13.265.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.565.700,00	14.893.000,00	18.634.300,00	18.425.600,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.708.634,00	133.685.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.785.600,00	141.737.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.931.500,00	54.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.854.100,00	87.542.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	145.208.900,00	137.643.486,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.978.850,00	84.685.886,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	85.978.850,00	84.685.886,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.030.050,00	9.957.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.030.050,00	9.957.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	197.517.795,00	86.315.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	870.750.000,00	665.361.337,00	79.250.000,00	79.143.000,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	870.750.000,00	665.361.337,00	79.250.000,00	79.143.000,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	870.750.000,00	665.361.337,00	79.250.000,00	79.143.000,00	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	212.433.415,00	201.904.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	270.605.000,00	202.126.554,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.400.000,00	61.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.01.05	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	66.400.000,00	61.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.200.000,00	43.399.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.08	2-08.0-00.0-00.01.000	2.08.07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	44.200.000,00	43.399.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09			PANGAN	4.282.140.037,00	3.888.261.919,00	14.929.800,00	14.874.000,00	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.213.133.657,97	3.035.314.993,00	14.929.800,00	14.874.000,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.372.774,00	35.201.300,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.160.674,00	12.937.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.562.600,00	8.158.300,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.572.250,00	8.271.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.077.250,00	5.834.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.860.450,00	2.641.352.948,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.660.450,00	22.249.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.245.300,00	7.120.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.461.800,00	33.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.461.800,00	33.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.486.031,97	101.591.768,00	14.929.800,00	14.874.000,00	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.534.806,97	27.158.500,00	14.929.800,00	14.874.000,00	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.550.025,00	3.385.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.150.100,00	16.384.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.014.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.208.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.029.000,00	40.663.868,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.042.852,00	134.488.327,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	5.314.077,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.742.500,00	3.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.850.352,00	114.744.250,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.909.750,00	89.280.650,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	40.243.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.429.750,00	49.036.850,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.907.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.907.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3.907.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	901.061.379,03	733.586.896,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	202.056.000,00	107.985.601,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	191.640.000,00	98.700.001,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.416.000,00	9.285.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	400.000.000,00	368.185.756,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	368.185.756,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.037.700,00	21.185.303,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.637.700,00	2.622.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.637.700,00	2.622.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	98.174.727,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	-	-	-	-	-	-
2	2.09	2-09.0-00.0-00.01.000	2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11			LINGKUNGAN HIDUP	8.990.536.282,00	8.690.578.030,00	1.869.095.500,00	1.620.748.190,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.650.329.581,00	3.504.434.230,00	5.141.500,00	2.773.890,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.142.803,00	15.132.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.632.703,00	10.132.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.100,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.182.960,00	2.863.575.710,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.699.799.240,00	2.690.198.110,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.900.920,00	152.360.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.707.800,00	4.689.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.910.000,00	8.090.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.865.000,00	8.237.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.885.974,00	156.995.220,00	1.960.500,00	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.410.242,00	3.000.000,00	1.960.500,00	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.154.992,00	25.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.277.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.731.240,00	18.058.080,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.312.500,00	89.837.140,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.224.241,00	225.348.700,00	3.181.000,00	2.773.890,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.595.100,00	17.026.950,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.045.000,00	22.000.000,00	3.181.000,00	2.773.890,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.334.141,00	175.821.750,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.893.603,00	243.382.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.893.603,00	243.382.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	172.500.000,00	154.825.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	92.446.750,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	92.446.750,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.03.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000,00	92.446.750,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	39.171.000,00	37.154.200,00	11.100.000,00	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	39.171.000,00	37.154.200,00	11.100.000,00	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	39.171.000,00	37.154.200,00	11.100.000,00	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.028.535.701,00	4.901.717.850,00	1.852.854.000,00	1.617.974.300,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.942.035.701,00	4.816.324.850,00	1.852.854.000,00	1.617.974.300,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.385.067.701,00	1.347.155.050,00	1.852.854.000,00	1.617.974.300,00	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11.2.01.21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	86.500.000,00	85.393.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.11	2-11.0-00.0-00.01.000	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	86.500.000,00	85.393.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.126.537.627,00	3.948.866.573,00	221.841.400,00	193.460.090,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.645.870.845,00	3.486.421.070,00	59.584.000,00	59.394.290,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.890.508,00	53.936.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.446.768,00	51.696.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.695.000,00	740.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.690,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.050,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.961.406,00	2.906.680.792,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.100.282,00	87.090.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.462.880,00	2.452.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.304.756,00	59.764.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.304.756,00	59.764.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.424.343,00	139.709.189,00	59.584.000,00	59.394.290,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	59.584.000,00	59.394.290,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.309.460,00	1.309.440,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.089.500,00	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.025.383,00	126.199.749,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.846.715,00	195.545.189,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.207.600,00	1.644.380,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.639.115,00	193.900.809,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.443.117,00	91.635.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.053.800,00	45.260.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.069.317,00	35.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.320.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	243.195.944,00	227.033.103,00	162.257.400,00	134.065.800,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	121.042.534,00	117.087.403,00	162.257.400,00	134.065.800,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.728.334,00	8.136.000,00	25.875.000,00	25.840.800,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	110.314.200,00	108.951.403,00	136.382.400,00	108.225.000,00	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	122.153.410,00	109.945.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.900.010,00	12.155.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.912.000,00	8.285.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	88.377.000,00	81.240.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10.964.400,00	8.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	147.463.467,00	146.618.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.610.887,00	41.380.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.395.000,00	20.165.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	21.215.887,00	21.215.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	38.978.180,00	38.497.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	3.023.000,00	2.697.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	35.955.180,00	35.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	72.958.189,00	72.682.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	45.006.089,00	44.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.221.319,00	42.220.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.784.770,00	2.718.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.049.182,00	16.111.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	17.049.182,00	16.111.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.12	2-12.0-00.0-00.01.000	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.049.182,00	16.111.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.883.297.155,00	2.695.040.898,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.812.800,00	4.070.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.121.500,00	4.070.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.691.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.388.924.691,00	2.311.707.138,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000,00	58.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.540.000,00	26.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.540.000,00	26.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.261.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.261.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.459.400,00	132.754.410,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.359.100,00	17.609.410,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.019.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.521.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.150.000,00	13.880.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.410.000,00	76.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.594.565,00	73.134.650,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.994.565,00	66.534.650,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.704.699,00	123.849.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.704.699,00	123.849.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.348.790.000,00	1.889.118.302,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	171.165.000,00	80.290.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	171.165.000,00	80.290.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.177.625.000,00	1.808.828.302,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	160.450.000,00	160.234.782,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	427.490.000,00	211.656.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.000.000,00	25.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	309.910.000,00	179.863.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.154.000,00	40.287.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	11.154.000,00	4.624.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00	35.663.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.756.000,00	139.576.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	11.398.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189.256.000,00	85.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	9.000.000,00	7.125.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000,00	22.338.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	12.995.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120.000.000,00	119.880.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04.2.01.20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000,00	37.181.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	739.200.000,00	733.974.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.14	2-14.0-00.0-00.01.000	2.14.04.2.01.25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	210.355.000,00	189.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15			PERHUBUNGAN	9.154.630.220,00	8.066.781.307,00	1.548.256.350,00	1.294.119.800,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.724.775.870,00	4.482.567.543,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.135.000,00	10.880.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.775.000,00	1.630.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.710.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.710.000,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.650.350.600,00	3.619.396.423,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.230.000,00	187.780.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	22.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.297.025,00	158.941.590,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.125.160,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.072.025,00	21.965.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.950.000,00	30.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.872.000,00	7.729.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000,00	22.485.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.903.000,00	62.037.430,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.655.045,00	477.689.530,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.970.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.655.045,00	465.719.530,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.675.700,00	215.660.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.521.250,00	98.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.154.450,00	110.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.429.854.350,00	3.584.213.764,00	1.548.256.350,00	1.294.119.800,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	740.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.128.175.475,00	3.411.835.364,00	1.079.484.450,00	1.069.899.800,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	131.032.000,00	40.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.997.143.475,00	3.371.325.364,00	1.079.484.450,00	1.069.899.800,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	94.120.680,00	45.020.000,00	270.791.000,00	224.220.000,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	370.000,00	360.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	38.250.680,00	-	224.541.000,00	224.220.000,00	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	55.500.000,00	44.660.000,00	46.250.000,00	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	525.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62.684.220,00	48.779.000,00	197.980.900,00	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	28.233.320,00	23.499.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.019.100,00	2.000.000,00	197.980.900,00	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1.581.800,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.025.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28.825.000,00	19.830.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96.285.975,00	78.579.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.725.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.700.000,00	9.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	68.860.975,00	68.779.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.15	2-15.0-00.0-00.01.00	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	2.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.16			KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.082.559.174,00	7.811.433.973,00	700.130.500,00	490.850.902,00	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.109.581.524,00	3.956.650.093,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.818.900,00	12.484.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.475.100,00	4.810.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.170.000,00	3.107.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.606.800,00	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.241.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.105.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.276.300,00	3.396.107.446,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.900.000,00	126.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.477.900,00	4.087.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.140.300,00	1.057.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.140.300,00	1.057.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.854.665,00	77.741.420,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.623.800,00	9.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.773.665,00	14.646.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.767.200,00	17.785.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.250.000,00	8.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000,00	23.824.420,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.472.759,00	345.222.427,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.265.068,00	115.557.450,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.207.691,00	209.664.977,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.018.600,00	124.037.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.871.500,00	64.344.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.399.100,00	51.122.300,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.748.000,00	8.570.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.003.571.850,00	2.924.118.990,00	521.243.750,00	490.850.902,00	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.003.571.850,00	2.924.118.990,00	521.243.750,00	490.850.902,00	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.02.2.01.14	Relasi Media	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	3.025.600,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.546.250,00	421.640.770,00	521.243.750,00	490.850.902,00	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	969.405.800,00	930.664.890,00	178.886.750,00	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.250.000,00	3.191.961,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	3.250.000,00	3.191.961,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	966.155.800,00	927.472.929,00	178.886.750,00	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	26.588.700,00	17.235.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	13.752.624,00	6.445.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	48.353.250,00	48.000.000,00	178.886.750,00	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	200.000.000,00	199.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.16	2-16.2-20.2-21.01.000	2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	629.461.226,00	607.992.129,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17			KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.586.976.208,00	2.919.824.359,00	36.295.600,00	29.914.500,00	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.793.155.408,00	2.611.828.559,00	36.295.600,00	29.914.500,00	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.838.400,00	2.175.760.740,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.340.000,00	96.940.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.270.000,00	3.201.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.081.120,00	142.763.239,00	36.295.600,00	29.914.500,00	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.484.875,00	8.482.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.491.439,00	33.490.200,00	36.295.600,00	29.914.500,00	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.670.200,00	2.670.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.272.600,00	14.959.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.006,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.380.000,00	19.380.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.182.000,00	60.181.639,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.436.084,00	104.128.180,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.620.880,00	17.925.180,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.815.204,00	80.203.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.633.804,00	182.014.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.596.504,00	98.521.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.747.300,00	74.343.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	192.535.800,00	191.635.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	192.535.800,00	191.635.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	161.427.600,00	161.427.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	31.108.200,00	30.208.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.960.000,00	100.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.960.000,00	100.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.960.000,00	100.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286.325.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	286.325.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.935.000,00	1.110.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	740.000,00	740.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	214.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	214.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.17	2-17.0-00.0-00.01.000	2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	214.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18			PENANAMAN MODAL	3.929.517.480,00	3.782.479.773,00	441.229.900,00	437.138.640,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.548.407.005,00	3.453.518.173,00	389.569.600,00	386.063.100,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.064.600,00	30.892.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.457.400,00	12.007.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	795.000,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	275.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	603.000,00	346.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	733.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	591.200,00	591.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.110.000,00	15.698.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.525.200,00	2.924.041.618,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.065.000,00	2.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.480.000,00	49.676.700,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	645.000,00	645.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.260.000,00	1.251.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	775.000,00	766.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.135.700,00	1.108.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.060.500,00	1.022.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.335.000,00	19.496.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	775.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	566.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.525.000,00	1.554.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.400.000,00	987.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.125.000,00	567.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.584.250,00	198.754.682,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.317.625,00	8.317.625,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.122.775,00	31.031.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.518.900,00	9.470.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.236.600,00	7.236.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.810.000,00	5.217.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.447.150,00	99.481.657,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.131.200,00	38.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.209.600,00	8.800.000,00	389.569.600,00	386.063.100,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	11.000.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.135.800,00	8.800.000,00	202.259.600,00	199.922.100,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.800,00	-	176.310.000,00	176.151.000,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.539.955,00	177.920.537,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.381.200,00	10.381.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.820.000,00	13.965.837,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.338.755,00	153.573.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.623.400,00	92.057.236,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	39.421.536,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.380.000,00	44.138.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.763.400,00	8.496.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	47.498.449,00	20.113.700,00	17.959.100,00	17.427.000,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.943.650,00	7.746.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	14.943.650,00	7.746.900,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	32.554.799,00	12.366.800,00	17.959.100,00	17.427.000,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	32.554.799,00	12.366.800,00	17.959.100,00	17.427.000,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	168.544.251,00	159.281.700,00	18.883.500,00	18.863.340,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	168.544.251,00	159.281.700,00	18.883.500,00	18.863.340,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	168.544.251,00	159.281.700,00	18.883.500,00	18.863.340,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	84.239.275,00	74.271.900,00	14.817.700,00	14.785.200,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	84.239.275,00	74.271.900,00	14.817.700,00	14.785.200,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	45.083.700,00	39.045.100,00	11.954.300,00	11.932.500,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	21.678.425,00	20.003.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	17.477.150,00	15.223.000,00	2.863.400,00	2.852.700,00	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.917.300,00	74.773.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.917.300,00	74.773.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3.860.000,00	3.790.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41.381.552,00	40.775.500,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	30.675.748,00	30.207.600,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.911.200,00	521.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.911.200,00	521.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.18	2-18.0-00.0-00.01.000	2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.911.200,00	521.200,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.238.574.654,00	3.795.734.849,00	416.479.200,00	406.939.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.053.854,00	2.742.595.399,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.571.700,00	12.210.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.299.700,00	9.170.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.265.200,00	1.248.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.006.800,00	1.792.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.726.800,00	2.032.835.999,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	540.900,00	468.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.385.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.155.550,00	182.726.340,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.952.400,00	19.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.401.750,00	37.086.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.223.000,00	21.219.100,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.400,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.120.000,00	36.775.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.390.000,00	67.926.240,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.147.954,00	378.590.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.270.000,00	16.270.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.323.500,00	16.778.150,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.554.454,00	345.542.250,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.066.850,00	125.231.860,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.066.850,00	125.231.860,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	317.260.400,00	193.527.850,00	7.739.600,00	7.659.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	98.010.000,00	71.417.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	54.895.000,00	42.727.800,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	28.115.000,00	13.690.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.250.400,00	122.110.050,00	7.739.600,00	7.659.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	161.529.750,00	122.110.050,00	7.739.600,00	7.659.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	57.720.650,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.016.260.400,00	759.611.600,00	408.739.600,00	399.280.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	224.000.000,00	184.991.600,00	401.000.000,00	399.280.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	224.000.000,00	184.991.600,00	401.000.000,00	399.280.000,00	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	694.177.100,00	500.000.000,00	7.739.600,00	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	694.177.100,00	500.000.000,00	7.739.600,00	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	75.000.000,00	74.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	23.083.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	23.083.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.19	2-19.0-00.0-00.01.000	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.20			STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.22			KEBUDAYAAN	286.359.100,00	247.984.621,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150.205.300,00	137.306.600,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.589.300,00	45.288.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	49.589.300,00	45.288.700,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.616.000,00	92.017.900,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.616.000,00	92.017.900,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	34.500.000,00	32.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000,00	32.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	34.500.000,00	32.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20.635.000,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	81.018.800,00	72.748.021,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	81.018.800,00	72.748.021,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	81.018.800,00	72.748.021,00	-	-	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.23	PERPUSTAKAAN	802.018.177,00	146.232.036,00	19.927.830,00	19.869.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	689.518.177,00	105.850.000,00	19.927.830,00	19.869.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.518.177,00	27.745.000,00	19.927.830,00	19.869.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.289.692,00	22.735.000,00	19.927.830,00	19.869.000,00	-	-	-	-
1	1.01	1-01.2-22.0-00.01.000	2.23.02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.645.185,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	5.583.300,00	5.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	78.105.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	311.563.208,00	36.715.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	88.805.975,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	199.630.817,00	41.390.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	112.500.000,00	40.382.036,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000,00	40.382.036,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.23.03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	112.500.000,00	40.382.036,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24			KEARSIPAN	3.201.318.145,00	2.800.593.171,00	67.692.500,00	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.113.626.363,00	2.785.116.771,00	67.692.500,00	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.862.900,00	2.875.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.869.500,00	2.875.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.185.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.808.400,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.548.439,00	2.397.144.687,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.872.529,00	49.872.529,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.382.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.382.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.938.400,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.680.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.680.000,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.986.298,00	81.593.720,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.195.825,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.418.000,00	8.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.570.900,00	2.562.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.239.490,00	1.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.562.083,00	69.596.720,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.500,00	-	67.692.500,00	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	368.500,00	-	67.692.500,00	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.080.226,00	158.003.184,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.517.354,00	37.695.704,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.686.260,00	10.167.480,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.876.612,00	110.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.100.000,00	122.555.180,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.120.000,00	122.555.180,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.672.722,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	46.672.722,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	46.672.722,00	5.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	41.019.060,00	10.046.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	41.019.060,00	10.046.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26.900.300,00	5.946.400,00	-	-	-	-	-	-
2	2.24	2-24.2-23.0-00.01.000	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	14.118.760,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29.172.778.332,05	26.683.861.051,00	1.469.595.984,95	1.055.125.078,00	-	-	-	-
3	3.25			KELAUTAN DAN PERIKANAN	312.470.100,00	293.178.156,00	3.000.000,00	2.999.799,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	287.470.100,00	268.190.162,00	3.000.000,00	2.999.799,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	287.470.100,00	268.190.162,00	3.000.000,00	2.999.799,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.470.100,00	243.402.952,00	3.000.000,00	2.999.799,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25.000.000,00	24.787.210,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-27.3-25.0-00.01.000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000,00	24.987.994,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26			PARIWISATA	7.679.042.277,00	7.410.759.983,00	558.249.400,00	554.713.919,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.850.457.616,00	3.628.277.517,00	8.249.400,00	6.300.000,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.162,00	18.309.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.423.162,00	14.990.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.500,00	2.269.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.434.500,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.071.289.200,00	2.958.634.760,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.381.500,00	1.340.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	169.150.000,00	158.390.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.187.800,00	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.707.800,00	19.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.480.000,00	1.340.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.165.738,00	166.624.844,00	8.249.400,00	6.300.000,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.211.138,00	5.786.500,00	8.249.400,00	6.300.000,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.738.200,00	41.647.300,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.216.400,00	89.191.044,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.032.716,00	392.874.353,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.205.700,00	38.819.100,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.110.000,00	22.327.900,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.717.016,00	331.727.353,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.415.000,00	71.094.560,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.895.000,00	71.094.560,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	398.258.000,00	392.407.898,00	550.000.000,00	548.413.919,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	388.258.000,00	383.257.898,00	550.000.000,00	548.413.919,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.005.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	48.258.000,00	47.267.798,00	550.000.000,00	548.413.919,00	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.000.000,00	239.985.100,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	45.000.000,00	44.565.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.289.859.500,00	1.284.964.288,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.040.034.100,00	1.035.324.288,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000,00	597.479.650,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	214.996.800,00	214.536.800,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	225.037.300,00	223.307.838,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.26	3-26.0-00.0-00.01.000	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27			PERTANIAN	16.487.887.505,05	14.879.753.101,00	689.346.384,95	286.725.510,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.042.843.172,09	9.480.664.252,00	28.000.000,00	27.750.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.660.152,00	18.040.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.152,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000,00	8.880.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.235.259.706,00	8.750.126.727,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.842.000,00	15.820.400,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.650.000,00	217.630.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.657.400,00	1.132.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.393.875,00	2.273.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.090.600,00	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.705.600,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.880.075,00	46.769.125,00	28.000.000,00	27.750.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.750,00	2.459.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.600,00	-	28.000.000,00	27.750.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.358.225,00	6.742.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.250.000,00	9.075.800,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.468.500,00	28.492.325,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.534.338,30	505.106.900,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.780.000,00	13.780.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	69.865.400,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.400.054,00	23.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.354.284,30	398.061.500,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.418.300,79	151.021.500,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.418.300,79	151.021.500,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.276.902.238,00	2.941.560.520,00	608.390.800,00	207.570.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.938.818.000,00	1.619.742.840,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155.000.000,00	151.318.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.233.524.481,00	1.219.067.680,00	8.390.800,00	8.370.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	654.829.486,00	643.225.600,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	578.694.995,00	575.842.080,00	8.390.800,00	8.370.000,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	104.559.757,00	102.750.000,00	600.000.000,00	199.200.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	104.559.757,00	102.750.000,00	600.000.000,00	199.200.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.594.753.068,36	1.414.489.550,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	285.000.018,36	223.124.550,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	85.000.000,00	23.124.550,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	200.000.018,36	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.309.753.050,00	1.191.365.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000.000,00	99.850.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	645.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	48.450.000,00	46.498.100,00	1.550.000,00	1.548.450,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	48.450.000,00	46.498.100,00	1.550.000,00	1.548.450,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.450.000,00	46.498.100,00	1.550.000,00	1.548.450,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.129.296.276,60	674.935.700,00	32.405.584,95	32.097.060,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.129.296.276,60	674.935.700,00	32.405.584,95	32.097.060,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.129.296.276,60	674.935.700,00	32.405.584,95	32.097.060,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	395.642.750,00	321.604.979,00	19.000.000,00	17.760.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	395.642.750,00	321.604.979,00	19.000.000,00	17.760.000,00	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	271.641.500,00	210.289.800,00	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.27	3-27.3-25.0-00.01.000	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	124.001.250,00	111.315.179,00	19.000.000,00	17.760.000,00	-	-	-	-
3	3.29			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.078.800,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.078.800,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.078.800,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.266.000,00	3.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	812.800,00	738.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30			PERDAGANGAN	4.076.798.250,00	3.582.134.308,00	175.400.200,00	171.079.850,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.556.748.050,00	3.367.034.058,00	13.197.700,00	12.477.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.966.840,00	6.902.340,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.549.940,00	5.034.540,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.607.900,00	1.867.800,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.153.200,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.655.800,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.988.431.160,00	2.847.968.519,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.880.000,00	170.880.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.705.400,00	2.682.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.067.960,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.045.100,00	706.955,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.045.100,00	706.955,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.135.000,00	10.545.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.135.000,00	10.545.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.786.132,00	197.394.380,00	13.197.700,00	12.477.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.925,00	3.306.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.273.907,00	25.964.780,00	12.437.700,00	11.777.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.249.900,00	7.240.400,00	760.000,00	700.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.575.400,00	10.414.200,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.813.000,00	5.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.625.000,00	2.053.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.756.000,00	142.666.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.883.068,00	126.899.352,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.295.200,00	21.311.484,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.587.868,00	93.587.868,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.500.750,00	176.617.512,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.685.200,00	169.517.512,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.115.550,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	322.200.000,00	100.375.750,00	127.800.000,00	126.595.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	279.550.000,00	67.684.500,00	100.450.000,00	99.456.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	79.550.000,00	67.684.500,00	100.450.000,00	99.456.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.650.000,00	32.691.250,00	27.350.000,00	27.139.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	42.650.000,00	32.691.250,00	27.350.000,00	27.139.500,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	31.155.200,00	25.451.700,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.155.200,00	25.451.700,00	-	-	-	-	-	-
3	3.31	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	31.155.200,00	25.451.700,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	39.140.000,00	30.260.200,00	1.890.000,00	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	39.140.000,00	30.260.200,00	1.890.000,00	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	31.111.400,00	27.706.700,00	1.890.000,00	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.028.600,00	2.553.500,00	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	127.555.000,00	59.012.600,00	32.512.500,00	32.006.850,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	127.555.000,00	59.012.600,00	32.512.500,00	32.006.850,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	127.555.000,00	59.012.600,00	32.512.500,00	32.006.850,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31	PERINDUSTRIAN	612.501.400,00	514.147.503,00	43.600.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	612.501.400,00	514.147.503,00	43.600.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	612.501.400,00	514.147.503,00	43.600.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	612.501.400,00	514.147.503,00	43.600.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.30	3-30.3-31.0-00.01.000	3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	90.682.758.826,50	86.062.199.246,00	4.925.969.040,50	3.522.642.564,00	-	-	-	-
4	4.01			SEKRETARIAT DAERAH	54.228.965.390,50	51.862.189.991,00	3.601.270.640,50	2.348.197.076,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.632.888.210,00	41.613.463.565,00	3.124.619.679,00	1.895.288.874,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.847.040,00	124.044.750,00	11.500.000,00	10.878.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.931.450,00	67.727.000,00	11.500.000,00	10.878.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.274.400,00	4.212.400,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.000,00	4.528.550,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.588.000,00	4.517.400,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.164.300,00	24.073.800,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.315.890,00	18.985.600,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.345.085.871,00	19.639.811.688,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.266.777.271,00	19.561.901.938,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.390.000,00	63.276.700,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.472.500,00	5.302.800,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.884.600,00	4.857.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.561.500,00	4.472.750,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.998.100,00	19.723.400,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.038.700,00	7.851.900,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.959.400,00	11.871.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.450.800,00	193.563.500,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	183.120.000,00	182.364.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.881.600,00	3.832.000,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.862.400,00	3.845.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.586.800,00	3.522.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.468.885.888,00	6.444.408.105,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.374.800,00	180.366.400,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.254.992,00	397.162.200,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	533.393.000,00	533.203.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.849.412,00	73.166.500,00	2.727.329.029,00	1.528.334.850,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	731.601.000,00	650.080.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	1.553.299.036,00	538.558.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	162.233.585,00	156.238.350,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.849.412,00	73.166.500,00	280.195.408,00	183.458.500,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.236.942.162,00	5.861.035.181,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.210.877,00	135.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.480.800,00	201.966.558,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.990.250,00	534.610.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.756.800.336,00	3.633.386.356,00	283.000.000,00	276.625.224,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	994.048.080,00	975.840.371,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.100.000,00	86.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	541.849.300,00	511.588.800,00	283.000.000,00	276.625.224,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.948.109.562,00	1.243.761.209,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.002.968.762,00	496.101.209,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	336.140.800,00	318.634.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	29.026.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.679.900.169,00	3.678.136.250,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	309.946.470,00	242.983.836,00	27.194.400,00	9.543.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44.969.670,00	42.492.800,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.984.310,00	26.589.310,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	113.592.750,00	88.960.492,00	27.194.400,00	9.543.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.114.000,00	20.980.450,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.285.740,00	63.960.784,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	465.072.400,00	459.442.790,00	71.496.250,00	69.907.800,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	188.415.154,00	187.449.836,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	266.648.071,00	262.177.954,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	10.009.175,00	9.815.000,00	71.496.250,00	69.907.800,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.243.815.952,00	8.991.972.671,00	217.908.150,00	215.695.650,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	519.275.720,00	515.619.494,00	30.561.700,00	30.092.100,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	155.138.990,00	154.210.190,00	30.561.700,00	30.092.100,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.560.260,00	139.687.840,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	223.576.470,00	221.721.464,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.867.689.342,00	6.657.493.123,00	65.600.000,00	64.724.100,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.719.238.520,00	4.604.154.463,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.072.301.722,00	1.981.907.604,00	65.600.000,00	64.724.100,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	76.149.100,00	71.431.056,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.450.559.960,00	1.415.394.549,00	63.974.100,00	63.541.950,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	665.587.770,00	658.806.449,00	63.974.100,00	63.541.950,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	397.508.680,00	373.819.600,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	387.463.510,00	382.768.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	406.290.930,00	403.465.505,00	57.772.350,00	57.337.500,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	302.011.910,00	299.735.905,00	11.411.600,00	11.377.500,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	103.119.020,00	102.569.600,00	46.360.750,00	45.960.000,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.352.261.228,50	1.256.753.755,00	258.742.811,50	237.212.552,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	489.236.490,00	460.945.987,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	54.735.700,00	44.645.340,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	407.397.990,00	389.468.347,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9.380.700,00	9.245.600,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	7.651.500,00	7.592.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	10.070.600,00	9.994.700,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	521.948.770,00	519.624.420,00	30.112.500,00	29.748.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	17.512.200,00	17.017.600,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60.634.821,00	60.401.340,00	30.112.500,00	29.748.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	443.801.749,00	442.205.480,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	315.310.818,50	250.700.848,00	228.630.311,50	207.464.552,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	92.376.566,00	84.806.819,00	33.314.430,00	33.155.700,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	169.950.323,00	113.782.559,00	36.220.077,00	21.978.000,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52.983.929,50	52.111.470,00	159.095.804,50	152.330.852,00	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.765.150,00	25.482.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.107.600,00	15.900.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	9.657.550,00	9.582.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.01	4-01.0-00.0-00.01.000	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02			SEKRETARIAT DPRD	36.453.793.436,00	34.200.009.255,00	1.324.698.400,00	1.174.445.488,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.477.469.336,00	19.292.630.136,00	1.324.698.400,00	1.174.445.488,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.064.100,00	18.702.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.307.750,00	1.976.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.533.100,00	3.298.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.790.000,00	2.196.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.213.750,00	1.796.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.150.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.348.750,00	2.996.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.720.750,00	2.440.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.510.679.335,00	4.448.748.396,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.080.000,00	163.080.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.408.300,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.258.750,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.268.500,00	8.220.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.603.500,00	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.596.800,00	71.580.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.158.400,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.558.400,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.880.000,00	65.580.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.352.900,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283.850,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.030.550,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.182.484.225,00	1.035.502.214,00	47.251.000,00	46.965.000,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.655.025,00	66.418.500,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.866.500,00	16.102.500,00	17.046.000,00	16.965.000,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.124.400,00	184.572.850,00	205.000,00	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.276.000,00	132.322.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.024.000,00	46.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.695.000,00	2.175.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	208.332.000,00	206.857.250,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.146.000,00	380.854.114,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	365.300,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.000,00	-	877.447.400,00	728.832.992,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	141.124.500,00	141.025.500,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.000,00	-	526.322.900,00	398.712.000,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	200.000.000,00	189.095.492,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.884.706,00	937.228.903,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125.637.750,00	125.637.750,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.340.000,00	142.841.153,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.906.956,00	668.750.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.088.850,00	1.053.808.367,00	400.000.000,00	398.647.496,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	647.027.300,00	624.328.009,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.374.350,00	377.045.358,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.250.000,00	45.435.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.822.200,00	-	400.000.000,00	398.647.496,00	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.615.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.197.974.100,00	10.643.531.056,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.163.880.600,00	9.801.466.056,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	909.093.500,00	802.065.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.145.057.320,00	1.083.528.700,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	52.813.600,00	48.285.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.976.324.100,00	14.907.379.119,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.547.376.300,00	4.519.556.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22.473.800,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	194.448.000,00	190.756.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- U ndangan	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.309.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	390.157.200,00	321.015.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.365.450,00	58.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	152.000.000,00	87.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	64.720.250,00	63.265.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	69.071.500,00	67.750.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	386.491.100,00	354.320.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	49.123.000,00	47.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	56.503.000,00	43.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.861.000,00	44.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.008.600,00	45.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.008.600,00	47.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	50.008.600,00	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	80.978.300,00	78.320.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.974.417.000,00	2.585.586.076,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	260.000.000,00	183.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	8.025.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	795.000.000,00	783.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	438.153.300,00	337.240.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.205.800,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	434.872.500,00	337.240.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5.854.300,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	2.870.250,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.984.050,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.233.849.900,00	6.789.662.043,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	40.043.000,00	35.825.000,00	-	-	-	-	-	-
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	968.454.800,00	837.613.744,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
4	4.02	4-02.0-00.0-00.01.000	4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.203.500,00	-	-	-	-	-	-	-
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	47.193.097.686,50	44.886.199.597,00	2.492.165.349,50	2.265.864.997,00	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	5.01			PERENCANAAN	7.793.788.950,00	6.843.776.002,00	410.122.222,00	224.570.189,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.285.178.290,00	6.052.428.752,00	334.361.622,00	148.870.073,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.458.200,00	22.775.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	2.395.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.240.200,00	5.188.800,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.154.000,00	3.525.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.000.000,00	4.440.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.264.000,00	6.896.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.312.484.164,00	5.268.989.722,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.321.195,00	154.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	915.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.848.800,00	15.977.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000,00	3.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.348.800,00	12.898.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.019.450,00	37.468.000,00	4.656.894,00	4.195.400,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.637.350,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000,00	2.032.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.500.000,00	491.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.393.270,00	22.945.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.988.830,00	-	4.656.894,00	4.195.400,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.646.060,00	368.599.809,00	149.704.728,00	144.674.673,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.116.320,00	57.010.000,00	149.704.728,00	144.674.673,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.300.000,00	11.224.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.250.000,00	33.349.590,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.979.740,00	255.166.219,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.328.465,00	186.185.121,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.240.000,00	25.636.100,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.880.800,00	22.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.207.665,00	123.399.021,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.393.151,00	152.434.100,00	180.000.000,00	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.808.306,00	78.298.800,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.542.350,00	74.135.300,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.495,00	-	180.000.000,00	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.292.598.260,00	640.500.500,00	14.549.000,00	14.548.609,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	581.199.260,00	444.465.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	21.495.260,00	20.055.900,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000,00	9.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	68.150.000,00	52.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	118.600.000,00	98.369.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	332.954.000,00	263.740.100,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.269.000,00	25.052.000,00	14.549.000,00	14.548.609,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	18.125.000,00	15.052.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	451.000,00	-	14.549.000,00	14.548.609,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.693.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	676.610.000,00	170.658.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	63.310.000,00	39.895.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	690.000,00	325.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	612.610.000,00	130.438.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	520.000,00	325.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	520.000,00	325.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	216.012.400,00	150.846.750,00	61.211.600,00	61.151.507,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	130.241.600,00	96.495.750,00	44.061.600,00	44.001.510,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.535.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	122.506.600,00	88.895.750,00	44.061.600,00	44.001.510,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	43.080.000,00	23.851.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.905.000,00	4.788.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.735.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.645.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.905.000,00	4.788.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.305.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.895.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.015.000,00	2.475.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	42.690.800,00	30.500.000,00	17.150.000,00	17.149.997,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.412.500,00	3.375.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.712.500,00	2.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000,00	-	2.000.000,00	1.999.998,00	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	28.390.800,00	24.450.000,00	15.150.000,00	15.149.999,00	-	-	-	-
5	5.02			KEUANGAN	32.026.508.025,50	31.300.869.590,00	2.082.043.127,50	2.041.294.808,00	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.580.842.594,50	17.216.710.941,00	1.267.487.400,00	1.263.371.243,00	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.624.149,00	110.124.050,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.650.000,00	14.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.718.450,00	20.718.450,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	20.320.200,00	20.320.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.180.499,00	34.180.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.755.000,00	20.755.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.900.692.699,00	12.633.650.685,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.634.500,00	51.634.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.094.000,00	32.094.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.302.965,00	28.188.700,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.218.965,00	13.848.700,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.084.000,00	14.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.006.997.377,50	2.001.748.785,00	432.487.400,00	431.712.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.100,00	9.987.500,00	219.391.200,00	219.136.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	632.953.677,50	632.862.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.253.600,00	217.245.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.830.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.960.000,00	293.833.785,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	16.096.200,00	16.096.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	842.000.000,00	841.820.000,00	197.000.000,00	196.480.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.955.404,00	1.734.597.553,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220.943.500,00	220.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.017.700,00	38.591.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.300.000,00	82.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.270.000,00	708.401.168,00	835.000.000,00	831.659.243,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.509.500,00	509.498.113,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.635.000,00	129.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.980.000,00	-	485.000.000,00	483.792.443,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000,00	47.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.145.500,00	22.303.055,00	350.000.000,00	347.866.800,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.065.074.241,00	10.902.018.077,00	442.839.400,00	430.952.250,00	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.184.135.490,00	3.125.684.912,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	247.471.650,00	244.875.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170.791.772,00	170.521.700,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	97.059.800,00	95.955.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	62.279.700,00	61.603.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	87.141.400,00	86.240.100,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	52.259.200,00	51.635.800,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	498.984.638,00	478.385.980,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	808.999.120,00	799.101.360,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	768.457.500,00	748.683.772,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16.048.000,00	15.949.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	74.335.400,00	74.213.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.307.310,00	298.520.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.367.209.893,00	6.301.888.065,00	146.448.350,00	140.820.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.782.010,00	398.658.301,00	20.559.100,00	16.500.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98.057.500,00	97.793.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.748.666.153,00	4.694.637.507,00	125.889.250,00	124.320.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	115.765.250,00	114.282.221,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	52.555.100,00	52.163.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	204.020.000,00	200.992.924,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12.350.750,00	11.460.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	187.373.290,00	186.708.900,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	47.817.090,00	46.892.595,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	499.822.750,00	498.299.017,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.239.889.330,00	1.202.618.380,00	90.481.000,00	90.187.500,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.564.930,00	20.880.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	390.078.400,00	378.193.080,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	315.025.500,00	314.592.100,00	80.481.000,00	80.197.500,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	73.080.500,00	71.815.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	113.986.200,00	113.333.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16.484.750,00	16.144.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	294.669.050,00	287.659.800,00	10.000.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	273.839.528,00	271.826.720,00	205.910.050,00	199.944.750,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	273.839.528,00	271.826.720,00	205.910.050,00	199.944.750,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.271.371.233,00	1.255.637.030,00	24.989.000,00	24.364.500,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.271.371.233,00	1.255.637.030,00	24.989.000,00	24.364.500,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	47.256.730,00	45.646.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	528.983,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.197.790,00	17.998.600,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.049.860,00	18.723.800,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	315.316.350,00	312.245.510,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.105.100,00	16.030.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.760.940,00	98.655.472,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	73.174.590,00	72.645.300,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.957.440,00	66.219.840,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	148.111.680,00	142.983.308,00	24.989.000,00	24.364.500,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.706.790,00	28.610.700,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400.328.200,00	399.039.300,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	36.876.780,00	36.838.800,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.109.219.957,00	1.926.503.542,00	346.727.327,50	322.606.815,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.109.219.957,00	1.926.503.542,00	346.727.327,50	322.606.815,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	141.847.000,00	133.597.020,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	379.949.730,00	370.996.992,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.518.350,00	80.399.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	144.815.402,00	130.498.500,00	71.089.018,00	66.567.000,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	47.482.125,00	35.218.250,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.340.990,00	78.644.000,00	15.352.909,50	13.997.100,00	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	166.496.400,00	163.184.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.713.700,00	7.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	577.522.400,00	517.269.900,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.136.500,00	130.023.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.721.060,00	88.948.300,00	-	-	-	-	-	-
5	5.02	5-02.0-00.0-00.01.000	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	197.676.300,00	190.374.080,00	260.285.400,00	242.042.715,00	-	-	-	-
5	5.03			KEPEGAWAIAN	6.257.135.581,00	5.893.238.414,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.576.809.535,00	5.412.826.374,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.817.780.500,00	4.711.495.078,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.480.000,00	110.540.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.906.700,00	3.330.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.306.650,00	18.707.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.306.650,00	18.707.200,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.446.570,00	314.109.574,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.601.600,00	2.284.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.554.970,00	122.849.750,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00	30.148.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.534.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.756.000,00	147.027.324,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.090.840,00	234.544.602,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.941.911,00	56.513.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.148.929,00	170.031.102,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.879.500,00	126.939.520,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.949.500,00	115.414.520,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.930.000,00	11.525.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	680.326.046,00	480.412.040,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	97.895.141,00	92.010.320,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	85.545.141,00	80.110.320,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12.350.000,00	11.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	172.810.905,00	60.971.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	2.461.605,00	2.272.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	170.349.300,00	58.698.500,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	273.660.000,00	207.341.870,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	60.000.000,00	31.635.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,00	94.921.870,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	113.660.000,00	80.785.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.960.000,00	120.088.850,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	131.520.000,00	120.088.850,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	5.04		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	964.298.730,00	755.460.591,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	964.298.730,00	755.460.591,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	964.298.730,00	755.460.591,00	-	-	-	-	-	-
5	5.03	5-03.5-04.0-00.01.000	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	964.298.730,00	755.460.591,00	-	-	-	-	-	-
5	5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	151.366.400,00	92.855.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.366.400,00	92.855.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	41.201.300,00	19.078.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	41.201.300,00	19.078.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	28.438.000,00	13.391.000,00	-	-	-	-	-	-
5	5.01	5-01.5-05.0-00.01.000	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	28.438.000,00	13.391.000,00	-	-	-	-	-	-
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.661.010.831,00	8.699.199.324,00	420.392.250,00	402.850.450,00	-	-	-	-
6	6.01			INSPEKTORAT	9.661.010.831,00	8.699.199.324,00	420.392.250,00	402.850.450,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.350.163.718,00	6.134.532.764,00	200.000.000,00	199.310.000,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.740.506.704,00	5.605.855.795,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.670.000,00	57.780.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.060.000,00	57.060.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.060.000,00	57.060.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.352.000,00	7.721.340,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.352.000,00	7.721.340,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.219.300,00	171.317.849,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.598.300,00	5.062.520,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.140.000,00	21.457.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.981.000,00	142.298.329,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.595.154,00	117.584.159,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.243.200,00	24.815.409,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.351.954,00	92.768.750,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.430.560,00	174.993.621,00	200.000.000,00	199.310.000,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.632.000,00	34.625.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.798.560,00	140.368.621,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	200.000.000,00	199.310.000,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.439.940.663,00	1.995.978.600,00	199.211.700,00	189.248.200,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.328.423.763,00	1.916.978.600,00	199.211.700,00	189.248.200,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	497.825.813,00	432.683.400,00	182.338.300,00	173.873.200,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.134.397.150,00	928.775.000,00	16.873.400,00	15.375.000,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	495.540.000,00	384.838.400,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	123.610.000,00	119.531.800,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	77.050.800,00	51.150.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	111.516.900,00	79.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	54.766.900,00	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56.750.000,00	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	870.906.450,00	568.687.960,00	21.180.550,00	14.292.250,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	-	-	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	837.060.450,00	548.348.410,00	21.180.550,00	14.292.250,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	707.582.450,00	451.907.610,00	21.180.550,00	14.292.250,00	-	-	-	-
6	6.01	6-01.0-00.0-00.01.000	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	129.478.000,00	96.440.800,00	-	-	-	-	-	-
7				UNSUR KEWILAYAHAN	51.063.967.923,00	49.337.512.948,00	4.501.586.605,00	4.374.184.290,00	-	-	-	-
7	7.01			KECAMATAN	51.063.967.923,00	49.337.512.948,00	4.501.586.605,00	4.374.184.290,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.310.352.348,00	31.816.274.255,00	105.551.300,00	48.986.400,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.591.220,00	40.103.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.880.000,00	19.145.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000,00	1.122.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.586.220,00	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.836.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.075.505.912,00	29.758.090.852,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.453.409.155,00	29.172.546.852,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	614.673.492,00	578.741.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.719.865,00	3.418.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.703.400,00	3.385.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.664.200,00	47.039.900,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.824.200,00	42.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.470.000,00	4.239.900,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.706.902,00	652.833.012,00	72.034.200,00	43.886.400,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.164.857,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
7	7.01		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.616.245,00	42.663.000,00	72.034.200,00	43.886.400,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.879.800,00	61.785.400,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.011.000,00	8.838.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.505.000,00	120.035.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.530.000,00	417.911.612,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.155,00	-	20.615.100,00	5.100.000,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	137.500,00	-	14.253.100,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.655,00	-	6.362.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.024.501.515,00	960.479.233,00	2.902.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	204.077.456,00	190.667.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.592.610,00	29.680.130,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.900,00	-	2.902.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.774.644.549,00	740.132.103,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.198.444,00	357.728.258,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.741.044,00	235.071.500,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.750.000,00	8.888.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.707.400,00	113.768.758,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.599.221.085,00	1.465.032.843,00	205.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.599.221.085,00	1.465.032.843,00	205.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	164.800.000,00	157.273.300,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.434.421.085,00	1.307.759.543,00	205.000,00	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.890.550.590,00	15.813.913.850,00	4.395.830.305,00	4.325.197.890,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.890.550.590,00	15.813.913.850,00	4.395.830.305,00	4.325.197.890,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	269.450.000,00	265.658.400,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.169.695,00	-	4.395.830.305,00	4.325.197.890,00	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.616.930.895,00	15.548.255.450,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	194.173.500,00	183.471.800,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	194.173.500,00	183.471.800,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	166.660.000,00	158.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	27.513.500,00	24.971.800,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.670.400,00	58.820.200,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.670.400,00	58.820.200,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	28.200.400,00	23.931.000,00	-	-	-	-	-	-
7	7.01		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.100.000,00	34.889.200,00	-	-	-	-	-	-
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.420.362,62	3.429.156.208,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.115.307.191,00	3.077.623.435,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.811.491,00	131.018.200,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.197.342,00	18.325.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.197.342,00	18.325.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.287.330,63	106.507.705,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.300,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.580.030,63	26.320.780,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.346.000,00	7.335.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.130.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.200.000,00	23.200.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.169.000,00	40.051.925,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.757.484,00	96.512.924,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.343.600,00	10.300.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.808.430,00	9.619.674,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.605.454,00	76.593.250,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.571.614,99	123.892.744,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.571.614,99	123.892.744,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	430.850.000,00	426.450.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	750.000.000,00	749.434.860,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	612.772.653,38	610.872.652,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	612.772.653,38	610.872.652,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.582.200,00	23.682.200,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	587.190.453,38	587.190.452,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	228.210.000,00	226.654.700,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	228.210.000,00	226.654.700,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	96.210.000,00	96.210.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	132.000.000,00	130.444.700,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	473.360.000,00	471.839.310,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	473.360.000,00	471.839.310,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	357.460.000,00	356.040.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	115.900.000,00	115.799.310,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	573.560.000,00	558.910.000,00	-	-	-	-	-	-
8	8.01	8-01.0-00.0-00.01.000	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.854.260.000,00	1.824.080.000,00	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					584.889.808.726,30	552.829.607.107,00	78.496.751.497,70	70.559.783.931,00	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran II

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	9.381.759.939,21	20.864.208.679,37
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	9.375.282.776,21	20.864.208.679,37
Sub Total	**6.477.163,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	20.736.593.109,14	9.381.759.939,21
Sub Total	**20.743.070.272,14**	**9.381.759.939,21**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(6.477.163,00)	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**20.736.593.109,14**	**9.381.759.939,21**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

Lampiran III
Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pajak Daerah-LO	40.760.661.792,00	35.127.068.778,50	5.633.593.013,50	16,04
Retribusi Daerah-LO	18.011.008.962,00	2.817.579.468,00	15.193.429.494,00	539,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.690.962.405,00	3.080.810.919,00	610.151.486,00	19,80
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	4.687.534.829,96	20.014.048.458,68	(15.326.513.628,72)	(76,58)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**67.150.167.988,96**	**61.039.507.624,18**	**6.110.660.364,78**	**10,01**
PENDAPATAN TRANSFER - LO				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil-LO	38.020.278.200,00	31.300.226.000,00	6.720.052.200,00	21,47
Dana Alokasi Umum-LO	426.951.422.834,00	424.328.577.685,00	2.622.845.149,00	0,62
Dana Alokasi Khusus-LO	73.572.431.089,00	125.006.899.829,00	(51.434.468.740,00)	(41,15)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**538.544.132.123,00**	**580.635.703.514,00**	**(42.091.571.391,00)**	**(7,25)**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO				
Insentif Fiskal-LO	20.386.711.000,00	12.933.346.000,00	7.453.365.000,00	57,63
Jumlah Transfer Insentif Fiskal	**20.386.711.000,00**	**12.933.346.000,00**	**7.453.365.000,00**	**57,63**
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lainnya	**558.930.843.123,00**	**593.569.049.514,00**	**(34.638.206.391,00)**	**(5,84)**
TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	19.159.758.362,00	27.422.280.693,00	(8.262.522.331,00)	(30,13)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**19.159.758.362,00**	**27.422.280.693,00**	**(8.262.522.331,00)**	**(30,13)**
Jumlah Pendapatan Transfer	**578.090.601.485,00**	**620.991.330.207,00**	**(42.900.728.722,00)**	**(6,91)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah-LO	16.770.493.186,00	42.265.621.477,56	(25.495.128.291,56)	(60,32)
Pendapatan Lainnya-LO	9.074.674.312,00	10.065.180.497,00	(990.506.185,00)	(9,84)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**25.845.167.498,00**	**52.330.801.974,56**	**(26.485.634.476,56)**	**(50,61)**
JUMLAH PENDAPATAN	**671.085.936.971,96**	**734.361.639.805,74**	**(63.275.702.833,78)**	**(8,62)**
BEBAN				
Beban Pegawai	296.292.707.511,00	305.393.904.402,00	(9.101.196.891,00)	(2,98)
Beban Persediaan	57.519.484.930,72	58.046.480.288,66	(526.995.357,94)	(0,91)
Beban Jasa	131.154.476.541,00	158.814.681.234,82	(27.660.204.693,82)	(17,42)
Beban Pemeliharaan	8.801.769.550,00	4.231.747.146,00	4.570.022.404,00	107,99
Beban Perjalanan Dinas	27.469.989.565,00	46.882.096.647,50	(19.412.107.082,50)	(41,41)
Beban Bunga	4.667.167.507,00	5.750.485.843,00	(1.083.318.336,00)	(18,84)
Beban Hibah	15.069.201.240,00	45.058.052.636,92	(29.988.851.396,92)	(66,56)
Beban Bantuan Sosial	471.500.000,00	4.136.000.000,00	(3.664.500.000,00)	(88,60)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	72.750.123.078,43	71.317.837.873,98	1.432.285.204,45	2,01
Beban Penyisihan Piutang	1.893.954.370,25	2.772.774.709,00	(878.820.338,75)	(31,69)
Beban Lain-lain	0,00	740.008.741,00	(740.008.741,00)	(100,00)
Beban Transfer	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH BEBAN	**616.240.374.293,40**	**703.144.069.522,88**	**(86.903.695.229,48)**	**(12,36)**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**54.845.562.678,56**	**31.217.570.282,86**	**23.627.992.395,70**	**75,69**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar - LO	(22.692.431.879,63)	(1.855.550.709,41)	(20.836.881.170,22)	1.122,95
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	905.894.716,00	(1.986.666.965,00)	2.892.561.681,00	(145,60)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(21.786.537.163,63)**	**(3.842.217.674,41)**	**(17.944.319.489,22)**	**(467,03)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**33.059.025.514,93**	**27.375.352.608,45**	**5.683.672.906,48**	**20,76**

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
POS LUAR BIASA Beban Tak Terduga	4.513.321.480,00	4.490.000.000,00	23.321.480,00	0,52
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(4.513.321.480,00)**	**(4.490.000.000,00)**	**(23.321.480,00)**	(0,52)
SURPLUS/DEFISIT-LO	**28.545.704.034,93**	**22.885.352.608,45**	**5.660.351.426,48**	**24,73**

WALI KOTA TOMOHON,

,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

Lampiran IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**1.588.841.668.862,43**	**1.614.415.467.324,61**
Surplus / Defisit - LO	28.545.704.034,93	22.885.352.608,45
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(3.336.278.836,13)	(48.459.151.070,63)
EKUITAS AKHIR	**1.614.051.094.061,23**	**1.588.841.668.862,43**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

Lampiran V

Neraca

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	20.154.955.442,14	8.693.656.425,21
Kas di Bendahara Penerimaan	713.659,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	145.537.145,00	3.697.300,00
Kas Dana BOS	63.937.275,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	11.460.000,00	79.152.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	576.304.450,00	605.254.214,00
Kas Lainnya	0,00	159.032.718,00
Piutang Pajak	22.190.655.755,00	19.894.919.957,00
-Penyisihan Piutang Pajak	(11.944.008.346,50)	(10.054.553.976,25)
-Piutang Pajak *Netto*	10.246.647.408,50	9.840.365.980,75
Piutang Retribusi	203.461.255,00	31.754.179,00
-Penyisihan Piutang Retribusi	(31.554.179,00)	(31.754.179,00)
-Piutang Retribusi *Netto*	171.907.076,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.690.962.405,00	3.080.810.919,00
-Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
-Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Netto*	3.690.962.405,00	3.080.810.919,00
Piutang Transfer	4.592.907.034,00	11.469.021.531,00
-Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
-Piutang Transfer *Netto*	4.592.907.034,00	11.469.021.531,00
Piutang Lain-lain	1.368.862.580,00	3.366.930.483,00
-Penyisihan Piutang Lain-lain	(25.500.000,00)	(21.019.000,00)
-Piutang Lain-lain *Netto*	1.343.362.580,00	3.345.911.483,00
Beban Dibayar Di Muka	1.210.467.697,52	0,00
Persediaan	11.736.036.619,66	4.256.060.569,90
Jumlah Aset Lancar	**53.945.198.791,82**	**41.532.963.140,86**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	45.432.176.291,00	40.526.281.575,00
Jumlah Investasi Permanen	**45.432.176.291,00**	**40.526.281.575,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**45.432.176.291,00**	**40.526.281.575,00**
ASET TETAP		
Tanah	415.887.649.663,08	410.218.345.663,08
Peralatan dan Mesin	332.737.257.745,98	314.529.108.272,98
Gedung dan Bangunan	562.624.321.182,29	533.637.951.366,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.438.637.211.762,68	1.388.183.721.093,86
Aset Tetap Lainnya	5.644.644.888,60	5.421.350.988,60
Konstruksi dalam Pengerjaan	15.205.302.510,08	20.316.829.939,23
Akumulasi Penyusutan	(1.351.498.146.856,26)	(1.263.378.260.052,28)
Jumlah Aset Tetap	**1.419.238.240.896,45**	**1.408.929.047.271,89**
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	123.687.565.872,15	122.718.091.303,26

Uraian	2025	2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	2.186.893.750,00	2.071.893.750,00
-Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.850.219.583,31)	(1.696.029.466,66)
-Aset Tak Berwujud *Netto*	336.674.166,69	375.864.283,34
Aset Lain-lain	130.627.277.753,42	155.967.441.443,05
-Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(62.003.727.751,11)	(61.526.877.538,98)
-Aset Lain-lain Netto	68.623.550.002,31	94.440.563.904,07
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	429.549.000,00
Jumlah Aset Lainnya	**192.647.790.041,15**	**217.964.068.490,67**
JUMLAH ASET	**1.711.263.406.020,42**	**1.708.952.360.478,42**
KEWAJIBAN		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	216.314.862,00	159.032.718,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	16.559.091.300,00	16.559.091.300,00
Pendapatan Diterima Di Muka	13.097.295,00	11.192.127,57
Utang Belanja	33.608.143.097,19	40.006.618.765,42
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**50.396.646.554,19**	**56.735.934.910,99**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	46.815.665.405,00	63.374.756.705,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**46.815.665.405,00**	**63.374.756.705,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**97.212.311.959,19**	**120.110.691.615,99**
EKUITAS		
EKUITAS	**1.614.051.094.061,23**	**1.588.841.668.862,43**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.711.263.406.020,42**	**1.708.952.360.478,42**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

Lampiran VI

Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi		
Pendapatan Pajak Daerah	38.464.925.994,00	32.408.637.666,50
Pendapatan Retribusi Daerah	18.860.687.942,00	2.817.579.468,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.080.810.919,00	2.680.085.246,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	3.875.682.713,93	18.470.173.078,66
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	12.592.550.200,00	11.496.924.000,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	25.857.277.000,00	34.209.741.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	426.951.422.834,00	424.328.577.685,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	73.572.431.089,00	125.006.899.829,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	20.386.711.000,00	12.933.346.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.035.872.859,00	28.364.838.292,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.165.652.475,00	7.991.355.070,00
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	**659.844.025.025,93**	**700.708.157.335,16**
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
Belanja Pegawai	301.200.368.052,00	294.191.910.833,00
Belanja Barang dan Jasa	230.514.032.515,00	260.092.565.976,32
Belanja Bunga	4.667.167.507,00	5.750.485.843,00
Belanja Hibah	15.069.201.240,00	45.015.997.813,00
Belanja Bantuan Sosial	1.378.837.793,00	4.136.000.000,00
Belanja Tak Terduga	4.581.481.655,00	4.490.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	150.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	**557.561.088.762,00**	**613.676.960.465,32**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**102.282.936.263,93**	**87.031.196.869,84**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	197.249.300,00	233.893.100,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	**197.249.300,00**	**233.893.100,00**
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
Belanja Modal Tanah	416.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.516.328.111,00	7.364.439.874,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	16.441.807.851,00	45.044.739.743,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.497.951.569,00	25.092.690.093,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	687.696.400,00	536.827.700,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	149.750.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00

URAIAN	2025	2024
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	**74.559.783.931,00**	**82.188.447.410,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(74.362.534.631,00)**	**(81.954.554.310,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	16.559.091.300,00	16.559.091.300,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan	16.559.091.300,00	16.559.091.300,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(16.559.091.300,00)**	**(16.559.091.300,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.070.389.273,00	42.112.903.669,00
Penerimaan Sisa UP dari Bendahara Pengeluaran	75.220.119,00	125.956.315,50
Penerimaan Sisa TU dari Bendahara Pengeluaran	608.359.794,00	2.065.206.733,00
Penerbitan SP2D GU Nihil	6.110.319.881,00	5.354.943.684,50
Penerbitan SP2D TU Nihil	19.754.748.214,00	22.891.616.917,00
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris	**64.619.037.281,00**	**72.550.627.319,00**
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris		
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.229.421.991,00	42.181.063.844,00
Penerbitan SP2D UP	6.185.540.000,00	5.480.900.000,00
Penerbitan SP2D TU	20.363.108.008,00	24.956.823.650,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris	**64.778.069.999,00**	**72.618.787.494,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(159.032.718,00)**	**(68.160.175,00)**
Kenaikan/Penurunan Kas	**11.202.277.614,93**	**(11.550.608.915,16)**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	**9.540.792.657,21**	**20.932.368.854,37**
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	**20.743.070.272,14**	**9.381.759.939,21**
Koreksi SiLPA	68.396.975,00	0,00
Kas di BLUD	141.440.724,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	159.032.718,00
Saldo Akhir Kas	**20.952.907.971,14**	**9.540.792.657,21**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

Lampiran VII

Catatan atas Laporan Keuangan

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	**Pendahuluan**
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II	**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	**Kebijakan Akuntansi**
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V	**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
	5.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1.1 Pendapatan – LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah
BAB VI	**Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah**
BAB VII	**Penutup**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tomohon harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), di mana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan Laporan Pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Tomohon (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran;

(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

(a) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;

(c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

(g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

(h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

(i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

(j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

(k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

(l) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(m) Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

(n) Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

(o) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 30 Agustus 2021;

(p) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Oktober 2024;

(q) Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Oktober 2024;

(r) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 8 Oktober 2024; dan

(s) Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pergeseran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Oktober 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan;

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kondisi Umum, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Kondisi Umum

2.2. Ekonomi Makro

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.5. Alokasi Anggaran Prioritas

2.6. Realisasi *Mandatory Spending*

2.7. Program Prioritas Nasional

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.A Pendapatan-LRA

5.1.B Belanja

5.1.C Transfer

5.1.D Pembiayaan

5.2. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Perubahan SAL

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos Neraca

5.3.A Aset

5.3.B Kewajiban

5.3.C Ekuitas

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Operasional

5.4.A Pendapatan-LO

5.4.B Beban

5.4.C Kegiatan Non-Operasional

5.4.D Pos Luar Biasa

5.5. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non-Keuangan

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KONDISI UMUM, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Umum

Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Tomohon dalam bahasa Tombulu berasal dari kata “Tou mu'ung”. Tomohon merupakan salah satu dari delapan etnis asli Minahasa dan termasuk dalam sub etnis Tombulu. Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Sebelum Tahun 2003, Kota Tomohon merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah Kota Tomohon menjadi daerah otonom (Kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003.

Pada Tahun 2004 terbentuklah Lembaga Legislatif Kota Tomohon berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Kemudian pada Tahun 2005 ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon tanggal 27 Januari 2003.

Letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24’18,479” Lintang Utara dan 124°43’52,457” Bujur Timur, 1°14’33,154” Lintang Utara 124°54’34,191” Bujur Timur. Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl). Suhu di Kota Tomohon pada waktu siang hari mampu mencapai 30 derajat Celsius dan 23-24 derajat Celsius pada malam hari. Kota Tomohon memiliki suhu yang berhawa sejuk karena berada di wilayah pegunungan. Selain kondisi wilayah berbukit, Kota Tomohon memiliki empat gunung yang mengitari wilayah pemukiman penduduk, yaitu Gunung Lokon (1.689 m) dengan tipe gunung berapi aktif, Gunung Mahawu (1.311 m), Gunung Tampusu (1.500 m), dan Gunung Tatawiran (1.474 m).

Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari 44 Kelurahan di 5 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 169,10 km^2 atau 16,910 Ha. Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tomohon Utara (60,06 Km^2) dan Kecamatan Tomohon Timur sebagai Wilayah Kecamatan yang terkecil (13,99 Km^2).

Tabel 2.1.1 Nama Kecamatan, Letak Kantor Pemerintahan, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Tomohon Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Letak Kantor Pemerintahan	Jumlah Kelurahan	Luas	
				Km²	%
1	Kecamatan Tomohon Utara	Kel. Kakaskasen Tiga	10	60,06	35
2	Kecamatan Tomohon Selatan	Kel. Walian	12	34,70	21
3	Kecamatan Tomohon Barat	Kel. Woloan Satu Utara	8	43,84	26
4	Kecamatan Tomohon Timur	Kel. Paslaten Satu	5	13,99	8
5	Kecamatan Tomohon Tengah	Kel. Talete Dua	9	16,51	10
Jumlah			**44**	**169,10**	**100**

Sumber : Data Olahan sebagaimana Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara

Batas administrasi di masing-masing kecamatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Batas Wilayah Kota Tomohon

BATAS	WILAYAH
Sebelah Utara	Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa
Sebelah Selatan	Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa
Sebelah Barat	Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa
Sebelah Timur	Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Tomohon

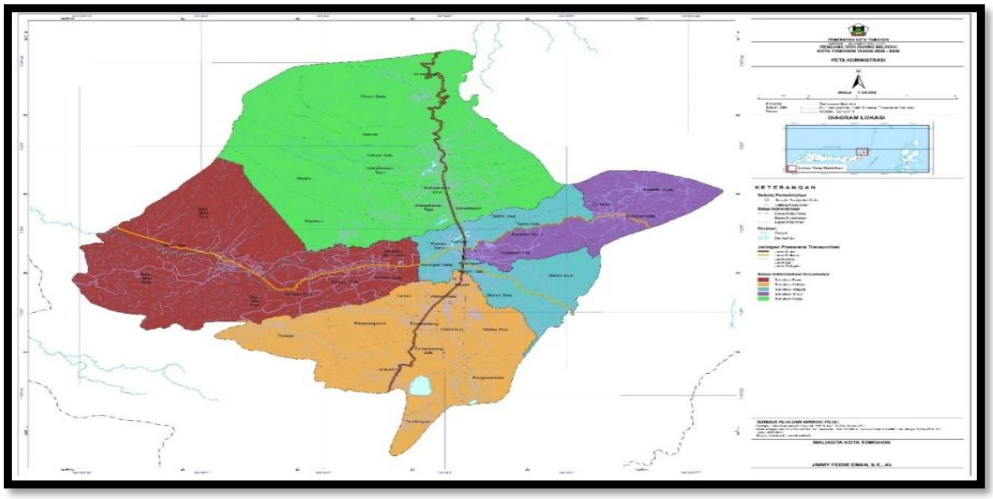

Sumber : Peta Administrasi Kota Tomohon sebagaimana data olahan berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019)

Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Gambar 2 Jarak Kota Tomohon dengan Daerah Lainnya di Sulawesi Utara

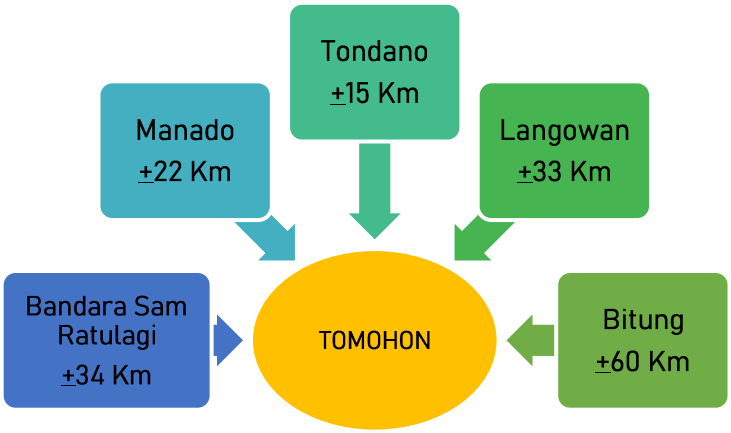

Posisi Kota Tomohon sangat strategis dalam konteks regional Sulawesi dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado sebagai salah satu Pusat Kegiatan

Nasional (PKN). Dari segi kebangkitan perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan Internasional Bitung dan Jalan Tol Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulawesi Utara akan memberi dampak bagi perekonomian Masyarakat.

Adapun beberapa objek wisata yang ada di Kota Tomohon yaitu wisata budaya, wisata pertanian, wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata belanja dan wisata buatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting sebagai lokomotif penggerak untuk mendorong dan menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan yang maksimal di Kota Tomohon.

2.1.1 Jumlah Penduduk Kota Tomohon

Penduduk Tomohon berdasarkan hasil Proyeksi Interim Tahun 2025 ada sebanyak 104.260 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2024 penduduk Tomohon mengalami peningkatan.

Tabel 2.1.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Tahun 2024-2025 (Naik/Turun)	
		2023	2024	2025		
1	Kecamatan Tomohon Selatan	25.903	26.310	26.507	197	Naik
2	Kecamatan Tomohon Tengah	18.878	18.938	18.924	(14)	Turun
3	Kecamatan Tomohon Timur	11.158	11.248	11.297	49	Naik
4	Kecamatan Tomohon Barat	17.479	17.622	17.704	82	Naik
5	Kecamatan Tomohon Utara	29.306	29.694	29.828	134	Naik
Jumlah		**102.724**	**103.812**	**104.260**	**448**	**Naik**

Sumber : BPS Kota Tomohon

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Tomohon Tahun 2025 tertinggi di Kecamatan Tomohon Selatan, dan terendah di Kecamatan Tomohon Tengah.

Tabel 2.1.1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Tomohon Tahun 2025

No.	Nama Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
1	Kecamatan Tomohon Selatan	25,42	763,89
2	Kecamatan Tomohon Tengah	18,15	1.146,21
3	Kecamatan Tomohon Timur	10,84	807,51
4	Kecamatan Tomohon Barat	16,98	403,83
5	Kecamatan Tomohon Utara	28,61	496,64
Jumlah		**100**	**3.618,08**

Sumber : BPS Kota Tomohon

Rasio kepadatan penduduk *(Population Density Ratio)* merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Rasio kepadatan penduduk, yaitu angka yang menyatakan berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu dan untuk kepadatan penduduk Kota Tomohon Tahun 2025 adalah 3.618,08 per km².

Kepadatan jumlah penduduk terbesar di Kota Tomohon Tahun 2025 terdapat di Kecamatan Tomohon Tengah yaitu sebesar 1.146,21 per km², sedangkan kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 403,83 per km².

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,86% Tahun 2025;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,80% Tahun 2025;
c. Gini Ratio sebesar 0,359 Tahun 2025;

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,65 Tahun 2025;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,41% Tahun 2025; dan
f. Tingkat Inflasi sebesar 0,28% Tahun 2025.

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Tomohon

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024–Tahun 2025 Naik/turun	
1	Kota Tomohon (%)	5,60%	5,38%	4,86%	0,52	Turun
2	Kota Tomohon	6,24	6,07	5,55	0,52	Turun
	(Ribu Orang)	(Ribu Orang)	(Ribu Orang)	(Ribu Orang)	(Ribu Orang)	
3	Provinsi Sulut (%)	7,38%	7,25%	6,62%	0,63	Turun
4	Peringkat Provinsi	2	2	1		

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Persentase penduduk miskin Kota Tomohon pada Tahun 2025 sebesar 4.86% mengalami penurunan di mana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 5.38% atau turun sebesar 0,52%. Persentase

penduduk miskin Kota Tomohon masih di bawah Provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk lebih menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024 –Tahun 2025 Naik/turun	
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota	0,89	0,80	0,69	0,11	Turun
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,09	1,10	1,11	0,01	Naik
3	Peringkat Proivinsi	5	6	3		

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Tabel 2.2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024–Tahun 2025 Naik/turun	
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota	0,21	0,22	0,12	0,10	Turun
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,26	0,24	0,26	0,02	Naik
3	Peringkat Provinsi	6	8	4		

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

2.2.2 Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar 7,80% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024 –Tahun 2025 Naik/turun (%)	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota	8,52	7,79	7,80	0,01	Naik
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	6,10	5,85	5,78	0,07	Turun
3	Peringkat Provinsi	14	14	14		

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tomohon Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 7,80%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 7,79% atau mengalami kenaikan 0,01%.

2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Realisasi pencapaian *Gini Ratio* sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.3 *Gini Ratio* Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun	
1	Tingkat Kota	0,339	0,336	0,359	0,023	Turun
2	Tingkat Provinsi	0,370	0,360	0,343	0,017	Naik
3	Peringkat Provinsi	6	8	3		

Sumber Dokumen: BPS Sulawesi Utara (data sementara)

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Tomohon diukur dari *Gini Ratio* adalah sebesar 0,359. Angka ini naik 0,023 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2024 sebesar 0,336.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan
d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Realisasi pencapaian IPM Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar 80,65 dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tomohon

IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024 - 2025 Naik/Turun
Kota Tomohon	79,29	80,06	80,65	Naik
Provinsi Sulawesi Utara	75,04	75,68	76,32	Naik
Peringkat Provinsi	2	2	2	

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon (data sementara)

Realisasi pencapaian IPM Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar 80,65 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 80,06 poin mengalami kenaikan sebesar 0,59 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama

Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tomohon berada pada peringkat kedua se-Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024 - 2025 Naik/Turun
1	PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	3.557,70	3.726,49	3.927,94	Naik
2	Laju Pertumbuhan (%)	5,32%	4,74%	5,41%	Naik

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

Laju pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Kota Tomohon mengalami kenaikan 0,67% pada Tahun 2025 menjadi sebesar 5,41% yang sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar 4,74%.

Struktur perekonomian Kota Tomohon dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.5.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	763,8	843,16	934,99
B	Pertambangan dan Penggalian	499,1	531,02	583,22
C	Industri Pengolahan	355,8	382,67	433,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,0	13,05	13,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,6	21,07	23,92
F	Konstruksi	1.109,3	1.130,77	1.170,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627,2	691,70	753,41
H	Transportasi dan Pergudangan	322,0	357,74	385,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,6	120,76	147,16
J	Informasi dan Komunikasi	210,2	232,29	254,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	99,0	104,25	111,18
L	Real Estate	199,7	217,81	240,53
MN	Jasa Perusahaan	2,9	3,25	3,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345,0	379,11	396,73
P	Jasa Pendidikan	166,3	190,47	206,52
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	472,6	507,03	559,99
RSTU	Jasa lainnya	134,5	153,14	168,19
	PDRB	**5.447,60**	**5.879,29**	**6.386,83**

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

Tabel 2.2.5.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	481,5	508,95	541,87
B	Pertambangan dan Penggalian	326,8	331,79	358,17
C	Industri Pengolahan	228,4	239,11	259,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,3	11,78	12,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,0	16,46	17,52
F	Konstruksi	768,1	775,80	775,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	406,3	431,26	451,45
H	Transportasi dan Pergudangan	153,2	165,15	173,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,9	78,82	94,25
J	Informasi dan Komunikasi	162,3	173,60	187,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	65,8	68,49	71,06
L	Real Estate	141,7	149,41	158,76
MN	Jasa Perusahaan	1,6	1,76	1,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	192,4	211,40	219,93
P	Jasa Pendidikan	100,3	109,37	115,47
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	339,3	353,09	381,02
RSTU	Jasa lainnya	90,0	100,25	107,88
	PDRB	**3.557,90**	**3.726,49**	**3.927,94**

Sumber Dokumen: BPS Kota Tomohon

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Tomohon dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang

menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu:

a. Inflasi ringan *(Creeping Inflation)* yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
b. Inflasi Sedang *(Galloping Inflation)* inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
c. Inflasi Berat *(High Inflation)* kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
d. Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa tingkat inflasi Tahun 2025 yakni Kota Manado (*month-to-month*) pada bulan Desember sebesar 0,28% atau masuk pada kategori inflasi ringan. Terjadi kenaikan tingkat Inflasi dibandingkan tingkat inflasi pada bulan Desember Tahun 2024 sebesar -0,04%.

2.3 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah.

Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh Kota Tomohon dalam rangka mengantisipasi kondisi Tahun 2025 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, kebijakan efisiensi belanja, dan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan sebagai berikut:

2.3.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan peningkatan pendapatan Kota Tomohon melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menitikberatkan pada (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) mudah diterapkan dan dilaksanakan; (e) peningkatan koordinasi dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mengalami penurunan di mana pada Tahun Anggaran 2025 realisasi pendapatan Kota Tomohon adalah sebesar Rp660.041.274.325,93 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp700.942.050.435,16.

Terkait realisasi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

2.3.2 Kebijakan Efisiensi Belanja

Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja.

Pada sektor Belanja Daerah ini, dana yang disediakan untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp669.215.341.767,21.

Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung

peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan, komunikasi dan sektor jasa serta sektor konstruksi.

Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2.3.3 Kebijakan Penentuan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber Penerimaan Pembiayaan untuk Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp9.381.759.939,21 dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Kota Tomohon berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp16.559.091.300,00.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat dioptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran apabila terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.4.1 Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun

2025 sebesar Rp680.553.581.828,0 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp76.508.899.806,00 Pendapatan Transfer (berupa Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp593.406.248.022,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.638.434.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024 sebesar Rp722.903.035.428,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp73.293.699.632,00 Pendapatan Transfer (berupa Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp638.546.775.796,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp11.062.560.000,00.

2.4.2 Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp660.041.274.325,93 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp64.479.356.868,93 Pendapatan Transfer sebesar Rp585.396.264.982,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10.165.652.475,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp700.942.050.435,16 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp56.610.368.559,16 Pendapatan Transfer sebesar Rp636.340.326.806,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.991.355.070,00.

2.4.3 Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2025 sebesar Rp669.215.341.767,21 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp584.889.808.726,30, Belanja Modal sebesar Rp78.496.751.497,70, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.828.781.543,21. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2024 sebesar Rp723.208.152.807,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp636.379.050.120,80, Belanja Modal sebesar Rp81.235.588.018,25 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.593.514.667,95.

2.4.4 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar Rp627.970.872.693,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp552.829.607.107,00, Belanja Modal sebesar Rp70.559.783.931,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.581.481.655,00. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024 adalah sebesar Rp691.865.407.875,32 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp609.186.960.465,32, Belanja Modal sebesar Rp78.188.447.410,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.490.000.000,00.

2.4.5 Anggaran Transfer

Anggaran Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar Rp150.000.000,00. Sedangkan Anggaran Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024 tidak dianggarkan.

2.4.6 Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 adalah sebesar Rp150.000.000,00. Sedangkan Realisasi Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024 tidak ada.

Secara ringkas realisasi APBD Kota Tomohon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	**Pendapatan**	**680.553.581.828,00**	**660.041.274.325,93**	**700.942.050.435,16**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	76.508.899.806,00	64.479.356.868,93	56.610.368.559,16
1.2	Pendapatan Transfer	593.406.248.022,00	585.396.264.982,00	636.340.326.806,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	7.991.355.070,00
2	**Belanja**	**669.215.341.767,21**	**627.970.872.693,00**	**691.865.407.875,32**
2.1	Belanja Operasi	584.889.808.726,30	552.829.607.107,00	609.186.960.465,32
2.2	Belanja Modal	78.496.751.497,70	70.559.783.931,00	78.188.447.410,00
2.3	Belanja Tak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	4.490.000.000,00
3	**Transfer**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
3.1	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	Surplus / Defisit	**11.188.240.060,79**	**31.920.401.632,93**	**9.076.642.559,84**
4	**Pembiayaan**			
4	Penerimaan Pembiayaan Daerah	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	20.864.208.679,37
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.570.000.000,00	20.559.091.300,00	20.559.091.300,00
	Pembiayaan Netto	**(11.188.240.060,79)**	**(11.183.808.523,79)**	**305.117.379,37**
	SILPA	**0,00**	**20.736.593.109,14**	**9.381.759.939,21**

Secara khusus capaian target dan realisasi APBD Kota Tomohon per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun 2025.

2.5 Alokasi Anggaran Prioritas

Alokasi Anggaran Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Tomohon telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2025 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Alokasi Anggaran Prioritas

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	APBD 2025	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	22.643.995.503,00	3,38
2	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	19.890.827.905,00	2,97
3	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PARIWISATA	14.879.878.977,58	2,22
4	PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH	57.083.097.303,91	8,53
5	STABILITAS DAERAH YANG TERJAMIN	10.093.548.670,00	1,51
6	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	35.144.097.881,00	5,25
7	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA, TOMOHON *SMART CITY* DAN PELAYANAN PUBLIK	144.946.641.073,09	21,66
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	**304.682.087.313,58**	**45,53**
	Total Belanja Daerah	**669.215.341.767,21**	

2.6 Realisasi *Mandatory Spending*

Sehubungan dengan Realisasi Anggaran *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Tomohon, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Pendidikan

Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.1 Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025			
		Anggaran		Realisasi	
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		**120.596.174.153,00**		**115.768.121.339,00**
	1) Belanja Operasi:	**118.578.728.028,00**		**113.889.290.543,00**	
	a. belanja pegawai;	91.561.759.500,00		90.250.068.699,00	
	b. belanja barang dan jasa;	15.378.018.528,00		12.704.655.456,00	
	c. belanja hibah;	11.038.950.000,00		10.934.566.388,00	
	d. belanja bantuan sosial.	600.000.000,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	**2.017.446.125,00**		**1.878.830.796,00**	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		**286.359.100,00**		**247.984.621,00**
	1) Belanja Operasi:	**286.359.100,00**		**247.984.621,00**	
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	
	b. belanja barang dan jasa;	286.359.100,00		247.984.621,00	
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		**821.946.007,00**		**166.101.036,00**
	1) Belanja Operasi:	**802.018.177,00**		**146.232.036,00**	
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	
	b. belanja barang dan jasa;	802.018.177,00		146.232.036,00	
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	**19.927.830,00**		**19.869.000,00**	
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		**4.655.053.854,00**		**4.202.673.849,00**
	1) Belanja Operasi:	**4.238.574.654,00**		**3.795.734.849,00**	
	a. belanja pegawai;	2.038.185.900,00		2.032.367.999,00	
	b. belanja barang dan jasa;	1.600.388.754,00		1.163.366.850,00	
	c. belanja hibah;	600.000.000,00		600.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	**416.479.200,00**		**406.939.000,00**	
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Keb		**11.011.657.153,00**		**10.467.658.081,00**
	1) Belanja Transfer:	**150.000.000,00**		**150.000.000,00**	
	Belanja bantuan keuangan...	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2) Sub Kegiatan..... pada SKPD Dinas....	**10.861.657.153,00**		**10.317.658.081,00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.000.000,00		10.945.000,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.742.628.000,00		1.689.809.955,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	126.860.341,00		92.889.500,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000,00		36.880.000,00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	89.799.900,00		79.994.000,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	35.820.100,00		0,00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.877.000,00		120.684.800,00	

No	Komponen Perhitungan	APBD 2025			
		Anggaran		Realisasi	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	579.048.750,00		505.585.952,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00		0,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	250.000,00		0,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00		42.999.800,00	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000,00		744.611.337,00	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10.964.400,00		8.265.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00		35.663.400,00	
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	9.000.000,00		7.125.000,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000,00		22.338.000,00	
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000,00		37.181.200,00	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.125.000,00		0,00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41.381.552,00		40.775.500,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.000.000,00		239.985.100,00	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000,00		597.479.650,00	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	214.996.800,00		214.536.800,00	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	225.037.300,00		223.307.838,00	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	249.825.400,00		249.640.000,00	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25.000.000,00		24.787.210,00	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	143.001.250,00		129.075.179,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00		0,00	
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.269.145.000,00		4.253.800.000,00	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.727.100,00		60.386.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	41.201.300,00		19.078.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.518.350,00		80.399.000,00	
	Pembentukan Paskibraka	750.000.000,00		749.434.860,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		137.371.190.267,00		130.852.538.926,00
3.	Total Belanja Daerah		669.215.341.767,21		627.970.872.693,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		20,53		20,84

Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp137.371.190.267,00 dengan realisasi sebesar Rp130.852.538.926,00. Persentase Realisasi Fungsi Pendidikan dibandingkan dengan Total Realisasi Belanja Daerah Rp627.970.872.693,00 adalah sebesar 20,84%.

b. Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.2 Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)		Realiasasi (Rp)	
1	a) Belanja Modal		78.496.751.497,70		70.544.306.831,00
	1) Tanah	625.000.000,00		416.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95		13.517.015.111,00	
	3) Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75		16.441.807.851,00	
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.823.216.984,00		39.497.951.569,00	
	5) Aset tetap lainnya	1.132.081.725,00		671.532.300,00	
	6) Aset lainnya	115.000.000,00		0,00	
	b) Belanja pemeliharaan	7.490.295.379,60	7.490.295.379,60	6.944.507.989,00	6.944.507.989,00
2	a) Belanja Hibah		15.263.584.853,38		15.020.094.840,00
	b) Belanja Bantuan Sosial		2.400.329.223,00		1.378.837.793,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan		0,00		0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		103.650.960.953,68		93.887.747.453,00
4	Total Belanja Daerah		669.215.341.767,21		627.970.872.693,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:				
	a) Belanja bagi hasil		0,00		0,00
	b) Bantuan keuangan		150.000.000,00		150.000.000,00
5	Jumlah (a+b)		150.000.000,00		150.000.000,00
6	Selisih (4-5)		669.065.341.767,21		627.820.872.693,00
7	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)		267.626.136.706,88		251.128.349.077,20
8	Persentase Belanja Infrastruktur		15,49		14,95

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang sesuai dengan Lampiran Huruf G tentang Hal Khusus Lainnya angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Daerah Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp103.650.960.953,68 dan terealisasi sebesar Rp93.887.747.453,00. Secara Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sebesar 14,95% atau belum mencapai Alokasi Minimal sebesar 40% sebagaimana ketentuan dimaksud diatas.

Namun demikian Lampiran Huruf G tentang Hal Khusus Lainnya angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada huruf a menjelaskan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga batas akhir Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Untuk itu sampai dengan batas waktu yang diamanatkan Peraturan tersebut diatas, Pemerintah Kota Tomohon akan berupaya untuk memenuhi alokasi minimal untuk Belanja Infrastruktur untuk Pelayanan Publik.

c. Realisasi Anggaran Fungsi Pengawasan

Realisasi Anggaran Fungsi Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.3 Realisasi Anggaran Pengawasan

No	Komponen Perhitungan	2025			
		Anggaran		Realisasi	
1.	a. Urusan bidang Pengawasan:		4.399.566.377,00		3.553.973.979,00
	1) Belanja Operasi:	3.979.174.127,00		3.151.123.529,00	
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	
	b. belanja barang dan jasa;	3.979.174.127,00		3.151.123.529,00	
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	420.392.250,00		402.850.450,00	
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		150.000.000,00		150.000.000,00
	1) Belanja Transfer:	150.000.000,00		150.000.000,00	
	Belanja bantuan keuangan…	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD ….	0,00		0,00	
	dst....				
2.	Anggaran Pengawasan (a+b)		4.549.566.377,00		3.703.973.979,00
3.	Total Belanja Daerah		669.215.341.767,21		627.970.872.693,00
	Rasio anggaran pengawasan (2:3) x 100%		0,68		0,59

Anggaran Fungsi Pengawasan sebesar Rp4.399.566.377,00 dengan realisasi sebesar Rp3.703.973.979,00. Persentase Realisasi Fungsi Pengawasan dibandingkan dengan Total Realisasi Belanja Daerah Rp627.970.872.693,00 adalah sebesar 0,59%.

2.7 Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional untuk peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program yang meliputi: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1); Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2); (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3); Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4); Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5); Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6); Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan anggaran sebesar Rp145.297.942.957,71 dengan realisasi sebesar Rp138.826.700.974,09 atau 95,55% dengan rincian program dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional disajikan pada **Lampiran 1.1** Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp680.553.581.828,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp76.508.899.806,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp593.406.248.022,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.638.434.000,00.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp660.041.274.325,93 (tercapai 96,99%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp64.479.356.868,93 (tercapai 84,28%), Pendapatan Transfer sebesar Rp585.396.264.982,00 (tercapai 98,65%) dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.165.652.475,00 (tercapai 95,56%).

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp669.215.341.767,21 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp584.889.808.726,30, Belanja Modal sebesar Rp78.496.751.497,70, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.828.781.543,21.

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp627.970.872.693,00 (tercapai 93,84%) yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp552.829.607.107,00 (tercapai 94,52%) realisasi Belanja Modal sebesar Rp70.559.783.931,00 (tercapai 89,89%), realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.581.481.655,00 (tercapai 78,60 %).

Anggaran Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000,00.

Sedangkan realisasi Transfer Daerah Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000,00 (tercapai 100%).

Dengan demikian terjadi Surplus Rp31.920.401.632,93 dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp660.041.274.325,93, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp627.970.872.693,00 dan realisasi Transfer Daerah sebesar Rp150.000.000,00. Sedangkan realisasi Pembiayaan (Rp11.183.808.523,79) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.375.282.776,21 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp20.559.091.300,00.

3.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.508.899.806,00 dengan realisasi sebesar Rp64.479.356.868,93 (tercapai 84,28%). Capaian PAD sebagai salah satu dari komponen Pendapatan yang terendah jika dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pelaksanaan pengelolaan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku pengelola Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan untuk Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata Daerah.

Capaian PAD yang belum optimal tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah pengelolanya. Adapun secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- Belum Optimalnya Pendataan dan Pemutakhiran Basis Data Potensi PAD
  Basis data terkait objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah belum sepenuhnya akurat dan mutakhir, sehingga masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal.
- Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah masih relatif rendah, yang berdampak pada keterlambatan maupun tunggakan pembayaran.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia(SDM)

  Ketersediaan dan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah dalam hal pemungutan, pengawasan, serta pengelolaan administrasi pendapatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

  Sistem pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah dibeberapa sektor masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi secara digital, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan.
- Belum Maksimalnya Pengawasan dan Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

  Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan, termasuk penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh.
- Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah yang Belum Optimal

  Pengelolaan potensi PAD yang melibatkan beberapa perangkat daerah memerlukan koordinasi dan integrasi data yang lebih baik guna mendukung optimalisasi pemungutan pendapatan daerah.
- Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Aktivitas Usaha Masyarakat

  Fluktuasi kondisi ekonomi daerah turut mempengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota Tomohon telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Selain itu Wali Kota Tomohon juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja/unit kerja pada Pemerintah Kota Tomohon selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Entitas Pelaporan adalah unit kerja pada Pemerintah Kota Tomohon yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan

adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis Akuntansi

   Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

2. Prinsip Nilai Perolehan

   Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

   Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasi melalui APBD selama tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau untuk membayar utang.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

   Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu di mana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

   Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan dan semesteran.

6. Prinsip Konsistensi

   Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Komponen–Komponen Laporan Keuangan

Komponen–komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/PPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti, Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

e) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional (bila ada); Pos luar biasa (bila ada); dan Surplus/defisit-LO.

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos Ekuitas awal; Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan Ekuitas akhir.

g) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan beban).

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau

SP2D Nihil.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari beban operasi, beban transfer, beban non-operasional dan beban luar biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

e. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
    a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
    b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer:

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.

h. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak kooperatif; dan/atau wajib pajak likuid; dan/atau wajib pajak tidak mengajukan keberatan;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak mengajukan keberatan/banding;
- Kualitas Piutang Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun; dan/atau wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas;
- Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 4 tahun; dan/atau wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

- *Self assessment*, masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan; dan
- *Official assessment*, masyarakat akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pada saat Wajib Pajak telah menerima hasil perhitungan otoritas perpajakan maka Wajib Pajak menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh otoritas perpajakan.

Tabel 4.1 Penyisihan Piutang Menurut Umur Piutang

No	JENIS PIUTANG	UMUR PIUTANG			
		< 1 Tahun	≥ 1 s.d. 2 Tahun	> 2 s.d. 4 Tahun	> 4 Tahun
1.	Piutang Pendapatan	0%	25%	50%	100%

i. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan/*Stock Opname*.

j. Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

3. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

4. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

   a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

   b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.

   c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

   Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

   a. Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

      Investasi jangka Panjang Non-Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

   b. Investasi Jangka Panjang Permanen

      Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

6. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

7. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

    a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

    b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

8. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

9. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

    a. Pengukuran investasi jangka pendek

        Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

        1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

        2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

10. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

11. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

12. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

13. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

14. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

    a. Metode biaya

       Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

    b. Metode ekuitas

       Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

       Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

    c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

       Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

       Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

       Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah

yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh Tempo pada Periode 1 s/d 2 Tahun	25%
2	Jatuh Tempo pada Periode 2 s/d 3 Tahun	50%
3	Jatuh Tempo pada Periode 3 s/d 4 Tahun	75%
4	Jatuh Tempo pada Periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dinilai dengan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap diklasifikasi berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus adalah metode penyusutan di mana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Aset Tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 dihitung secara tahunan mulai tahun perolehan. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebagai akumulasi penyusutan. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh pada Tahun 2021 dan seterusnya dilakukan bulanan, sedangkan penyajian laporan penyusutan dilakukan semesteran.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

l. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan piutang penjualan

angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

n. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

o. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

p. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

q. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon *Unudited* Tahun 2025 ini belum ada inventarisasi/identifikasi aset tetap yang tergolong dalam Properti Investasi karena Kebijakan Akuntansi Properti Investasi baru ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Mei 2025 sehingga saldo Properti Investasi pada Neraca baru disajikan untuk Tahun 2025.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan

kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya. Tujuan ditetapkannya pedoman kapitalisasi adalah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon.

b. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Tomohon adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Lampiran I terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Kota Tomohon Tahun 2025 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan menurut SAP terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi Belanja adalah Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan ke dalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

5.1.A Pendapatan

Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Tomohon Tahun 2025, dapat dilihat pada diagram dan tabel sebagai berikut:

Diagram 5.1 Realisasi Pendapatan–LRA Tahun 2025



Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	**PENDAPATAN–LRA**	**680.553.581.828,00**	**660.041.274.325,93**	**96,99**	**700.942.050.435,16**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA**	**76.508.899.806,00**	**64.479.356.868,93**	**84,28**	**56.610.368.559,16**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah–LRA	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	**89,50**	32.408.637.666,50
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah–LRA	25.243.145.000,00	18.860.687.942,00	**74,72**	2.817.579.468,00
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan–LRA	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	**81,07**	2.680.085.246,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah–LRA	4.490.169.160,00	4.072.932.013,93	**90,71**	18.704.066.178,66
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER–LRA**	**593.406.248.022,00**	**585.396.264.982,00**	**98,65**	**636.340.326.806,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	543.512.427.000,00	538.973.681.123,00	**99,16**	595.042.142.514,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal-LRA	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	**100,00**	12.933.346.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	**88,24**	28.364.838.292,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA**	**10.638.434.000,00**	**10.165.652.475,00**	**95,56**	**7.991.355.070,00**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	**95,56**	7.991.355.070,00

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos pendapatan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LRA sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp64.479.356.868,93 atau 84,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.508.899.806,00 dengan rincian:

   1) Pendapatan Pajak Daerah–LRA sebesar Rp38.464.925.994,00 atau 89,50 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.975.585.646,00.

Pendapatan Pajak Daerah–LRA menurut objek pendapatan Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Pajak Daerah–LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pajak Hotel–LRA	0,00	0,00	-
2	Pajak Restoran–LRA	0,00	0,00	-
3	Pajak Hiburan–LRA	0,00	0,00	-
4	Pajak Reklame–LRA	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	109,70
5	Pajak Penerangan Jalan–LRA	0,00	0,00	-
6	Pajak Parkir–LRA	0,00	0,00	-
7	Pajak Air Tanah–LRA	34.456.800,00	50.877.763,00	147,66
8	Pajak Sarang Burung Walet–LRA	4.366.000,00	4.400.000,00	100,78
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LRA	583.848.497,00	588.680.000,00	100,83
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)–LRA	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	82,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)–LRA	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	106,74
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.500.262.166,00	17.373.392.882,00	99,28
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	68,05
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	74,91
	Jumlah	**42.975.585.646,00**	**38.464.925.994,00**	**89,50**

Pendapatan Pajak Daerah–LRA menurut rincian objek Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah–LRA per Rincian Objek Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Pajak Hotel–LRA**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1.018.059.869,00**
	Pajak Hotel–LRA	0,00	0,00	-	1.018.059.869,00
2	**Pajak Restoran–LRA**	**0,00**	**0,00**	**-**	**5.080.633.980,00**
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00		-	5.080.633.980,00
3	**Pajak Hiburan–LRA**	**0,00**	**0,00**	**-**	**196.608.950,00**
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	-	0,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	-	18.380.000,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	-	178.228.950,00
4	**Pajak Reklame–LRA**	**2.261.187.250,00**	**2.480.435.375,00**	**109,70**	**2.293.104.684,00**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	109,70	1.875.900.000,00
	Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	-	0,00
	Pajak Reklame Melekat/Sticker	0,00	0,00	-	0,00
	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	-	0,00
	Pajak Reklame Peragaan	0,00	0,00	-	417.204.684,00
5	**Pajak Penerangan Jalan–LRA**	**0,00**	**0,00**	**-**	**5.850.030.421,00**
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	-	5.850.030.421,00
6	**Pajak Parkir–LRA**	**0,00**	**0,00**	**-**	**211.946.594,00**
	Pajak Parkir–LRA	0,00	0,00	-	211.946.594,00
7	**Pajak Air Tanah–LRA**	**34.456.800,00**	**50.877.763,00**	147,66	**19.299.000,00**
	Pajak Air Tanah–LRA	34.456.800,00	50.877.763,00	147,66	19.299.000,00
8	**Pajak Sarang Burung Walet–LRA**	**4.366.000,00**	**4.400.000,00**	100,78	**4.500.000,00**
	Pajak Sarang Burung Walet–LRA	4.366.000,00	4.400.000,00	100,78	4.500.000,00
9	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LRA**	**583.848.497,00**	**588.680.000,00**	100,83	**624.001.638,00**
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LRA	583.848.497,00	588.680.000,00	100,83	624.001.638,00
10	**Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)–LRA**	**6.013.144.000,00**	**4.930.695.487,00**	82,00	**4.476.331.224,00**
	PBBP2	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	82,00	4.476.331.224,00
11	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)–LRA**	**3.792.041.998,00**	**4.047.529.987,00**	106,74	**4.230.107.892,50**
	BPHTB-Pemindahan Hak	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	106,74	4.230.107.892,50
12	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**17.500.262.166,00**	**17.373.392.882,00**	99,28	**8.404.013.414,00**
	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	8.431.620.478,00	8.938.218.406,00	106,01	7.882.052.498,00
	PBJT - Tenaga Listrik	7.156.668.000,00	6.380.342.672,00	89,15	
	PBJT-Jasa Perhotelan	1.363.365.016,00	1.458.652.602,00	106,99	369.867.579,00
	PBJT-Jasa Parkir	220.000.000,00	255.071.829,00	115,94	69.036.776,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	328.608.672,00	341.107.373,00	103,80	83.056.561,00
13	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**8.594.278.935,00**	**5.848.785.600,00**	**68,05**	0,00
	Opsen PKB	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	68,05	0,00
14	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**4.192.000.000,00**	**3.140.128.900,00**	**74,91**	0,00
	Opsen BBNKB	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	74,91	0,00
	Jumlah	**42.975.585.646,00**	**38.464.925.994,00**	**89,50**	**32.408.637.666,50**

Penjelasan perbandingan capaian dari target Anggaran dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA:

1. Pajak Reklame-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pajak Reklame-LRA dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Pajak Reklame-LRA sebesar Rp2.480.435.375,00 atau 109,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.261.187.250,00. Realisasi Pajak Reklame-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena Penetapan target yang bersifat realistis dan kehati-hatian (*prudent*) pada awal tahun anggaran, sehingga realisasi penerimaan yang berkembang lebih baik dari perkiraan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Reklame-LRA, sebesar Rp2.293.104.684,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LRA karena bertambahnya penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah. Selain itu, peningkatan realisasi juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak melalui kegiatan pendataan dan pemutakhiran objek pajak reklame, peningkatan pengawasan, serta penertiban terhadap reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
2. Pajak Air Tanah-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Air Tanah dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp50.877.763,00 atau 147,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.456.800,00. Realisasi Pajak Air Tanah-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena optimalisasi pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak air tanah, selain itu penetapan target penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp19.299.000,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah-LRA karena pada Tahun 2025 telah diberlakukan ketentuan perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perhitungan besaran pajak menjadi lebih terstandar dan berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah.

3. Pajak Sarang Burung Walet-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Sarang Burung Walet dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp4.400.000,00 atau 100,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.366.000,00.

   Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena penetapan target penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LRA sebesar Rp4.500.000,00. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet-LRA karena kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Mineral Bukan Logam dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp588.680.000,00 atau 100,83 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp583.848.497,00. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena penetapan target penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp624.001.638,00. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA karena berkurangnya aktivitas pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan oleh wajib pajak, terbatasnya kegiatan pembangunan yang menggunakan material galian, serta adanya beberapa wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan produksi secara optimal pada tahun berjalan. Kondisi

tersebut berdampak pada menurunnya volume objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5. PBB-P2-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak PBB-P2 dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi PBB-P2-LRA sebesar Rp4.930.695.487,00 atau 82,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.013.144.000,00. Realisasi PBB-P2-LRA kurang dari target yang ditetapkan karena masih adanya wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun anggaran, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada sebagian wajib pajak, serta masih dilakukannya proses pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 sehingga realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi PBB-P2-LRA sebesar Rp4.476.331.224,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pendapatan PBB-P2-LRA karena berbagai upaya optimalisasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan, antara lain melalui inovasi digital kios mandiri satu anjungan (KRISAN) sosialisasi, penagihan, dan perbaikan basis data wajib pajak, memberikan dampak positif sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

6. BPHTB-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak BPHTB dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Pajak BPHTB sebesar Rp4.047.529.987,00 atau 106,74 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.792.041.998,00. Realisasi BPHTB-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena karena penetapan target dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren transaksi serta kondisi perekonomian daerah.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi BPHTB-LRA sebesar Rp4.230.107.892,50. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pendapatan BPHTB-LRA karena menurunnya jumlah transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pada Tahun 2025 telah diberlakukan Peraturan Wali Kota mengenai pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendukung program nasional 3 juta rumah, yang turut mempengaruhi besaran penerimaan BPHTB.

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam rangka meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian kebijakan. Adapun penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD mengeluarkan pengaturan tentang Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT), dalam mengatur berbagai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah.

   PBJT merupakan integrasi 5 (lima) jenis pajak daerah dalam UU HKPD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Untuk menyelaraskan regulasi perpajakan yang ada diatasnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Tomohon memberlakukan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   Peraturan Daerah Kota Tomohon No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dan diberlakukan pada bulan Februari 2024 sedangkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBD Kota Tomohon TA 2024 ditetapkan pada tahun 2023 dimana target pajak daerah ditetapkan mengikuti nomenklatur pajak yang lama oleh karena itu maka realisasi pajak daerah masih diinput sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan pada APBD TA 2024 (induk) kemudian pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan APBD Kota Tomohon TA 2024 tanggal 31 Oktober 2024 target pajak sudah ditetapkan berdasarkan nomenklatur pajak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

   a) Pajak Restoran menjadi PBJT- Makanan dan/atau Minuman
   b) Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT- Tenaga Listrik
   c) Pajak Hotel menjadi PBJT- Jasa Perhotelan
   d) Pajak Parkir menjadi PBJT- Jasa Parkir
   e) Pajak Hiburan menjadi PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan

Maka berdasarkan kondisi diatas per Oktober 2024, penginputan realisasi pajak daerah (PBJT) dipindahkan mengikuti target yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan APBD Kota Tomohon TA 2024.

1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA

   Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp8.938.218.406,00 atau 106,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.431.620.478,00. Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman lebih dari target yang ditetapkan karena dipengaruhi oleh berkembangnya aktivitas usaha di sektor restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis, termasuk adanya penambahan objek pajak baru pada tahun 2025. Selain itu, upaya optimalisasi pemungutan pajak melalui pendataan dan pengawasan terhadap wajib pajak, dan pemantauan penerimaan pajak daerah secara berkala turut mendorong peningkatan realisasi penerimaan. Di sisi lain, penetapan target penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Restoran-LRA sebesar Rp12.962.686.478,00 terdiri atas Pajak Restoran sebesar Rp5.080.633.980,00 dan PBJT-Makan dan/atau Minuman sebesar Rp7.882.052.498,00. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pajak Restoran-LRA. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penerimaan yang bersifat insidentil pada Tahun 2024 berupa penyetoran kurang bayar Pajak Restoran dari hasil pemeriksaan khusus oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp4.661.066.000,00 yang disetorkan oleh Wajib Pajak D'Linow Restaurant. Dengan adanya penerimaan tambahan tersebut, realisasi Tahun 2024 tercatat lebih tinggi. Apabila penerimaan yang bersifat insidentil tersebut tidak diperhitungkan, maka realisasi penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman pada Tahun 2025 sebenarnya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan penerimaan rutin Tahun 2024.

2) PBJT-Tenaga Listrik-LRA

   Realisasi PBJT-Tenaga Listrik-LRA sebesar Rp6.380.342.672,00 atau 89,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.156.668.000,00.

Realisasi PBJT-Tenaga Listrik-LRA kurang dari target yang ditetapkan karena jumlah penerimaan pajak yang terealisasikan melalui PT. PLN Persero lebih rendah jika dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak yang diproyeksikan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi PBJT-Tenaga Listrik-LRA disajikan sebagai Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.850.030.421,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LRA karena pertumbuhan konsumsi tenaga listrik masyarakat dan pelaku usaha yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBJT atas tenaga listrik dibandingkan realisasi Tahun 2024.

3) PBJT-Jasa Perhotelan-LRA

Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan-LRA sebesar Rp1.458.652.602,00 atau 106,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.363.365.016,00. Dapat dilihat realisasi PBJT-Jasa Perhotelan-LRA lebih dari target yang ditetapkan karena penetapan target penerimaan pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Hotel-LRA sebesar Rp1.387.927.448,00 terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp1.018.059.869,00 dan PBJT-Jasa Perhotelan Rp369.867.579,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Hotel-LRA karena meningkatnya tingkat hunian hotel dan usaha penginapan seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta pelaksanaan berbagai kegiatan atau *event* di Kota Tomohon yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, upaya optimalisasi pemungutan pajak melalui pendataan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

4) PBJT-Jasa Parkir

Realisasi PBJT-Jasa Parkir-LRA sebesar Rp255.071.829,00 atau 115,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi PBJT Jasa Parkir lebih dari target yang ditetapkan karena penetapan target penerimaan pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun

sebelumnya serta perkembangan kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 Realisasi PBJT-Parkir-LRA sebesar Rp280.983.370,00 terdiri dari Pajak Parkir Rp211.946.594,00 dan PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp69.036.776,00. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pendapatan Pajak Parkir-LRA karena penurunan tarif pajak dari 20% menjadi 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp341.107.373,00 atau sebesar 103,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp328.608.672,00. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan lebih dari target yang ditetapkan karena penetapan target penerimaan pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi perekonomian daerah, sehingga realisasi penerimaan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Hiburan-LRA sebesar Rp279.665.511,00 terdiri dari Pajak Hiburan sebesar Rp196.608.950,00 dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp83.056.561,00. Dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Pajak Hiburan-LRA karena adanya kenaikan tarif pajak hiburan untuk objek pajak karaoke yang ditetapkan sebesar 40% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah tambahan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas pokok PKB, diatur dalam UU HKPD dan berlaku efektif sejak 5 Januari 2025. Tarifnya sebesar 66% dari pokok pajak. Opsen PKB-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Opsen PKB dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Opsen PKB sebesar Rp5.848.785.600,00 atau 68,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.594.278.935,00. Realisasi Opsen PKB-LRA kurang dari target yang ditetapkan karena tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak kendaraan bermotor yang masih belum optimal dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu, sehingga masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum

dilunasi. Selain itu, adanya mutasi atau perpindahan kendaraan bermotor ke daerah lain turut mempengaruhi berkurangnya potensi penerimaan opsen PKB di daerah. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang berdampak pada daya beli terhadap kendaraan bermotor baru, serta belum optimalnya pendataan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah daerah namun terdaftar di daerah lain. Di samping itu, implementasi kebijakan opsen pajak daerah yang relatif baru juga masih memerlukan proses penyesuaian baik dari sisi administrasi maupun pemahaman wajib pajak dalam pelaksanaannya.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah tambahan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB, diatur dalam UU HKPD dan berlaku efektif sejak 5 Januari 2025. Tarifnya sebesar 66% dari pokok BBNKB. Opsen BBNKB-LRA merupakan Laporan yang menyajikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Opsen BBNKB dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan dan menjadi target untuk dipenuhi. Realisasi Opsen PKB sebesar Rp3.140.128.900,00 atau 74,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.192.000.000,00. Realisasi Opsen PKB-LRA kurang dari target yang ditetapkan karena masih terbatasnya jumlah transaksi jual beli atau peralihan kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat yang melakukan transaksi kendaraan bermotor belum segera melakukan proses balik nama kendaraan sehingga kewajiban pembayaran BBNKB belum terealisasi pada tahun berjalan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang berdampak pada menurunnya daya beli terhadap kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bekas, sehingga jumlah objek pajak yang dikenakan BBNKB tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di samping itu, masih terdapat kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat Kota Tomohon namun proses balik nama kendaraannya dilakukan di daerah lain sesuai dengan domisili administrasi kendaraan tersebut, sehingga potensi penerimaan Opsen BBNKB yang menjadi bagian dari pendapatan daerah Kota Tomohon belum dapat diperoleh secara optimal.

Adanya kenaikan realisasi Pendapatan Pajak-LRA bila dibandingkan dengan tahun lalu hal ini disebabkan oleh:

- Optimalisasi pemungutan pajak daerah.

  Pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengelola pendapatan secara aktif melaksanakan upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain

melalui kegiatan pendataan dan pemutakhiran data objek serta subjek pajak, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Upaya ini berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

- Penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.
  Proses pelaporan, pembayaran, dan penyetoran pajak daerah telah memanfaatkan sistem elektronik atau aplikasi berbasis digital. Penerapan sistem ini mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun kebocoran penerimaan pajak.
- Adanya penambahan wajib pajak baru.
  Melalui kegiatan pendataan dan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah berhasil mengidentifikasi dan mendaftarkan beberapa objek dan subjek pajak baru. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, penambahan wajib pajak tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah.
- Pemutakhiran dan validasi basis data objek pajak.
  Pemerintah daerah secara berkala melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak sehingga potensi pajak yang sebelumnya belum tercatat dapat dimasukkan dalam sistem pemungutan pajak daerah.
- Peningkatan kegiatan pengawasan lapangan terhadap objek pajak. Dilakukannya monitoring dan pengawasan secara langsung terhadap objek pajak daerah membantu memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya kegiatan atau *event* yang meningkatkan aktivitas usaha. Pelaksanaan kegiatan tertentu seperti *event* daerah, kegiatan promosi, maupun kegiatan ekonomi lainnya dapat meningkatkan aktivitas usaha masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp18.860.687.942,00 atau 74,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.243.145.000,00.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA menurut rincian objek pendapatan Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	82,25	46.072.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	51,73	1.282.641.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	55,28	68.425.000,00
4	Retribusi Terminal	251.000.000,00	258.226.166,00	102,88	118.470.168,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.145.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.500.000.000,00	658.360.000,00	43,89	734.190.000,00
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	3.712.832,00	0,00	0,00
8	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.150.000.000,00	364.718.585,00	31,71	567.781.000,00
	Jumlah	**25.243.145.000,00**	**18.860.687.942,00**	**74,72**	**2.817.579.468,00**

Penjelasan:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA

   Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA merupakan pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan. Realisasi Pelayanan Kesehatan-LRA Puskesmas sebesar Rp 16.430.485.665,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	9.871.000,00
Dana Non Kapitasi Puskesmas	Rp	148.835.900,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	Rp	16.271.778.765,00
	Rp	16.430.485.665,00

   Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebesar Rp9.871.000,00 melebihi dari target yang ditetapkan atau 141,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 karena meningkatnya kunjungan pasien umum dan tindakan-tindakan yang diberikan, juga ada Realisasi Dana Non Kapitasi Puskesmas sebesar Rp148.835.900,00 yang tidak ada target pendapatan. Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD sebesar Rp16.271.778.765,00 kurang dari target atau 81,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.970.000.000,00 karena adanya klaim BPJS belum tersalurkan yang menjadi piutang.

   Dibandingkan dengan Tahun 2024, dapat dilihat adanya kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA karena sudah termasuk di dalamnya pendapatan Dana Non Kapitasi Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA

   Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA adalah jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sementara/akhir pada Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA sebesar Rp1.034.632.694,00 atau 51,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan–LRA kurang dari target yang ditetapkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kendaraan sampah, dan kurangnya SDM penagih retribusi sampah. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.282.641.000,00 dapat dilihat adanya penurunan.

3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA

   Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA Tahun 2025 sebesar Rp110.552.000,00 atau sebesar 55,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA kurang dari target yang ditetapkan karena kendaraan Dinas/Pelat Merah sudah tidak lagi ditagih retribusinya.

   Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.425.000,00 dapat dilihat adanya peningkatan pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA sebesar Rp42.127.000,00 atau 61,57%.

4. Realisasi Retribusi Terminal-LRA

   Retribusi Tempat Khusus Parkir Kendaraan di Luar Badan Jalan dan Retribusi Tempat Kegiatan Usaha/Kios di Lingkungan Terminal-LRA merupakan pembayaran atas pelayanan parkir dan sewa kios di Lingkungan Terminal yang di kelola Pemerintah Daerah. Realisasi Retribusi Terminal-LRA Tahun 2025 sebesar Rp258.226.166,00 atau 102,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp251.000.000,00. Realisasi Retribusi Terminal-LRA melebihi target yang ditetapkan karena sudah menggunakan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

   Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp118.470.168,00 dapat dilihat adanya peningkatan pendapatan Retribusi Terminal-LRA sebesar Rp139.755.998,00 atau

117,97%, karena penagihan realisasi Retribusi Terminal-LRA sudah menggunakan sistem pembayaran digital melalui *QRIS*.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA

   Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp165.145.000,00, terdiri dari:

   - Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman

     Realisasi Rertribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.000.000,00. Belum adanya retribusi karena *screen house* yang digunakan untuk pembibitan dan produksi tidak layak digunakan atau rusak dan telah dianggarkan untuk rehabilitasi baru selesai di bulan Desember 2025 sehingga penanaman bibit bunga baru dimulai dan diperkirakan akan berproduksi di awal tahun 2026. Sedangkan *screen house* yang ada atau masih bisa digunakan itu untuk *mother plant* dan hasilnya diberikan sebagai bantuan kepada petani bunga di Kota Tomohon.
   - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

     Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.400.000,00. Belum adanya retribusi karena pengadaan indukan ikan baru terlaksana di minggu ke tiga bulan Desember 2025 sedangkan untuk menghasilkan benih ikan membutuhkan waktu paling kurang satu bulan bahkan lebih karena indukan baru membutuhkan waktu beradaptasi untuk menghasilkan benih ikan dengan kualitas baik.
   - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan

     Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp745.000,00. Belum adanya retribusi karena belum ada bangunan fisik untuk rumah potong sapi, belum beroperasinya rumah potong babi karena masih adanya kasus penyakit di Sulawesi Utara sehingga pelaku usaha mendatangkan daging babi beku dari luar Sulawesi Utara (Bali) sehingga yang dipakai hanya ruang pendinginnya saja, belum beroperasinya rumah potong unggas karena rata-rata pedagang di Tomohon memiliki usaha dalam skala kecil sehingga masih terbiasa dengan cara pemotongan tradisional.

6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

   Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pembayaran atas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga. Realisasi Retribusi layanan tempat rekreasi pariwisata sebesar Rp658.360.000,00 atau 43,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga kurang dari target yang ditetapkan disebabkan karena menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ditempat rekreasi yang menjadi lokasi penagihan retribusi.

   Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat adanya penurunan realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp734.190.000,00 karena pada Tahun 2024 tingkat kunjungan wisatawan asing ke destinasi yang dikelola oleh pemerintah lebih banyak dibandingkan Tahun 2025.

7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA

   Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA merupakan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA sebesar Rp3.712.832,00 merupakan pemanfaatan gedung dan bangunan sekolah untuk kantin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA tidak memiliki target anggaran karena penganggarannya pada Pendapatan dari Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah).

8. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LRA

   Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LRA adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Persetujuan Bangun Gedung yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LRA sebesar Rp364.718.585,00 atau 31,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000,00. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LRA kurang dari target yang ditetapkan karena kebutuhan atas pelayanan PBG berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir rata-rata dibawah 50% dari target. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 jumlah pemohon sebanyak 38 orang atau sebesar Rp567.781.000,00 dan Tahun Anggaran 2025 jumlah pemohon sebanyak 41 orang atau sebesar Rp364.718.585,00. Dilihat dari data jumlah pemohon mengalami kenaikan akan tetapi pendapatan lebih rendah karena fungsi bangunan dan luasan bangunan yang diurus (fungsi usaha, fungsi hunian/perumahan dan rumah tinggal pribadi).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA berupa bagian laba (dividen) atas penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo sebesar Rp3.080.810.919,00 berdasarkan Hasil Keputusan RUPS tanggal 09 April 2025 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) Nomor 01 tanggal 09 April 2025. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA sebesar Rp3.080.810.919,00 atau 81,07% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp3.800.000.000,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp4.072.932.013,93 atau 90,71% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 4.490.169.160,00.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LRA menurut objek pendapatan Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.1.3 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	197.249.300,00	65,75	233.893.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	284.454.160,00	238.389.180,00	83,81	132.000.000,00
3	Jasa Giro	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	56,77	910.522.233,00
4	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	5.535.675,00	0,00	169.053.470,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	1.950.000.000,00	1.095.318.571,38	56,17	1.150.412.430,98
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.206.555.100,00	0,00	619.116.078,50
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	68.812.449,58	0,00	305.121.233,18
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	137.230.460,97	0,00	134.556.619,00
9	Pendapatan BLUD	30.000.000,00	30.664.933,00	102,22	15.049.391.014,00
	Jumlah	**4.490.169.160,00**	**4.072.932.013,93**	**90,71**	**18.704.066.178,66**

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2025 sebesar Rp197.249.300,00 atau 65,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LRA Tahun 2025 sebesar Rp238.389.180,00 atau 83,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp284.454.160,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LRA berasal dari Sewa Kios KSU PD. Pasar sebesar Rp186.000.000,00 dan Sewa Kantor Kas Bank SulutGo sebesar Rp52.389.180,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LRA Tahun 2025 kurang dari target yang ditetapkan karena adanya Reklasifikasi Pendapatan dari Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (LRA) sesuai

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Realisasi Jasa Giro–LRA diperoleh sesuai jumlah dana yang tersedia di rekening-rekening giro milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Realisasi penerimaan Jasa Giro–LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.093.176.344,00 atau 56,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.925.715.000,00. Realisasi Jasa Giro kurang dari target anggaran dikarenakan adanya penurunan saldo harian Rekening Kas Daerah. Realisasi Jasa Giro mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu karena di Tahun 2025 adanya efisiensi belanja yang mengurangi penyerapan anggaran. Rincian Pendapatan Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Rincian Pendapatan Jasa Giro.
4. Realisasi Pendapatan Bunga-LRA Tahun 2024 sebesar Rp5.535.675,00. Realisasi Pendapatan Bunga-LRA Tahun 2025 merupakan realisasi Remunerasi. Remunerasi merupakan imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemerintah daerah pada fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Persentase remunerasi ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia. Sebagaimana ketentuan terkait remunerasi yang diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF. Realisasi tersebut diperoleh atas penempatan dana milik Pemerintah Kota Tomohon pada fasilitas TDF Tahun 2024.
5. Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah–LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.095.318.571,38 atau 56,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.950.000.000,00.
6. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.206.555.100,00.
7. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan–LRA Tahun 2025 sebesar Rp68.812.449,58.
8. Realisasi Pendapatan Denda Pajak–LRA Tahun 2025 sebesar Rp137.230.460,97 dengan rincian Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya–LRA sebesar Rp1.364.114,00, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp6.000,00, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LRA sebesar Rp426.012,00, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan–LRA sebesar Rp121.376.943,97, dan Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan–LRA sebesar Rp14.057.391,00.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak diperoleh dari pembayaran denda wajib pajak yang mendapatkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

9. Realisasi Pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp30.664.933,00 atau 102,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer–LRA Tahun 2025, terealisasi sebesar Rp585.396.264.982,00 terdiri dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA sebesar Rp559.360.392.123,00 atau 99,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp563.899.138.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA menurut objek pendapatan Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Dana Perimbangan**	**543.512.427.000,00**	**538.973.681.123,00**	**99,16**	**595.042.142.514,00**
1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	39.757.839.000,00	38.449.827.200,00	96,71	45.706.665.000,00
1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	428.132.711.000,00	426.951.422.834,00	99,72	424.328.577.685,00
1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.617.492.000,00	16.346.559.693,00	98,37	70.435.760.476,00
1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.004.385.000,00	57.225.871.396,00	96,99	54.571.139.353,00
2	**Insentif Fiskal**	**20.386.711.000,00**	**20.386.711.000,00**	**100,00**	**12.933.346.000,00**
2.1	Insentif Fiskal	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	100,00	12.933.346.000,00
	Jumlah	**563.899.138.000,00**	**559.360.392.123,00**	**99,20**	**607.975.488.514,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp559.360.392.123,00 terdiri atas Dana Perimbangan–LRA sebesar Rp538.973.681.123,00 dan Insentif Fiskal-LRA sebesar Rp20.386.711.000,00.

Dana Perimbangan–LRA sebesar Rp538.973.681.123,00 terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)–LRA sebesar Rp38.449.827.200,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA sebesar Rp426.951.422.834,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LRA sebesar Rp16.346.559.693,00 dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik–LRA sebesar Rp57.225.871.396,00.

<u>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)–LRA</u>

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)–LRA sebesar Rp38.449.827.200,00 terdiri atas:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak–LRA sebesar Rp12.592.550.200,00 yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan-

LRA sebesar Rp7.916.950.300,00, DBH PPh Pasal 21-LRA sebesar Rp4.285.124.100,00, dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp390.475.800,00.

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)–LRA sebesar Rp25.857.277.000,00 yang terdiri dari DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LRA sebesar Rp15.481.898.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA sebesar Rp9.538.313.000,00, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA sebesar Rp3.261.000,00, DBH SDA Perikanan-LRA sebesar Rp833.805.000,00.

Tabel 5.1.4.1 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

No	Uraian	Penyaluran DBH melalui TDF (Rp)	Realisasi Transfer Pusat 2025 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	**DBH Pajak-LRA**	**0,00**	**12.592.550.200,00**	**12.592.550.200,00**
1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	0,00	7.916.950.300,00	7.916.950.300,00
1.2	DBH PPh Pasal 21-LRA	0,00	4.285.124.100,00	4.285.124.100,00
1.3	DBH PPh Pasal 25-LRA	0,00	390.475.800,00	390.475.800,00
2	**DBH Sumber Daya Alam-LRA**	**429.549.000,00**	**25.427.728.000,00**	**25.857.277.000,00**
2.1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	284.000,00	15.481.614.000,00	15.481.898.000,00
2.2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	428.033.000,00	9.110.280.000,00	9.538.313.000,00
2.3	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.232.000,00	2.029.000,00	3.261.000,00
2.4	DBH SDA Perikanan	0,00	833.805.000,00	833.805.000,00
	Jumlah	**429.549.000,00**	**38.020.278.200,00**	**38.449.827.200,00**

Dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA sebesar Rp38.449.827.200,00 terdiri dari Penyaluran DBH melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp429.549.000,00 dan realisasi Transfer Pusat Tahun 2025 sebesar Rp38.020.278.200,00.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA terdiri dari:

Tabel 5.1.4.2 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

No	Uraian	Bruto (Rp)	Potongan (Rp)	Bersih
1	**DAU**	**375.728.253.000,00**	**21.242.125.547,00**	**354.486.127.453,00**
2	**DAU Tambahan Dukungan**	**11.801.983.834,00**	0,00	**11.801.983.834,00**
a	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.800.000.000,00	0,00	**8.800.000.000,00**
b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.001.983.834,00	0,00	**3.001.983.834,00**
3	**DAU yang Ditentukan Penggunaannya**	**39.421.186.000,00**	0,00	**39.421.186.000,00**
a	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.204.651.000,00	0,00	**22.204.651.000,00**
b	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.216.535.000,00	0,00	**17.216.535.000,00**
Total		**426.951.422.834,00**	**21.242.125.547,00**	**405.709.297.287,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA yang diakui sebesar Rp426.951.422.834,00 terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA yang langsung ditransfer ke RKUD sebesar Rp405.709.297.287,00 dengan Pengakuan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) atas Potongan sebesar Rp21.242.125.547,00 yang terdiri dari Potongan Pokok Pinjaman sebesar Rp16.559.091.300,00, Bunga Pinjaman PEN sebesar Rp4.539.712.767,00, Pengembalian Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp38.058.000,00 dan Pengembalian Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp105.263.480,00.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LRA

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LRA sebesar Rp16.346.559.693,00 terdiri atas:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp992.549.000,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp4.854.764.400,00
- DAK Fisik-Bidang Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp2.801.963.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp7.697.283.293,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik–LRA

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik–LRA sebesar Rp57.225.871.396,00 terdiri atas:

- DAK Non-Fisik-BOS Reguler sebesar Rp13.302.856.588,00
- DAK Non-Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp965.250.000,00
- DAK Non-Fisik-TPG PNSD sebesar Rp27.573.081.900,00
- DAK Non-Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp105.000.000,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp1.956.104.589,00
- DAK Non-Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp505.690.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp997.421.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp45.000.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp247.420.000,00.
- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebesar Rp6.192.186.527,00

- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp379.667.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp4.313.293.792,00.
- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp375.000.000,00
- DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp267.900.000,00

Rincian penggunaan DAK Fisik dan penggunaan DAK Non-Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 2.2** Daftar Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan **Lampiran 2.3** Daftar Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Insentif Fiskal–LRA terealisasi sebesar Rp20.386.711.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.386.711.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA, terealisasi sebesar Rp26.035.872.859,00 atau 88,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.507.110.022,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil-LRA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Transfer Antar Daerah		
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	3.677.041.600,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	2.370.166.200,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	13.479.588.866,32
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	Rp	103.974.783,68
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	6.405.101.409,00
	Rp	26.035.872.859,00

Realisasi Transfer Antar Daerah kurang dari target anggaran dikarenakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 5 Januari Tahun 2025 sudah melalui Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2025 terealisasi Rp10.165.652.475,00 atau 95,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.638.434.000,00.

Tabel 5.1.5 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan–LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Lain-Lain Pendapatan**	**3.750.000.000,00**	**4.975.607.188,00**	**132,68**	**2.974.894.525,00**
1.1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	132,68	2.974.894.525,00
2	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**6.888.434.000,00**	**5.190.045.287,00**	**75,34**	**5.016.460.545,00**
	Jumlah	**10.638.434.000,00**	**10.165.652.475,00**	**95,56**	**7.991.355.070,00**

Pendapatan Hibah–LRA terealisasi sebesar Rp4.975.607.188,00 atau 132,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.750.000.000,00.

Pendapatan Hibah menurut objek pendapatan Tahun 2025:

Tabel 5.1.6 Lain-lain Pendapatan–LRA Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	132,68	2.974.894.525,00
	Jumlah	**3.750.000.000,00**	**4.975.607.188,00**	**132,68**	**2.974.894.525,00**

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp4.975.607.188,00 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah berupa Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi Triwulan III dan IV Tahun 2024 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2025 dari PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, yang menetapkan Besaran Bonus Produksi untuk daerah penghasil panas bumi berdasarkan penetapan persentase daerah penghasil dan hasil rekonsiliasi realisasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik yang ditetapkan secara triwulan.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp5.190.045.287,00 atau 75,34% dari anggaran yang ditetapkan Rp6.888.434.000,00. Realisasi kurang dari target yang dianggarkan disebabkan karena adanya saldo kas dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di puskesmas yang belum digunakan sehingga belum disalurkan oleh BPJS Kesehatan.

5.1.B Belanja

1. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**669.215.341.767,21**	**627.970.872.693,00**	**93,84**	**691.865.407.875,32**
5.1	**Belanja Operasi**	**584.889.808.726,30**	**552.829.607.107,00**	**94,52**	**609.186.960.465,32**
5.1.1	Belanja Pegawai	307.247.559.230,00	301.200.368.052,00	98,03	294.191.910.833,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	255.257.799.266,92	230.514.032.515,00	90,31	260.092.565.976,32
5.1.3	Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	98,87	5.750.485.843,00
5.1.5	Belanja Hibah	15.263.584.853,38	15.069.201.240,00	98,73	45.015.997.813,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.400.329.223,00	1.378.837.793,00	57,44	4.136.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**78.496.751.497,70**	**70.559.783.931,00**	**89,89**	**78.188.447.410,00**
5.2.1	Belanja Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	66,56	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95	13.516.328.111,00	72,99	7.364.439.874,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75	16.441.807.851,00	95,13	45.044.739.743,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.823.216.984,00	39.497.951.569,00	96,75	25.092.690.093,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.132.081.725,00	687.696.400,00	60,75	536.827.700,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	115.000.000,00	0,00	0,00	149.750.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.828.781.543,21**	**4.581.481.655,00**	**78,60**	**4.490.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	78,60	4.490.000.000,00

Diagram 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2025

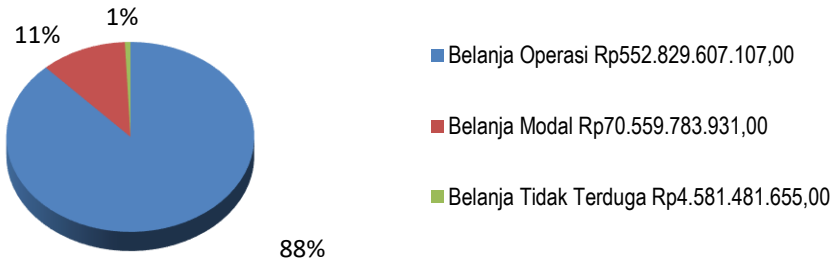

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos belanja daerah.

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp552.829.607.107,00 atau 94,52% dari anggaran Belanja Operasi yang disediakan sebesar Rp584.889.808.726,30. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp301.200.368.052,00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp307.247.559.230,00. Berikut rincian objek realisasi belanja pegawai Tahun 2025:

Tabel 5.2.1 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	193.617.112.034,00	190.051.378.153,00	98,16	184.337.939.480,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.172.467.834,00	100.509.147.634,00	98,37	69.215.786.532,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	32.077.704.994,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.853.000.600,00	9.545.731.056,00	96,88	7.814.575.766,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.002.968.762,00	496.101.209,00	49,46	128.144.061,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	498.280.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	95,61	119.480.000,00
	Jumlah	**307.247.559.230,00**	**301.200.368.052,00**	**98,03**	**294.191.910.833,00**

Realisasi Belanja Pegawai kurang dari target anggaran karena sepanjang Tahun Anggaran 2025 ada pegawai yang pensiun, meninggal dunia, dan/atau mutasi keluar daerah, sedangkan untuk belanja tambahan penghasilan pada ASN dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga realisasinya tidak mencapai 100%. Selanjutnya dari sisi penganggaran mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 poin C yang mengamanatkan pada tahap penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp230.514.032.515,00 atau 90,31% dari anggaran sebesar Rp255.257.799.266,92.

Belanja Barang dan Jasa termasuk menurut objek belanja, terdiri dari:

Tabel 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Belanja Barang**	**68.689.360.507,67**	**60.610.795.346,00**	**88,24**	**51.837.574.883,00**
	Belanja Barang Pakai Habis	68.623.082.075,67	60.550.018.376,00	88,24	51.528.380.883,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00
	Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	66.278.432,00	60.776.970,00	91,70	298.569.000,00
2	**Belanja Jasa**	**116.051.651.312,65**	**104.127.981.312,00**	**89,73**	**132.720.309.801,82**
	Belanja Jasa Kantor	85.765.979.286,40	75.296.144.372,00	87,79	106.536.431.378,82
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.983.405.744,00	18.694.626.560,00	98,48	19.181.101.667,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.089.424.742,00	1.725.033.050,00	82,56	1.039.170.000,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.929.400.000,00	3.492.249.000,00	88,87	1.412.505.000,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	509.965.000,00	398.000.000,00	78,04	290.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.758.711.438,25	2.635.518.045,00	95,53	2.316.942.044,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	180.132.000,00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	1.012.184.102,00	984.065.285,00	97,22	427.545.562,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	366.000.000,00	366.000.000,00	100,00	878.500.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	636.581.000,00	536.345.000,00	84,25	248.300.000,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non-ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	209.682.150,00
3	**Belanja Pemeliharaan**	**7.490.295.379,60**	**6.944.507.989,00**	**92,71**	**4.032.747.146,00**
	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.692.733.001,60	5.276.773.849,00	92,69	3.069.537.146,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	854.012.300,00	725.612.640,00	84,97	0,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	943.550.078,00	942.121.500,00	99,85	963.210.000,00
4	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.471.244.194,00**	**27.469.989.565,00**	**93,21**	**46.882.096.647,50**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.362.244.194,00	27.469.989.565,00	93,56	46.882.096.647,50
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**9.966.850.000,00**	**8.876.120.000,00**	**89,06**	**2.208.550.000,00**
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.966.850.000,00	8.876.120.000,00	89,06	2.208.550.000,00
6	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.264.362.600,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	3.264.362.600,00
7	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**	**3.670.605.275,00**	**3.653.293.825,00**	**99,53**	**0,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	3.474.779.275,00	3.442.467.825,00	99,07	**0,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	27.335.000,00	42.335.000,00	154,87	**0,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	168.491.000,00	168.491.000,00	100,00	**0,00**
8	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**19.917.792.598,00**	**18.831.344.478,00**	**94,55**	**19.146.924.898,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	94,55	19.146.924.898,00
	Jumlah	**255.257.799.266,92**	**230.514.032.515,00**	**90,31**	**260.092.565.976,32**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp230.514.032.515,00 terdiri dari Belanja Barang Persediaan sebesar Rp60.610.795.346,00, Belanja Jasa sebesar Rp104.127.981.312,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.944.507.989,00, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp27.469.989.565,00, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar

Rp8.876.120.000,00, Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp3.653.293.825,00, Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp18.831.344.478,00.

Tabel 5.2.3 Belanja Barang Persediaan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis			
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	419.840.230,00	329.070.466,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.290.305.500,00	1.241.407.135,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.533.682.690,79	4.114.136.159,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	250.145.925,00	216.701.350,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.222.029.260,60	1.064.745.100,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	126.145.500,00	125.903.200,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.121.900,00	110.072.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	839.955.110,00	755.404.196,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	656.836.156,00	631.102.611,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.670.179.346,00	1.734.815.297,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.492.500,00	0,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.866.063.255,68	2.570.943.812,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.887.098.754,50	1.679.688.998,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.282.177.914,00	3.717.723.901,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.147.241.377,00	1.071.897.350,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.142.077.338,00	1.007.347.181,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	89.049.650,00	18.707.200,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	414.112.969,58	264.376.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.226.788.800,00	1.158.012.500,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.399.938.830,09	2.956.962.116,00
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.622.822.158,00	2.379.669.248,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	43.670.000,00	41.365.100,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.442.412.991,00	5.485.613.062,00
24	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.683.414.779,00	3.359.690.041,00
25	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.756.766.522,43	3.536.812.218,00
26	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	201.856.357,00	200.680.312,00
27	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.913.950,00	0,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.471.394.840,00	14.530.239.818,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.554.856.100,00	4.200.381.596,00
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	50.400.000,00	44.600.000,00
31	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	117.114.200,00	112.234.000,00
32	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	208.896.100,00	191.925.000,00
33	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	268.799.850,00	239.193.999,00
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	394.962.342,00	362.525.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	103.400.975,00	78.800.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	304.466.700,00	296.225.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	45.939.000,00	42.100.000,00
38	Belanja Pakaian KORPRI	27.500.000,00	27.500.000,00
39	Belanja Pakaian Adat Daerah	188.941.900,00	185.115.000,00
40	Belanja Pakaian Batik Tradisional	176.562.500,00	101.940.000,00
41	Belanja Pakaian Paskibraka	364.707.804,00	364.391.910,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi			
42	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	13.565.500,00	10.850.000,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	450.000,00	0,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	2.157.132,00	0,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-BajuPengaman	11.000.000,00	10.999.989,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-TopiKerja	7.000.000,00	7.000.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-SepatuLapangan	16.577.000,00	16.577.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	15.528.800,00	15.349.981,00
	TOTAL	**68.689.360.507,67**	**60.610.795.346,00**

c) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 sebesar Rp4.667.167.507,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp4.720.536.153,00 merupakan realisasi pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah Kota Tomohon kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang sebesar Rp127.454.740,00 tanggal 02 September 2025, dan Pengakuan Belanja Bunga Pinjaman PEN sebesar Rp4.539.712.767,00 yang dipotong dari setiap Dana Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2025.

d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp15.069.201.240,00 atau 98,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.263.584.853,38. Untuk Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada Lampiran 3.1 Rincian Realisasi Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.4 Belanja Hibah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00	28.503.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	3.765.000.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum	2.050.000.000,00	1.960.000.000,00	95,61	0,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	290.980.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	10.581.480.000,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	100,00	578.324.213,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.972.320.000,00	9.899.038.588,00	99,27	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	99,25	938.313.600,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	42.430.000,00	19.055.000,00	44,91	208.900.000,00
Jumlah		**15.263.584.853,38**	**15.069.201.240,00**	**98,73**	**45.015.997.813,00**

e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp1.378.837.793,00 atau 57,44% dari anggarannya sebesar Rp2.400.329.223,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Belanja Bantuan Sosial**				
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.400.329.223,00	471.500.000,00	33,67	3.156.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00	907.337.793,00	90,73	980.000.000,00
	Jumlah	**2.400.329.223,00**	**1.378.837.793,00**	**57,44**	**4.136.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu Program Unggulan yang terdapat dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon. Selengkapnya dapat dilihat pada Visi dan Misi, serta Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon Halaman 224. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada individu dalam bentuk pemberian uang tunai kepada lansia kurang dari target anggaran yang ditetapkan karena calon penerima meninggal dunia atau karena alasan lainnya.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp70.559.783.931,00 atau 89,89% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp78.496.751.497,70. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sebesar Rp416.000.000,00 karena tidak ada anggaran Belanja Modal Tanah Tahun 2025.

Tabel 5.2.6 Belanja Modal Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Belanja Modal Tanah**				
	Belanja Modal Tanah Persil	625.000.000,00	416.000.000,00	66,56	-
	Jumlah	**625.000.000,00**	**416.000.000,00**	**66,56**	**-**

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp13.516.328.111,00 atau 72,99% dari anggaran sebesar Rp18.517.087.062,95, Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00
2	Belanja Modal Pompa	15.235.700,00	13.600.000,00	89,26	3.100.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	731.601.000,00	650.080.000,00	88,86	0,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	415.656.000,00	389.332.500,00	93,67	0,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	392.854.000,00	391.974.300,00	99,78	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.260.000.000,00	1.226.000.000,00	97,30	0,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	358.000.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	2.999.799,00	99,99	0,00
9	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	31.204.000,00	31.204.000,00	100,00	64.800.000,00
10	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	24.241.100,00	17.038.500,00	70,29	0,00
12	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	706.400,00	0,00	0,00	319.950,00
13	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	80.412.191,00	39.004.581,00	48,51	0,00
14	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	897.273.541,00	785.718.915,00	87,57	110.090.600,00
15	Belanja Modal Mebel	954.640.270,00	442.381.467,00	46,34	45.622.000,00
16	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Pendingin	83.612.650,00	38.170.700,00	45,65	4.350.000,00
18	Belanja Modal Alat Dapur	77.029.808,00	32.314.000,00	41,95	22.991.500,00
19	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	1.002.648.130,00	582.775.560,00	58,12	295.076.000,00
20	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.158.501,00	3.900.000,00	63,33	86.750.505,00
21	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	108.516.369,00	23.910.400,00	22,03	0,00
22	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	43.865.000,00	42.556.000,00	97,02	19.843.750,00
23	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	35.703.936,00	23.678.520,00	66,32	0,00
24	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	136.525.000,00	52.281.000,00	38,29	42.000.000,00
25	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.327.945,00
26	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	482.210.159,50	416.840.265,00	86,44	113.896.500,00
27	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	137.000.000,00	135.653.122,00	99,02	0,00
28	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	23.000.000,00	22.866.000,00	99,42	0,00
29	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.498.400,00	0,00	0,00	198.067.000,00
30	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.950.000,00	0,00	0,00	
31	Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	174.314.866,50	154.697.650,00	88,75	60.505.100,00
32	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	12.746.000,00
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	195.454.846,00	138.700.359,00	70,96	2.741.955.519,00
34	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	309.300.000,00
35	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	167.397.007,00
36	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	700.000.000,00	696.000.000,00	99,43	0,00
37	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
38	Belanja Modal Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	30.925.000,00
39	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Modal Alat Laboratorium Lainnya	1.550.000,00	1.548.450,00	99,90	0,00
41	Belanja Modal *Personal Computer*	3.243.154.444,00	2.877.830.189,00	88,74	1.001.403.948,00
42	Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*	588.717.405,95	496.248.010,00	84,29	235.071.199,00
43	Belanja Modal Peralatan Jaringan	156.455.000,00	621.600,00	0,40	20.463.998,00
44	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	83.189.143,00	22.500.000,00	27,05	23.700.000,00
45	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	47.860.800,00	44.999.989,00	94,02	24.300.000,00
46	Belanja Modal Alat Penolong	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
48	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	115.000.000,00	106.093.800,00	92,26	0,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	409.227.700,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	121.208.653,00
51	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	190.000.000,00	188.700.000,00	99,32	0,00
52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	420.682.000,00	445.975.500,00	106,01	0,00
53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00
54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	36.499.000,00	36.499.000,00	100,00	0,00
55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	52,42	0,00
JUMLAH		**18.517.087.062,95**	**13.516.328.111,00**	**72,99**	**7.364.439.874,00**

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp16.441.807.851,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp17.284.365.725,75, Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.331.971.575,75	13.856.173.902,00	96,68	33.367.452.813,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	556.327.150,00	505.072.700,00	90,79	2.959.350.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	1.121.206.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaiakan	0,00	0,00	0,00	1.397.000.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	2.105.936.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	130.507.000,00	130.425.000,00	99,94	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	257.250.000,00	210.580.000,00	81,86	0,00
8	Belanja Modal Taman	986.310.000,00	967.674.843,00	98,11	494.473.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.151.700.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	122.000.000,00	121.555.344,00	99,64	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	875.422.000,00
12	Belanja Modal Pagar	600.000.000,00	387.962.292,00	64,66	0,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	87,45	572.199.930,00
JUMLAH		**17.284.365.725,75**	**16.441.807.851,00**	**95,13**	**45.044.739.743,00**

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp39.497.951.569,00 atau 96,75% dari anggaran sebesar Rp40.823.216.984,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	10.610.854.739,00	10.542.580.262,00	99,36	15.997.472.400,00
2	Belanja Modal Jalan Khusus	2.196.620.058,00	2.183.245.803,00	99,39	2.990.946.750,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.115.697.075,00	4.115.697.075,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.053.563.820,00	2.052.014.738,00	99,92	1.353.943.233,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.903.731.649,00	3.862.575.148,00	98,95	1.203.996.462,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	399.479.527,00	394.459.775,00	98,74	189.843.248,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	98,76	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	463.000.000,00	452.615.850,00	97,76	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.620.878.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	61.000.000,00	60.959.956,00	99,93	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	500.000.000,00	336.000.000,00	67,20	0,00
12	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	94,14	699.999.000,00
13	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.872.565.666,00	6.196.050.000,00	90,16	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.441.484.450,00	2.388.428.462,00	97,83	1.035.611.000,00
	JUMLAH	**40.823.216.984,00**	**39.497.951.569,00**	**96,75**	**25.092.690.093,00**

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp687.696.400,00 atau 60,75% dari anggaran sebesar Rp1.132.081.725,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut rincian objek belanja terdiri dari:

Tabel 5.2.10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	17.208.000,00	16.692.000,00	97,00	0,00
2	Belanja Modal Ternak Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	33,20	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	536.827.700,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	472.447.325,00	441.534.600,00	93,46	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	35.201.400,00	23.044.800,00	65,47	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**1.132.081.725,00**	**687.696.400,00**	**60,75**	**536.827.700,00**

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp115.000.000,00. Belanja Modal Aset Lainnya menurut rincian objek terdiri dari:

Tabel 5.2.11 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00	0,00	0,00	149.750.000,00
JUMLAH		**115.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**149.750.000,00**

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp4.581.481.655,00 atau 78,60% dari anggaran sebesar Rp5.828.781.543,21.

Tabel 5.2.12 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

NO.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	78,60%	4.490.000.000,00
TOTAL		**5.828.781.543,21**	**4.581.481.655,00**	**78,60%**	**4.490.000.000,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.581.481.655,00 merupakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang terdiri atas:

- Pemberian Dana Duka sebesar Rp4.110.000.000,00
- Pemberian Dana Bantuan Kebakaran sebesar Rp260.000.000,00
- Pembayaran Hutang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp68.160.175,00
- Pembayaran Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2023 yang dipotong dari DAU bulan April 2025 sebesar Rp38.058.000,00
- Pembayaran Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2024 yang dipotong dari DAU bulan Oktober 2025 sebesar Rp105.263.480,00.

5.1.C Transfer Daerah

Transfer Daerah adalah pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.2.13 Transfer Daerah

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Transfer/Bagi Hasil Ke Desa**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	**100,00**	0,00
	Jumlah	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Realisasi Transfer Daerah sebesar Rp150.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00, terdiri dari bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50.000.000,00, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00, dan kepada Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp50.000.000,00 dalam rangka penanggulangan bencana daerah-daerah tersebut.

2. Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi

Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi untuk periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.2.14 Belanja dan Transfer Menurut Klasifikasi Organisasi Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	120.882.533.253,00	116.037.918.960,00	95,99	132.233.197.574,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	93,30	140.302.647.148,32
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	95,79	31.540.346.282,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	89,58	7.459.350.892,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	98,31	35.410.355.266,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.411.964.125,00	4.094.096.952,00	92,80	4.434.014.846,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	16.815.213.420,00	15.591.550.360,00	92,72	21.820.244.734,00
8	Dinas Sosial Daerah	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	92,99	9.456.997.339,00
9	Dinas Tenaga Kerja Daerah	9.295.620.676,00	9.095.650.067,00	97,85	8.351.777.572,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	82,52	4.432.239.876,00
11	Dinas Pangan Daerah	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	90,83	4.076.956.099,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	94,95	11.154.816.306,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	95,26	4.121.224.537,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	87,87	7.066.924.837,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	87,46	6.248.642.265,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	94,53	9.072.216.428,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	81,41	3.583.995.509,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	96,54	5.015.514.984,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	90,28	5.641.378.946,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	4.090.956.652,00	2.966.694.207,00	72,52	3.488.379.404,00
21	Dinas Pariwisata Daerah	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	96,70	12.547.757.619,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	17.492.703.990,00	15.462.656.566,00	88,39	12.127.725.421,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4.908.299.850,00	4.306.967.661,00	87,75	3.983.699.571,00
24	Sekretariat Daerah	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	93,74	54.184.090.952,00
25	Sekretariat DPRD	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	93,64	35.847.219.264,00
26	Kecamatan Tomohon Utara	12.482.194.566,00	11.966.943.509,00	95,87	13.431.016.298,00
27	Kecamatan Tomohon Tengah	11.504.954.516,00	11.180.918.574,00	97,18	11.912.754.726,00
28	Kecamatan Tomohon Selatan	14.336.009.265,00	13.888.467.604,00	96,88	14.734.951.850,00
29	Kecamatan Tomohon Timur	7.390.946.489,00	7.093.404.043,00	95,97	7.407.157.164,00
30	Kecamatan Tomohon Barat	9.851.449.692,00	9.581.963.508,00	97,26	9.591.001.625,00
31	Inspektorat Daerah	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	90,29	7.841.282.937,00
32	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.355.277.572,00	7.161.201.191,00	85,71	7.706.578.647,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	39.937.332.696,21	37.923.646.053,00	94,96	38.942.125.771,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	92,07	6.696.825.186,00
	Jumlah	**669.215.341.767,21**	**627.970.872.693,00**	**93,84**	**691.865.407.875,32**

3. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Rincian Realisasi Belanja Daerah menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.2.15 Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
0.1.01	PENDIDIKAN	120.596.174.153,00	115.789.934.339,00	96,01%	131.622.658.566,00
0.1.02	KESEHATAN	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	93,30%	140.302.647.148,32
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	95,79%	31.540.346.282,00
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	89,58%	7.459.350.892,00
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.227.177.545,00	19.685.647.312,00	92,74%	26.254.259.580,00
0.1.06	SOSIAL	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	92,99%	9.456.997.339,00
0.2.07	TENAGA KERJA	9.291.541.876,00	9.091.762.067,00	97,85%	8.351.777.572,00
0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	82,52%	4.432.239.876,00
0.2.09	PANGAN	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	90,83%	4.076.956.099,00
0.2.10	LINGKUNGAN HIDUP	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	94,95%	11.154.816.306,00
0.2.11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	95,26%	4.121.224.537,00
0.2.12	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	87,87%	7.066.924.837,00
0.2.13	PERHUBUNGAN	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	87,46%	6.248.642.265,00
0.2.14	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	94,53%	8.866.323.928,00
0.2.15	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	81,41%	3.583.995.509,00
0.2.16	PENANAMAN MODAL	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	96,54%	5.015.514.984,00
0.2.17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	90,28%	5.641.378.946,00
0.2.18	STATISTIK	-	-	-	205.892.500,00
0.2.19	KEBUDAYAAN	286.359.100,00	247.984.621,00	86,60%	610.539.008,00
0.2.20	PERPUSTAKAAN	821.946.007,00	166.101.036,00	20,21%	164.643.701,00
0.2.21	KEARSIPAN	3.269.010.645,00	2.800.593.171,00	85,67%	3.323.735.703,00
0.2.22	KELAUTAN DAN PERIKANAN	315.470.100,00	296.177.955,00	93,88%	47.353.715,00
0.2.23	PARIWISATA	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	96,70%	12.547.757.619,00
0.2.24	PERTANIAN	17.177.233.890,00	15.166.478.611,00	88,29%	12.080.371.706,00
0.3.25	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.078.800,00	3.888.000,00	95,32%	-
0.3.26	PERDAGANGAN	4.252.198.450,00	3.753.214.158,00	88,27%	3.564.667.648,00
0.3.27	PERINDUSTRIAN	656.101.400,00	553.753.503,00	84,40%	419.031.923,00
0.3.28	SEKRETARIAT DAERAH	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	93,74%	54.184.090.952,00
0.3.29	SEKRETARIAT DPRD	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	93,64%	35.847.219.264,00
0.3.30	PERENCANAAN	8.203.911.172,00	7.068.346.191,00	86,16%	7.364.877.067,00
0.3.31	KEUANGAN	39.937.332.696,21	37.923.646.053,00	94,96%	38.942.125.771,00
0.4.01	KEPEGAWAIAN	6.257.135.581,00	5.893.238.414,00	94,18%	5.918.864.783,00
0.4.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	964.298.730,00	755.460.591,00	78,34%	777.960.403,00
0.5.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	151.366.400,00	92.855.000,00	61,34%	341.701.580,00
0.5.02	INSPEKTORAT	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	90,29%	7.841.282.937,00
0.5.03	KECAMATAN	55.565.554.528,00	53.711.697.238,00	96,66%	57.076.881.663,00
0.5.04	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	98,31%	35.410.355.266,00
TOTAL		**669.215.341.767,21**	**627.970.872.693,00**	**93,84%**	**691.865.407.875,32**

5.1.D Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pembiayaan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**9.381.759.939,21**	**9.375.282.776,21**	**99,93%**	**20.864.208.679,37**
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	99,93%	20.864.208.679,37
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**20.570.000.000,00**	**20.559.091.300,00**	**99,95%**	**20.559.091.300,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	4.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	99,93%	16.559.091.300,00
	PEMBIAYAAN *NETTO*	**(11.188.240.060,79)**	**(11.183.808.523,79)**	**99,96%**	**305.117.379,37**

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp9.375.282.776,21 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp9.381.759.939,21.

   Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp9.375.282.776,21 terdiri dari:

   a. Penghematan Belanja sebesar Rp9.381.759.939,21.
   b. Koreksi SiLPA sebesar (Rp6.477.163,00) terdiri dari:
      - Penambahan atas Kurang catat Saldo Awal kas Dana BOP PAUD pada TK Pembina Tomohon sebesar Rp236.800,00;
      - Penambahan atas Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya atas Pembayaran Hutang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp68.160.175,00;
      - Pengurangan atas Koreksi SiLPA yang merupakan Dana BOS yang seharusnya dikembalikan kepada Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2024 sebesar Rp74.874.138,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 sebesar Rp20.559.091.300,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp20.570.000.000,00.

   Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.559.091.300,00 terdiri dari:

   a. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SulutGo sebesar Rp4.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 100 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2025.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.559.091.300,00 yaitu:

- Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.559.091.300,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2024.

3. Pembiayaan *Netto*

Pembiayaan *Netto* sebesar (Rp11.183.808.523,79) atau 99,96% dari anggaran sebesar (Rp11.188.240.060,79).

5.1.E Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.736.593.109,14. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan *netto* selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

A	Pendapatan	Rp660.041.274.325,93	
B	Belanja dan Transfer	Rp628.120.872.693,00	
C	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp31.920.401.632,93	C = A - B
D	Penerimaan Pembiayaan	Rp9.375.282.776,21	
E	Pengeluaran Pembiayaan	Rp20.559.091.300,00	
F	Pembiayaan *Netto*	(Rp11.183.808.523,79)	F = D - E
G	SiLPA	Rp20.736.593.109,14	G = C + F

SiLPA terdiri dari rincian saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BOS, Kas di FKTP dikurangi Kewajiban Utang PFK pada BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran sehingga Saldo Akhir Kas (SiLPA) sebesar Rp20.736.593.109,14. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Perhitungan Kas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	20.154.955.442,14
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	713.659,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	145.537.145,00
5	Kas Dana BOS	63.937.275,00
6	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
7	Kas Dana BOSP	11.460.000,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	576.304.450,00
9	Kas Lainnya	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	0,00
Saldo Akhir Kas (NERACA)		**20.952.907.971,14**
Utang PFK atas kesalahan pengembalian Kas Dana BOS yang seharusnya dikembalikan ke rekening Bendahara Umum Negara, tetapi dikembalikan ke Kas Daerah		(74.874.138,00)
Utang PFK BLUD RSUD Anugerah Tomohon		(141.440.724,00)
Saldo Akhir Kas (SiLPA)		**20.736.593.109,14**
Selisih Kas		**216.314.862,00**

Selisih Kas sebesar Rp216.314.862,00 merupakan Kas Lainnya pada Kas Daerah (Penerimaan) yang merupakan pengakuan utang PFK atas kesalahan pengembalian Kas Dana BOS yang seharusnya dikembalikan ke rekening Bendahara Umum Negara, tetapi dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp74.874.138,00 dan merupakan pengakuan utang PFK sebesar Rp141.440.724,00 pada Kas di BLUD.

Tabel 5.4.1 Rincian Sisa Saldo Kas Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	SISA SALDO KAS TA. 2025	
1	**DAU EARMARKED**		**2.493.996.859,00**
	Pendidikan	2.026.674.493,00	
	Kesehatan	316.237.126,00	
	Kelurahan	126.863.160,00	
	PPPK	24.222.080,00	
2	**DID**		**970.838.047,00**
	IF kinerja tahun sebelumnya	970.838.047,00	
3	**DAK FISIK**		**403.340.641,00**
	Pendidikan		
	PAUD	13.429.100,00	
	Kesehatan dan KB		
	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	88.608.291,00	
	Air Minum		
	Air Minum-Layanan Dasar	252.967.500,00	
	Sanitasi		
	Sanitasi-Layanan Dasar	48.335.750,00	
4	**DAK NON FISIK**		**3.453.147.151,00**
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	627.403.100,00	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	191.699.434,00	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.271.291.175,00	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan	271.485.914,00	
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	629.750.918,00	
	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan pertanian	59.850.000,00	
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	180.088.646,00	
	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan	221.577.964,00	
5	**DAU**		**4.525.328.661,00**
6	**DBH**		**1.695.535.432,00**
7	**PAD**		**5.724.183.295,14**
8	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**		**813.711.218,00**
9	**UTANG PFK**		**74.874.138,00**
JUMLAH			**20.154.955.442,14**

Tabel 5.4.2 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	**Penghematan Belanja Pegawai**		**6.047.191.178,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.565.733.881,00	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.663.320.200,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	307.269.544,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	506.867.553,00	
	Belanja Pegawai BLUD	4.000.000,00	
2	**Penghematan Belanja Barang dan Jasa**		**24.743.766.751,92**
	Belanja Barang	8.078.565.161,67	
	Belanja Jasa	11.923.670.000,65	
	Belanja Pemeliharaan	545.787.390,60	
	Belana Perjalanan Dinas	2.001.254.629,00	
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.090.730.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.311.450,00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.086.448.120,00	
3	**Penghematan Belanja Bunga**		**53.368.646,00**
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	53.368.646,00	
4	**Penghematan Belanja Hibah**		**194.383.613,38**
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.000.000,00	
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,38	
	Belanja Hibah Dana BOSP	104.383.612,00	
5	**Penghematan Belanja Bantuan Sosial**		**1.021.491.430,00**
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	928.829.223,00	
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	92.662.207,00	
6	**Penghematan Belanja Modal**		**7.936.967.566,70**
	Belanja Modal Tanah	209.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.758.951,95	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	842.557.874,75	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.325.265.415,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	444.385.325	
	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000	
7	**Penghematan dari Belanja Tidak Terduga**		**1.247.299.888,21**
	Belanja Tidak Terduga	1.247.299.888,21	
8	**Realisasi Kurang Pengeluaran Pembiayaan**		**10.908.700,00**
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.908.700,00	
9	**JUMLAH PENGHEMATAN BELANJA DAN REALISASI LEBIH PENDAPATAN**		**41.255.377.774,21**
	DIKURANGI		
10	**Realisasi Kurang Pendapatan Asli Daerah**		**12.029.542.937,07**
	Pajak Daerah	4.510.659.652,00	
	Retribusi Daerah	6.382.457.058,00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	719.189.081,00	
	Lain-lain PAD yang Sah	417.237.146,07	
11	**Realisasi Kurang Pendapatan Transfer**		**8.009.983.040,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.538.745.877,00	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.471.237.163,00	
12	**Realisasi Kurang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**472.781.525,00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	472.781.525,00	
13	**Realisasi Kurang Penerimaan Pembiayaan**		**6.477.163,00**
	Koreksi SiLPA	6.477.163,00	
14	**JUMLAH REALISASI KURANG PENDAPATAN DAN KELEBIHAN BELANJA**		**20.518.784.665,07**
15	**SiLPA (9-14)**		**20.736.593.109,14**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kode	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	9.381.759.939,21	20.864.208.679,37
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	9.375.282.776,21	20.864.208.679,37
3	**Sub Total (3 = 1 - 2)**	**6.477.163,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	20.736.593.109,14	9.381.759.939,21
5	**Sub Total (5 = 3 + 4)**	**20.743.070.272,14**	**9.381.759.939,21**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(6.477.163,00)	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6 + 7)**	**20.736.593.109,14**	**9.381.759.939,21**

Penjelasan:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp9.381.759.939,21 berasal dari SiLPA Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2024.
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp9.375.282.776,21 yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kota Tomohon di Tahun Anggaran 2025.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp20.736.593.109,14 berasal dari Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Realisasi Belanja Daerah ditambah Pembiayaan *Netto* Tahun 2025, yaitu:

Surplus/(Defisit)	Rp31.920.401.632,93
Pembiayaan *Netto*	(Rp11.183.808.523,79)
SiLPA	Rp20.736.593.109,14

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp6.477.163,00).
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp20.736.593.109,14 berasal dari SiLPA Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.6 Neraca pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset	1.711.263.406.020,42	1.708.952.360.478,42
Kewajiban	97.212.311.959,19	120.110.691.615,99
Ekuitas	1.614.051.094.061,23	1.588.841.668.862,43

5.3.A ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp1.711.263.406.020,42	**Rp1.708.952.360.478,42**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Tomohon, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.711.263.406.020,42 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.311.045.542,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp1.708.952.360.478,42**.**

Rincian aset Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut.

Tabel 5.6.1 Rincian Aset pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Aset Lancar	53.945.198.791,82	41.532.963.140,86	12.412.235.650,96
Investasi Jangka Panjang	45.432.176.291,00	40.526.281.575,00	4.905.894.716,00
Aset Tetap	1.419.238.240.896,45	1.408.929.047.271,89	10.309.193.624,56
Aset Lainnya	192.647.790.041,15	217.964.068.490,67	(25.316.278.449,52)
Jumlah	**1.711.263.406.020,42**	**1.708.952.360.478,42**	**2.311.045.542,00**

1. Aset Lancar	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp53.945.198.791,82	**Rp41.532.963.140,86**

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Pos-pos Investasi Jangka Pendek antara lain deposito berjangka tiga sampai 12 bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain Piutang Pajak, Retribusi, Denda, Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.945.198.791,82 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp20.154.955.442,14	**Rp8.693.656.425,21**

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adanya kenaikan saldo Kas Daerah yang disebabkan karena realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja sehingga terjadi surplus. Sumber pendanaan surplus tersebut diambil dari SiLPA Tahun 2025.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.154.955.442,14 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di Rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tomohon yaitu:

Tabel 5.6.2 Kas di Kas Daerah

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Rekening Pengeluaran	009.01.14.040001-5	Bank SulutGo	918.477.396,00	545.675.158,00
2	Rekening Penerimaan	009.01.12.000002-1	Bank SulutGo	3.573.996,00	5.931.515,00
3	Rekening Kas Umum Daerah	009.01.12.000004-4	Bank SulutGo	19.229.372.550,14	8.142.049.752,21
4	Rekening Giro	6226286263	Bank BNI	0,00	0,00
5	Rekening Giro	6226889997	Bank BNI	0,00	0,00
6	Rekening Giro	6222268894	Bank BNI	0,00	0,00
7	Rekening Giro	6223636620	Bank BNI	0,00	0,00
8	Rekening Giro	6227776277	Bank BNI	0,00	0,00
9	Rekening Giro	6228826887	Bank BNI	0,00	0,00
10	Rekening Giro	6223368864	Bank BNI	500.000,00	0,00
11	Rekening Giro	6229996961	Bank BNI	3.031.500,00	0,00
12	Rekening Giro	6223366265	Bank BNI	0,00	0,00
13	Rekening Giro	6226226269	Bank BNI	0,00	0,00
14	Rekening Giro	1732982102	Bank BNI	0,00	0,00
Jumlah				**20.154.955.442,14**	**8.693.656.425,21**

Berikut diuraikan peruntukan masing-masing rekening Kas Daerah:

1. Nomor Rekening 009.01.14.040001-5 Bank SulutGo sebesar Rp918.477.396,00 adalah Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Tomohon. Rekening Pengeluaran merupakan rekening tempat untuk membayar semua pengeluaran daerah.
2. Nomor Rekening 009.01.12.000002-1 Bank SulutGo sebesar Rp3.573.996,00 adalah Rekening Penerimaan Pemerintah Kota Tomohon. Rekening Penerimaan merupakan rekening tempat penampungan penerimaan daerah yang setiap hari dipindahbukukan ke RKUD.
3. Nomor Rekening 009.01.12.000004-4 Bank SulutGo sebesar Rp19.229.372.550,14 adalah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Tomohon. RKUD merupakan rekening tempat penyimpanan kas daerah.
4. Nomor Rekening 6226286263 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak BPHTB. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan BPHTB selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
5. Nomor Rekening 6226889997 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.

6. Nomor Rekening 6222268894 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Air Tanah. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Air Tanah selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
7. Nomor Rekening 6223636620 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Parkir. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Parkir selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
8. Nomor Rekening 6227776277 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Hiburan. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Hiburan selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
9. Nomor Rekening 6228826887 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Reklame. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Reklame selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
10. Nomor Rekening 6223368864 Bank BNI sebesar Rp500.000,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Restoran. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Restoran selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
11. Nomor Rekening 6229996961 Bank BNI sebesar Rp3.031.500,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Hotel. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Hotel selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
12. Nomor Rekening 6223366265 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
13. Nomor Rekening 6226226269 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening EPBBP2 Pemerintah Kota Tomohon. Rekening ini merupakan tempat penampungan penerimaan PBB selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.
14. Nomor Rekening 1732982102 Bank BNI sebesar Rp0,00 adalah rekening penerimaan yang merupakan tempat penampungan penerimaan untuk semua jenis pendapatan pajak selain di Rekening Penerimaan Bank SulutGo.

Tahun 2025

Tidak ada selisih Saldo Akhir Kas di BKU dan Saldo Akhir Kas di Rekening Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025.

Tabel 5.6.2.1 Rincian Sisa Saldo Kas di Kas Daerah

NO	URAIAN	SISA SALDO KAS TA. 2025	
1	**DAU EARMARKED**		**2.493.996.859,00**
	Pendidikan	2.026.674.493,00	
	Kesehatan	316.237.126,00	
	Kelurahan	126.863.160,00	
	PPPK	24.222.080,00	
2	**DID**		**970.838.047,00**
	IF kinerja tahun sebelumnya	970.838.047,00	
3	**DAK FISIK**		**403.340.641,00**
	Pendidikan		
	PAUD	13.429.100,00	
	Kesehatan dan KB		
	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	88.608.291,00	
	Air Minum		
	Air Minum-Layanan Dasar	252.967.500,00	
	Sanitasi		
	Sanitasi-Layanan Dasar	48.335.750,00	
4	**DAK NON FISIK**		**3.453.147.151,00**
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	627.403.100,00	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	191.699.434,00	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.271.291.175,00	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan	271.485.914,00	
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	629.750.918,00	
	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan pertanian	59.850.000,00	
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	180.088.646,00	
	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan	221.577.964,00	
5	**DAU**		**4.525.328.661,00**
6	**DBH**		**1.695.535.432,00**
7	**PAD**		**5.724.183.295,14**
8	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**		**813.711.218,00**
9	**UTANG PFK**		**74.874.138,00**
JUMLAH			**20.154.955.442,14**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp74.874.138 pada tabel merupakan Kas Daerah (Penerimaan) yang merupakan pengakuan utang PFK atas kesalahan pengembalian Kas Dana BOS yang seharusnya dikembalikan ke rekening Bendahara Umum Negara, tetapi dikembalikan ke Kas Daerah.

Tahun 2024

Rekening Kas Umum Daerah 009.01.12.000004-4 Bank SulutGo sebesar Rp8.210.209.927,21 merupakan Saldo Akhir Kas per tanggal 31 Desember 2024. Saldo Akhir Kas di BKU per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.142.049.752,21. Terdapat selisih sebesar Rp68.160.175,00 terdiri dari

Rp59.751.842,00 dan Rp8.408.333,00 karena sudah diakui di Kas Lainnya atas Utang PFK-PPh 21 yang disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Rekening Pengeluaran 009.01.12.000001-5 Bank SulutGo sebesar Rp490.764.358,00 merupakan Saldo Akhir Kas per tanggal 31 Desember 2024. Saldo Akhir Kas di BKU per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp545.675.158,00. Terdapat selisih kurang sebesar Rp54.910.800,00 karena adanya kesalahan pemindahbukuan berupa pengeluaran kas di rekening tanpa adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke SINODE GMIM Tomohon dari PT. Bank SulutGo.

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada Lampiran 4.1 Saldo Kas di Kas Daerah, dan Rincian Mutasi Saldo Kas Daerah dapat dilihat pada Lampiran 4.2 Daftar Mutasi Saldo Kas Daerah.

2)	**Kas di Bendahara**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Penerimaan	**Rp713.659,00**	**Rp0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada Bendahara Penerimaan.

Tabel 5.6.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	713.659,00	0,00
	JUMLAH	**713.659,00**	**0,00**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada Lampiran 5.1 Kas di Bendahara Penerimaan.

Penjelasan saldo Kas di Bendahara Penerimaan:

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp713.659,00 pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dalam bentuk kas di bank Rekening Penerimaan Bank SulutGo Nomor 00901120000022 yang digunakan untuk penerimaan Pendapatan PBB-P2 melalui QRIS, dipindahbukukan ke Kas Daerah tanggal 30 Januari 2026.
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

3)	**Kas di Bendahara**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Pengeluaran	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tahun 2025 Pemerintah Kota Tomohon terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Tomohon tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran atau sebesar Rp0,00.

Rincian Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 6.1** Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, rincian Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 6.2** Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran, rincian Daftar Sisa UP dapat dilihat pada **Lampiran 6.3** Daftar Sisa UP, rincian Daftar Sisa TU dapat dilihat pada **Lampiran 6.4** Daftar Sisa TU, dan rincian Daftar Pengembalian Belanja pada **Lampiran 6.5** Daftar Pengembalian Belanja.

4) Kas di BLUD	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp145.537.145,00	**Rp3.697.300,00**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024 baru menerapkan BLUD pada RSUD Anugerah Tomohon.

Tabel 5.6.2.3 Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.500.000,00
2	Rekening Penerimaan BNI No 2212001227	2.596.421,00	2.197.300,00
3	Rekening Pengeluaran BNI No 181721806	1.500.000,00	0,00
4	Rekening Transitoris BNI No 2018636135	141.440.724,00	0,00
	JUMLAH	**145.537.145,00**	**3.697.300,00**

Penjelasan saldo Kas di BLUD:

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp145.537.145,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Penerimaan BNI Nomor 2212001227 yang digunakan untuk transaksi penerimaan dari RSUD Anugerah sebesar Rp2.596.421,00;

- Rekening Pengeluaran BNI Nomor 1817218605 yang digunakan untuk transaksi pengeluaran dari RSUD Anugerah sebesar Rp1.500.000,00;
- Rekening Transitoris BNI Nomor 2018636135 yang digunakan untuk transaksi pembayaran pajak dari RSUD Anugerah sebesar Rp141.440.724,00. Saldo ini untuk pembayaran pajak yang belum dibayar (utang PFK) per 31 Desember 2025.

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.697.300,00, terdiri dari Saldo Kas Tunai Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 dan Saldo pada BLUD RSUD Anugerah Tomohon (Rekening BNI Penerimaan Nomor 2212001227) sebesar Rp2.197.300,00.

5) Kas Dana BOS	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp63.937.275,00	**Rp0,00**

Kas Dana BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah) merupakan Dana BOS untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Saldo Kas Dana BOS Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 senilai Rp63.937.275,00 merupakan Kas Dana BOS yang belum terpakai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.3 Kas Dana BOS

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Kas Dana BOS Negeri	63.937.275,00	0,00
2	Kas Dana BOS Swasta	0,00	0,00
3	Kas Dana Tunjangan Guru ASN Daerah	0,00	0,00
	JUMLAH	**63.937.275,00**	**0,00**

Saldo Kas Dana BOS Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 karena Saldo Kas BOS pada tahun 2024 sebesar Rp67.692.000,00 dicatat pada Kas BOSP (dapat dilihat pada hal 112).

Rincian mutasi Kas Dana BOS pada Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 7.1** Daftar Saldo Kas Dana BOS Negeri, rincian Saldo Kas Jasa Giro Dana BOS Satdiknas Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 7.2** Daftar Saldo Kas Jasa Giro Dana BOS Satdiknas Negeri, adapun rincian Saldo Kas BOS Satdiknas Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 7.3** Daftar Saldo Kas BOS Satdiknas Swasta, dan rincian Saldo Kas Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7.8** Saldo Kas Dana Tunjangan Guru ASN Daerah.

6)	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	31 Desember 2025 Rp0,00	31 Desember 2024 Rp0,00

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di Puskesmas. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas dari Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.6.4 Kas di Bendahara FKTP

No	Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Lansot	0,00	0,00
2	Puskesmas Pangolombian	0,00	0,00
3	Puskesmas Matani	0,00	0,00
4	Puskesmas Rurukan	0,00	0,00
5	Puskesmas Taratara	0,00	0,00
6	Puskesmas Kakaskasen	0,00	0,00
7	Puskesmas Tinoor	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Rincian mutasi Kas di Bendahara FKTP pada Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 8.1** Kas Dana Kapitasi pada FKTP.

7)	Kas Dana BOSP	31 Desember 2025 Rp11.460.000,00	31 Desember 2024 Rp79.152.000,00

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP) adalah dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Pengelolaan Dana BOSP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Ringkasan Kas Dana BOSP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6.5 Kas Dana BOSP

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Kas Dana BOS Negeri	-	67.692.000,00
2	Kas Dana BOS Swasta	-	-
3	Kas BOP PAUD Negeri	-	-
4	Kas BOP PAUD Swasta	-	-
5	Kas BOP Pendidikan Kesetaraan Negeri	-	-
6	Kas BOP Pendidikan Kesetaraan Swasta	11.460.000,00	11.460.000,00
	Jumlah	**11.460.000,00**	**79.152.000,00**

Kas Dana BOSP Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.460.000,00 yang terdiri dari:

1. Dana BOS

   Kas Dana BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah) merupakan Dana BOS untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Saldo Akhir Kas Dana BOS di Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 karena Saldo Akhir Kas Dana BOS telah dicatat (pindah rekening) di Kas Dana BOS hal 110 sebesar Rp63.937.275,00.

2. Dana BOP PAUD

   Dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Saldo Akhir Kas Dana BOP PAUD sebesar Rp0,00. Daftar Saldo Kas Dana PAUD Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 7.4** dan Daftar Saldo Kas Dana PAUD Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 7.5**.

3. Dana BOP Kesetaraan

   Dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan) merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Saldo Akhir Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp11.460.000,00. Daftar Saldo Kas Dana Pendidikan Kesetaraan Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 7.6** dan Daftar Saldo Kas Dana Pendidikan Kesetaraan Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 7.7**.

8) Kas Dana BOK **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**

Rp576.304.450,00 **Rp605.254.214,00**

Kas Dana BOK merupakan Kas Dana Operasional Kesehatan. Pemerintah Kota Tomohon menerima Dana Bantuan Opersional Kesehatan untuk Puskesmas dari Pemerintah Pusat melalui Transfer Pusat DAK (Dana Alokasi Khusus) Non-Fisik langsung ke Rekening Puskesmas. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kota Tomohon mempunyai Kas Dana BOK sebesar Rp576.304.450,00 per 31 Desember 2025.

Ringkasan Kas Dana BOK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6.6 Kas Dana BOK

No	Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Lansot	54.227.200,00	77.779.358,00
2	Puskesmas Pangolombian	75.211.002,00	62.968.383,00
3	Puskesmas Matani	31.733.493,00	62.601.293,00
4	Puskesmas Rurukan	146.932.198,00	112.707.129,00
5	Puskesmas Taratara	92.069.792,00	94.653.317,00
6	Puskesmas Kakaskasen	124.139.079,00	85.963.175,00
7	Puskesmas Tinoor	51.991.686,00	108.581.559,00
	Jumlah	**576.304.450,00**	**605.254.214,00**

Kas Dana BOK pada Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 9.1**

9) Kas Lainnya **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**

Rp0,00 **Rp159.032.718,00**

Tabel 5.6.7 Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Lainnya dari Rekening Transitoris PFK Pemkot	0,00	15.998.405,00
2	Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD)	0,00	68.160.175,00
3	Kas Lainnya dari Kas Daerah (Penerimaan)	0,00	74.874.138,00
	Jumlah	**0,00**	**159.032.718,00**

Tahun 2025

Kas Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Tahun 2024

Kas Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp159.032.718,00 terdiri dari:

- Kas Lainnya dari Rekening Transitoris PFK Pemkot (Rekening Bank SulutGo Nomor 009 01.12.000029-2 yang merupakan rekening untuk pembayaran PFK dari SP2D mempunyai saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.810.283,00 tetapi yang diakui sebagai Kas Lainnya untuk Utang PFK yang belum terbayar sebesar Rp15.998.405,00. Kas Lainnya sebesar Rp15.998.405,00 disetorkan pada 24 Januari 2024. Saldo yang tidak diakui pada Kas Lainnya sebesar Rp1.811.878,00 terdiri dari Rp1.600.000,00 yang merupakan nilai SP2D Nomor 10488/SP2D-LS/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dari Dinas Koperasi dan UMKM yang salah dipindahbukukan oleh Bank SulutGo dan Rp211.878,00 yang belum dapat diklasifikasikan sebagai utang PFK.
- Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD) sebesar Rp68.160.175,00 terdiri dari Rp59.751.842,00 dan Rp8.408.333,00 yang merupakan Reklasifikasi dari Kas Daerah ke Kas Lainnya atas Utang PFK-PPh 21 yang disetorkan di Kas Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Kas tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara namun disetor ke Kas Daerah. Kas Lainnya dari Kas Daerah (RKUD) sebesar Rp68.160.175,00 telah disetorkan pada tanggal 26 Maret 2025 dengan nomor SP2D 71.73/04.0/000097/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/92/3/2025.
- Kas Lainnya dari Kas Daerah (Penerimaan) sebesar Rp74.874.138,00 yang merupakan pengakuan utang PFK atas kesalahan pengembalian Kas Dana BOS yang seharusnya dikembalikan ke rekening Bendahara Umum Negara, tetapi dikembalikan ke Kas Daerah.

Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 10.1**.

Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Kas Lainnya yang hanya diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan ini dan tidak dimuat dalam Neraca yaitu Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Tahun 2025 yang diberikan PT. Bank SulutGo berdasarkan komposisi saham atau penyertaan modal dari Pemerintah Kota Tomohon.

Tahun 2025

Pemerintah Kota Tomohon mendapat Dana CSR Tahun 2025 sebesar Rp444.000.000,00. Realisasi Dana CSR sebesar Rp158.000.000,00 yang disetorkan langsung ke Rekening Pemohon Dana CSR berdasarkan Surat Wali Kota dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 10.2** Rekapitulasi Penggunaan Dana CSR Tahun 2025. Terdapat sisa Dana CSR Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 10.3** Rekapitulasi Penggunaan Dana CSR Tahun 2024.

Tahun 2024

Pemerintah Kota Tomohon mendapat Dana CSR Tahun 2024 sebesar Rp597.000.000,00. Realisasi Dana CSR sebesar Rp750.000.000,00 yang disetorkan langsung ke Rekening Pemohon Dana CSR berdasarkan Surat Wali Kota dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 10.3** Rekapitulasi Penggunaan Dana CSR Tahun 2024.

10) Piutang Pajak	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
Netto	**Rp10.246.647.408,50**	**Rp9.840.365.980,75**

Piutang Pajak *Netto* yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.246.647.408,50, terdiri dari:

Tabel 5.6.8 Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	365.715.843,00	349.533.655,00
2	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	707.336.117,00	707.605.542,00
4	PBB P2	20.897.261.624,00	18.617.438.589,00
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	86.943.867,00	86.943.867,00
6	PBJT-Restoran	116.411.815,00	116.411.815,00
7	PBJT-Hotel	10.411.864,00	10.411.864,00
8	PBJT-Parkir	3.360.000,00	3.360.000,00
9	PBJT-Hiburan	230.000,00	230.000,00
Jumlah Piutang Pajak		**22.190.655.755,00**	**19.894.919.957,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		**11.944.008.346,50**	**10.054.553.976,25**
Jumlah Piutang Pajak Netto		**10.246.647.408,50**	**9.840.365.980,75**

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 11.1** Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dilakukan Penyisihan

Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.6.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	238.145.061,25	238.145.061,25
2	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	401.871.757,75	284.044.215,00
4	PBB P2	11.083.649.356,50	9.355.744.462,50
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	86.943.867,00	43.471.933,50
6	PBJT-Restoran	116.411.815,00	116.411.815,00
7	PBJT-Hotel	10.411.864,00	10.411.864,00
8	PBJT-Parkir	3.360.000,00	3.110.000,00
9	PBJT-Hiburan	230.000,00	230.000,00
	Jumlah	**11.944.008.346,50**	**10.054.553.976,25**

Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 11.2** Daftar Penyisihan Piutang dan **Lampiran 11.3** Daftar Penyisihan Piutang menurut Umur Piutang.

Upaya penagihan Piutang Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah dengan turun langsung ke Wajib Pajak yang salah satunya dalam penagihan untuk Piutang PBB-P2 disampaikan melalui Kelurahan.

11)	**Piutang**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Retribusi *Netto*	**Rp171.907.076,00**	**Rp0,00**

Piutang Retribusi *Netto* merupakan tunggakan atas retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tomohon yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2025 dan disisihkan berdasarkan Jenis Piutang dan Umur Piutang. Piutang Retribusi *Netto* yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp171.907.076,00. Berikut disajikan rincian Piutang Retribusi *Netto* Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025.

Tabel 5.6.9 Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	171.907.076,00	0,00
Piutang Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00
Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00
Piutang Izin Trayek	0,00	200.000,00
Piutang Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00
Jumlah Piutang Retribusi	**203.461.255,00**	**31.754.179,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	**31.554.179,00**	**31.754.179,00**
Jumlah Piutang Retribusi Netto	**171.907.076,00**	**0,00**

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 11.1** Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.6.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Penyisihan Piutang Izin Trayek	0,00	200.000,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00
	Jumlah	**31.554.179,00**	**31.754.179,00**

Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 11.2** Daftar Penyisihan Piutang dan **Lampiran 11.3** Daftar Penyisihan Piutang Menurut Umur Piutang.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
12)	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**Rp3.690.962.405,00**	**Rp3.080.810.919,00**

Tahun 2025

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp3.690.962.405,00 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank SulutGo Nomor 04 tanggal 10 Februari 2026 pada Keputusan Pertama memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan Dana Setoran Modal beberapa Pemegang Saham. Pemerintah Kota Tomohon menerima Dividen secara proporsional berdasarkan *share* saham per 31 Desember 2025. Dividen ini diterima pada tanggal 24 Februari 2026.

Tahun 2024

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp3.080.810.919,00 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank SulutGo Nomor 01 tanggal 09 April 2025 pada Agenda II tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 (Dividen, Cadangan, Bonus Pegawai dan Tantiem), Pemerintah Kota Tomohon menerima Dividen secara proporsional berdasarkan *share* saham per 31 Desember 2024. Dividen ini diterima pada tanggal 16 April 2025.

13) **Piutang Transfer**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp4.592.907.034,00	**Rp11.469.021.531,00**

Piutang Transfer terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00.

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp4.592.907.034,00 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah terbayar.

Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan
- Pajak Air Permukaan (PAP).

Piutang Transfer Tahun Anggaran 2024 merupakan Pendapatan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disalurkan kepada Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp11.469.021.531,00 berdasarkan pada Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut rincian Piutang Transfer Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggran 2025:

Tabel 5.6.10 Piutang Transfer

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH - PKB)	0,00	3.677.041.600,00
2	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH - BBN KB)	0,00	2.370.166.200,00
3	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH - PBB KB)	4.582.581.236,68	5.340.733.165,00
4	Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (DBH - PAP)	10.325.797,32	81.080.566,00
	Jumlah	**4.592.907.034,00**	**11.469.021.531,00**
	Jumlah Penyisihan Transfer	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Piutang Transfer Netto	**4.592.907.034,00**	**11.469.021.531,00**

Mutasi Piutang Transfer Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 11.1** Daftar Piutang Pendapatan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.6.10.1 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH - PKB)	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH - BBN KB)	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH - PBB KB)	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (DBH - PAP)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Piutang Tahun 2025 bernilai Rp0,00 karena Piutang Transfer Daerah Tahun 2024 berupa DBH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi langsung disalurkan pada Tahun 2025 sehingga umur piutang masih 0 tahun.

14) **Piutang Lain-lain**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
Netto	**Rp1.343.362.580,00**	**Rp3.345.911.483,00**

Piutang Lain-lain *Netto* yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.343.362.580,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.11 Piutang Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**386.015.316,00**	**1.293.105.056,00**
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD	379.500.000,00	271.500.000,00
2	Piutang TGR	6.515.316,00	0,00
3	Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek	0,00	19.000,00
4	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	1.021.586.056,00
B	**Piutang Pendapatan Lainnya**	**982.847.264,00**	**2.073.825.427,00**
5	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	982.847.264,00	2.073.825.427,00
C	**Piutang lainnya**	**0,00**	**0,00**
6	Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Lain-lain (A+B+C)	**1.368.862.580,00**	**3.366.930.483,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain		**25.500.000,00**	**21.019.000,00**
Jumlah Piutang Lain-Lain Netto		**1.343.362.580,00**	**3.345.911.483,00**

Mutasi Piutang Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 11.1** Daftar Piutang Pendapatan.

Penjelasan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

(1) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2025 sebesar Rp379.500.000,00 merupakan penambahan Piutang sebesar Rp198.000.000,00 untuk 33 kios yang belum membayar periode Tahun 2025 dan Piutang dari Hasil Sewa BMD Kios KSU pada PD. Pasar sebesar Rp271.500.000,00 untuk 31 kios yang belum membayar sewa periode Tahun 2024.

(2) Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp6.515.316,00 merupakan Pengurangan Persediaan ATK dari Dinas Perhubungan karena tidak adanya fisik dan sudah terbayar tanggal 29 April 2026.

(3) Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp0,00 merupakan sisa piutang sebesar Rp19.000,00 Tahun 2018 yang ketetapannya bersamaan dengan Piutang Retribusi Ijin Trayek dan telah dibayar pada tanggal 27 Februari 2025.

(4) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp0,00 merupakan klaim *Covid* BPJS Kesehatan untuk tahun 2020-2022 sebesar

Rp1.021.351.300,00 yang sudah dibayarkan oleh BPJS tanggal 28 Februari 2025 dan klaim Santunan Pasien Jasa Raharja bulan Oktober 2024 sebesar Rp234.756,00 yang sudah dibayarkan oleh Jasa Raharja tanggal 29 Agustus 2025.

Penjelasan Piutang Pendapatan Lainnya:

(5) Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah (Bonus Produksi) per 31 Desember 2025 sebesar Rp982.847.264,00,00 merupakan Piutang Bonus Produksi Tahun 2025 Triwulan IV sesuai berita acara rekonsiliasi dengan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong tanggal 11 Februari 2026 yang diterima pendapatannya pada 11 Mei 2026.

Penjelasan Piutang Lainnya:

(6) Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar per 31 Desember 2025 sebesar 0,00.

Rincian Daftar Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 11.4** Daftar Piutang Lainnya.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang dan Jenis Piutang yaitu Piutang Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.6.11.1 Penyisihan Piutang Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**25.500.000,00**	**21.019.000,00**
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD	25.500.000,00	21.000.000,00
2	Piutang Denda Retribusi Ijin Trayek		19.000,00
B	**Piutang Pendapatan Lainnya**	**0,00**	**0,00**
3	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00
C	**Piutang lainnya**	**0,00**	**0,00**
4	Piutang Lainnya Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain (A+B+C)	**25.500.000,00**	**21.019.000,00**

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 11.2** Daftar Penyisihan Piutang dan **Lampiran 11.3** Daftar Penyisihan Piutang Menurut Umur Piutang.

15)	**Beban Dibayar Di Muka**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp1.210.467.697,52	**Rp0,00**

Beban Dibayar Di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar beban yang belum menjadi kewajiban pada periode pelaporan saat ini. Pembayaran ini diakui sebagai aset lancar dalam neraca dan baru dibebankan pada Laporan Operasional (LO) ketika manfaat barang/jasa tersebut telah diperoleh.

Saldo Beban Dibayar Di Muka yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.210.467.697,52 yang terdiri dari:

Tabel 5.6.12 Rincian Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025

No	Nama Paket	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Beban Dibayar Di Muka (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah				
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Kinilow	528.089.000,00	369.979.153,40	158.109.846,60
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Rurukan Satu	528.089.000,00	369.820.726,70	158.268.273,30
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Walian	528.089.000,00	375.735.323,50	152.353.676,50
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Woloan Dua	541.622.250,00	384.724.284,18	156.897.965,82
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Pangolombian	541.623.000,00	405.621.464,70	136.001.535,30
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah				
1	Bantuan Prasarana Pertanian kepada Kelompok Tani/*Screen House*	792.000.000,00	343.173.600,00	448.826.400,00
			Jumlah	1.210.457.697,52

16)	**Persediaan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp11.736.036.619,66	**Rp4.256.060.569,90**

Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp11.736.036.619,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.13 Persediaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bahan Bakar/Pelumas	60.000.000,00	0,00
2	Bahan Kimia	118.849.550,00	0,00
3	Bahan Lainnya	2.385.833.520,69	1.698.126.605,59
4	Suku Cadang	56.631.378,00	16.398.112,00
5	ATK	77.874.217,00	53.658.882,00
6	Kertas dan Cover	0,00	325.000,00
7	Bahan Cetak	160.656.100,00	134.024.750,00
8	Alat Listrik	76.009.767,00	2.028.000,00
9	Benda Pos/Materai	3.730.000,00	2.870.000,00
10	Perlengkapan Dinas	2.600.000,00	24.000.000,00
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	75.125.000,00	0,00
12	Suvenir/ Cendera Mata	0,00	14.250.000,00
13	Alat/Bahan Untuk Keg. Ktr Lainnya	100.779.609,00	9.871.800,00
14	Obat-obatan	3.645.639.336,24	884.859.850,31
15	Persediaan utk Diserahkan	4.382.771.403,48	1.033.824.350,00
16	Natura	515.647.238,25	381.823.220,00
17	Pakan	73.889.500,00	0,00
	Jumlah	**11.736.036.619,66**	**4.256.060.569,90**

Rincian Daftar Saldo Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 12.2** Daftar Saldo Persediaan.

Terdapat Persediaan yang sudah dikuasai pihak ketiga/masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.6.13.1 Persediaan yang Dikuasai Pihak Ketiga/Masyarakat

No	Perangkat Daerah	Persediaan yang Dikuasai Pihak Ketiga	Persediaan yang Dikuasai Masyarakat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	2.615.994.225,00	25.043.487,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	7.492.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	0,00	761.641.297,52
4	Dinas Sosial Daerah	0,00	379.650.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja Daerah	0,00	333.609.852,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	0,00	20.900.000,00
8	Dinas Pangan Daerah	0,00	61.653.488,00
9	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	0,00	1.013.431.494,00
10	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	0,00	179.154.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	2.629.500,00
	Jumlah	**2.615.994.225,00**	**2.785.205.618,52**

Selain Nilai Persediaan pada Neraca, terdapat Persediaan Barang yang Kadaluwarsa/Usang pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp146.496.740,00 berupa Obat Kadaluwarsa di Instalasi Farmasi;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp152.858.000,00 berupa blanko Kutipan Pencatatan Sipil sebesar Rp54.725.000,00, Formulir Pencatatan Sipil sebesar Rp1.108.000,00, Buku Register Akta sebesar Rp4.100.000,00 dan Blanko Kutipan Pencatatan Sipil sebesar Rp92.925.000,00; dan
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.767.248,00 berupa Karcis Kebersihan.

2. Investasi Permanen	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp45.432.176.291,00	**Rp40.526.281.575,00**

Investasi permanen merupakan nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada:

Tabel 5.6.14 Investasi Permanen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT. Bank Sulut Go	24.854.700.000,00	20.854.700.000,00
PDAM	15.713.996.716,00	14.954.714.087,00
PD. Pasar	4.863.479.575,00	4.716.867.488,00
Jumlah	**45.432.176.291,00**	**40.526.281.575,00**

Perhitungan untuk masing-masing Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Lampiran 13.2 Rekapan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Penjelasan:

a. PT. Bank SulutGo

Manfaat ekonomis dari investasi pada PT. Bank SulutGo tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT. Bank SulutGo.

Selama Tahun 2016 terdapat penambahan penyertaan modal Rp1.001.200.000,00 atau 10.012 lembar saham berdasarkan surat dari Bank SulutGo Nomor 76 tertanggal 30 Juni 2016 (Akta RUPS Nomor 76 Tanggal 30 Juni 2016) yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935695.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama PT. Bank SulutGo tanggal 12 Oktober 2015

sesuai dengan Akta Nomor 16 yang telah dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0943848.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 13.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Penyertaan Modal kepada PT. Bank SulutGo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo. Di dalam peraturan tersebut, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa jumlah Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2026 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan uraian per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 790/Bag.Hukum/SK/III/136-2021 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi tanggal 16 Maret 2021.
2. Tahun 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi tanggal 17 Februari 2022.
3. Tahun 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 151 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2023 yang terealisasi tanggal 6 Februari 2023.
4. Tahun 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi tanggal 29 Januari 2024.

5. Tahun 2025 sebesar 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 100 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2025 yang terealisasi tanggal 26 Maret 2025.

Dengan demikian penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo per 31 Desember 2025 sebesar 24.854.700.000,00 terdiri dari 248.547 lembar saham dengan nilai per lembar Rp100.000,00.

Metode pencatatan penyertaan modal untuk PT. Bank SulutGo adalah menggunakan metode biaya karena penyertaan modal kurang dari 20%.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada Bank SulutGo dapat dilihat pada Lampiran 13.3 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah dan Lampiran 13.4 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

b. PDAM Kota Tomohon

Perusahaan Air Minum Kota Tomohon berasal dari pemekaran PDAM Kabupaten Minahasa. PDAM Kabupaten Minahasa berasal dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Minahasa yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 tanggal 26 November 1980. Pergantian dari Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Perda Nomor Tahun 1990, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, PDAM Kota Tomohon dipisahkan dari PDAM Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Daerah Wali Kota Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon. PDAM Kabupaten Minahasa menyerahkan aset ke PDAM Kota Tomohon sesuai Berita Acara Penyerahan Aset dan Pengelolaan dari PDAM Minahasa ke PDAM Tomohon tanggal 09 Mei 2007.

Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 24 Februari Tahun 2014. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon, maka mulai Tahun 2017 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Tomohon terjadi penambahan yang akan direalisasikan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2017

   Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 191 Tahun 2017 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;
2. Tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2018

   Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 190 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018; dan
3. Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terealisasi Tahun 2019

   Keputusan Wali Kota Nomor 189 Tahun 2019 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penerima Dana Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.954.714.087,00 sesuai dengan Saldo pada Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Kota Tomohon per 31 Desember 2024 yang dihitung dengan menggunakan metode Ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada **Lampiran 13.1** Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2025, saldo Ekuitas PDAM sebesar Rp15.713.996.716,00 adanya penambahan nilai Ekuitas sebesar Rp759.282.629,00 dibandingkan saldo Ekuitas PDAM Tahun 2024 sebesar Rp14.954.714.087,00.

Penambahan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp759.282.629,00 sesuai dengan penambahan nilai Ekuitas dari Laporan Keuangan *Audited* PDAM Kota Tomohon sehingga jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kota Tomohon sebesar Rp15.713.996.716,00.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada PDAM dapat dilihat pada **Lampiran 13.3** Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan **Lampiran 13.4** Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca.

c. PD. Pasar Kota Tomohon

Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar) Kota Tomohon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar yang berkedudukan sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada PD. Pasar pada tanggal 24 Februari Tahun 2014 sebesar Rp11.411.023.000,00 berupa Barang Milik Daerah. Pencatatan nilai penyertaan modal pada PD. Pasar dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 13.1 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2025, saldo Ekuitas PD. Pasar sebesar Rp4.863.479.575,00 adanya penambahan nilai Ekuitas sebesar Rp146.612.087,00 dibandingkan saldo Ekuitas PD. Pasar Tahun 2024 sebesar Rp4.716.867.488,00.

Penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah Tahun 2024 sebesar Rp146.612.087,00 sesuai dengan penambahan nilai Ekuitas dari Laporan Keuangan *Audited* PD. Pasar Kota Tomohon sehingga jumlah penyertaan modal pada PD. Pasar Kota Tomohon sebesar Rp4.863.479.575,00.

Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan Neraca pada PD. Pasar dapat dilihat pada **Lampiran 13.3** Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi dan **Lampiran 13.4** Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca.

3. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp1.419.238.240.896,45	**Rp1.408.929.047.271,89**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap milik Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.419.238.240.896,45 atau meningkat sebesar Rp10.309.193.624,56 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp1.408.929.047.271,89.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Aset Tetap

Jenis	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Bertambah/ (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	415.887.649.663,08	410.218.345.663,08	5.669.304.000,00
Peralatan dan Mesin	332.737.257.745,98	314.529.108.272,98	18.208.149.473,00
Gedung dan Bangunan	562.624.321.182,29	533.637.951.366,42	28.986.369.815,87
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.438.637.211.762,68	1.388.183.721.093,86	50.453.490.668,82
Aset Tetap Lainnya	5.644.644.888,60	5.421.350.988,60	223.293.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.205.302.510,08	20.316.829.939,23	(5.111.527.429,15)
Akumulasi Penyusutan	(1.351.498.146.856,26)	(1.263.378.260.052,28)	(88.119.886.803,98)
Jumlah	**1.419.238.240.896,45**	**1.408.929.047.271,89**	**10.309.193.624,56**

Rincian Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dapat dilihat pada Lampiran 14.1 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas nilai Aset Tetap Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

a. Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp415.887.649.663,08	**Rp410.218.345.663,08**

Nilai Aset Tanah Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp415.887.649.663,08 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 5.7.1 Rincian Aset Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Daftar Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.887.813.720,00	11.887.813.720,00
2	Dinas Kesehatan	534.992.000,00	0,00
	Puskesmas Lansot	917.317.240,00	917.317.240,00
	Puskesmas Pangolombian	308.967.200,00	308.967.200,00
	Puskesmas Matani	1.288.604.400,00	1.288.604.400,00
	Puskesmas Rurukan	709.112.354,50	709.112.354,50
	Puskesmas Taratara	180.211.560,00	180.211.560,00
	Puskesmas Kakaskasen	662.288.320,00	662.288.320,00
	Puskesmas Tinoor	377.313.000,00	377.313.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	2.503.959.200,00	2.503.959.200,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.813.294.355,00	312.813.294.355,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.708.206.360,00	8.708.206.360,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.891.000,00	96.891.000,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00	0,00
11	Dinas Pangan Daerah	1.121.294.600,00	1.121.294.600,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.800.623.079,90	2.800.623.079,90
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	
15	Dinas Perhubungan Daerah	6.138.100.120,00	6.138.100.120,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.815.445.200,00	2.815.445.200,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata	6.075.620.000,00	6.075.620.000,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	4.869.442.375,98	4.869.442.375,98
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.263.938.560,00	2.263.938.560,00
24	Sekretariat Daerah	8.122.063.760,00	8.122.063.760,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.806.238.612,30	10.671.926.612,30
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manus	0,00	0,00
29	Inspektorat Daerah	349.978.000,00	349.978.000,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	2.410.593.440,00	2.410.593.440,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	2.112.548.480,00	2.112.548.480,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	16.367.067.400,00	16.367.067.400,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	2.751.419.600,00	2.751.419.600,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	894.305.725,40	894.305.725,40
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
JUMLAH		**415.887.649.663,08**	**410.218.345.663,08**

Penjelasan atas Aset Tanah selama Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Penambahan 4 (empat) bidang tanah yang berasal dari hibah Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp5.134.312.000,00 yang dicatatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dengan rincian:

Tabel 5.7.1.1 Penambahan Aset Tanah berasal dari Hibah

No	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang (Rp.)	Berita Acara Serah Terima/dokumen pendukung lainnya	
						Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Rampasan Negara	2322K/PID.SUS/2011 / 04 Januari 2012 29/PID/TPK/2011/PT.DKI / 19 Agustus 2011	1	Bidang	2.865.307.000,00	2/14/2025	BA-04/Ek.11/26/02/2025; 066/WKT/II-2025
2	Tanah Bangunan Peternakan Babi	2322K/PID.SUS/2011 / 04 Januari 2012	1	Bidang	642.546.000,00	2/14/2025	BA-04/Ek.11/26/02/2025; 066/WKT/II-2025
3	Tanah barang bukti No. 129	2322K/PID.SUS/2011 / 04 Januari 2012 29/PID/TPK/2011/PT.DKI / 19 Agustus 2011	1	Bidang	347.602.000,00	2/14/2025	BA-04/Ek.11/26/02/2025; 066/WKT/II-2025
4	Tanah barang Bukti No 2735-2741 dan Barang Bukti No2740	21K/PID.SUS/2017 / 29 Maret 2017 2322K/PID.SUS/2012 / 04 Januari 2012 29/PID/TPK/2011/PT.DKI / 19 Agustus 2011	1	Bidang	1.278.857.000,00	2/14/2025	BA-04/Ek.11/26/02/2025 / 066/WKT/II-2025
JUMLAH					**5.134.312.000,00**		

2) Penambahan 4 (empat) bidang tanah pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon senilai Rp534.992.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.1.2 Penambahan Aset Tanah berasal dari Belanja Modal

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp.)	Jasa Appraisal (Rp.)	Total	Tanggal Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Jasa Aprailsal Tanah Puskesmas Pembantu Pangolombian	60.000.000,00	29.748.000,00	89.748.000,00	11/26/2025
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Jasa Aprailsal Tanah Puskesmas Pembantu Taratara	212.000.000,00	29.748.000,00	241.748.000,00	11/26/2025
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Jasa Apraisal Tanah Puskesmas Pembantu Kakaskasen	44.000.000,00	29.748.000,00	73.748.000,00	11/27/2025
4	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Jasa Apraisal Tanah Puskesmas Pembantu Tinoor	100.000.000,00	29.748.000,00	129.748.000,00	11/27/2025
JUMLAH			**416.000.000,00**	**118.992.000,00**	**534.992.000,00**	

3) Tanah milik Pemerintah Kota Tomohon berjumlah 1.051 bidang tanah, terdiri dari 219 bidang tanah dan 832 ruas tanah di bawah jalan. Tanah yang sudah bersertifikat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 155 bidang tanah. Pada Tahun 2025 terbit sertifikat 14 bidang tanah yang merupakan 28 bidang tanah yang di usulkan sejak tahun 2024 dan untuk 14 bidang tanah masih sementara berproses di Kantor ATR BPN Kota Tomohon dan untuk sisanya akan diselesaikan secara bertahap.

b.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp332.737.257.745,98	Rp314.529.108.272,98

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp332.737.257.745,98 terdiri dari:

Tabel 5.7.2 Rincian Peralatan dan Mesin

No	Daftar Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.865.362.538,95	18.317.622.673,95
2	Dinas Kesehatan	34.724.579.654,00	33.097.298.348,00
	Puskesmas Lansot	1.915.551.805,20	1.816.885.805,20
	Puskesmas Pangolombian	2.167.971.588,00	2.116.774.588,00
	Puskesmas Matani	2.665.582.565,00	2.587.637.565,00
	Puskesmas Rurukan	2.293.131.844,00	2.196.153.844,00
	Puskesmas Taratara	3.006.924.396,85	2.921.552.397,85
	Puskesmas Kakaskasen	2.993.633.994,50	2.945.297.994,50
	Puskesmas Tinoor	2.560.694.600,00	2.501.072.601,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	59.663.034.033,16	54.462.750.832,16
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.558.874.475,00	5.397.979.975,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.583.450.786,00	28.580.850.786,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.654.569.380,00	6.649.559.530,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.554.569.434,40	3.505.496.889,40
8	Dinas Sosial	1.567.793.665,00	1.400.477.965,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.132.547.040,00	1.102.847.040,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1.759.887.950,00	1.662.319.350,00
11	Dinas Pangan Daerah	1.297.572.663,00	1.282.698.663,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.730.914.012,64	13.110.165.822,64
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.097.016.715,00	2.073.231.625,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.264.201.071,50	4.259.916.737,50
15	Dinas Perhubungan Daerah	9.326.332.712,00	9.071.946.912,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.421.276.091,00	8.931.402.011,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	908.814.467,00	878.899.967,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.972.934.098,00	1.711.946.458,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.114.441.913,00	918.082.913,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.590.974.074,00	1.571.105.074,00
21	Dinas Pariwisata	3.056.726.883,00	2.741.911.383,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.608.900.148,00	6.143.681.789,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.046.765.584,00	2.836.779.734,00
24	Sekretariat Daerah	17.689.229.776,00	15.128.886.872,00
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	70.128.000,00	70.128.000,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	40.626.000,00	0,00
	Bagian Pemerintahan	182.969.600,00	95.540.000,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	111.054.100,00	46.330.000,00
	Bagian Pengadaan Barang Jasa	667.570.352,00	460.105.800,00
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	292.667.730,00	222.759.930,00
	Bagian Hukum	353.989.950,00	290.448.000,00
	Bagian Umum	17.401.227.408,00	18.063.730.408,00
	Bagian Organisasi	183.468.520,00	173.925.520,00
25	Sekretariat DPRD	17.049.060.352,98	17.000.322.852,98
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.738.370.599,00	2.514.800.410,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.700.666.711,80	16.059.072.171,80
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manu	2.556.125.775,00	2.556.125.775,00
29	Inspektorat Daerah	3.003.494.980,00	2.799.954.530,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	2.257.361.821,00	2.244.311.821,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	2.801.159.857,00	2.706.622.998,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	3.491.755.733,00	2.991.885.733,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	2.002.846.500,00	1.674.935.533,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	1.654.754.964,00	1.251.175.810,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.383.698.834,00	1.383.698.834,00
Total		**332.737.257.745,98**	**314.529.108.272,98**

Ringkasan mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.7.2.1 Ringkasan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024		**314.529.108.272,98**
Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025	**12.463.718.252,00**	
Penyesuaian/Koreksi 2025 - Tambah	**9.794.105.597,00**	
Penambahan Aset Peralatan Mesin selain belanja modal berasal dari dana BOS	446.662.500,00	
Penambahan Aset Peralatan Mesin selain belanja modal berasal dari dana BOP Kesetaraan	36.499.000,00	
Penambahan Aset Peralatan Mesin selain belanja modal berasal dari dana BOS Kinerja	19.800.000,00	
Penambahan Aset Peralatan Mesin selain belanja modal berasal dari dana JKN	550.335.359,00	
Penambahan Aset Peralatan Mesin selain belanja modal berasal dari dana Hibah	1.617.766.000,00	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin	269.006.216,00	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin	2.278.800.521,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin	3.675.000,00	
Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang belum terbayarkan di tahun 2025 dan sudah dicatat di Aset Tetap	2.359.127.564,00	
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Peralatan dan Mesin	46.444.000,00	
Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin dari Ekstrakomptabel ke intrakomptabel	338.316.927,00	
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Peralatan dan	1.827.672.510,00	
Penyesuaian/Koreksi 2025 - Kurang	**(4.049.674.376,00)**	
Pengurangan aset dibawah nilai kapitalisasi	(131.873.777,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	(46.951.000,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	(2.718.919.276,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa	(80.896.189,00)	
Pengurangan aset yang merupakan BHP	(50.513.450,00)	
Pengurangan aset Peralatan dan Mesin dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel	(29.054.684,00)	
Pengurangan aset Peralatan dan Mesin Akibat Kurang Belanja Dari Dana Bos	(687.000,00)	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(990.779.000,00)	
Saldo akhir aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025		**332.737.257.745,98**

Penjelasan atas mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 sebagai berikut:

- Mutasi Penambahan Nilai Aset Peralatan Mesin berasal dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp13.517.015.111,00 dengan rincian:
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 12.463.718.252,00.
  - Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain Belanja Modal berasal dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp 446.662.500,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.1.1 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal Berasal dari Dana BOS

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	**REKLAS KE KIB E**			**26.452.000,00**
2	**PENGEMBALIAN KURANG BELANJA**			**687.000,00**
3	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**5**		**19.550.000,00**
	Lemari Kayu	5	unit	19.550.000,00
4	**ALAT KANTOR LAINNYA**	**10**		**38.544.300,00**
	CCTV - Camera Control Television System	1	unit	490.000,00
	Mesin Absensi	4	unit	7.353.000,00
	Mesin Laminating	1	unit	464.000,00
	LCD Projector/Infocus	4	unit	30.237.300,00
5	**MEUBELAIR**	**184**		**66.575.000,00**
	Kursi Kayu	85	Buah	40.675.000,00
	Meja Sekolah	39	Buah	17.140.000,00
	Kursi Plastik	48	Buah	6.000.000,00
	Kursi Siswa	12	unit	2.760.000,00
6	**ALAT PENDINGIN**	**2**		**678.000,00**
	Kipas Angin	2	unit	678.000,00
7	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**	**25**		**142.038.700,00**
	Televisi	17	unit	112.183.000,00
	Amplifier	2	unit	6.200.000,00
	Loudspeaker	4	unit	18.774.600,00
	Timbangan Orang	1	Buah	1.881.100,00
	Mesin Potong Rumput	1	unit	3.000.000,00
8	**PERALATAN STUDIO AUDIO**	**3**		**23.032.000,00**
	Microphone/Wireless MIC	1	unit	392.000,00
	Camera Digital	1	unit	19.000.000,00
	Speaker aktif	1	unit	3.640.000,00
9	**ALAT STUDIO LAINNYA**	**4**		**6.000.000,00**
	Alat Studio Lain-lain	4	unit	6.000.000,00
10	**PERSONAL KOMPUTER**	**9**		**92.666.400,00**
	P.C Unit	1	unit	6.800.000,00
	Lap Top	8	unit	85.866.400,00
11	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**	**12**		**30.439.100,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	24.439.100,00
	External/ Portable Hardisk	4	unit	6.000.000,00
TOTAL				**446.662.500,00**

- Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain Belanja Modal berasal dari Dana BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp36.499.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.1.2 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal Berasal dari Dana BOP

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ilmu Pengetahuan Umum	30	Buah	3.920.000,00
2	Sosiologi	10	Buah	1.320.000,00
3	Ekonomi	10	Buah	1.430.000,00
4	Pengetahuan Bahasa Indonesia	14	Buah	1.778.000,00
5	Pengetahuan Bahasa Inggris	25	Buah	3.205.000,00
6	Matematika	10	Buah	1.120.000,00
7	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	10	Buah	1.500.000,00
8	Teknologi	29	Buah	3.461.000,00
9	Geografi, Eksplorasi	10	Buah	1.320.000,00
10	Sejarah	10	Buah	1.445.000,00
11	Lap Top	1	unit	16.000.000,00
TOTAL				**36.499.000,00**

- Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain Belanja Modal berasal dari Dana BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp19.800.000,00 dengan rincian berupa 36 Buah Matras.
- Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain Belanja Modal berasal dari Dana JKN sebesar Rp550.335.359,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.1.3 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal Berasal dari Dana JKN

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
PUSKESMAS KAKASKASEN				**56.074.087,00**
1	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**			**1.900.000,00**
	Tangga	1	Buah	1.900.000,00
2	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**14.486.887,00**
	Tensimeter	3	unit	3.052.500,00
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3	Buah	666.000,00
	Timbangan Bayi	2	unit	1.592.850,00
	Utility Trolly	2	Buah	5.106.000,00
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	11	Buah	4.069.537,00
3	**ALAT KEDOKTERAN MATA**			**111.000,00**
	Snellen Chard	2	Buah	111.000,00
4	**ALAT LABORATORIUM UMUM**			**666.000,00**
	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	2	unit	666.000,00
5	**ALAT LABORATORIUM LAIN**			**910.200,00**
	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2	unit	910.200,00
6	**PERSONAL KOMPUTER**			**35.000.000,00**
	Lap Top	1	unit	35.000.000,00
7	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**3.000.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	unit	3.000.000,00
PUSKESMAS MATANI				**81.878.121,00**
1	**ALAT UKUR LAIN-LAIN**			**1.365.300,00**
	Termometer Infrared	3	unit	1.365.300,00
2	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**1.110.000,00**
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	2	unit	1.110.000,00
3	**ALAT KEDOKTERAN NUKLIR**			**1.457.821,00**
	Blood Presure Meter/Tensimeter	2	unit	1.457.821,00
4	**PERSONAL KOMPUTER**			**71.845.000,00**
	P.C Unit	3	unit	35.098.000,00
	Note Book	3	unit	36.747.000,00
5	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**6.100.000,00**
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	unit	6.100.000,00
PUSKESMAS LANSOT				**106.395.080,00**
1	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**			**12.946.500,00**
	Lemari Besi/Metal	2	unit	3.622.500,00
	Locker	3	unit	9.324.000,00
2	**MEUBELAIR**			**13.106.500,00**
	Kursi Putar	2	Buah	1.955.000,00
	Bangku Tunggu	2	unit	4.662.000,00
	Sofa	1	Set	6.489.500,00
3	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**			**6.250.000,00**
	Dispenser	2	unit	3.550.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1	unit	2.700.000,00
4	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**15.595.980,00**
	Tensimeter	7	unit	4.035.000,00
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	12	Buah	1.864.800,00
	Timbangan Bayi	1	Buah	499.500,00
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	6	Buah	9.196.680,00
5	**ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)**			**1.998.000,00**
	Electro Stimulator (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf))	1	unit	1.998.000,00
6	**ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA**			**233.100,00**
	Ukur Tinggi Badan	3	Buah	233.100,00
7	**PERSONAL KOMPUTER**			**52.265.000,00**
	P.C Unit	2	unit	17.265.000,00
	Lap Top	3	unit	35.000.000,00
8	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**4.000.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	4.000.000,00

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
PUSKESMAS RURUKAN				**98.084.448,00**
1	**MEUBELAIR**			**5.900.000,00**
	Kursi Putar	2	Buah	1.600.000,00
	Kursi Tangan	4	Buah	4.300.000,00
2	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**			**15.095.000,00**
	Televisi	1	unit	15.095.000,00
3	**PERALATAN STUDIO AUDIO**			**4.282.000,00**
	Speaker aktif	1	unit	4.282.000,00
4	**ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM**			**3.330.000,00**
	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	1	unit	3.330.000,00
5	**ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS**			**3.881.448,00**
	Infra Red & Ultraviolet	1	unit	1.106.448,00
	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	1	unit	2.775.000,00
6	**PERSONAL KOMPUTER**			**63.346.000,00**
	P.C Unit	3	unit	28.898.000,00
	Lap Top	1	unit	18.499.000,00
	Note Book	1	unit	8.749.000,00
	Tablet PC	1	unit	7.200.000,00
7	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**2.250.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	unit	2.250.000,00
PUSKESMAS TARATARA				**93.268.999,00**
1	**ALAT DAPUR**			**4.440.000,00**
	Blender	1	unit	4.440.000,00
2	**PERALATAN STUDIO AUDIO**			**8.505.000,00**
	Microphone/Wireless MIC	1	unit	1.890.000,00
	Speaker aktif	1	unit	6.615.000,00
3	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**7.019.000,00**
	Tensimeter	3	unit	4.440.000,00
	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	6	unit	825.000,00
	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2	unit	575.000,00
	Nierbekhen	2	unit	180.000,00
	Pulse Oximeter	2	unit	999.000,00
4	**ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN**			**1.443.000,00**
	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2	unit	1.443.000,00
5	**ALAT KEDOKTERAN THT**			**525.000,00**
	Alat Kesehatan THT Lain-lain	1	unit	525.000,00
6	**ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA**			**1.999.999,00**
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	unit	1.999.999,00
7	**PERSONAL KOMPUTER**			**62.797.000,00**
	P.C Unit	4	unit	36.800.000,00
	Lap Top	1	unit	11.400.000,00
	Tablet PC	3	unit	14.597.000,00
8	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**5.380.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	4.300.000,00
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3	unit	1.080.000,00
9	**PERALATAN KOMPUTER LAINNYA**			**1.160.000,00**
	Mouse	5	unit	1.160.000,00
PUSKESMAS TINOOR				**61.730.999,00**
1	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**666.000,00**
	Tensimeter	1	unit	666.000,00
2	**ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS**			**5.884.999,00**
	Infra Red & Ultraviolet	2	unit	3.109.999,00
	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	1	unit	2.775.000,00
3	**ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA**			**333.000,00**
	Ukur Tinggi Badan	1	unit	333.000,00
4	**PERSONAL KOMPUTER**			**45.747.000,00**
	P.C Unit	2	unit	18.999.000,00
	Note Book	2	unit	26.748.000,00
5	**PERALATAN MAINFRAME**			**2.400.000,00**
	Hard Disk	2	unit	2.400.000,00
6	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**6.700.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	6.700.000,00
PUSKESMAS PANGOLOMBIAN				**52.903.625,00**
1	**ALAT STUDIO LAINNYA**			**5.100.000,00**
	cctv	1	unit	5.100.000,00
2	**ALAT KEDOKTERAN UMUM**			**1.137.750,00**
	Tensimeter	5	Buah	1.137.750,00
3	**ALAT LABORATORIUM PENUNJANG**			**568.875,00**
	Timbangan	5	Buah	568.875,00
4	**PERSONAL KOMPUTER**			**39.797.000,00**
	P.C Unit	2	unit	19.798.000,00
	Lap Top	1	unit	19.999.000,00
5	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**6.300.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	6.300.000,00
TOTAL				**550.335.359,00**

- Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selain Belanja Modal berasal dari Hibah sebesar Rp1.617.766.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.1.4 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal Berasal dari Hibah

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				**287.384.000,00**
1	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**			**2.233.854,00**
	Rak TV	1	Buah	2.233.854,00
2	**MEUBELAIR**			**186.350.000,00**
	Meja Resepsionis	2	Set	186.350.000,00
3	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**			**43.400.581,00**
	Televisi	1	unit	43.400.581,00
4	**PERSONAL KOMPUTER**			**41.166.728,00**
	P.C Unit	3	unit	41.166.728,00
5	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**			**7.020.682,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	unit	7.020.682,00
6	**PERALATAN JARINGAN**			**7.212.155,00**
	Router	1	unit	7.212.155,00
SEKRETARIAT DAERAH				**1.215.483.000,00**
1	**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**			**1.215.483.000,00**
	Sedan	1	unit	383.434.000,00
	Jeep	1	unit	365.457.000,00
	Station Wagon	2	unit	466.592.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN				**114.899.000,00**
1	**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**			**114.899.000,00**
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain	1	unit	114.899.000,00
TOTAL				**1.617.766.000,00**

- Penambahan akibat reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp269.006.216,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.2 Penambahan Akibat Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN DAERAH				**7.830.000,00**
1	Kursi Kayu	1	Buah	310.000,00
2	Meja Sekolah	16	Buah	7.520.000,00
DINAS KESEHATAN DAERAH				**233.676.216,00**
1	A.C. Split	30	unit	231.926.216,00
2	Alat Rumahtangga Lainnya	1	buah	1.750.000,00
DINAS SOSIAL DAERAH				**27.500.000,00**
1	Meja Resepsionis	1	unit	27.500.000,00
TOTAL				**269.006.216,00**

- Penambahan akibat reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.278.800.521,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.3 Penambahan Akibat Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.
1	2	3	4	5
DINAS PERHUBUNGAN				**990.779.000,00**
1	Solar Cell	100,00	Paket	990.779.000,00
KECAMATAN TOMOHON TENGAH				**99.945.000,00**
2	Solar Cell	20,00	Titik	99.945.000,00
KECAMATAN TOMOHON SELATAN				**499.870.000,00**
3	Solar Cell	100,00	unit	499.870.000,00
KECAMATAN TOMOHON BARAT				**289.727.367,00**
4	Solar Cell	60,00	Titik	289.727.367,00
KECAMATAN TOMOHON TIMUR				**398.479.154,00**
5	Solar Cell	80,00	Titik	398.479.154,00
TOTAL				**2.278.800.521,00**

- Penambahan akibat reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.675.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.4 Penambahan Akibat Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin

Nomor	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Lain-Lain Alat Peraga PAUD/TK	29	Buah	1.325.000,00
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2.350.000,00
TOTAL				3.675.000,00

- Penambahan nilai yang belum terbayarkan di tahun 2025 dan sudah dicatat di Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.359.127.564,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.5 Penambahan nilai yang belum terbayarkan di Tahun 2025 dan sudah dicatat di Aset Peralatan dan Mesin.

No	Nama/ Jenis Barang/ Kegiatan	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen		Nilai yang Dicatat sebagai UTANG	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH						
1	PERALATAN DAN MESIN (TOPCON SLILAMP SL-D4 (LED) TOPCON OPERATION MICROSCOPE OMS-800 PRO	Jalan Pinaras Kelurahan Tumtantang I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	4/8/2025	266/SP/RSUD-A/I/2025	822.480.564	SUDAH DICATAT DIASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (TOPCON SLILAMP SL-D4 (LED) TOPCON OPERATION MICROSCOPE OMS-800 PRO NILAI 2.056.201.408
2	PERALATAN DAN MESIN (STELLARIS ELITE TRADERMARK ANTERIOR MODEL)	Jalan Pinaras Kelurahan Tumtantang I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	8/22/2025	03/PPK/SPK .ALKES-4/RSUDA/VIII -2025	1.455.177.000	SUDAH DICATAT DIASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (STELLARIS ELITE TRADERMARK ANTERIOR MODEL) NILAI 1.455.177.000
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH						
1	Monitor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	27/08/2025	EP-01K3MSCVQ9ZFMGARST26888QP8/DISHUB.02	5.850.000,00	Pengadaan Monitor untuk Aplikasi SIM PKB Fullcycle
2	ADP MACHINE - SERVER	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	27/08/2025	EP-01K3MSCVQ9ZFMGARST26888QP8/DISHUB.3	18.595.000,00	Pengadaan Server untuk Aplikasi SIM PKB Fullcycle
3	Printer	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	27/08/2025	EP-01K3MSCVQ9ZFMGARST26888QP8/DISHUB.4	57.025.000,00	Pengadaan Printer Smartcard untuk Aplikasi SIM PKB Fullcycle
TOTAL					**2.359.127.564,00**	

- Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan penambahan dari reklasifikasi Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp46.444.000,00 dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) set Lain-Lain Alat Peraga PAUD/TK.
- Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan penambahan dari Ekstrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp338.316.927,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.5.1 Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin dari Ekstrakomptabel ke intrakomptabel

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.497.465,00
2	Dinas Kesehatan	39.030.428,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	26.100.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.984.334,00
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	88.857.500,00
6	Sekretariat Daerah	13.500.000,00
7	Kecamatan Tomohon Utara	2.500.000,00
8	Kecamatan Tomohon Barat	4.847.200,00
TOTAL		**338.316.927,00**

- Penambahan akibat reklasifikasi dari Aset Lainnya (aset peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak swasta) ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.827.672.510,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.5.2 Penambahan Akibat Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Perangkat Daerah	Nama Barang	Nilai Perolehan Rp.
1	Sekretariat Daerah	Toyota Kijang Innova G M/T	254.000.000,00
2	Bagian Umum	Suzuki APV	193.081.000,00
3	Dinas Kesehatan	Toyota Kijang Innova E	304.713.000,00
		Toyota Kijang Innova E	304.713.000,00
4	Dinas Pariwisata	Toyota Kijang Innova G M/T	308.515.500,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Daihatsu Xenia	154.216.670,00
		Daihatsu Xenia	154.216.670,00
		Daihatsu Xenia	154.216.670,00
TOTAL			**1.827.672.510,00**

- Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp131.873.777,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.6 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Kapitalisasi

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN				**75.519.296,00**
	ALAT KANTOR LAINNYA			**954.000,00**
	CCTV - Camera Control Television System	1	unit	490.000,00
	Mesin Laminating	1	unit	464.000,00
	MEUBELAIR			**49.785.996,00**
	Kursi Kayu	21	Buah	4.910.000
	Meja Sekolah	51	Buah	19.040.000
	Kursi Plastik	168	Buah	23.075.996
	Kursi Siswa	12	unit	2.760.000
	ALAT PENDINGIN			**678.000,00**
	Kipas Angin	2	unit	678.000,00
	PERALATAN STUDIO AUDIO			**392.000,00**
	Microphone/Wireless MIC	1	unit	392.000,00
	ALAT PERAGA PAUD/TK			**3.909.300,00**
	Lain-Lain Alat Peraga PAUD/TK	39	Set	3.909.300
	PERALATAN SENAM			**19.800.000,00**
	Matras	36	Buah	19.800.000
PUSKESMAS KAKASKASEN				**7.738.087,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**6.050.887,00**
	Tensimeter	3	unit	3.052.500
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3	Buah	666.000
	Timbangan Bayi	2	unit	1.592.850
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	10	Buah	739.537
	ALAT KEDOKTERAN MATA			**111.000,00**
	Snellen Chard	2	Buah	111.000
	ALAT LABORATORIUM UMUM			**666.000,00**
	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	2	unit	666.000
	ALAT LABORATORIUM LAIN			**910.200,00**
	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2	unit	910.200
PUSKESMAS MATANI				**3.933.121,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**3.933.121,00**
	Tensimeter	2,00	unit	1.457.821,00
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	5,00	unit	2.475.300,00
PUSKESMAS LANSOT				**7.729.080,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**7.495.980,00**
	Tensimeter	7,00	unit	4.035.000,00
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	12,00	Buah	1.864.800,00
	Timbangan Bayi	1,00	Buah	499.500,00
	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	4,00	Buah	1.096.680,00
	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA			**233.100,00**
	Ukur Tinggi Badan	3,00	Buah	233.100,00
PUSKESMAS RURUKAN				**1.106.448,00**
	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS			**1.106.448,00**
	Infra Red & Ultraviolet	1,00	unit	1.106.448,00
PUSKESMAS TARATARA				**7.897.000,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**3.689.000,00**
	Tensimeter	1,00	unit	1.110.000,00
	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	6,00	unit	825.000,00
	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2,00	unit	575.000,00
	Nierbekhen	2,00	unit	180.000,00
	Pulse Oximeter	2,00	unit	999.000,00
	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			**1.443.000,00**
	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2,00	unit	1.443.000,00
	ALAT KEDOKTERAN THT			**525.000,00**
	Alat Kesehatan THT Lain-lain	1,00	unit	525.000,00
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			**1.080.000,00**
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3,00	unit	1.080.000,00
	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA			**1.160.000,00**
	Mouse	5,00	unit	1.160.000,00

PUSKESMAS TINOOR				**2.109.000,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**666.000,00**
	Tensimeter	1	unit	666.000,00
	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS			**1.110.000,00**
	Infra Red & Ultraviolet	1	unit	1.110.000,00
	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA			**333.000,00**
	Ukur Tinggi Badan	1	unit	333.000,00
PUSKESMAS PANGOLOMBIAN				**1.706.625,00**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**1.137.750,00**
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	5	Buah	1.137.750,00
	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM			**568.875,00**
	timbangan orang dewasa	5	Buah	568.875,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.				**13.323.298,00**
	MEUBELAIR			**1.900.000,00**
	Kursi Fiber Glas/Plastik	24	Buah	1.900.000,00
	ALAT DAPUR			**1.025.000,00**
	Blender	1	Buah	400.000,00
	Dandang	2	Buah	625.000,00
	ALAT RUMAH TANGGA			**765.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	9	Pcs	765.000,00
	ALAT KEDOKTERAN UMUM			**3.746.300,00**
	Tensimeter	5	unit	2.497.500,00
	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	unit	541.800,00
	Pulse Oximeter	1	unit	207.000,00
	Nebulizer	2	unit	500.000,00
	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			669.998,00
	Timbangan Digital	2	unit	669.998,00
	ALAT KEDOKTERAN MATA			**5.217.000,00**
	Alat Kedokteran Mata	4	Pcs	5.217.000,00
DINAS SOSIAL				**4.485.000,00**
	MEUBELAIR			**4.485.000,00**
	Kursi Rapat	10	unit	4.485.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**976.822,00**
	PERALATAN JARINGAN			**976.822,00**
	Kabel penunjang peralatan jaringan	19	Buah	927.981,09
	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	Buah	48.840,91
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**700.000,00**
	ALAT DAPUR			**700.000,00**
	Teko Listrik	4	Buah	700.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				**4.650.000,00**
	ALAT STUDIO LAINNYA			**4.650.000,00**
	Alat Studio Lain-lain	30	Buah	4.650.000,00
TOTAL				**131.873.777,00**

- Pengurangan akibat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp46.951.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.7 Pengurangan Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ilmu Pengetahuan Umum	194	Buku	26.376.000,00
2	Lain-Lain Buku Umum	54	Buku	3.996.000,00
3	Sosiologi	10	Buku	1.320.000,00
4	Ekonomi	10	Buku	1.430.000,00
5	Pengetahuan Bahasa Indonesia	14	Buku	1.778.000,00
6	Pengetahuan Bahasa Inggris	25	Buku	3.205.000,00
7	Matematika	10	Buku	1.120.000,00
8	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	10	Buku	1.500.000,00
9	Teknologi	29	Buku	3.461.000,00
10	Geografi, Eksplorasi	10	Buku	1.320.000,00
11	Sejarah	10	Buku	1.445.000,00
TOTAL				**46.951.000,00**

- Pengurangan akibat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp2.718.919.276,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.8 Pengurangan Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pem-	Nomor				Harga (Rp)
				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN DAERAH								**139.425.000,00**
1.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-727475	E451-ID 758920	DB 2343 G	F.2168561.S	13.942.500,00
2.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-724132	E451-ID 756233	DB 5254 GM	F.2168552.S	13.942.500,00
3.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-720677	E451-ID 750611	DB 5284 GM	F.2168582.S	13.942.500,00
4.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-717148	E451-ID 746852	DB 5350 GM	F.2168630.S	13.942.500,00
5.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-713133	E451-ID 743867	DB 2098 G	F.2168647.S	13.942.500,00
6.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-720815	E451-ID 751050	DB 5316 GM	F.2168659.S	13.942.500,00
7.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-709776	E451-ID 739573	DB 2217 G	F.2168633.S	13.942.500,00
8.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-726498	E451-ID-758319	DB 5290 GM	F.2168588.S	13.942.500,00
9.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-713119	E451-ID 743936	DB 2203 G	F.2168564.S	13.942.500,00
10.	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	2009	MH8BE4DFA9J-717119	E451-ID 746871	DB 5318 GM	F.2168658.S	13.942.500,00
DINAS KESEHATAN DAERAH								**381.620.295,00**
1.	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	Isuzu/TBR 54	2008	MHCTBR54B8K144579	E144579	DB 9015 GM		247.520.295,00
2.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125XSCD	2006	MH8FD125X6J-750850	F03-ID-751282	DB 2131 G	D.8211488.S	15.440.000,00
3.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125 XSCD	2006	MH8FD125X6J-750823	F03-ID-751538	DB 2252 G	D.8211491.S	15.440.000,00
4.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125 XSCD	2006	MH8FD125X6J-750847	F03-ID-751307	DB 5117 GM	D.8211492.S	15.440.000,00
5.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125 XSCD	2006	MH8FD125X6J-751234	F03-ID-751250	DB 2107 G	D.8211493.S	15.440.000,00
6.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125 XSCD	2006	MH8FD125X6J-750824	F03-ID-751289	DB 5132 GM	D.8213807.S	15.440.000,00
7.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125 XSCD	2006	MH8FD125X6J-751174	F03-ID-750682	DB 2103 G	D.8213810.S	15.440.000,00
8.	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 123 SD	2007	MH8BF45CA7J-126510	F496-ID145828	DB 2027 G	E.6730942.S	13.820.000,00
9.	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 123 SD	2007	MH8BF45CA7J-102012	F496-ID112672	DB 5169 GM	E.6730947.S	13.820.000,00
10.	Sepeda Motor	Suzuki/FL 123 SD	2007	MH8BF45CA7J-126514	F496-ID145850	DB 2132 G	E.6727001.S	13.820.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH								**89.700.000,00**
1.	Sepeda Motor	Kawazaki/ K Zone R	2008	MH4AN125H7KP- 01073	AN125HEP- 04448	DB 5217 GM	F.1767453	14.950.000,00
2.	Sepeda Motor	Kawazaki/K Zone R	2008	MH4AN125H8KP-01720	AN125HEP- 06286	DB 5214 GM	F.0603150	14.950.000,00
3.	Sepeda Motor	Kawazaki/K Zone R	2008	MH4AN125H8KP-01997	AN125HEP- 07641	DB 5204 GM	F.1767458	14.950.000,00
4.	Sepeda Motor	Kawazaki/K Zone R	2008	MH4AN125H7KP-01183	AN125HEP- 04648	DB 5207 GM	F.1767461	14.950.000,00
5.	Sepeda Motor	Kawazaki/K Zone R	2008	MH4AN125H8KP-01739	AN125HEP- 06288	DB 5219 GM	F.1767455	14.950.000,00
6.	Sepeda Motor	Kawazaki/K Zone R	2008	MH4AN125H7KP-00907	AN125HEP- 04060	DB 5209 GM	F.1767463	14.950.000,00

Nomor	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pem-	Nomor				Harga (Rp)
				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEKRETARIAT DAERAH								**1.111.649.946,00**
1.	Sedan	Toyota Corolla Altis .8 V A/T	2006	MR053ZEC-267403701	1ZZ-4552030	DB 16 G	D.6921803	327.250.000,00
2.	Station Wagon	Toyota Avanza	2006	MHFFMREK36K012451	DB-38889	DB 1085 G	D.7088918	116.600.000,00
3.	Station Wagon	Toyota Avanza	2006	MHFFMREK36K-012292	DB36661	DB 1095 G	D.7088915	116.600.000,00
4.	Sedan	KIA Carenz	2007	MJJFC52225K-003277	TB-003278	DB 1210 GM	E.6205750	165.600.000,00
5.	Station Wagon	Ford Everest	2009	MNBLS4D109W301066	WLAT1104865	DB 1298 G	F.6108400	385.599.946,00
BAGIAN UMUM								**855.584.000,00**
1	Sedan	Toyota Camry Hybrid	2013	MR053CK50D4501007	2AR U058095	DB 1 G	K-08975148	685.909.000,00
2	Station Wagon	Isuzu Panther	2006	MHCTBR54F6K273669	E273669	DB 1224 GM	D.7088893	169.675.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								**140.940.035,00**
1.	Sepeda Motor	Suzuki 110 XCSD	2004	MH8FD110C4J-511582	E402-ID-511095	DB 5004 GM	C.8640210.S	9.000.000,00
2.	Sepeda Motor	Suzuki 110 XCSD	2004	MH8FD110C4J-630753	E402-ID-629390	DB 5000 GM	C.8640207.S	9.000.000,00
3.	Sepeda Motor	Kymco/Cevira	2007	MJ1KB20BD7J109953	KB20BD109951	DB 5157 GM	E.4564296	10.300.000,00
4.	Sepeda Motor	Kymco/Cevira	2007	MJ1KB20BD7J-111224	KB20BD111230	DB 5159 GM	E.4564298	10.300.000,00
5.	Sepeda Motor	Suzuki/Thunder EN 125 A	2009	MH8EN125A9J-608336	F405-ID-60791	DB 5247 GM	F.2168511.S	18.150.000,00
6	Station Wagon	Mitsubishi VAIWGLS	2004	MHMVA1WJR3K004474	AG18-309002	DB 1233 G	C.6697745	84.190.035,00
TOTAL								**2.718.919.276,00**

- Pengurangan akibat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa sebesar Rp80.896.189,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.9 Pengurangan Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**50.767.189,00**
1	Tali Kamantel Dinamic	5	Rol	4.999.989,00
2	Flashdisk USB	2	Buah	767.200,00
3	Sepatu Lapangan Lain-lain	30	Pasang	45.000.000,00
	DINAS SOSIAL			**30.129.000,00**
1	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5	unit	16.725.000,00
2	Alat Kesehatan Umum Lainnya	10	unit	3.750.000,00
3	Dandang :bahan aluminium No.34 Ukuran Besar	6	buah	2.700.000,00
4	Kompor Gas 2 Tungku.Bahan Stainless Steel	6	buah	2.940.000,00
5	Loyang.Bahan Stainless Steel Ukuran Sedang	6	buah	1.200.000,00
6	Pisau Daging.Bahan Stainless Steel	6	buah	894.000,00
7	Termos Nasi.Bahan Plastik Ukuran 30 Liter	6	buah	1.320.000,00
8	Wajan.Bahan Aluminium ukuran sedang	6	buah	600.000,00
TOTAL				**80.896.189,00**

- Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan Barang Habis Pakai sebesar Rp50.513.450,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.10 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang Merupakan BHP

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang
1	2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN				**1.000.000,00**
1	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2	Buah	1.000.000,00
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				**1.548.450,00**
1	COOLER BOX	2	Buah	603.450,00
2	Kacamata Pelindung	14	Buah	945.000,00
SEKRETARIAT DPRD				**46.965.000,00**
1	MANGKUK SUP KERAMK	50	Buah	1.950.000,00
2	PANSTOVE	10	Buah	10.750.000,00
3	PANSTOVE OVAL GOLD	10	Buah	4.265.000,00
4	PAPAN NAMA DEWAN	30	Buah	30.000.000,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**1.000.000,00**
1	Refi APAR	2	unit	1.000.000,00
TOTAL				**50.513.450,00**

- Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan pengurangan dari intrakomptabel ke Ekstrakomptabel sebesar Rp29.054.684,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.2.10.1 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dari intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	2	3
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	1.686.000,00
2	Dinas kesehatan	7.625.543,00
3	Rumah sakit umum daerah anugerah	6.985.000,00
4	Satuan polisi pamongpraja	7.350.000,00
5	Kecamatan tomohon tengah	5.408.141,00
TOTAL		**29.054.684,00**

- Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang diakibatkan kurang belanja dari dana BOS sebesar Rp687.000,00 pada SMP Negeri 3 Tomohon.

- Pengurangan akibat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp990.779.000,00 berupa pengadaan solar cell (pekerjaan pembangunan konstruksi PJL & pekerjaan pembangunan konstruksi PJU)

c.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp562.624.321.182,29	Rp533.637.951.366,42

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp562.624.321.182,29 terdiri dari:

Tabel 5.7.3 Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No	Daftar Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66.806.894.383,89	66.710.879.705,00
2	Dinas Kesehatan	66.805.535.229,33	45.520.873.296,33
	Puskesmas Lansot	1.244.004.200,00	1.244.004.200,00
	Puskesmas Matani	97.900.000,00	97.900.000,00
	Puskesmas Taratara	9.045.608.199,15	9.045.608.199,15
	Puskesmas Kakaskasen	11.063.461.838,50	11.063.461.838,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	50.540.520.266,50	49.660.956.566,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.711.492.935,90	77.511.774.935,90
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.288.494.390,00	22.288.494.390,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	593.693.796,00	593.693.796,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.063.923.600,00	2.063.923.600,00
8	Dinas Sosial	1.231.986.000,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.281.270.000,00	1.281.270.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00	0,00
11	Dinas Pangan Daerah	2.529.822.000,00	2.529.822.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.323.068.353,20	7.323.068.353,20
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.473.325.000,00	2.473.325.000,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	6.027.570.499,00	5.897.145.499,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.110.263.455,00	25.110.263.455,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	176.151.000,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.432.654.070,60	5.224.816.730,60
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.473.863.000,00	1.473.863.000,00
21	Dinas Pariwisata	37.408.478.503,34	37.408.478.503,34
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	28.577.924.211,00	28.244.650.515,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	31.531.655.952,00	31.531.655.952,00
24	Sekretariat Daerah	20.346.850.633,36	19.019.347.010,00
	Bagian Umum	8.259.285.071,00	8.259.285.071,00
25	Sekretariat DPRD	27.679.333.354,60	27.082.450.507,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.454.962.761,70	13.107.095.961,70
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manus	2.329.510.924,00	2.329.510.924,00
29	Inspektorat Daerah	4.282.201.596,90	4.082.891.596,90
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	6.558.004.777,02	4.582.829.580,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	6.005.131.450,00	6.005.131.450,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	6.769.309.070,30	6.769.309.070,30
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	3.210.140.000,00	3.210.140.000,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	3.620.187.750,00	3.620.187.750,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.269.842.910,00	1.269.842.910,00
	JUMLAH	562.624.321.182,29	533.637.951.366,42

Ringkasan mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.7.3.1 Ringkasan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024		**533.637.951.366,42**
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	**16.441.807.851,00**	
Penyesuaian/Koreksi 2025 - Tambah	**18.910.837.510,23**	
Penambahan Hibah	1.198.000.000,00	
Penambahan berasal dari Reklasifikasi aset KDP	14.664.098.366,23	
Penambahan Bantuan Revitalisasi Bangunan dari Kemendikbud	1.899.135.000,00	
Penambahan Nilai Yang sudah Tercatat di Aset Tetap tapi Belum Terbayarkan	195.134.794,00	
Penambahan Nilai Jaskon Realisasi dari Bajas	754.718.605,00	
Penambahan dari Ekstrakomptable ke Intrakomptable	76.282.000,00	
Penambahan dari Jaskon perencanaan, pengawasan dan pengelolaan bantuan Revitalisasi	123.468.745,00	
Penyesuaian/Koreksi 2025 - Kurang	**(6.366.275.545,36)**	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin	(269.006.216,00)	
Pengurangan akibat Renovasi Aset yang tidak menambah nilai Aset Tetap	(1.347.710.630,00)	
Pengurangan Aset yg sudah dicatat di Tahun 2023 dan baru terbayarkan di Tahun 2025	(106.327.150,00)	
Pengurangan nilai Aset yang sudah di catat di KDP Tahun 2024 dan dibayarkan di Tahun 2025	(726.796.487,23)	
Pengurangan Aset Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel	(3.785.497.942,00)	
Reklas ke aset lainnya(Pengurangan nilai kekurangan volume)	(130.937.120,13)	
Saldo Akhir Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025		**562.624.321.182,29**

Penjelasan atas mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

(1) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari hibah Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Tomohon yang dicatat pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah berupa Bangunan Gedung Stasiun Jalan ”Michi No Eki” Pakewa Tomohon sebesar Rp1.198.000.000,00 dengan Nomor Dokumen Hibah: B-230/PL.130/D/04/2025 tanggal 28 April 2025.

(2) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.664.098.366,23 pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon berupa pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dengan nilai sebesar Rp13.983.320.666,23 dan Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah berupa pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebesar Rp680.777.700,00.

(3) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Bantuan Revitalisasi Bangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp1.899.135.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.2 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Berasal dari Bantuan Revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Total Nilai Barang	Dokumen Sumber Perolehan		
						Nama	Nomor	Tanggal
1	2	3	6	7	9	11	12	13
	GEDUNG DAN BANGUNAN				**1.899.135.000,00**			
	BANGUNAN GEDUNG				**1.899.135.000,00**			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				**1.899.135.000,00**			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN				**1.619.309.000,00**			
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas SD Inpres Woloan 2	1	Paket	474.995.000,00	BAST	001/BAST/.ASET/XII-2025	12/31/2025
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Ruang Administrasi SD Inpres Woloan 2	1	Paket	126.430.000,00	BAST	001/BAST/.ASET/XII-2025	12/31/2025
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Walian	1	Paket	451.120.000,00	BAST	297/INP/WAL/XII-2025	12/19/2025
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Ruang Administrasi SD Inpres Walian	1	Paket	116.660.000,00	BAST	297/INP/WAL/XII-2025	12/19/2025
5	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Rehabilitasi Toilet SD Inpres Kakaskasen 2	1	Paket	68.680.000,00	BAST	158/III.6.2/XII.C-2025	12/11/2025
6	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Pembangunan Toilet SD Inpres Walian	1	Paket	133.560.000,00	BAST	297/INP/WAL/XII-2025	12/19/2025
7	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Pembangunan Toilet SD Inpres Kakaskasen 2	1	Paket	114.474.000,00	BAST	158/III.6.2/XII.C-2025	12/11/2025
8	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Pembangunan Toilet SD Inpres Woloan 2	1	Paket	133.390.000,00	BAST	001/BAST/.ASET/XII-2025	12/31/2025
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL				**146.800.000,00**			
9	Gedung Garasi Lain - Lain	Rehabilitasi Toilet SD Inpres Woloan 2	1	Paket	73.000.000,00	BAST	001/BAST/.ASET/XII-2025	12/31/2025
10	Gedung Garasi Lain - Lain	Rehabilitasi Toilet SD Inpres Walian	1	Paket	73.800.000,00	BAST	297/INP/WAL/XII-2025	12/19/2025
	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN				**133.026.000,00**			
11	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SD Inpres Kakaskasen 2	1	Paket	133.026.000,00	BAST	158/III.6.2/XII.C-2025	12/11/2025

(4) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Penambahan Nilai yang Sudah tercatat di aset tetap di Tahun 2025 tapi belum terbayarkan di Tahun 2025 senilai Rp195.134.794,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.3 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Penambahan Nilai yang Sudah tercatat di aset tetap di Tahun 2025 tapi belum terbayarkan di Tahun 2025

No	Nama / Jenis Barang / Kegiatan	Dokumen		Hutang
		Nomor	Tanggal	(Rp.)
1	2	3	4	5
Dinas Kesehatan Daerah				
1	Pembangunan Laboratorium	01/PPK-K/FISIK.LAB/DKD/V/2024 01,1/PPK-K-ADD/FISIK.LAB/DKD/VI/2024	20 MEI 2024	79.154.006,00
2	Pembangunan Puskesmas Pembantu Pangolombian	01/PPK-FISIK.PUSTUPANGOL/DKD/VII2025	17 Juli 2025	44.231.979,00
3	Pembangunan Puskesmas Pembantu Taratara Satu	01/PPK-FISIK.PUSTUPANGOL/DKD/VII2025	17 Juli 2025	44.366.815,00
			TOTAL	167.752.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah				
1	Revitalisasi Gedung Kompleks Kantor Walikota (Command Center) (APBDP)	16/SPK/PPK/DPUPRD-KT/XI-2025	17 November 2025	17.429.600,00
			TOTAL	17.429.600,00
Sekretariat DPRD				
1	Pekerjaan Pagar	01/SPK/PPK-SETWAN/PGR/XII-2025	2 Desember 2025	9.952.394,00
			TOTAL	9.952.394,00
TOTAL				**195.134.794,00**

(5) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Penambahan Nilai Jasa Konsultan yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp754.718.605,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.4 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Penambahan Nilai Jasa Konsultan yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa

NO	URAIAN	TANGGAL	NO. BUKTI	NILAI
1	2	3	4	5
1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**			**49.639.200,00**
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan RKB TK Karya Lahendong	4 Juni 2025	71.73/04.0/000441/LS/1.01.2.22.0.00 .02.0000/PPR1/12/2025	24.975.000,00
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri Karya Lahendong	29 Desember 2025	71.73/04.0/000442/LS/1.01.2.22.0.00 .02.0000/PPR1/12/2025	24.664.200,00
2	**DINAS KESEHATAN DAERAH**			505.458.004,00
	JasKon Perencanaan PERENCANAAN PEMBANGUNAN NICU PICU PT IMPERIUM ABADI KONSULTAN DAK FISIK	10 Desember 2025	71.73/03.0/000430/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**74.131.900**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN NICU PICU PT IMPERIUM DAK FISIK	19 Desember 2025	71.73/03.0/000534/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**13.082.100**
	JasKon Pengawasan PEKERJAAN PEMBANGUNAN NICU PICU PT WOWONGTEHU INDAH DAK FISIK	23 Desember 2025	71.73/03.0/000580/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	57.858.750
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU KAKASKASEN PT IMPERIUM DAK FISIK	19 Desember 2025	71.73/03.0/000539/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**6.450.743**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU KAKASKASEN PT IMPERIUM ABADI KONSULTAN DAK FISIK	10 Desember 2025	71.73/03.0/000424/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**36.554.209**
	JasKon Pengawasan PEMBANGUNAN PUSTU KAKASKASEN PT WOWONGTEHU DAK FISIK	29 Desember 2025	71.73/03.0/000598/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	29.104.200
	JasKon Perencanaan Pembangunan PUSTU Tinoor Satu PT Imperium Abadi Konsultan DAK Fisik	10 Desember 2025	71.73/03.0/000431/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**36.554.209**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU TINOOR SATU PT IMPERIUM ABADI DAK FISIK	19 Desember 2025	71.73/03.0/000531/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**6.450.743**
	JasKon Pengawasan PEMBANGUNAN PUSTU TINOOR SATU PT WOWONGTEHU DAK FISIK	29 Desember 2025	71.73/03.0/000617/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	28.982.100
	JasKon Perencanaan Pembangunan PUSTU Taratara PT Aras Berkarya Mandiri DAK Fisik	10 Desember 2025	71.73/03.0/000429/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**36.579.495**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU TARA TARA PT ARAS DAK FISIK	19 Desember 2025	71.73/03.0/000543/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**6.455.205**
	JasKon Pengawasan PEMBANGUNAN PUSTU TARATARA PT WOWONGTEHU DAK FISIK	29 Desember 2025	71.73/03.0/000602/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	29.137.500
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU TARATARA SATU PT WOWONGTEHU DAK FISIK	10 Desember 2025	71.73/03.0/000434/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**36.579.495**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSTU TARATARA SATU PT WOWONGTEHU DAK FISIK	19 Desember 2025	71.73/03.0/000548/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**6.455.205**
	JasKon Pengawasan Pembangunan Pustu Taratara Satu CV Wastu Citra Pratama DAK Fisik	29 Desember 2025	71.73/03.0/000619/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	29.093.100
	JasKon Perencanaan Pembangunan PUSTU Pangolombian PT Wowongtehu Indah DAK Fisik	10 Desember 2025	71.73/03.0/000439/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2025	**36.579.495**
	JasKon Perencanaan PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU PANGOLOMBIAN PT WOWONGTEHU INDAH DAK FISIK	22 Desember 2025	71.73/03.0/000558/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	**6.455.205**
	JasKon Pengawasan Pembangunan Pustu Pangolombian CV Wastu Citra Pratama DAK Fisik	29 Desember 2025	71.73/03.0/000618/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/PPR1/12/2025	28.954.350
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM**			**199.621.401,00**
	JasKon Perencanaan Bangunan Gedung (Kantor Walikota dan Rumah Jabatan Wakil Walikota)			99.835.176,00
	Jaskon Pengawasan Pembangunan Balai Kelurahan Kakaskasen I			99.786.225,00
		TOTAL		**754.718.605,00**

(6) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan penambahan dari Ekstrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp76.282.000,00 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah yaitu Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain – Lain (Bangunan Aklimatisasi).

(7) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Jasa konsultan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan bantuan Revitalisasi Kemendikdasmen sebesar Rp123.468.745,00 pada Dinas Pendidikan Daerah dengan rincian:

Tabel 5.7.3.5 Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan dari Jasa konsultan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan bantuan Revitalisasi

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Ruang Administrasi Kelas SD Inp Walian	7.160.609,00
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jaskon Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Walian	27.689.816,00
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Revitalisasi 2025: Rehab 4 Ruang Kelas SD Inp Woloan 2	28.618.259,00
4	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Pembangunan Toilet SD Inp Kakaskasen 2	9.855.090,00
5	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Toilet SD Inp Kakaskasen 2	5.912.675,00
6	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Pembangunan Toilet SD Inp Walian	8.197.934,00
7	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Pembangunan Toilet SD Inp Woloan 2	8.036.694,00
8	Gedung Garasi Lain - Lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Toilet SD Inp Walian	4.529.855,00
9	Gedung Garasi Lain - Lain	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Toilet SD Inp Woloan 2	4.398.221,00
10	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Ruang Perpustakaan SD Inp Kakaskasen 2	11.452.235,00
11	Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat	Revitalisasi 2025: Jaskon Rehab Ruang Administrasi Kelas SD Inp Woloan 2	7.617.357,00
TOTAL			**123.468.745,00**

(8) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan akibat reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp269.006.216,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.6 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.
1	2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN DAERAH				**7.830.000,00**
1	Kursi Kayu	1	Buah	310.000,00
2	Meja Sekolah	16	Buah	7.520.000,00
DINAS KESEHATAN DAERAH				**233.676.216,00**
1	A.C. Split	30	unit	231.926.216,00
2	Alat Rumahtangga Lainnya	1	buah	1.750.000,00
DINAS SOSIAL DAERAH				**27.500.000,00**
1	Meja Resepsionis	1	unit	27.500.000,00
TOTAL				**269.006.216,00**

(9) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan pengurangan renovasi aset yang tidak menambah nilai aset tetap sebesar Rp1.347.710.630,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.7 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan pengurangan renovasi aset yang tidak menambah nilai aset

No	Nama / Jenis Barang / Kegiatan	Nama Pekerjaan	Dokumen		Nilai Kontrak
			Nomor	Tanggal	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
	DINAS PEKERJAAN UMUM				**99.839.000,00**
1	Tugu Lain-lain	Rehabilitasi Menara Alfa Omega	01/SPK/PPK/DPUPRD-KT/VII/2025	16 Juli 2025	99.839.000,00
	DINAS PARIWISATA				**548.413.919,00**
1	AIR TERJUN TEKAAN TELU	REHAB AIR TERJUN TEKAAN TELU	04/SPK/PPK/DISPAR-KT/XI/2025	11/25/2025	149.600.103,00
2	BATULAPIS TAMBULINAS	REHAB BATULAPIS TAMBULINAS	03/SPK/PPK/DISPAR-KT/XI/2025	11/25/2025	99.655.782,00
3	TAMAN WISATA ALAM	REHAB TAMAN WISATA ALAM	02/SPK/PPK/DISPAR-KT/XI/2025	11/25/2025	99.569.670,00
4	AIR PANAS BELERANG LAHENDONG	REHAB AIR PANAS BELERANG LAHENDONG	01/SPK/PPK/DISPAR-KT/XI/2025	11/25/2025	199.588.364,00
	SEKRATARIAT DAERAH				**215.665.268,00**
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rehabilitasi Toilet Rumah Dinas Walikota	03/PPK/SPK/SETDA/XII-2025	2 Desember 2025	121.555.344,00
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rehabilitasi Taman Rumah Dinas	06/PPK/SPK/SETDA/XII-2025	15 Desember 2025	94.109.924,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				**483.792.443,00**
1		Rehabilitasi Ruang Rapat Kantor			379.040.512,00
		Rehabilitasi Ruang Kepala Badan			
2		Rehabilitasi Toilet			74.891.770,00
3		Rehabilitasi Plafon Ruangan			29.860.161,00
TOTAL					**1.347.710.630,00**

(10) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan aset yg sudah dicatat di tahun 2023 dan baru terbayarkan di tahun 2025 sebesar Rp106.327.150,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dengan rincian Rp9.356.650,00 untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri I Tomohon dan Rp96.970.500,00 untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP Negeri III Tomohon.

(11) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan Pengurangan Nilai Aset yang sudah di catat di KDP di tahun 2024 dan dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp726.796.487,23 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.8 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan Pengurangan Nilai Aset yang sudah di catat di KDP di tahun 2024 dan dibayarkan di tahun 2025

No	Nama/ Jenis Barang/ Kegiatan	Dokumen		HUTANG KDP .
		Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5
Dinas Kesehatan Daerah				**663.218.717,23**
1	Pembangunan Laboratorium	20 MEI 2024 27 JUNI 2024	01/PPK-K/FISIK.LAB/DKD/V/2024 01.1/PPK-K-ADD/FISIK.LAB/DKD/VI/2024	663.218.717,23
Rumah Sakit Umum Daerah				**63.577.770,00**
1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS - LABORATORIUM KLINIS RSUD	27 AGUSTUS 2024	01/K/PPK-RSUD/VIII/2024	63.577.770,00
TOTAL				**726.796.487**

(12) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan pengurangan dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel sebesar Rp3.785.497.942,00

Tabel 5.7.3.9 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	2	3
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2.556.663.538,00
2	Dinas kesehatan	179.510.000,00
3	Dinas pertanian dan perikanan	941.008.304,00
4	Sekretariat daerah	108.316.100,00
TOTAL		**3.785.497.942,00**

(13) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya akibat pengurangan nilai kekurangan volume senilai Rp130.937.120,13 dengan rincian:

Tabel 5.7.3.10 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya akibat pengurangan nilai kekurangan volume

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.180.278,11
2	DINAS KESEHATAN	100.483.167,00
3	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.742.660,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	7.107.452,64
5	SEKRETARIAT DPRD	812.534,40
6	KECAMATAN TOMOHON UTARA	9.611.027,98
TOTAL		**130.937.120,13**

d.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp1.438.637.211.762,68	Rp1.388.183.721.093,86

Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.438.637.211.762,68 terdiri dari:

Tabel 5.7.4 Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
per Tanggal 31 Desember 2025

No	Daftar Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.745.189.981,41	1.124.592.309,00
2	Dinas Kesehatan	58.753.596,30	58.753.596,30
	Puskesmas Lansot	0,00	
	Puskesmas Pangolombian	849.000.000,00	849.000.000,00
	Puskesmas Matani	849.000.000,00	849.000.000,00
	Puskesmas Rurukan	849.000.000,00	849.000.000,00
	Puskesmas Taratara	849.000.000,00	849.000.000,00
	Puskesmas Kakaskasen	0,00	
	Puskesmas Tinoor	849.000.000,00	849.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	5.713.699.708,00	5.713.699.708,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.320.166.265.589,61	1.274.601.501.113,40
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.016.900.946,00	7.717.311.558,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.394.140.173,00	9.394.140.173,00
8	Dinas Sosial	0,00	
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00	
11	Dinas Pangan Daerah	0,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	11.064.624.806,00	11.064.624.806,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	
15	Dinas Perhubungan Daerah	1.382.051.094,20	398.906.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	854.491.740,00	854.491.740,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	
21	Dinas Pariwisata	5.330.101.210,00	5.330.101.210,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	25.901.928.146,00	25.901.928.146,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	160.171.317,00	166.971.317,00
24	Sekretariat Daerah	451.500.000,00	451.500.000,00
	Bagian Umum	300.859.100,00	300.859.100,00
25	Sekretariat DPRD	196.509.000,00	196.509.000,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	127.721.800,00	127.721.800,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manus	0,00	
29	Inspektorat Daerah	0,00	
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	12.353.525.816,16	11.354.139.443,16
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	5.917.693.825,00	5.117.997.825,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	13.431.808.240,00	12.736.549.975,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	9.204.975.174,00	8.806.794.274,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	2.619.300.500,00	2.519.628.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	
	JUMLAH	**1.438.637.211.762,68**	**1.388.183.721.093,86**

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.7.4.1 Ringkasan Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan, Jaringan selama Tahun 2025

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024		**1.388.183.721.093,86**
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	**39.497.951.569,00**	
Penyesuaian/ Koreksi 2025 - Tambah	**25.317.162.158,20**	
Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan dari Hibah	2.333.505.000,00	
Reklasifikasi Aset KDP ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.336.068.000,00	
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai Jasa Konsultan (realisasi dari Belanja Barang dan Jasa)	964.710.990,00	
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai yang Sudah tercatat di aset tetap di Tahun 2025 tapi belum terbayarkan di Tahun 2025	276.899.534,00	
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari NILAI EKSTRAKOM	1.567.330.364,40	
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Ekstrakomptable ke Intrakomptable	17.847.869.269,80	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.779.000,00	
Penyesuaian/ Koreksi 2025 - Kurang	**(14.361.623.058,38)**	
Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari nilai dibawah kapitalisasi	(99.783.715,00)	
Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(2.278.800.521,00)	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset KDP	(10.261.628.873,08)	
Pengurangan Nilai Aset yang sudah tercatat di Tahun 2022 dan baru terbayarkan di Tahun 2025	(1.025.732.750,00)	
Pengurangan karena Rehab / Renovasi yangTidak menambah nilai aset	(509.550.931,00)	
Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Intrakomptable ke Ekstrakomptable	(53.346.103,00)	
Reklas ke Aset Lainnya (Pengurangan nilai kekurangan volume)	(132.780.165,30)	
Saldo Akhir Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025		**1.438.637.211.762,68**

Penjelasan atas mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

(1) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari Realiasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp39.497.951.569,00.

(2) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari Hibah Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan dicatatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp2.333.505.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.2 Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Hibah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	**2**				**2.333.505.000,00**
	BANGUNAN AIR	**2**				**2.333.505.000,00**
	BANGUNAN AIR KOTOR	**2**				**2.333.505.000,00**
	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	**2**				**2.333.505.000,00**
1	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	Paket	277.1/BA/DC/2024	2 April 2024	1.156.695.000,00
2	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	Paket	277.1/BA/DC/2024	2 April 2024	1.176.810.000,00

(3) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp 1.336.068.000,00.

(4) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari penambahan nilai Jasa Konsultan (realisasi dari Belanja Barang dan Jasa) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp964.710.990,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.3 Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari penambahan nilai Jasa Konsultan (realisasi dari Belanja Barang dan Jasa)

No	Nama Pekerjaan	Dokumen		Nilai Kontrak
		Nomor	Tanggal	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	02/K-PENGAWAS SPAM/PPK/DPUPRD-KT/VI/2025	19 JUNI 2025	218.714.400,00
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai	05/SPK/PPK/DPUPRD-KT/VII-2025	30 Juli 2025	99.471.540,00
3	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi	08/SPK/PPK/DPUPRD-KT/VIII-2025	06 Agustus 2025	99.833.400,00
4	Jasa Konsultansi pengawasan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Tomohon	03/KONTRAK/PPK.KONS.SPAM/ DPUPRD-KT/VIII-2025	19 Agustus 2025	249.611.250,00
5	Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Pinawelaan	03/SPK/PPK.KONS.JEMBATAN/ DPUPRD-KT/VIII-2025	14 Agustus 2025	98.778.900,00
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan	03/SPK/PPK.RJ/DPUPRD-KT/ IX-2025	29 September 2025	98.623.500,00
7	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan	01/SPK/APBD/PPK.II/ DPUPRD-KT/VIII-2025	4 Agustus 2025	99.678.000,00
			TOTAL	**964.710.990,00**

(5) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari nilai yang sudah tercatat di Aset Tetap di Tahun 2025 namun belum terbayarkan di Tahun 2025 sebesar Rp276.899.534,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.4 Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Nilai yang sudah tercatat di Aset Tetap Tahun 2025 namun belum terbayarkan di Tahun 2025

No	Nama / Jenis Barang / Kegiatan	Nama Pekerjaan	Dokumen		Selisih Nilai yang Belum Terbayarkan
			Nomor	Tanggal	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah					**222.098.150,00**
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Lain - Lain	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KOTA TOMOHON III	03/KONTRAK/PPK.SPAM3/DPUPRD-KT/VIII-2025	08 Agustus 2025	65.600.000,00
2	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	PEMBANGUNAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN KAKASKASEN 3	02/SPK/APBDP/PPK.II/DPUPRD-KT/XI-2025	19 November 2025	8.046.150,00
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Lain - Lain	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (dari KDP 2024)	01/K/PPK.II/DPUPRD-KT/VIII-2024	1 Agustus 2024	148.452.000,00
Kecamatan Tomohon Selatan					**34.888.800,00**
1	Jalan Khusus Lainnya	Pembuatan Jalan Paving Kelurahan Walian Dua	11/SPK-SARPRAS/2025	11/12/2025	4.952.650,00
2	Jalan Khusus Lainnya	Pembuatan Jalan Paving Kelurahan Walian	04/SPK-SARPRAS/2025	9/12/2025	4.942.650,00
3	Jaringan Listrik Lainnya	Pemasangan lampu PJL	08/SPK-SARPRAS/2025	11/12/2025	4.999.850,00
4	Jaringan Listrik Lainnya	Pemasangan lampu PJL	06/SPK-SARPRAS/2025	19/12/2025	4.999.600,00
5	Jaringan Listrik Lainnya	Pemasangan lampu PJL	10/SPK-SARPRAS/2025	23/12/2025	4.999.550,00
6	Jaringan Listrik Lainnya	Pemasangan lampu PJL	07/SPK-SARPRAS/2025	11/12/2025	4.994.800,00
7	Jaringan Listrik Lainnya	Pemasangan lampu PJL	09/SPK-SAPRAS/2025	11/12/2025	4.999.700,00
Kecamatan Tomohon Timur					**19.912.584**
1	Jaringan Listrik Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	02/SPK/PPK/TOMTIM/XII-2025	8 Desember 2025	4.976.303
2	Jaringan Listrik Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	03/SPK/PPK/TOMTIM/XII-2025	8 Desember 2025	4.976.328
3	Jaringan Listrik Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	04/SPK/PPK/TOMTIM/XII-2025	8 Desember 2025	4.976.328
4	Pembangunan Talud Sederhana / Tembok Penahan Tanah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	01/SPK/PPK/TOMTIM/XII-2025	8 Desember 2025	4.983.625
TOTAL					**276.899.534,00**

(6) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Nilai Ekstrakomptabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon sebesar Rp1.567.330.364,40 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.5 Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Nilai Ekstrakomptabel

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4		1.567.330.364,40
	JALAN DAN JEMBATAN	4		1.567.330.364,40
	JALAN	4		1.567.330.364,40
	JALAN KABUPATEN	4		1.567.330.364,40
1	Jalan Kabupaten Kolektor	1	Meter	36.290.956,00
2	Jalan Kabupaten Kolektor	1	Meter	703.945.683,40
3	Jalan Kabupaten Kolektor	1	Meter	539.925.706,00
4	Jalan Kabupaten Kolektor	1	Meter	287.168.019,00

(7) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan penambahan dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel sebesar Rp17.847.869.269,80 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan rincian:

Tabel 5.7.4.6 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

No	Nama Pekerjaan	Total Nilai
1	2	3
1	Jalan Kabupaten Kolektor	13.999.647.617,10
2	Jalan Kabupaten Lain - Lain	3.848.221.652,70
TOTAL		**17.847.869.269,80**

(8) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp990.779.000,00 berupa pengadaan solar cell (pekerjaan pembangunan konstruksi PJL & pekerjaan pembangunan konstruksi PJU)

(9) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan akibat dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Tomohon Barat sebesar Rp99.783.715,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.7 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat dibawah nilai kapitalisasi

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Khusus Lainnya	Jalan Setapak Paving	1	Paket	37.219.965,00
2	Jalan Khusus Lainnya	Jalan Setapak Paving	1	Paket	13.847.239,00
3	Jalan Khusus Lainnya	Jalan Setapak Paving	1	Paket	35.781.349,00
4	Jalan Khusus Lainnya	Jalan Setapak Paving	1	Paket	12.935.162,00
TOTAL					**99.783.715,00**

(10) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.278.800.521,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.8 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.
1	2	3	4	5
DINAS PERHUBUNGAN				990.779.000,00
1	Solar Cell	100	Paket	990.779.000,00
KECAMATAN TOMOHON TENGAH				99.945.000,00
2	Solar Cell	20	Titik	99.945.000,00
KECAMATAN TOMOHON SELATAN				499.870.000,00
3	Solar Cell	100	unit	499.870.000,00
KECAMATAN TOMOHON BARAT				289.727.367,00
4	Solar Cell	60	Titik	289.727.367,00
KECAMATAN TOMOHON TIMUR				398.479.154,00
5	Solar Cell	80	Titik	398.479.154,00
TOTAL				2.278.800.521,00

(11) Pengurangan akibat reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp10.261.628.873,08 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.9 Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP

No	Nama / Jenis Barang / Kegiatan	Dokumen		Nilai KDP 2025
		Tanggal	Nomor	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	OPTIMALISASI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	04/K-IPLT/PPK/DPUPRD-KT/IX/2025	1 September 2025	336.000.000,00
2	PEMBANGUNAN BARU SPAM JARINGAN PERPIPAAN	01/K-SPAM/PPK/DPUPRD-KT/VI/2025	19 JUNI 2025	4.599.021.900,00
3	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KOTA TOMOHON I	06/KONTRAK/PPK.SPAM1/DPUPRD-KT/VIII-2025	18 Agustus 2025	4.435.603.750,00
4	Rekonstruksi Jalan Rurukan - Kumelembuai (Jalan Lama)	01/K/PPK.RJ/DPUPRD-KT/VIII-2025	5 Agustus 2025	891.003.223,08
TOTAL				**10.261.628.873,08**

(12) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan akibat pengurangan nilai aset yang sudah tercatat di Tahun Anggaran 2022 dan baru terbayarkan pada Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp 1.025.732.750,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.10 Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan akibat Pengurangan Nilai Aset yang sudah Tercatat di Tahun Anggaran 2022 dan baru terbayarkan pada Tahun 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Dokumen		Nilai
		Nomor	Tanggal	
1	Peningkatan Jalan Hotmix Perkebunan Tumempok Kelurahan Kumelembuai	01/K/APBD/PPK.1/DPUPRD-KT/VII-2022	27 Juli 2022	25.732.750,00
2	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air di Kelurahan Pangolombian (Hutang)	02/K/PPK.VII/DPUPRD-KT/ VIII-2022	12 Agustus 2022	1.000.000.000,00
TOTAL				**1.025.732.750,00**

(13) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat pengurangan nilai karena rehab/renovasi yang tidak menambah nilai aset sebesar Rp509.550.931,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.11 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Akibat Pengurangan Nilai Karena Rehab/Renovasi Yang Tidak Menambah Nilai Aset

No	Nama / Jenis Barang / Kegiatan	Nama Pekerjaan	Dokumen		Nilai Kontrak
			Nomor	Tanggal	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah					**299.040.575,00**
1	Operasi dan Pemeliharaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum			50.000.000,00
2	Operasi dan Pemeliharaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			108.843.500,00
3	Operasi dan Pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin Jembatan			140.197.075,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah					**149.550.400,00**
1	Jaringan Listrik Lainnya	Penataan Lampu Hias di Sineleyan	01/SPK/PERKIM/VII /2025	25 Juli 2025	149.550.400,00
Sekretariat Daerah					**60.959.956,00**
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rehabiliatasi Jaringan Air Bersil	05/PPK/SPK/SETD A/XII-2025	2 Desember 2025	60.959.956,00
Total					**509.550.931,00**

(14) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan pengurangan dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel sebesar Rp53.346.103,00

Tabel 5.7.4.12 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.546.103,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.800.000,00
TOTAL		**53.346.103,00**

(15) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lainnya akibat pengurangan nilai kekurangan volume senilai Rp132.780.165,30 dengan rincian:

Tabel 5.7.4.13 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Total Nilai
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.192.109,59
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.954.149,91
3	Dinas Perhubungan	7.633.905,80
TOTAL		**132.780.165,30**

Terdapat kelebihan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan akibat kelebihan bayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan di Kota Tomohon dengan nomor dokumen 04/K/PPK.RJ/DPUPRD-KT/XI-2025 tanggal 21 November 2025 sebesar Rp39,83.

e. Aset Tetap Lainnya | **31 Desember 2025** Rp5.644.644.888,60 | **31 Desember 2024** Rp5.421.350.988,60

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.644.644.888,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.5 Aset Tetap Lainnya

No	Daftar Organisasi Perangkat Daerah	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.096.569.307,00	1.873.275.407,00
2	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00
	Puskesmas Lansot	0,00	0,00
	Puskesmas Pangolombian	0,00	0,00
	Puskesmas Matani	0,00	0,00
	Puskesmas Rurukan	0,00	0,00
	Puskesmas Taratara	0,00	0,00
	Puskesmas Kakaskasen	0,00	0,00
	Puskesmas Tinoor	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	393.360.000,00	393.360.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	293.000,00	293.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	32.810.000,00	32.810.000,00
11	Dinas Pangan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.955.000,00	97.955.000,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.497.500,00	41.497.500,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.600.000,00	1.600.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.000.000,00	111.000.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	178.999.432,00	178.999.432,00
21	Dinas Pariwisata	257.260.500,00	257.260.500,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	813.500,00	813.500,00
24	Sekretariat Daerah	84.325.000,00	84.325.000,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	208.500,00	208.500,00
	Bagian Umum	105.790.250,00	105.790.250,00
25	Sekretariat DPRD	74.900.000,00	74.900.000,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	140.750.000,00	140.750.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusi	0,00	0,00
29	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	633.655.800,00	633.655.800,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	238.650.600,00	238.650.600,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	475.801.699,60	475.801.699,60
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	473.777.000,00	473.777.000,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	200.127.800,00	200.127.800,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
	JUMLAH	**5.644.644.888,60**	**5.421.350.988,60**

Tabel 5.7.5.1 Penjelasan Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024		**5.421.350.988,60**
Penyesuaian/Koreksi 2025 - Tambah	**734.647.400,00**	
Penambahan Aset Tetap Lainnnya berasal dari Belanja Modal	215.892.000,00	
Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Dana BOS	441.534.600,00	
Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Dana BOS Kinerja	23.044.800,00	
Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD	7.225.000,00	
Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	46.951.000,00	
Penyesuaian Koreksi - Kurang	**(511.353.500,00)**	
Pengurangan Aset Tetap Lainnya dibawah nilai kapitalisasi	(308.478.500,00)	
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin	(3.675.000,00)	
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Belanja Barang dan Jasa (Barang yang diserahkan ke masyarakat)	(199.200.000,00)	
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2025		**5.644.644.888,60**

Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama Tahun 2025 sebagai berikut:

(1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp734.647.400,00 terdiri dari:

- Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal sebesar Rp215.892.000,00
- Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp441.534.600,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.2 Penambahan Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Dana BOS

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Ilmu Pengetahuan Umum	2740	Buku	151.869.300,00
2	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1	Buku	2.000.000,00
3	Lain-Lain Buku Umum	203	Buku	18.013.000,00
4	Buku-buku Pedoman	1	Buku	35.800,00
5	Buku Panduan Pendidik	11	Buku	801.100,00
6	Agama Islam	49	Buku	3.880.400,00
7	Agama Kristen	760	Buku	57.434.100,00
8	Buku Agama Lain-Lain	29	Buku	2.134.000,00
9	Lain-lain Buku Ilmu Sosial	433	Buku	14.026.400,00
10	Pengetahuan Bahasa Indonesia	845	Buku	36.260.900,00
11	Pengetahuan Bahasa Inggris	654	Buku	31.239.600,00
12	Matematika	939	Buku	43.561.300,00
13	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	544	Buku	18.655.900,00
14	Teknologi	1148	Buku	49.075.600,00
15	Musik	10	Buku	789.000,00
16	Permainan dan Olah Raga	149	Buku	8.745.800,00
17	Lain-lain Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	85	Buku	3.012.400,00
TOTAL				**441.534.600,00**

- Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari dana BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp23.044.800,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.3 Penambahan Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Dana BOS Kinerja

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Ilmu Pengetahuan Umum	165	Buku	10.647.200,00
2	Pengetahuan Bahasa Indonesia	4	Buku	310.400,00
3	Pengetahuan Bahasa Inggris	10	Buku	786.000,00
4	Matematika	12	Buku	911.300,00
5	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	1	Buku	96.700,00
6	Teknologi	164	Buku	8.685.000,00
7	Permainan dan Olah Raga	10	Buku	776.000,00
8	Seni Budaya	11	Buku	754.600,00
9	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-Lain	1	Buku	77.600,00
TOTAL				**23.044.800,00**

- Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp7.225.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.4 Penambahan Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Lain-Lain Alat Peraga PAUD/TK	29	Buah	1.325.000,00
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2.350.000,00
3	Ilmu Pengetahuan Umum	72	Buku	3.550.000,00
TOTAL				**7.225.000,00**

(2) Penambahan Aset Tetap Lainnya akibat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp46.951.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.5 Penambahan Aset Tetap Lainnya Akibat Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Ilmu Pengetahuan Umum	194	Buku	22.456.000,00
2	Lain-Lain Buku Umum	54	Buku	3.996.000,00
3	Ilmu Pengetahuan Umum	30	Buku	3.920.000,00
4	Sosiologi	10	Buku	1.320.000,00
5	Ekonomi	10	Buku	1.430.000,00
6	Pengetahuan Bahasa Indonesia	14	Buku	1.778.000,00
7	Pengetahuan Bahasa Inggris	25	Buku	3.205.000,00
8	Matematika	10	Buku	1.120.000,00
9	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	10	Buku	1.500.000,00
10	Teknologi	29	Buku	3.461.000,00
11	Geografi, Eksplorasi	10	Buku	1.320.000,00
12	Sejarah	10	Buku	1.445.000,00
TOTAL				**46.951.000,00**

(3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat di bawah nilai kapitalisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp308.478.500,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.6 Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat dibawah Nilai Kapitalisasi

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Ilmu Pengetahuan Umum	2453	Buku	95.714.500,00
2	Lain-Lain Buku Umum	227	Buku	18.709.000,00
3	Buku-buku Pedoman	1	Buku	35.800,00
4	Buku Panduan Pendidik	6	Buku	142.900,00
5	Agama Islam	24	Buku	960.400,00
6	Agama Kristen	743	Buku	55.000.800,00
7	Buku Agama Lain-Lain	26	Buku	1.681.200,00
8	Lain-lain Buku Ilmu Sosial	2	Buku	178.200,00
9	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	401	Buku	9.698.200,00
10	Pengetahuan Bahasa Indonesia	691	Buku	15.334.400,00
11	Pengetahuan Bahasa Inggris	537	Buku	15.933.200,00
12	Matematika	772	Buku	20.984.000,00
13	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	486	Buku	9.750.500,00
14	Teknologi	1264	Buku	52.320.800,00
15	Musik	9	Buku	680.600,00
16	Permainan dan Olah Raga	141	Buku	7.613.800,00
17	Lain-lain Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	60	Buku	1.801.300,00
18	Seni Budaya	11	Buku	754.600,00
19	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-Lain	25	Buku	1.184.300,00
TOTAL				**308.478.500,00**

(4) Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp3.675.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.5.7 Pengurangan Aset Tetap Lainnya Akibat Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Lain-Lain Alat Peraga PAUD/TK	29	Buah	1.325.000,00
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2.350.000,00
TOTAL				**3.675.000,00**

(5) Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa (barang yang diserahkan kepada masyarakat) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah sebesar Rp199.200.000,00 dengan rincian 16 ekor ternak babi dewasa Betina calon induk.

f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 Rp15.205.302.510,08	31 Desember 2024 Rp20.316.829.939,23

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Aset Tetap Berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Pencatatan dan pengakuan nilai seluruh KDP yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran 2024 dilakukan berdasarkan nilai realisasi kemajuan fisik pekerjaan.

Nilai Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp15.205.302.510,08 terdiri dari:

Tabel 5.7.6 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Des 2025	Saldo Akhir Des 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	13.844.891.235,08	4.292.320.298,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Pemukiman Daerah	561.771.300,00	561.771.300,00
3	Dinas Kesehatan Daerah		13.983.320.666,23
4	Rumah Sakit Umum Daerah		680.777.700,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	99.789.000,00	99.789.000,00
6	Dinas Pariw isata Daerah	476.472.225,00	476.472.225,00
7	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	150.238.750,00	150.238.750,00
8	Sekretariat DPRD	72.140.000,00	72.140.000,00
Jumlah		**15.205.302.510,08**	**20.316.829.939,23**

Ringkasan mutasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.7.6.1 Ringkasan Saldo Akhir KDP Tahun 2025

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024		**20.316.829.939,23**
Penyesuaian Koreksi - Tambah	**10.888.638.937,08**	
Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset KDP	10.261.628.873,08	
Penambahan Nilai Jaskon Realisasi dari Barang dan Jasa	348.656.300,00	
Penambahan Nilai Berdasarkan BAKP 2025 (Hutang KDP)	278.353.764,00	
Penyesuaian Koreksi - Kurang	**(16.000.166.366,23)**	
Reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Gedung dan Bangunan	(14.664.098.366,23)	
Reklasifikasi Aset KDP menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.336.068.000,00)	
Saldo akhir aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025		**15.205.302.510,08**

Nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp15.205.302.510,08 merupakan Aset Tetap yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum selesai dikerjakan, dengan rincian:

(1) Penambahan reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi Aset KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp10.261.628.873,08 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.1 Penambahan Aset KDP akibat reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**7**		**10.261.628.873,08**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**7**		**10.261.628.873,08**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**7**		**10.261.628.873,08**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**7**		**10.261.628.873,08**
1	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	7.586.423,08
2	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	83.203.750,00
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	218.714.400,00
4	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	4.380.307.500,00
5	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	883.416.800,00
6	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	336.000.000,00
7	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	4.352.400.000,00

(2) Penambahan reklasifikasi dari Jasa Konsultan (realisasi dari Belanja Barang dan Jasa) menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp348.656.300,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.2 Penambahan Aset KDP akibat reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultan (realisasi dari Belanja Barang dan Jasa)

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**2**		**348.656.300,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**2**		**348.656.300,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**2**		**348.656.300,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**2**		**348.656.300,00**
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Paket	248.834.000,00
2	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	99.822.300,00

(3) Penambahan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akibat penambahan nilai berdasarkan BAKP 2025 (Hutang Konstruksi Dalam Pengerjaan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp278.353.764,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.3 Penambahan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akibat penambahan nilai berdasarkan BAKP 2025 (Hutang Konstruksi Dalam Pengerjaan)

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**4**	**Paket**	**278.353.764,00**
1	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	170.140.365,00
2	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	28.100.199,00
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	9.024.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1	Paket	71.089.200,00

(4) Pengurangan reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.664.098.366,23 dengan rincian:

Tabel 5.7.6.1.4 Pengurangan Aset KDP akibat reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
Dinas Kesehatan Daerah				**13.983.320.666,23**
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Paket	13.983.320.666,23
Rumah Sakit Umum Daerah				**680.777.700,00**
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Paket	680.777.700,00
TOTAL				**14.664.098.366,23**

(5) Pengurangan reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah untuk pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan sebesar Rp1.336.068.000,00.

g.	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 Rp1.351.498.146.856,26	31 Desember 2024 Rp1.263.378.260.052,28

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Kota Tomohon dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap: Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap dalam renovasi dan alat musik modern) dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Penyusutan juga dilakukan dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di mana lampiran tabel masa manfaat sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon.

Penyusutan juga dilakukan dengan memperhitungkan renovasi yang terjadi pada Aset Tetap yang terdapat dalam KIB C dan D sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan berupa akumulasi penyusutan berdasarkan Peraturan Walikota tersebut di atas, per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp1.351.498.146.856,26 bertambah sebesar Rp88.119.886.803,98 jika dibandingkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.263.378.260.052,28.

Tabel 5.7.7 Penyusutan Masing-Masing Perangkat Daerah

NO.	OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN UNAUDITED 2025	AP Ekstra ke Intra	AP Intra ke Ekstra	BP KurVol	Koreksi Bertambah/ Berkurang	AKUMULASI PENYUSUTAN e-BMD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.969.884.107,11	40.581.686.766,79	61.224.907,06	(985.210.508,32)	(120.583,91)	154.076.095,61	39.811.656.677,24
2	Dinas Kesehatan	54.892.523.083,23	59.636.146.123,80	39.030.428,00	(79.795.090,92)	(167.471,95)	609.246.115,14	60.204.460.104,08
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	43.664.772.085,81	52.387.674.706,84	26.100.000,00	(6.985.000,00)	0,00	0,00	52.406.789.706,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.222.330.883,07	901.340.887.229,17	17.501.771.864,72	0,00	(1.156.948.917,39)	(1.261.205.794,68)	916.424.504.381,81
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.068.712.713,49	28.860.086.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860.086.789,90
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.204.781.798,28	6.526.871.150,24	0,00	(7.350.000,00)	0,00	0,00	6.519.521.150,24
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.861.412.416,28	10.696.789.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696.789.462,26
8	Dinas Sosial	1.249.904.465,00	1.326.214.700,42	458.333,33	0,00	0,00	2.053.310,00	1.328.726.343,75
9	Dinas Tenaga Kerja	1.294.213.656,67	1.362.545.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.545.423,33
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1.606.754.354,76	1.655.577.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.577.501,19
11	Dinas Pangan Daerah	1.897.599.663,00	1.980.429.311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.429.311,32
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.204.047.863,87	17.707.871.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707.871.122,23
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.999.745.877,92	1.887.333.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.333.791,87
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.067.663.373,10	4.223.933.450,37	93.984.334,00	0,00	0,00	0,00	4.317.917.784,37
15	Dinas Perhubungan Daerah	10.014.260.615,53	10.963.930.790,09	0,00	0,00	(31.806,90)	(408.696.337,51)	10.555.202.645,68
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.406.835.279,07	19.206.391.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.206.391.167,43
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	807.060.173,25	846.667.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	846.667.504,50
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.609.944.741,33	1.655.409.094,25	0,00	0,00	0,00	293.585,00	1.655.702.679,25
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.365.299.821,31	1.517.680.917,17	0,00	0,00	(4.571,10)	0,00	1.517.676.346,07
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.810.976.444,00	1.892.288.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.288.666,50
21	Dinas Pariwisata	8.224.166.472,01	9.402.019.735,97	0,00	0,00	0,00	308.515.500,00	9.710.535.235,98
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	28.611.655.066,40	30.262.941.913,05	99.791.253,33	(282.048.182,00)	0,00	0,00	30.080.684.984,39
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.465.224.247,16	8.280.022.901,30	0,00	(2.550.000,00)	0,00	0,00	8.277.472.901,31
24	Sekretariat Daerah	38.743.222.547,18	39.283.314.089,42	13.500.000,00	(29.507.346,00)	(11.845,75)	447.081.000,00	39.714.375.897,66
25	Sekretariat DPRD	19.048.431.215,73	20.391.079.068,72	0,00	0,00	(1.354,22)	0,00	20.391.077.714,49
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.296.291.497,98	2.369.685.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.685.296,02
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	18.591.554.173,22	19.182.343.000,25	0,00	0,00	0,00	462.650.010,00	19.644.993.010,25
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	2.980.167.182,18	3.094.298.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.298.406,91
29	Inspektorat Daerah	3.718.586.021,21	3.894.707.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.707.705,73
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	6.824.171.198,65	7.722.465.458,20	2.500.000,00	0,00	(16.018,38)	0,00	7.724.949.439,81
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	4.672.685.267,72	5.388.298.650,04	0,00	(5.408.141,00)	0,00	0,00	5.382.890.509,04
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	6.733.692.933,50	8.253.618.311,40	0,00	0,00	0,00	(198.306.088,89)	8.055.312.222,50
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	7.019.890.441,61	7.717.856.269,33	4.847.200,00	0,00	0,00	0,00	7.722.703.469,32
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	2.611.828.655,35	3.019.382.788,25	0,00	0,00	0,00	(99.395.631,95)	2.919.987.156,30
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.617.969.716,31	1.676.334.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.334.346,69
	TOTAL	**1.263.378.260.052,29**	**1.336.194.783.610,94**	**17.843.208.320,45**	**(1.398.854.268,23)**	**(1.157.302.569,60)**	**16.311.762,72**	**1.351.498.146.856,26**

(1) Peralatan dan Mesin

Tabel 5.7.7.1 Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO.	OPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2024	Akumulasi Penyusutan Unaudited 2025	AP Ekstra ke Intra	AP Intra ke Ekstra	Koreksi Bertambah/ (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan Audited 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.088.542.376,46	16.374.289.576,14	61.224.907,06	(1.575.166,67)	(560.708,33)	16.433.378.608,21
2	Dinas Kesehatan	39.076.424.509,98	42.223.734.178,22	39.030.428,00	(7.370.890,92)	609.426.000,00	42.864.819.715,31
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	36.354.058.048,10	43.899.726.573,87	26.100.000,00	(6.985.000,00)	0,00	43.918.841.573,87
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.173.832.220,43	5.311.158.382,19			0,00	5.311.158.382,19
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.026.391.029,47	19.131.927.668,26			0,00	19.131.927.668,27
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.131.451.223,45	6.441.666.699,49		(7.350.000,00)	0,00	6.434.316.699,49
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.325.594.117,57	3.383.109.022,09			0,00	3.383.109.022,09
8	Dinas Sosial	1.249.904.465,00	1.326.214.700,42	458.333,34		0,00	1.326.673.033,75
9	Dinas Tenaga Kerja	1.012.334.256,67	1.055.040.623,33			0,00	1.055.040.623,33
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1.606.754.354,76	1.655.577.501,19			0,00	1.655.577.501,19
11	Dinas Pangan Daerah	1.226.725.954,67	1.258.959.163,00			0,00	1.258.959.162,99
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.278.730.770,06	10.853.367.819,90			0,00	10.853.367.819,90
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.999.745.877,92	1.887.333.791,88			0,00	1.887.333.791,87
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.685.495.886,55	3.793.245.210,93	93.984.334,00		0,00	3.887.229.544,93
15	Dinas Perhubungan Daerah	8.025.141.762,42	8.824.607.918,67			(412.824.583,33)	8.411.783.335,33
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.459.470.314,60	8.737.921.064,51			0,00	8.737.921.064,52
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	807.060.173,25	846.667.504,50			0,00	846.667.504,50
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.592.944.741,33	1.655.409.094,25			0,00	1.655.409.094,25
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	837.722.578,42	885.256.373,00			0,00	885.256.373,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.476.686.324,00	1.528.521.286,50			0,00	1.528.521.286,50
21	Dinas Pariwisata	2.537.177.933,48	2.634.840.251,37			308.515.500,00	2.943.355.751,37
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	5.802.777.505,67	5.974.560.744,65	88.857.500,00		0,00	6.063.418.244,65
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.266.891.130,12	2.445.547.621,33			0,00	2.445.547.621,33
24	Sekretariat Daerah	30.745.229.556,60	30.726.730.336,60	13.500.000,00		447.081.000,00	31.187.311.336,60
25	Sekretariat DPRD	14.061.941.836,30	14.856.758.649,27			0,00	14.856.758.649,27
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.296.291.497,98	2.369.685.296,02			0,00	2.369.685.296,02
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.220.552.818,45	15.544.132.594,12			462.650.010,00	16.006.782.604,12
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manu	2.464.682.893,75	2.532.223.900,00			0,00	2.532.223.900,00
29	Inspektorat Daerah	2.583.706.071,67	2.676.067.439,37			0,00	2.676.067.439,37
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	1.578.997.411,08	1.804.692.016,00	2.500.000,00		0,00	1.807.192.016,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	2.288.142.145,75	2.532.629.746,55		(5.408.141,00)	0,00	2.527.221.605,55
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	1.998.903.773,30	2.339.406.590,50			0,00	2.339.406.590,50
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	1.486.272.206,37	1.634.171.052,72	4.847.200,00		0,00	1.639.018.252,72
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	1.077.100.895,77	1.149.409.088,67			0,00	1.149.409.088,66
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.338.604.276,11	1.371.572.048,28			0,00	1.371.572.048,29
TOTAL		**252.182.282.937,50**	**271.666.161.527,78**	**330.502.702,40**	**(28.689.198,58)**	**1.414.287.218,34**	**273.382.262.249,93**

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp273.382.262.249,93 dimana terdapat koreksi bertambah/berkurang pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin sebesar Rp1.414.287.218,34 yaitu:

- Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkurang sebesar Rp560.708,33.
- Pada Dinas Perhubungan Daerah berkurang sebesar Rp412.824.583,33 dikarenakan adanya reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel yang menyebabkan nilai perolehan bertambah dan berkurang, beban penyusutan pada saat *Unaudited* sudah bukan angka yang seharusnya karena nilai perolehan tersebut. Untuk *audited* sudah sesuai dengan reklasifikasi intrakomptable, ekstrakomptable dan kekurangan volume.

- Pada Dinas Dinas Kesehatan Rp609.426.000,00, Dinas Pariwisata Rp308.515.500,00, Sekretariat Daerah Rp447.081.000,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp462.650.010,00 dikarenakan reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin.

(2) Gedung dan Bangunan

Tabel 5.7.7.2 Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO.	OPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2024	Akumulasi Penyusutan Unaudited 2025	AP Ekstra ke Intra	AP Intra ke Ekstra	BP KurVol	Koreksi Bertambah/ (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan Audited 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.162.476.090,02	23.568.467.744,09	0,00	(970.443.299,76)	(102.316,33)	4.257.726,17	22.602.179.854,17
2	Dinas Kesehatan	15.565.403.399,56	17.053.633.318,67	0,00	(72.424.200,00)	(167.471,95)	(179.884,86)	16.980.861.761,87
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	6.285.672.711,19	7.289.625.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.625.428,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.983.470.691,12	12.534.151.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534.151.988,94
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.825.185.047,69	6.270.954.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.954.935,49
6	Satuan Polisi Pamong Praja	73.330.574,83	85.204.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204.450,75
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	471.341.864,00	512.620.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.620.336,00
8	Dinas Sosial	0,00		0,00	0,00	0,00	2.053.310,00	2.053.310,00
9	Dinas Tenaga Kerja	281.879.400,00	307.504.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.504.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dinas Pangan Daerah	670.873.708,33	721.470.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	721.470.148,33
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.910.768.563,96	2.057.229.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.229.931,03
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	382.167.486,55	430.688.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	430.688.239,44
15	Dinas Perhubungan Daerah	1.701.331.553,11	1.819.491.838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.491.838,09
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.353.033.364,53	9.855.238.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.238.633,63
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.585,00	293.585,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	527.577.242,89	632.424.544,17	0,00	0,00	(4.571,10)	0,00	632.419.973,07
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	334.290.120,00	363.767.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.767.380,00
21	Dinas Pariwisata	3.612.267.400,52	4.360.436.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.436.970,59
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.049.262.394,97	7.632.125.405,27	10.933.753,33	(282.048.182,00)	0,00	0,00	7.361.010.976,60
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.174.152.021,11	5.804.785.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.785.140,15
24	Sekretariat Daerah	7.486.748.292,91	8.034.725.813,16	0,00	(29.507.346,00)	(11.845,75)	0,00	8.005.206.621,40
25	Sekretariat DPRD	4.967.785.560,68	5.510.503.775,70	0,00		(1.354,22)	0,00	5.510.502.421,47
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.310.333.499,77	3.574.349.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.349.506,13
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	515.484.288,43	562.074.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	562.074.506,91
29	Inspektorat Daerah	1.134.879.949,54	1.218.640.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.640.266,36
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	1.578.469.740,80	1.673.434.309,44	0,00	0,00	(16.018,38)	0,00	1.673.418.291,06
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	1.385.570.854,00	1.505.673.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.673.483,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	1.926.516.961,47	2.058.165.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.165.924,72
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	1.024.863.278,33	1.089.066.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.066.078,33
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	1.186.438.241,25	1.258.841.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.841.996,25
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	279.365.440,20	304.762.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304.762.298,40
TOTAL		117.160.939.741,77	128.090.059.191,56	10.933.753,33	(1.354.423.027,76)	(303.577,73)	6.424.736,31	126.752.691.075,70

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp126.752.691.075,70, dimana terdapat koreksi bertambah/berkurang pada Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.424.736,31 yaitu:

- Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertambah sebesar Rp4.257.726,17
- Pada Dinas Kesehatan Daerah berkurang sebesar Rp179.884,86
- Pada Dinas Sosial Daerah bertambah sebesar Rp2.053.310,00
- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkurang sebesar Rp293.585,00

Dikarenakan adanya reklasifikasi dari intrakomptable ke ekstrakomptable yang menyebabkan nilai perolehan bertambah dan berkurang, beban penyusutan pada saat *Unaudited* sudah bukan angka yang seharusnya karena nilai perolehan tersebut. Untuk Audited sudah sesuai dengan reklasifikasi intrakomptable, ekstrakomptable dan kekurangan volume.

(3) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.7.7.3 Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO.	OPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2024	Akumulasi Penyusutan Unaudited 2025	AP Ekstra ke Intra	AP Intra ke Ekstra	BP KurVol	Koreksi Bertambah/ (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan Audited 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	586.723.851,74	629.662.691,01		(13.192.041,90)	(18.267,58)	0,00	616.452.381,53
2	Dinas Kesehatan	250.695.173,69	358.778.626,90				0,00	358.778.626,90
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	1.025.041.326,52	1.198.322.704,45				0,00	1.198.322.704,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	846.686.627.971,53	883.117.176.858,04	17.501.771.864,72		(1.156.948.917,39)	(1.261.205.794,68)	898.200.794.010,68
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.217.136.636,33	3.457.204.186,14				0,00	3.457.204.186,14
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00					0,00	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.064.476.434,71	6.801.060.104,17				0,00	6.801.060.104,17
8	Dinas Sosial	0,00					0,00	
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00					0,00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00					0,00	
11	Dinas Pangan Daerah	0,00					0,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.014.548.529,85	4.797.273.371,30				0,00	4.797.273.371,30
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00					0,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00					0,00	
15	Dinas Perhubungan Daerah	287.787.300,00	319.831.033,33			(31.806,90)	4.128.245,57	323.927.472,26
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	594.331.599,94	613.231.469,28				0,00	613.231.469,28
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00					0,00	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00					0,00	
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00					0,00	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00					0,00	
21	Dinas Pariwisata	2.074.721.138,01	2.406.742.514,02				0,00	2.406.742.514,02
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.759.615.165,76	16.656.255.763,14				0,00	16.656.255.763,14
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24.181.095,93	29.690.139,83		(2.550.000,00)		0,00	27.140.139,83
24	Sekretariat Daerah	511.244.697,67	521.857.939,67				0,00	521.857.939,67
25	Sekretariat DPRD	18.703.818,75	23.816.643,75				0,00	23.816.643,75
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00					0,00	
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60.667.855,00	63.860.900,00				0,00	63.860.900,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	0,00					0,00	
29	Inspektorat Daerah	0,00					0,00	
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	3.666.704.046,77	4.244.339.132,75				0,00	4.244.339.132,75
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	998.972.267,97	1.349.995.420,49				0,00	1.349.995.420,49
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	2.808.272.198,73	3.856.045.796,18				(198.306.088,89)	3.657.739.707,29
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	4.280.599.956,91	4.766.464.138,27				0,00	4.766.464.138,27
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	315.105.143,33	563.346.203,33				(99.395.631,94)	463.950.571,39
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00					0,00	0,00
TOTAL		**893.246.156.209,13**	**935.774.955.636,04**	**17.501.771.864,72**	**(15.742.041,90)**	**(1.156.998.991,87)**	**(1.554.779.269,95)**	**950.549.207.197,31**

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp950.549.207.197,31, dimana terdapat koreksi bertambah/berkurang pada Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.554.779.269,95 yaitu:

- Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar Rp1.261.205.794,68
- Pada Dinas Perhubungan Daerah bertambah sebasar Rp4.128.245,57
- Pada Kecamatan Tomohon Selatan berkurang sebesar Rp198.306.088,89
- Pada Kecamatan Tomohon Timur berkurang sebesar Rp99.395.631,94

Dikarenakan adanya reklasifikasi dari intrakomptable ke ekstrakomptable yang menyebabkan nilai perolehan bertambah dan berkurang, beban penyusutan pada saat *Unaudited* sudah bukan angka yang seharusnya karena nilai perolehan tersebut. Untuk Audited sudah sesuai dengan reklasifikasi intrakomptabel, ekstrakomptable dan kekurangan volume.

(4) Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.7.7.4 Penyusutan Aset Tetap Lainnya

NO.	OPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2024	Akumulasi Penyusutan Unaudited 2025	Koreksi Bertambah/ (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan Audited 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	132.141.788,89	9.266.755,56	150.379.077,77	159.645.833,33
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.400.000,00	378.400.000,00	0,00	378.400.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	228.155.000,00	228.155.000,00	0,00	228.155.000,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	33.184.375,00	47.785.500,00	0,00	47.785.500,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00		0,00	
TOTAL		**788.881.163,89**	**663.607.255,56**	**150.379.077,77**	**813.986.333,33**

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp813.986.333,33, dimana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat koreksi sebesar Rp150.379.077,77 dengan rincian penambahan sebesar Rp154.520.277,38 atas alat musik tradisional/daerah dan alat bercorak kebudayaan yang belum disusutkan sejak perolehan, serta pengurangan sebesar Rp4.141.200,00 atas buku yang seharusnya tidak disusutkan sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 14.2

h.	**Aset Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp192.647.790.041,15	**Rp217.964.068.490,67**

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp192.647.790.041,15 terdiri dari:

Tabel 5.7.8 Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	123.687.565.872,15
2	Kemitraaan dengan Pihak Ketiga	0,00
3	Aset Tak Berwujud	2.186.893.750,00
4	Amortisasi Aset Tak berwujud	(1.850.219.583,31)
5	Aset dengan Kondisi Rusak Berat:	
	- Peralatan dan Mesin	48.221.634.158,02
	- Gedung dan Bangunan	2.640.427.253,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.667.314.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	565.757.000,00
6	Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya:	
	- Peralatan dan Mesin	16.153.180.131,47
	- Gedung dan Bangunan	1.819.695.364,00
	- Aset Tetap Lainnya	5.625.000,00
7	Aset dengan Kondisi Hilang:	
	- Peralatan dan Mesin	460.504.100,00
8	Aset berupa Barang Habis Pakai:	
	- Peralatan dan Mesin	12.747.900,00
9	Aset yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga	
	- Peralatan dan Mesin	5.714.260.847,40
	- Gedung dan Bangunan	14.183.219.620,76
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.112.349.550,00
	- Aset Tetap Lainnya	1.785.493.819,10
10	Aset yang digunakan oleh Pihak Swasta	
	- Peralatan dan Mesin	0,00
	- Gedung dan Bangunan	567.000.000,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	620.637.017,63
11	Aset yang akan diserahkan ke Instansi Vertikal:	
	- Peralatan dan Mesin	47.500.000,00
12	Aset yang akan diserahkan ke Provinsi	
	- Peralatan dan Mesin	87.853.190,04
	- Aset Tetap Lainnya	4.125.991,00
13	Aset yang akan diserahkan ke Instansi BUMD	498.661.600,00
14	Penyusutan Aset Lainnya	(62.003.727.751,11)
15	Piutang Lain-Lain	1.360.124.207,00
16	Aset Lain-Lain	28.099.167.004,00
Jumlah		**192.647.790.041,15**

Ringkasan Mutasi Aset Lainnya selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1 Ringkasan Mutasi Aset Lainnya Selama Tahun 2025

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024		**217.964.068.490,67**
Penambahan TGR	969.474.568,89	
Pengurangan TGR		
Penambahan Aset Tidak Berw ujud	115.000.000,00	
Penambahan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	
Penambahan akibat koreksi pencatatan pada aset Gedung Bangunan yang akan diserahkan kepada	0,20	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(476.850.212,13)	
Pengurangan Dana Transfer TreasuryDeposit Facility (TDF)	(429.549.000,00)	
Penambahan Amortisasi	(154.190.116,65)	
Pengurangan Akibat Penghapusan	(23.512.491.179,83)	
Reklasifikasi ke peralatan dan mesin	(1.827.672.510,00)	
Jumlah Penambahan/Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2025		(25.316.278.449,52)
Saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2025		**192.647.790.041,15**

Penjelasan atas saldo Aset Lainnya selama Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

   Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 sebesar Rp123.687.565.872,15 terdiri dari :

   - Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp123.300.096.384,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.1 Tuntutan Ganti Rugi

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi Pemeriksaan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Tuntutan Ganti Rugi
				Tindaklanjut Rekomendasi	Dalam Proses Tindaklanjut/ Belum di Tindaklanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2025	1.246.910.679,55	1.177.543.411,55	0,00	1.177.543.411,55	0,00	0,00	1.177.543.411,55
1	2024	1.046.690.509,44	913.173.495,76	410.400.863,66	487.073.632,10	0,00	0,00	487.073.632,10
2	2023	1.533.264.174,47	1.533.264.174,47	768.106.717,22	675.099.457,25	**15.687.000,00**	0,00	690.786.457,25
3	2022	1.635.286.999,13	1.635.286.999,13	1.177.336.179,05	446.216.044,08	0,00	0,00	446.216.044,08
4	2021	842.517.412,13	608.146.418,62	47.700.001,00	560.446.417,62	0,00	0,00	560.446.417,62
5	2020	717.213.981,18	629.313.453,18	121.269.931,00	508.043.522,18	0,00	0,00	508.043.522,18
6	2019	2.710.062.817,70	2.302.091.671,70	945.485.261,70	1.356.606.410,00	0,00	0,00	1.356.606.410,00
7	2018	3.144.404.369,09	2.017.693.758,09	924.070.019,00	1.075.863.739,09	0,00	0,00	1.075.863.739,09
8	2017	3.783.004.438,54	3.504.300.438,54	1.202.329.019,33	2.301.971.419,21	0,00	0,00	2.301.971.419,21
9	2016	2.882.573.350,78	2.203.573.638,78	1.323.091.358,86	823.143.779,92	0,00	0,00	823.143.779,92
10	2015	5.286.592.951,81	446.509.536,56	87.218.000,00	359.291.536,56	0,00	0,00	359.291.536,56
11	2014	4.745.989.042,12	4.192.450.723,60	3.647.273.171,70	536.910.327,90	0,00	8.267.224,00	545.177.551,90
12	2013	4.154.849.641,00	3.187.962.728,20	649.278.556,13	2.538.684.172,07	0,00	0,00	2.538.684.172,07
13	2012	3.513.806.607,88	3.508.916.258,20	2.005.040.438,91	1.503.875.819,29	0,00	0,00	1.503.875.819,29
14	2011	78.258.160.745,24	48.023.027.414,24	150.953.573,00	47.872.073.841,24	0,00	0,00	47.872.073.841,24
15	2010	40.406.263.814,73	40.406.263.814,73	1.762.869.278,00	38.643.394.536,73	0,00	0,00	38.643.394.536,73
16	2009	21.812.707.143,00	21.812.707.143,00	1.500.000.000,00	20.312.707.143,00	0,00	0,00	20.312.707.143,00
17	2008	4.974.614.066,98	4.974.614.066,98	4.234.638.697,98	739.975.369,00	0,00	0,00	739.975.369,00
18	2007	390.930.613,05	390.930.613,05	390.930.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2006	1.616.604.588,04	1.616.604.588,04	259.383.006,82	1.357.221.581,22	0,00	0,00	1.357.221.581,22
20	2005	478.371.412,00	478.371.412,00	478.371.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**185.180.819.357,86**	**145.562.745.758,42**	**22.085.746.098,41**	**123.276.142.160,01**	**15.687.000,00**	**8.267.224,00**	**123.300.096.384,01**

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp466.105.825,14 dengan rincian sebagai berikut:
  - Sisa Kekurangan Volume untuk Paket Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp202.388.539,71 dan;
  - Penambahan Kekurangan Volume untuk Paket Pekerjaan TA 2025 sebesar Rp263.717.285,43

  Rincian mutasi Tuntutan Ganti Rugi Kekurangan Volume Pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 15.1 Daftar Kekurangan Volume Pekerjaan
- Pengurangan TGR dari Koreksi Aset Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp78.636.337,00 yang terdiri dari Utang PFK Inspektorat sebesar Rp19.464.000,00 dan Utang PFK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp59.172.337,00.

2. Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud *Netto*	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp336.674.166,69	**Rp375.864.283,34**

Aset Tak Berwujud *Netto* Tahun 2025 sebesar Rp336.674.166,69 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.2 Aset Tak Berwujud Sampai Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Pengurangan Akibat Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Nilai Perolehan sampai dengan Tahun 2025 (Rp.)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Softw are Aplikasi Terapan	852.481.750,00	2013		852.481.750,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB P2	177.925.000,00	2014		177.925.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aplikasi SMARTGOVE	195.000.000,00	2022		195.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WEBGIS TAXATION MAP	115.000.000,00	2022		115.000.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Aplikasi SIAK	65.650.000,00	2014		65.650.000,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	GPS Pengaw asan	8.140.000,00	2014		8.140.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Website Potensi Investasi	17.000.000,00	2016	17.000.000,00	0,00
		Aplikasi Perijinan	39.930.000,00	2016		39.930.000,00
5	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	49.100.000,00	2016		49.100.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Lisensi	72.800.000,00	2017		72.800.000,00
		Lisensi dan Frenchise	27.120.000,00	2021		27.120.000,00
7	Dinas Perhubungan Daerah	Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture Kedatangan	52.640.476,00	2020		52.640.476,00
		Aplikasi Sinkronisasi Dengan SIM Kemenhub	23.536.786,00	2020		23.536.786,00
		Aplikasi SIM PKB	46.819.738,00	2020		46.819.738,00
		Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor	115.000.000,00	2025		115.000.000,00
8	Dinas Kesehatan Daerah	Softw are Aplikasi PSC	165.000.000,00	2020		165.000.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Aplikasi E-Library	31.000.000,00	2020		31.000.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi SmartGov Kota	149.750.000,00	2024		149.750.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud			**2.203.893.750,00**		**17.000.000,00**	**2.186.893.750,00**
Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud						**(1.850.219.583,31)**
Jumlah Aset Tak Berwujud *Netto*						**336.674.166,69**

a. Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp115.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Daerah berupa Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor;

3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp154.190.116,65 dan Akumulasi Amortisasi sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp1.850.219.583,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024	BEBAN PENYUSUTAN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN UNAUDITED 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.976.000,00	5.424.000,00	95.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	140.250.000,00	24.750.000,00	165.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pangan Daerah	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.650.000,00	0,00	65.650.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	100.447.550,00	26.382.783,32	126.830.333,32
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.479.166,67	29.949.999,99	42.429.166,66
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.930.000,00	0,00	39.930.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.316.666,67	5.683.333,33	31.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	49.100.000,00	0,00	49.100.000,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.164.740.083,33	62.000.000,00	1.226.740.083,33
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	0,00	0,00	0,00
29	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	0,00	0,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	0,00	0,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.696.029.466,67**	**154.190.116,64**	**1.850.219.583,31**

4. Aset Lain-Lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-Lain	**Rp130.627.277.753,42**	**Rp155.967.441.443,05**

Aset Lain-lain Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp130.627.277.753,42 atau berkurang sebesar Rp25.340.163.689,63 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp155.967.441.443,05 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.4 Aset Lain-lain Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset dengan Kondisi Rusak Berat:	
	- Peralatan dan Mesin	48.221.634.158,02
	- Gedung dan Bangunan	2.640.427.253,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.667.314.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	565.757.000,00
2	Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya:	
	- Peralatan dan Mesin	16.153.180.131,47
	- Gedung dan Bangunan	1.819.695.364,00
	- Aset Tetap Lainnya	5.625.000,00
3	Aset dengan Kondisi Hilang:	
	- Peralatan dan Mesin	460.504.100,00
4	Aset berupa Barang Habis Pakai:	
	- Peralatan dan Mesin	12.747.900,00
5	Aset yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga	
	- Peralatan dan Mesin	5.714.260.847,40
	- Gedung dan Bangunan	14.183.219.620,76
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.112.349.550,00
	- Aset Tetap Lainnya	1.785.493.819,10
6	Aset yang digunakan oleh Pihak Swasta	
	- Peralatan dan Mesin	0,00
	- Gedung dan Bangunan	567.000.000,00
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	620.637.017,63
7	Aset yang akan diserahkan ke Instansi Vertikal:	
	- Peralatan dan Mesin	47.500.000,00
8	Aset yang akan diserahkan ke Provinsi	
	- Peralatan dan Mesin	87.853.190,04
	- Aset Tetap Lainnya	4.125.991,00
9	Aset yang akan diserahkan ke Instansi BUMD	498.661.600,00
10	Piutang Lain-Lain	1.360.124.207,00
11	Aset Lain-Lain	28.099.167.004,00
Jumlah		**130.627.277.753,42**

5.1 Aset dengan Kondisi Rusak Berat

	31 Desember 2024	31 Desember 2024
Aset dengan Kondisi Rusak Berat	**Rp53.095.132.411,02**	**Rp53.196.252.371,02**

Aset Kondisi Rusak Berat Tahun 2025 sebesar Rp53.095.132.411,02 dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin (KIB B)

Tabel 5.7.8.1.5 Aset Kondisi Rusak Berat Peralatan dan Mesin (KIB B) Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.041.535.750,00
2	Sekretariat Daerah	5.608.356.725,00
3	Bagian Ekonomi & Pembangunan	3.148.800,00
4	Bagian Organisasi & Tata Laksana	30.609.259,00
5	Bagian Umum	176.319.750,00
6	Bagian Hukum	24.769.000,00
7	Bagian Perlengkapan	222.648.550,00
8	Kecamatan Tomohon Utara	242.886.500,00
9	Kecamatan Tomohon Tengah	105.917.500,00
10	Kecamatan Tomohon Selatan	99.629.500,00
11	Kecamatan Tomohon Timur	98.724.500,00
12	Kecamatan Tomohon Barat	152.789.987,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	38.346.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	606.509.740,00
15	Dishub Perhubungan Daerah	538.483.050,00
16	Dinas Kesehatan Daerah	18.680.203.201,00
17	Puskesmas Kakaskasen	538.137.838,00
18	Puskesmas Matani	613.538.820,00
19	Puskesmas Lansot	350.575.569,00
20	Puskesmas Rurukan	101.036.215,00
21	Puskesmas Tara-tara	172.948.228,00
22	Puskesmas Tinoor	149.197.270,00
23	Puskesmas Pangolombian	159.863.805,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	3.509.577.342,57
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	106.568.910,00
26	Dinas Tenaga Kerja Daerah	141.196.800,00
27	Dinas Sosial Daerah	91.077.400,00
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	1.021.370.962,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	50.445.445,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah	285.476.525,00
31	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	1.920.726.008,45
32	Dinas Pangan Daerah	520.646.302,00
33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	131.119.500,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4.020.594.214,00
35	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah	170.764.486,00
36	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	228.361.572,00
37	Inspektorat Daerah	331.155.346,00
38	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	364.762.000,00
39	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	4.222.928.421,70
40	Dinas Pariwisata Daerah	283.924.758,30
41	Badan Kesatuan bangsa Dan Politik	115.881.561,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.499.977,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	220.707.570,00
45	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	371.975.000,00
46	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	54.117.000,00
57	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	182.581.500,00
Jumlah		**48.221.634.158,02**

- Terjadi pengurangan Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) dalam kondisi rusak berat yang telah dihapuskan melalui proses pemindahtanganan melalui mekanisme lelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Pada Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp622.810.000 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.5.1 Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) dalam kondisi rusak berat akibat Penghapusan.

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.840.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	13.820.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	14.950.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	331.200.000,00
5	Kecamatan Tomohon Selatan	187.000.000,00
TOTAL		**622.810.000,00**

- Penambahan aset kondisi rusak berat peralatan dan mesin yang berasal dari aset peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak swasta sebesar Rp521.690.040,00 berupa:
  1. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Kijang Innova DB 70 G senilai Rp185.000.000,00 pada Dinas Pangan
  2. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Kijang Innova DB 1006 G senilai Rp252.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  3. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Kuda DB 1231 G senilai Rp 84.190.040,00 pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

  Untuk Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Gedung dan Bangunan (KIB C)

Tabel 5.7.8.1.6 Aset Kondisi Rusak Berat Tahun 2024 Gedung dan Bangunan (KIB C)

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	336.938.560,00
2	Dinas Pertanian Dan Perikanan Daerah	402.252.205,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.608.973.000,00
4	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	40.300.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	251.963.488,00
Jumlah		**2.640.427.253,00**

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) Tahun 2025 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.640.427.253,00.

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)

Tabel 5.7.8.1.7 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Kondisi Rusak Berat

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	1.659.056.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	3.508.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	2.250.000,00
Jumlah		**1.667.314.000,00**

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Tahun 2025 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.667.314.000,00.

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB-D) dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.7.8.1.8 Aset Tetap Lainnya Kondisi Rusak Berat

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	36.000.000,00
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengambangan Daerah	529.757.000,00
Jumlah		**565.757.000,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya (KIB E) Tahun 2025 tidak terjadi Penambahan/Pengurangan sehingga nilainya masih sama dengan Tahun 2024 sebesar Rp565.757.000,00.

Aset Tetap Lainnya dalam kondisi rusak berat nantinya akan diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp17.978.500.495,47	**Rp17.978.500.495,47**

Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya sebesar Rp17.978.500.495,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.9 Aset dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	3.031.127.980,00
Kecamatan Tomohon Timur	75.380.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	222.610.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Pemukiman Daerah	6.962.000,00
Dinas Pehubungan Daerah	154.466.000,00
Dinas Kesehatan Daerah	366.885.700,00
Puskesmas Kakaskasen	4.695.000,00
Puskesmas Rurukan	4.300.000,00
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah	10.915.948.873,97
Dinas Tenaga Kerja Daerah	36.933.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	85.826.888,00
Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Daerah	60.079.667,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Daerah	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	35.718.500,00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	256.758.411,00
Dinas Pangan Daerah	326.291.151,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4.300.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.996.366.364,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah	7.775.000,00
Inspektorat Daerah	5.146.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.600.000,00
Dinas Pariw isata Daerah	6.940.000,50
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	15.105.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.707.460,00
Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	150.107.500,00
Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah	26.300.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	83.170.000
Jumlah	**17.978.500.495,47**

a. Peralatan dan Mesin (KIB B)

Tabel 5.7.8.1.10 Aset Peralatan dan Mesin dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	3,031,127,980.00
Kecamatan Tomohon Timur	20,280,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	23,280,000.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	6,962,000.00
Dinas Pehubungan Daerah	154,466,000.00
Dinas Kesehatan Daerah	366,885,700.00
Puskesmas Kakaskasen	4,695,000.00
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah	10,915,948,873.97
Dinas Tenaga Kerja Daerah	36,933,000.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	85,826,888.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	60,079,667.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	35,718,500.00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	256,758,411.00
Dinas Pangan Daerah	326,291,151.00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4,300,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	435,401,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	7,775,000.00
Inspektorat Daerah	5,146,000.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	84,975,000.00
Dinas Pariwisata Daerah	6,940,000.50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,105,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,707,460.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	150,107,500.00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	26,300,000.00
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	83,170,000.00
Jumlah	**16,153,180,131.47**

Aset Peralatan dan Mesin (KIB-B) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

b. Gedung dan Bangunan (KIB C)

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tidak Diketahui Keberadaannya pada Gedung dan Bangunan (KIB C) Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.11 Aset Gedung dan Bangunan dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Kecamatan Tomohon Timur	55.100.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	199.330.000,00
Puskesmas Rurukan	4.300.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.560.965.364,00
Jumlah	**1.819.695.364,00**

Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

c. Aset Tetap Lainnya (KIB E)

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tidak Diketahui Keberadaannya pada Aset Tetap Lainnya (KIB E) Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.12 Aset Tetap Lainnya dengan Kondisi Tidak Diketahui Keberadaannya

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.625.000,00
Jumlah	**5.625.000,00**

Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang tidak diketahui keberadaannya akan dilaksanakan proses penelusuran bersama dengan SKPD terkait.

5.3 Aset dengan Kondisi Hilang sebesar Rp460.504.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.13 Aset dengan Kondisi Hilang

Yang Ada Surat Keterangan Hilang	Nilai (Rp)
Sekretariat DPRD	40.032.000,00
Sekretariat Daerah	2.475.000,00
Bagian Umum	4.620.000,00
Bagian Perlengkapan	33.530.600,00
Kecamatan Tomohon Tengah	37.775.000,00
Kecamatan Tomohon Timur	15.000.000,00
Dinas Pehubungan Daerah	23.400.000,00
Dinas Kesehatan Daerah	13.820.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	13.942.500,00
Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	19.979.500,00
Dinas Sosial Daerah	1.350.000,00
Dinas Pangan Daerah	2.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	55.670.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	17.410.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	15.000.000,00
Inspektorat Daerah	21.638.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	48.233.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	47.883.500,00
Dinas pariwisata Daerah	19.995.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.750.000,00
Jumlah	**460.504.100,00**

Aset dengan kondisi hilang nantinya akan diproses TGR melalui sidang MPTGR.

5.4 Aset berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp12.747.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.14 Aset Barang Habis Pakai

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
Bagian Perlengkapan	9.922.000,00	Barang-barang tersebut merupakan peralatan dapur barang pakai habis pengadaan Tahun 2013 yang saat ini dalam kondisi rusak berat dan telah diusulkan untuk dihapus pada Tahun 2021
Puskesmas Rurukan	2.825.900,00	Terjadi kesalahan penginputan oleh pengurus barang pada SIMDA BMD, dimana Barang Habis Pakai (BHP) turut diinput oleh pengurus barang sehingga akan dilakukan koreksi dengan pengusulan penghapusan
Jumlah	**12.747.900,00**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Barang Habis Pakai Tahun 2025.

5.5 Aset yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga sebesar Rp27.795.323.837,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.15 Aset Peralatan Mesin yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB B	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	3.057.397.413,40	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah sw asta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil *audited* Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2.490.378.434,00	Aset Peralatan dan Mesin yang diserahkan ke pihak ketiga dimana berkas terkait penyerahan barang tersebut antara lain BAST dan NPHD sudah tidak diketahui keberadaannya
Dinas Pangan Daerah	166.485.000,00	Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berpindah kantor pada Tahun 2017 dan mengalami perubahan nomenklatur (digabung dengan Badan Ketahanan Pangan) sehingga BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Jumlah	**5.714.260.847,40**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan /pengurangan Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.16 Aset Gedung dan Bangunan yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB C	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	460.000.000,00	Bangunan MCK Plus 2 unit dan Septiktank komunal 3 unit yang berada di Kelurahan Tinoor Satu yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan setempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	13.723.219.620,76	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah swasta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil audited Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Jumlah	**14.183.219.620,76**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.17 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB D	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	4.704.000.000,00	1. Terdapat 18 item pekerjaan yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk diserahkan kepada Pemerintah setempat dengan total nilai Rp896.000.000,00 2. Terdapat 29 item pekerjaan yang telah memiliki berita acara dan sudah tercatat di SIMDA BMD namun belum diusulkan dalam penghapusan sehingga akan ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam permohonan penghapusan dengan total nilai Rp3.808.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	1.408.349.550,00	1. Bangunan irigasi yang belum diserahkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyerahan bangunan tersebut dengan nilai Rp765.724.000,00 2. Bangunan sumur bor dan fasilitasnya yang belum diserahkan dan akan segera ditindaklanjuti untuk penyerahan bangunan tersebut dengan nilai Rp230.974.550,00 3. Aset yang tidak diserahkan karena terletak di tanah milik Dinas Pertanian & Perikanan Daerah Kota Tomohon dengan nilai Rp411.649.000,00
Jumlah	**6.112.349.550,00**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.18 Aset Tetap Lainnya yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

KIB E	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	1.785.493.819,10	Aset tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga (sekolah swasta), namun terdapat beberapa perbedaan jumlah nilai dengan SIMDA BMD dengan hasil *audited* Tahun 2020. Hingga saat ini aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga masih tercatat dalam SIMDA BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum dilakukan penghapusan karena dokumen pendukung seperti BAST sudah tidak diketahui keberadaannya
Jumlah	**1.785.493.819,10**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang akan Diserahkan kepada Pihak ketiga Tahun 2025.

5.6 Aset yang Digunakan Oleh Pihak Swasta sebesar Rp1.187.637.017,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.19 Aset Gedung dan Bangunan yang Digunakan Oleh Pihak Swasta

KIB C	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	567.000.000,00	Aset Gedung dan Bangunan berupa Gedung Pusat Informasi Geothermal & Wisata yang terletak di Kelurahan Lahendong dengan tahun perolehan 2008 senilai Rp411.100.000,00 dan dilanjutkan dengan pembuatan pagar dengan tahun perolehan 2013 dengan nilai Rp155.900.000,00 yang saat ini digunakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah	**567.000.000,00**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) yang digunakan oleh Pihak Swasta Tahun 2025.

Tabel 5.7.8.1.20 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Digunakan Oleh Pihak Swasta

KIB D	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	620.637.017,63	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdiri dari 3 ruas jalan yang dibangun diatas tanah bukan milik Pemerintah Kota Tomohon yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti untuk penyerahannya dengan rincian 1. Jalan Gudang Peluru (Rp228.377.388,53) 2. Jalan Kompleks Lapas (Rp233.286.023,10) 3. Jalan PPWG Kaaten (Rp158.973.606,00)
Jumlah	**620.637.017,63**	

Tidak terjadi Mutasi penambahan/pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) yang digunakan oleh Pihak Swasta Tahun 2025.

Terjadi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang Digunakan Oleh Pihak Swasta yaitu:

- yang telah dihapuskan melalui proses pemindahtanganan melalui mekanisme lelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Pada Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp600.000.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Nissan Terrano.
- Pengurangan aset peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak swasta ke aset kondisi rusak berat peralatan dan mesin Rp521.690.040,00 berupa:

1. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Kijang Innova DB 70 G senilai Rp185.000.000,00 pada Dinas Pangan
2. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Kijang Innova DB 1006 G senilai Rp252.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Kuda DB 1231 G senilai Rp 84.190.040,00 pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- Pengurangan akibat reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak swasta ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.827.672.510,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.21 Pengurangan Akibat Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin yang digunakan oleh pihak swasta ke Aset Peralatan dan Mesin

No	Perangkat Daerah	Nama Barang	Nilai Perolehan Rp.
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Toyota Kijang Innova G M/T	254.000.000,00
2	Bagian Umum	Suzuki APV	193.081.000,00
3	Dinas Kesehatan	Toyota Kijang Innova E	304.713.000,00
		Toyota Kijang Innova E	304.713.000,00
4	Dinas Pariwisata	Toyota Kijang Innova G M/T	308.515.500,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Daihatsu Xenia	154.216.670,00
		Daihatsu Xenia	154.216.670,00
		Daihatsu Xenia	154.216.670,00
TOTAL			**1.827.672.510,00**

5.7 Aset yang akan Diserahkan ke Instansi Vertikal sebesar Rp47.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.22 Aset yang Akan Diserahkan ke Instansi Vertikal

KIB B	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	47.500.000,00	Aset Peralatan & Mesin yang telah diserahkan ke pelaku usaha kuliner dan dokumennya telah diserahkan di Bidang Akuntansi pada Tahun 2017
Jumlah	**47.500.000,00**	

5.8 Aset yang akan diserahkan ke Provinsi sebesar Rp91.979.181,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.23 Aset yang Akan Diserahkan ke Provinsi

Perangkat Daerah	KIB B	KIB C	KIB E	Total Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	87.853.190,04	0,00	4.125.991,00	91.979.181,04	Barang yang ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sulut pada saat penyerahan P3D disebabkan barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya
Jumlah				**91.979.181,04**	

5.9 Aset yang akan diserahkan ke Instansi BUMD sebesar Rp498.661.600,00 merupakan Rehab Gedung Bangunan Pasar Kota Tomohon (Kondisi Baik) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah berdasarkan dokumen Nomor 01/PPK/K/DISDAGIN-KT/VII-2018 yang nilai gedung induk tercatat di PD. Pasar. Aset tersebut nantinya akan diserahkan dalam bentuk penyertaan modal setelah diterbitkannya Peraturan Daerah.

5.10 Tidak terjadi mutasi penambahan/pengurangan Piutang Lain-Lain sebesar Rp1.360.124.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.8.1.24 Piutang Lain-Lain Aset

No	Jenis Piutang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	67.697.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah	135.494.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	2.471.932,00
4	Dinas Tenaga Kerja Daerah	3.380.000,00
5	Bagian Pemerintahan & Kerjasama	36.461.800,00
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	83.070.000,00
7	Bagian Perlengkapan	284.506.000,00
8	Bagian Ekonomi & Pembangunan	210.696.150,00
9	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	88.925.000,00
11	Bagian Organisasi & Tata Laksana	64.823.450,00
12	Bagian Umum	260.100.000,00
14	Bagian Hukum	50.015.000,00
15	Kecamatan Tomohon Timur	3.300.000,00
16	Reklasifikasi dari Piutang Pajak Reklame untuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang Belum Tertagih	69.183.875,00
Jumlah		**1.360.124.207,00**

5.11 Penambahan akibat reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan rincian:

a. Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.718.919.276,00 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.25 Penambahan Aset Lainnya akibat Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139.425.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	381.620.295,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	89.700.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	1.967.233.946,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	140.940.035,00
TOTAL		**2.718.919.276,00**

Nilai Aset Lainnya Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.718.919.276,00 tidak ditambahkan dalam jumlah penambahan akibat reklasifikasi dari Aset Lainnya disebabkan telah dihapus melalui proses pemindahtanganan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola pada Pemerintah Kota Tomohon.

5.12 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp62.003.727.751,11	**Rp61.526.877.538,98**

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 terjadi Penambahan yang menyebabkan Saldo Akhir Tahun 2025 berubah nilainya menjadi Rp62.003.727.751,11 Untuk Tahun 2024 nilainya bertambah sebesar Rp476.850.212,13 dengan rincian:

Tabel 5.7.8.1.26 Akumulasi Penyusutan Aset lainnya

NO.	OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 2024	PENGURANGAN PENGHAPUSAN	KOREKSI BERTAMBAH/ BERKURANG	AKUMULASI PENYUSUTAN UNAUDITED 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.501.366.216,54	(75.840.000,00)		14.425.526.216,54
2	Dinas Kesehatan	20.849.553.278,16	(13.820.000,00)	953.741.892,13	21.789.475.170,29
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah	0,00			0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.900.420,00		145.918.320,00	179.818.740,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.490.073.155,97			1.490.073.155,97
6	Satuan Polisi Pamong Praja	220.707.570,00			220.707.570,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.499.977,00			119.499.977,00
8	Dinas Sosial	91.077.400,00			91.077.400,00
9	Dinas Tenaga Kerja	141.196.800,00			141.196.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	285.476.525,00			285.476.525,00
11	Dinas Pangan Daerah	335.646.302,00			335.646.302,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.308.415.668,93			4.308.415.668,93
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.023.213.285,33			1.023.213.285,33
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67.195.445,00	(14.950.000,00)		52.245.445,00
15	Dinas Perhubungan Daerah	538.483.050,00			538.483.050,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	182.581.500,00			182.581.500,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	183.064.486,00			183.064.486,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	226.732.349,78			226.732.349,78
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	106.568.910,00			106.568.910,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	54.117.000,00			54.117.000,00
21	Dinas Pariwisata	283.924.758,30			283.924.758,30
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.067.104.802,30			2.067.104.802,30
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.119.500,00			131.119.500,00
24	Sekretariat Daerah	6.397.052.084,00	(331.200.000,00)		6.065.852.084,00
25	Sekretariat DPRD	1.043.671.166,67			1.043.671.166,67
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	908.221.000,00			908.221.000,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.230.954.994,00			4.230.954.994,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	371.975.000,00			371.975.000,00
29	Inspektorat Daerah	331.155.346,00			331.155.346,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	242.886.500,00			242.886.500,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	105.917.500,00			105.917.500,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	286.629.500,00	(187.000.000,00)		99.629.500,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	152.789.987,00			152.789.987,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	98.724.500,00			98.724.500,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115.881.561,00			115.881.561,00
TOTAL		**61.526.877.538,98**	**(622.810.000,00)**	**1.099.660.212,13**	**62.003.727.751,11**

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp622.810.000 disebabkan pemindahtanganan melalui proses penjualan.

5.13 Aset Lain-Lain sebesar Rp28.099.167.004,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi dari kas di Bendahara Pengeluaran atas kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang masih dalam tahap proses penyidikan oleh KPK berdasarkan Surat Panggilan KPK Nomor Spgl-3377/23/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp880.256.950,00; dan

- Sisa Tuntutan Ganti Rugi atas penarikan tunai Tahun 2009 dan 2010 berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012 Nomor 13/LHP/XIX.MND/05/2013 sebesar Rp27.218.910.054,00.

6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp429.549.000,00. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang penyalurannya berupa *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dalam bentuk nontunai yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7.9 Rincian Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No	Uraian	2025	2024
1	**DBH Pajak**	**0,00**	**0,00**
1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00
1.2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00
1.3	DBH PPh Pasal 25/29	0,00	0,00
2	**DBH Sumber Daya Alam**	**0,00**	**429.549.000,00**
2.1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	284.000,00
2.2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	428.033.000,00
2.3	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi	0,00	1.232.000,00
2.4	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**429.549.000,00**

Pemerintah Kota Tomohon telah menerima saluran pokok DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp429.549.000,00 pada tanggal 17 Februari 2025, berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Manado Nomor S-250/KPN.3001/2025 tentang Penyampaian Informasi Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2024.

5.3.B Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.212.311.959,19, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp50.396.646.554,19 dan Kewajiban Panjang sebesar Rp46.815.665.405,00.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.B.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**Rp50.396.646.554,19**	**Rp56.735.934.910,99**

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp50.396.646.554,19 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp216.314.862,00, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp16.559.091.300,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp13.097.295,00, dan Utang Belanja sebesar Rp33.608.143.097,19.
Rincian kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	216.314.862,00	159.032.718,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	16.559.091.300,00	16.559.091.300,00
Pendapatan Diterima Di Muka	13.097.295,00	11.192.127,57
Utang Belanja	33.608.143.097,19	40.006.618.765,42
Jumlah	**50.396.646.554,19**	**56.735.934.910,99**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 16.1 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**Rp216.314.862,00**	**Rp159.032.718,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp216.314.862,00 merupakan pengakuan utang PFK atas kesalahan pengembalian Kas Dana BOS yang seharusnya dikembalikan ke rekening Bendahara Umum Negara, tetapi dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp74.874.138,00 dan Penambahan Utang PFK RSUD Anugerah sebesar Rp141.440.724,00.

Tabel 5.8.2 Utang PFK

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang PPh Ps 21	0,00	68.479.550,00
2	Utang PPh Ps 22	0,00	1.453.941,00
3	Utang PPh Ps 23	16.671.903,00	923.771,00
4	Utang PPh Ps 4 (2)	0,00	1.323.000,00
5	Utang PPN	124.768.821,00	11.978.318,00
6	Utang PFK Lainnya (*)	74.874.138,00	74.874.138,00
	Jumlah	**216.314.862,00**	**159.032.718,00**

Rincian Daftar Utang PFK dapat dilihat pada Lampiran 16.2 Daftar Utang PFK SKPD.

2.	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**31 Desember 2025** **Rp16.559.091.300,00**	**31 Desember 2024** **Rp16.559.091.300,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan (satu tahun) yang akan datang.

Pemerintah Kota Tomohon mempunyai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.559.091.300,00 untuk cicilan pembayaran pokok pinjaman yang dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum) setiap bulan untuk Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

3.	**Pendapatan Diterima Di Muka**	**31 Desember 2025** **Rp13.097.295,00**	**31 Desember 2024** **Rp11.192.127,57**

Pendapatan Diterima Di Muka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Di Muka Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.097.295,00 merupakan pendapatan hasil pemanfaatan tanah dan/atau bangunan mal pelayanan publik yang diterima dari PT. Bank SulutGo untuk digunakan sebagai Kantor Kas Bank SulutGo dalam periode 4 April 2025 sampai 03 April 2026 berdasarkan perjanjian sewa menyewa Nomor 000.2.3.2/SEKR/906-BPKPD dan Nomor 004/A/PSM/TMHN/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025. Pendapatan Diterima Di Muka adalah Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD dalam periode 01 Januari 2026 sampai 03 April 2026.

Pendapatan Diterima Di Muka Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.192.127,57 merupakan pendapatan hasil sewa tanah dan/atau bangunan mal pelayanan publik yang diterima dari PT. Bank SulutGo untuk digunakan sebagai Kantor Kas Bank SulutGo dalam periode 4 April 2023 sampai 03 April 2025 berdasarkan perjanjian sewa menyewa Nomor 584/SET/427 dan Nomor 003/A/PSM/IX/2023 tanggal 22 September 2023. Pendapatan Diterima Di Muka adalah Pendapatan Hasil Sewa BMD dalam periode 01 Januari 2025 sampai 03 April 2025.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4. Utang Belanja	**Rp33.608.143.097,19**	**Rp40.006.618.765,42**

Utang Belanja Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.608.143.097,19 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp12.466.618.669,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.335.482.413,00, Utang Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp2.694.927.708,19, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp671.575.890,00, Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.324.538.417,00 dan Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp115.000.000,00.

Tabel 5.8.3 Utang Belanja

NO	URAIAN	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	UTANG BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	UTANG BELANJA MODAL ASET LAINNYA-ASET TIDAK BERWUJUD	JUMLAH UTANG BELANJA (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	7.473.630,00	0,00	157.472.400,00	0,00			164.946.030,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	2.181.785.759,00	13.266.912.783,00		2.277.657.564,00	167.752.800,00			17.894.108.906,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	54.838.430,00			17.429.600,00	4.148.938.892,00		4.221.206.922,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	6.257.570,00		144.327.744,19	471.912.756,00			622.498.070,19
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00						0,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	0,00	0,00						0,00
7	DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	0,00						0,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	0,00						0,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	0,00						0,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	0,00	0,00						0,00
11	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	0,00		81.470.000,00	3.744.500,00		115.000.000,00	200.214.500,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	0,00						0,00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	0,00						0,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	0,00	0,00		34.000.000,00				34.000.000,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	0,00			783.840,00			783.840,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	0,00	0,00						0,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	0,00						0,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	0,00						0,00
19	DINAS PANGAN DAERAH	0,00	0,00						0,00
20	DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	0,00						0,00
21	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	0,00						0,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00						0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00						0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00			9.952.394,00			9.952.394,00
25	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00						0,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	10.284.832.910,00	0,00				102.937.628,00		10.387.770.538,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00						0,00
29	INSPEKTORAT	0,00	0,00						0,00
30	KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	0,00						0,00
31	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	0,00	0,00						0,00
32	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	0,00				45.324.313,00		45.324.313,00
33	KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	0,00				7.425.000,00		7.425.000,00
34	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	0,00				19.912.584,00		19.912.584,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00						0,00
TOTAL		**12.466.618.669,00**	**13.335.482.413,00**	**0,00**	**2.694.927.708,19**	**671.575.890,00**	**4.324.538.417,00**	**115.000.000,00**	**33.608.143.097,19**

Rincian Utang Belanja dapat dilihat di Lampiran 16.3 Daftar Utang Belanja.

5. Utang Jangka Pendek	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
Lainnya	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00.

5.3.B.2	Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Jangka Panjang	**Rp46.815.665.405,00**	**Rp63.374.756.705,00**

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah Kota Tomohon mempunyai Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp46.815.665.405,00, yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.8.4 Kewajiban Jangka Panjang

No	Kewajiban Jangka Panjang	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	63.374.756.705,00	0,00	16.559.091.300,00	0,00	46.815.665.405,00
Jumlah		**63.374.756.705,00**	**0,00**	**16.559.091.300,00**	**0,00**	**46.815.665.405,00**

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp46.815.665.405,00 merupakan Pengurangan atas reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp16.559.091.300,00 untuk Pembayaran Pokok Utang Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821 dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 23 Agustus 2021. Perjanjian tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Sumber Pinjaman	:	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Dasar Hukum Pinjaman	:	Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821
Tanggal Perjanjian Pinjaman	:	23 Agustus 2021
Jumlah Pinjaman	:	Rp100.354.602.840,00
Jangka Waktu Pinjaman	:	8 tahun atau 96 bulan
Bunga Pinjaman	:	6,19% per tahun

Biaya Pinjaman		
- Biaya Pengelolaan Pinjaman	:	0,185% per tahun
- Biaya Provisi	:	1% (dikenakan 1 kali)
Tujuan Pinjaman	:	Untuk membiayai kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Tahun 2021

- Rincian Realisasi Pokok Pinjaman Daerah sebesar Rp70.248.221.988,00 pada Tahun 2021 sebagai berikut:
  1. Tahap I sebesar Rp25.088.650.710,00 tanggal 26 Oktober 2021
  2. Tahap II sebesar Rp45.159.571.278,00 tanggal 23 Desember 2021.

Tahun 2022

- Realisasi Penerimaan atas Pinjaman Dana PEN tahap III sebesar Rp29.106.317.869,00 tanggal 24 Juni 2022.
- Jumlah *Outstanding* Pinjaman Pemerintah Kota Tomohon ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sampai dengan Tahun 2022 sejumlah Realisasi Tahap I, II dan III yaitu sebesar Rp99.354.539.857,00 kurang dari nilai pinjaman pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-127/SMI/0821 sebesar Rp100.354.602.840,00. Hal ini disebabkan karena Realisasi Penerimaan Pinjaman berdasarkan nilai kontrak dari kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- Pemerintah Kota Tomohon belum membayar Pokok Pinjaman Daerah pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 karena adanya masa *grace period* selama 2 tahun.
- Realisasi Biaya Provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif Pinjaman PEN dilakukan dengan penerbitan SP2D No.02820/SP2D-LS/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp993.545.399,00.

Tahun 2023

- Tahun 2023 ada Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah yang dipotong dari Transfer Dana DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp2.759.848.550,00 dari Pemotongan DAU November 2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.379.924.275,00 dan Pemotongan DAU Desember 2023 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp1.379.924.275,00.
- Pada tanggal 5 Juni 2023 ada Pengembalian Sisa Dana Pinjaman PEN sebesar Rp101.752.002,00 dengan penerbitan SP2D No.02825/SP2D-LS/06/2023.
- Realisasi Pembayaran Bunga Tahun 2023 sebesar Rp6.228.345.207,00 dipotong dari Dana Alokasi Umum setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang

Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

- Realisasi Biaya Pengelolaan Pinjaman untuk Tahun 2023 sebesar Rp183.617.658,00 (0,185% per Tahun dari jumlah *Outstanding* Pinjaman) dilakukan dengan penerbitan SP2D No. 05939/SP2D-LS/09/2023 tanggal 04 September 2023.

Tahun 2024

- Tahun 2024 ada Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah yang dipotong dari Transfer Dana DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp16.559.091.300,00 dari Pemotongan DAU Januari sampai dengan Desember 2024.
- Realisasi Pembayaran Bunga Tahun 2024 sebesar Rp5.592.396.785,00 dipotong dari Dana Alokasi Umum setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.
- Realisasi Biaya Pengelolaan Pinjaman untuk Tahun 2024 sebesar Rp158.089.058,00 (0,185% per Tahun dari jumlah *Outstanding* Pinjaman) dilakukan dengan penerbitan SP2D No. 05171/SP2D-LS/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Tahun 2025

- Tahun 2025 ada Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah yang dipotong dari Transfer Dana DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp16.559.091.300,00 dari Pemotongan DAU Januari sampai dengan Desember 2025.
- Realisasi Pembayaran Bunga Tahun 2024 sebesar Rp4.667.167.507,00

dipotong dari Dana Alokasi Umum setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

- Realisasi Biaya Pengelolaan Pinjaman untuk Tahun 2024 sebesar Rp127.454.740,00 (0,185% per Tahun dari jumlah *Outstanding* Pinjaman) dilakukan dengan penerbitan SP2D No. 04705/SP2D-LS/IX/2025 tanggal 2 September 2025.

Rincian Pinjaman Daerah dapat dilihat Pada Lampiran 17.1 Daftar Pinjaman Daerah dan Rincian kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.2 Daftar Rincian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Daerah.

5.3.C EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp1.614.051.094.061,23	**Rp1.588.841.668.862,43**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Tomohon, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tomohon.

Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.614.051.094.061,23 mengalami peningkatan sebesar Rp25.209.425.198,80 dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.841.668.862,43.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan–LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Tomohon

Kode	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
7	**PENDAPATAN–LO**	**671.085.936.971,96**	**734.361.639.805,74**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)–LO**	**67.150.167.988,96**	**61.039.507.624,18**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah–LO	40.760.661.792,00	35.127.068.778,50
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah–LO	18.011.008.962,00	2.817.579.468,00
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	3.690.962.405,00	3.080.810.919,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah–LO	4.687.534.829,96	20.014.048.458,68
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER–LO**	**578.090.601.485,00**	**620.991.330.207,00**
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO	558.930.843.123,00	593.569.049.514,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	19.159.758.362,00	27.422.280.693,00
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LO**	**25.845.167.498,00**	**52.330.801.974,56**
7.3.1	Pendapatan Hibah–LO	16.770.493.186,00	42.265.621.477,56
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	9.074.674.312,00	10.065.180.497,00
8	**BEBAN**	**616.240.374.293,40**	**703.144.069.522,88**
8.1.1	Beban Pegawai	296.292.707.511,00	305.393.904.402,00
8.1.2	Beban Barang Dan Jasa	224.945.720.586,72	267.975.005.316,98
8.1.3	Beban Bunga	4.667.167.507,00	5.750.485.843,00
8.1.5	Beban Hibah	15.069.201.240,00	45.058.052.636,92
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	471.500.000,00	4.136.000.000,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	1.893.954.370,25	2.772.774.709,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	740.008.741,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.202.177.866,30	24.453.833.104,25
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.931.692.976,74	10.136.107.992,23
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.445.264.327,07	36.506.769.794,16
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.797.791,67	59.953.583,34
8.2.5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	154.190.116,65	161.173.400,00
8.2.6	Beban Transfer	150.000.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**54.845.562.678,56**	**31.217.570.282,86**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	197.249.300,00	213.171.242,86
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	905.894.716,00	115.335.938,67
8.3.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(22.889.681.179,63)	(2.068.721.952,27)
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	(2.102.002.903,67)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(21.786.537.163,63)**	**(3.842.217.674,41)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**33.059.025.514,93**	**27.375.352.608,45**
	POS LUAR BIASA		
8.4.1	Beban Tak Terduga	4.513.321.480,00	4.490.000.000,00
	SURPLUS/DEFISIT-POS LUAR BIASA	**(4.513.321.480,00)**	**(4.490.000.000,00)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**28.545.704.034,93**	**22.885.352.608,45**

5.4.A PENDAPATAN–LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan–LO Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 diakui sebesar Rp671.085.936.971,96 mengalami penurunan sebesar Rp63.275.702.833,78 atau 8,62% dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp734.361.639.805,74 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah–LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp67.150.167.988,96 mengalami kenaikan sebesar Rp6.110.660.364,78 atau 10,01% dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp61.039.507.624,18 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah–LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp40.760.661.792,00.

Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2025 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.1 Pendapatan Pajak Daerah–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Hotel–LO	0,00	1.012.441.537,00
2	Pajak Restoran–LO	0,00	5.080.633.980,00
3	Pajak Hiburan–LO	0,00	196.608.950,00
4	Pajak Reklame–LO	2.496.617.563,00	2.324.392.184,00
5	Pajak Penerangan Jalan–LO	0,00	5.850.030.421,00
6	Pajak Parkir–LO	0,00	211.946.594,00
7	Pajak Air Tanah–LO	50.877.763,00	19.299.000,00
8	Pajak Sarang Burung Walet–LO	4.400.000,00	4.500.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LO	588.410.575,00	616.152.723,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan–LO	7.210.518.522,00	7.182.942.083,00
11	BPHTB-LO	4.047.529.987,00	4.224.107.892,50
12	PBJT-LO	17.373.392.882,00	8.404.013.414,00
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	5.848.785.600,00	0,00
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	3.140.128.900,00	0,00
	Jumlah	**40.760.661.792,00**	**35.127.068.778,50**

Nilai Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp40.760.661.792,00 berasal dari:

Realisasi Pajak Daerah LRA Tahun 2025			Rp	38.464.925.994,00
Piutang Pajak Tahun 2025	Rp	22.190.655.755,00		
Piutang Pajak Tahun 2024	Rp	(19.894.919.957,00)		
Selisih			Rp	2.295.735.798,00
Pendapatan Pajak Daerah–LO			Rp	40.760.661792,00

Penjelasan selisih Realisasi Pajak Daerah–LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp2.295.735.798,00 didapat dari penambahan Piutang

Pajak Tahun 2025 sebesar Rp22.190.655.755,00, pengurangan atas penerimaan Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp19.894.919.957,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp18.011.008.962,00.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2025 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO	15.580.806.685,00	46.072.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan–LO	1.034.632.694,00	1.282.641.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO	110.552.000,00	68.425.000,00
6	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum/Terminal-LO	258.226.166,00	118.470.168,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga–LO	658.360.000,00	734.190.000,00
8	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LO	3.712.832,00	567.781.000,00
9	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum–LO	364.718.585,00	0,00
	Jumlah	**18.011.008.962,00**	**2.817.579.468,00**

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah–LO sebesar Rp18.011.008.962,00 berasal dari:

Realisasi Retribusi Daerah LRA Tahun 2025		Rp	18.860.687.942,00
Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	171.907.076,00		
Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2024	(1.021.586.056,00)		
Piutang Pajak Tahun 2024			
Selisih		Rp	(849.678.980,00)
Pendapatan Pajak Daerah–LO		Rp	18.011.008.962,00

Penjelasan selisih Realisasi Retribusi Daerah–LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp849.678.980,00 didapat dari Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025 pada Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp171.907.076,00 dan Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2025 untuk Penerimaan atas Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.021.586.056,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp3.690.962.405,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.690.962.405,00 merupakan dividen yang diterima berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank SulutGo Nomor 04 tanggal 10 Februari 2026 pada Keputusan Pertama memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan Dana Setoran Modal beberapa Pemegang Saham. Pemerintah Kota Tomohon menerima Deviden secara proporsional berdasarkan *share* saham per 31 Desember 2025. Deviden ini diterima pada tanggal 24 Februari 2026.

4) Lain-lain PAD yang Sah–LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 diakui sebesar Rp4.687.534.829,96. Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah–LO Tahun 2025 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.3 Lain-lain PAD Yang Sah–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	**0,00**
2	Hasil Pemanfaaatan BMD yang Tidak Dipisahkan–LO	344.484.012,57	295.500.000,00
3	Jasa Giro-LO	1.093.176.344,00	910.522.233,00
4	Pendapatan Bunga–LO	5.535.675,00	169.053.470,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah–LO	1.883.342.576,84	1.509.201.755,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.124.288.378,00	619.116.078,50
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	68.812.449,58	305.121.233,18
8	Pendapatan Denda Pajak–LO	137.230.460,97	134.556.619,00
9	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	0,00
10	Pendapatan BLUD	30.664.933,00	0,00
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	16.070.621.254,00
12	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	0,00	355.816,00
Jumlah		**4.687.534.829,96**	**20.014.048.458,68**

Nilai Lain-lain PAD yang Sah–LO sebesar Rp4.687.534.829,96 berasal dari:

Realisasi Lain-lain PAD-LRA Tahun 2025		Rp 4.072.932.013,93
Penambahan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD	Rp 209.192.127,57	
Pengurangan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD	Rp (103.097.295,00)	
Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp 1.000.640.135,55	
Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp (294.882.852,09)	
Pengurangan atas Penjualan Alat Angkutan yang di catat pada surplus Penjualan Alat Angkutan	Rp (197.249.300,00)	
Selisih		Rp 614.602.816,03
Pendapatan Lain-lain PAD–LO		Rp 4.687.534.829,96

Penjelasan selisih Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah–LO sebesar Rp614.602.816,03 didapat dari:

- Penambahan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD sebesar Rp209.192.127,57 terdiri dari Penambahan Piutang atas sewa kios KSU pada periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp198.000.000,00 dan Penambahan Pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka dari sewa Kantor Kas Bank SulutGo pada periode 4 April 2024 sampai 3 April 2025 sebesar Rp11.192.127,57.
- Pengurangan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD sebesar Rp103.097.295,00 terdiri dari Pengurangan Piutang atas pembayaran sewa kios KSU periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar Rp90.000.000,00 dan Pengurangan Pendapatan atas Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka dari pembayaran sewa Kantor Kas Bank SulutGo pada periode 4 April 2025 sampai 3 April 2026 sebesar Rp13.097.295,00.
- Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.000.640.135,55.
- Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp294.882.852,09 atas pembayaran kekurangan volume pekerjaan Tahun 2024.
- Pengurangan atas Penjualan Alat Angkutan yang dicatat pada Surplus Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp197.249.300,00.

2. Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan Transfer–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp578.090.601.485,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.900.728.722,00 atau 6,91% dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp620.991.330.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp558.930.843.123,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 terdiri atas Dana Perimbangan-LO sebesar Rp538.544.132.123,00 dan Insentif Fiskal-LO sebesar Rp20.386.711.000,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2025 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.9.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	**Dana Perimbangan**	**538.544.132.123,00**	**580.635.703.514,00**
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	38.020.278.200,00	31.300.226.000,00
1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LO	426.951.422.834,00	424.328.577.685,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LO	16.721.559.693,00	70.435.760.476,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusuis (DAK) Non-Fisik–LO	56.850.871.396,00	54.571.139.353,00
2	**Lainnya**	**20.386.711.000,00**	**12.933.346.000,00**
2.1	Insentif Fiskal	20.386.711.000,00	12.933.346.000,00
Jumlah (1+2)		**558.930.843.123,00**	**593.569.049.514,00**

Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp538.544.132.123,00 terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp38.020.278.200,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp426.951.422.834,00, Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik-LO sebesar Rp16.721.559.693,00 dan Dana Transfer Khusus (DAK) Non-Fisik-LO sebesar Rp56.850.871.396,00. Insentif Fiskal–LO diakui sebesar Rp20.386.711.000,00.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 sebesar Rp38.020.278.200,00 terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO sebesar Rp12.592.550.200,00 dan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp25.427.728.000,00.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LO terdiri dari:

Tabel 5.9.4.1 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

No	Uraian	Bruto (Rp)	Pot (Rp)	Bersih
1	**DAU**	**375.728.253.000,00**	**21.242.125.547,00**	**354.486.127.453,00**
2	**DAU Tambahan Dukungan**	**11.801.983.834,00**	0,00	**11.801.983.834,00**
a	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.800.000.000,00	0,00	8.800.000.000,00
b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.001.983.834,00	0,00	3.001.983.834,00
3	**DAU yang Ditentukan Penggunaannya**	**39.421.186.000,00**	0,00	**39.421.186.000,00**
a	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.204.651.000,00	0,00	22.204.651.000,00
b	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.216.535.000,00	0,00	17.216.535.000,00
Total		**426.951.422.834,00**	**21.242.125.547,00**	**405.709.297.287,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LO yang diakui sebesar RP426.951.422.834,00 terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LO yang langsung ditransfer ke RKUD sebesar Rp405.709.297.287,00 dengan Pengakuan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) atas Potongan sebesar Rp21.242.125.547,00 yang terdiri dari Potongan Pokok Pinjaman sebesar Rp16.559.091.300,00, Bunga Pinjaman PEN sebesar Rp4.539.712.767,00, Pengembalian Sisa DAK Non Fisik sampai dengan 2023 sebesar Rp38.058.000,00 dan Pengembalian Sisa DAK Non Fisik sampai dengan 2024 sebesar Rp105.263.480,00.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LO sebesar Rp16.721.559.693,00 terdiri atas:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp992.549.000,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO sebesar Rp375.000.000,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO sebesar Rp4.854.764.400,00
- DAK Fisik-Bidang Bidang Sanitasi-Reguler-LO sebesar Rp2.801.963.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO sebesar Rp7.697.283.293,00

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik–LO sebesar Rp56.850.871.396,00 terdiri atas:

- DAK Non-Fisik-BOS Reguler-LO sebesar Rp13.302.856.588,00
- DAK Non-Fisik-BOS Kinerja-LO sebesar Rp965.250.000,00
- DAK Non-Fisik-TPG PNSD-LO sebesar Rp27.573.081.900,00
- DAK Non-Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO sebesar Rp105.000.000,00
- DAK Non-Fisik-BOKKB-BOKB-LO sebesar Rp1.956.104.589,00
- DAK Non-Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO sebesar Rp505.690.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO sebesar Rp267.900.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO sebesar Rp997.421.000,00

- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO sebesar Rp45.000.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO sebesar Rp247.420.000,00.
- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO sebesar Rp6.192.186.527,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO sebesar Rp379.667.000,00
- DAK Non-Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO sebesar Rp4.313.293.792,00.

Insentif Fiskal–LO terealisasi sebesar Rp20.386.711.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.386.711.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp19.159.758.362,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO, berasal dari:

Realisasi Transfer Antar Daerah-LRA		Rp 26.035.872.859,00
Piutang DBH Pajak Tahun 2025	Rp 4.592.907.034,00	
Piutang DBH Pajak Tahun 2024	Rp (11.469.021.531,00)	
Selisih		Rp (6.876.114.497,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO		Rp 19.159.758.362,00

Penjelasan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar RpRp6.876.114.497,00 merupakan selisih dari Penambangan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.592.907.034,00 dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp11.469.021.531,00 Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp25.845.167.498,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.485.634.476,56 atau 50,61% dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp52.330.801.974,56 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp16.770.493.186,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.495.128.291,56 atau 60,32% dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp42.265.621.477,56.

Pendapatan Hibah–LO Tahun 2025 sebesar Rp16.770.493.186,00 didapat dari:

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA			Rp	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp	5.852.372.745,00		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Rp	4.453.426.441,00		
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Rp	6.464.694.000,00		
Selisih			Rp	16.770.493.186,00
Pendapatan Hibah-LO			Rp	16.770.493.186,00

Penjelasan selisih sebesar Rp16.636.144.441,00 antara Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp0,00 dengan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp16.636.144.441,00, yaitu:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp5.852.372.745,00 berupa:
  - Penambahan AT- Peralatan dan Mesin dari Hibah Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura sebesar Rp287.384.000,00.
  - Penambahan AT-GB dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.899.135.000,00 dan Rp1.198.000.000,00.
  - Penambahan AT- JIJ (Bangunan Pembuang Air Kotor) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.333.505.000,00.
  - Penambahan Persediaan Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.880.000,00.
  - Penambahan Aset Tetap Bangunan Gedung (Revitalisasi Pusat Tahun 2025 atas Jasa Konstruksi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp123.468.745,00.
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp4.453.426.441,00.
  - Persediaan Obat-Obatan Hibah dari DPPKBD Provinsi kepada DInas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon sebesar Rp160.359.650,00.

- Penerimaan Hibah Persediaan Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kota Tomohon sebesar Rp4.293.066.791,00.

- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp6.464.694.000,00 merupakan Penambahan Aset Tetap Tanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No.BA.04/Ek.11/26/02/2025; No. 066/WKT/II-2025.

2) Pendapatan Lainnya-LO adalah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp9.074.674.312,00 mengalami penurunan sebesar Rp990.506.185,00 atau 9,84% dari Tahun 2024 sebesar Rp10.065.180.497,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Lainnya-LRA sebesar Rp10.165.652.475,00, terdapat selisih sebesar Rp1.090.978.163,00 terdiri dari pengurangan Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah (Bonus Produksi pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong) Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp1.016.878.298,00 dan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp1.056.947.129,00 dan penambahan Piutang Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp982.847.264,00.

5.4.B BEBAN

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 diakui sebesar Rp616.240.374.293,40 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.9.5 Beban-LO

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	296.292.707.511,00	305.393.904.402,00
2	Beban Persediaan	57.519.484.930,72	58.046.480.288,66
3	Beban Jasa	131.154.476.541,00	158.814.681.234,82
4	Beban Pemeliharaan	8.801.769.550,00	4.231.747.146,00
5	Beban Perjalanan Dinas	27.469.989.565,00	46.882.096.647,50
6	Beban Bunga	4.667.167.507,00	5.750.485.843,00
7	Beban Hibah	15.069.201.240,00	45.058.052.636,92
8	Beban Bantuan Sosial	471.500.000,00	4.136.000.000,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	72.750.123.078,43	71.317.837.873,98
10	Beban Penyisihan Piutang	1.893.954.370,25	2.772.774.709,00
11	Beban Lain-lain	0,00	740.008.741,00
12	Beban Transfer	150.000.000,00	0,00
	Jumlah	**616.240.374.293,40**	**703.144.069.522,88**

1. Beban Pegawai–LO

Beban Pegawai–LO Tahun 2025 diakui sebesar Rp296.292.707.511,00

Rincian Beban Pegawai–LO Tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut.

Tabel 5.9.6 Beban Pegawai–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	190.051.378.153,00	194.622.772.390,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	66.891.799.852,00	70.132.947.191,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	28.709.687.241,00	32.077.704.994,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	9.545.731.056,00	7.814.575.766,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	496.101.209,00	128.144.061,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	510.880.000,00	498.280.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	87.130.000,00	119.480.000,00
Jumlah		**296.292.707.511,00**	**305.393.904.402,00**

Penjelasan Selisih		
Belanja Pegawai-LRA		**301.200.368.052,00**
Jurnal Penyesuaian Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan Pegawai ASN-LO Bulan Desember 2024	(4.907.660.541,00)	
	Selisih	**(4.907.660.541,00)**
Beban Pegawai-LO		**296.292.707.511,00**

Penjelasan selisih sebesar (Rp4.907.660.541,00) antara Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp301.200.368.052,00 dengan Beban Pegawai-LO sebesar Rp296.292.707.511,00 yaitu:

- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO sebesar (Rp4.907.660.541,00) merupakan Penambahan Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024.

2. Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan-LO sebesar Rp57.519.484.930,72 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.7 Beban Persediaan-LO

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Beban Barang Pakai Habis		
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	329.070.466,00	304.733.500,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.122.557.585,00	39.116.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.054.136.159,00	5.887.557.005,00
4	Beban Bahan Baku	216.701.350,00	132.193.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.064.745.100,00	753.834.720,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	126.903.200,00	82.564.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.072.000,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	116.210.730,90	564.895.459,33
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	631.102.611,00	550.514.555,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.694.582.031,00	1.540.298.667,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	27.965.300,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.540.213.161,00	4.538.170.987,33
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.680.013.998,00	1.267.227.450,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.691.092.551,00	2.079.458.562,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.071.037.350,00	885.663.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	19.406.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	709.156.953,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	933.365.414,00	529.975.718,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	40.107.200,00	20.600.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	189.251.500,00	579.487.700,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.172.262.500,00	179.516.600,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.916.821.496,00	600.855.333,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	4.072.316.203,07	6.638.489.329,34
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	41.365.100,00	121.927.000,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.804.066.921,00	2.650.517.552,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.532.762.999,00	8.219.418.100,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.402.988.199,75	2.911.366.324,66
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	126.790.812,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.530.239.818,00	11.114.895.618,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.200.381.596,00	3.400.633.255,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	44.600.000,00	0,00
33	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	112.234.000,00	282.382.500,00
34	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	485.300.000,00
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	191.925.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	239.193.999,00	0,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	362.525.000,00	145.111.000,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.800.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	296.225.000,00	67.741.100,00
40	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	42.100.000,00	0,00
41	Beban Pakaian KORPRI	27.500.000,00	0,00
42	Beban Pakaian Adat Daerah	185.115.000,00	108.465.600,00
43	Beban Pakaian Batik Tradisional	101.940.000,00	40.825.000,00
44	Beban Pakaian Olahraga	0,00	50.900.000,00
45	Beban Pakaian Paskibraka	364.391.910,00	400.000.000,00
46	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	5.123.400,00
	Beban Barang Tak Pakai Habis		
47	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	10.625.000,00
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	85.904.000,00
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	0,00	5.865.000,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10.850.000,00	
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah- Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	7.800.000,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-BajuPengaman	10.999.989,00	
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	7.000.000,00	
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-SepatuLapangan	16.577.000,00	
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	15.349.981,00	
	Jumlah	**57.519.484.930,72**	**58.046.480.288,66**

Rincian Daftar Saldo Beban Persediaan dapat dilihat pada lampiran 12.2 Daftar Saldo

Beban Persediaan.

Terdapat selisih sebesar Rp3.091.310.415,28 antara Beban Persediaan–LO dan Realisasi Belanja Barang Persediaan–LRA sebagai berikut:

Penjelasan Selisih		
Belanja Barang Persediaan-LRA		**60.610.795.346,00**
Penambahan Beban Persediaan dari Aset tetap Peralatan Mesin	131.409.639,00	
Penambahan Beban Persediaan dari Aset Tetap Lainnya	199.200.000,00	
Penambahan Beban Persediaan dari Pendapatan Hibah Provinsi	4.453.426.441,00	
Pengurangan Beban Presediaan ke Aset Tetap Peralatan Mesin	(46.444.000,00)	
Pengurangan Beban Persediaan menjadi Persediaan Tahun 2025	(12.045.681.840,18)	
Jurnal Balik Persediaan Tahun 2024	4.256.060.569,90	
Pengurangan Beban Persediaan karena pembayaran Utang Barang diserahkan kepada pihak lain	(33.044.175,00)	
Pengurangan Beban Persediaan karena reklafikasi ke Beban hibah	(17.117.050,00)	
Penambahan Beban Persediaan dari pendapatan hibah	10.880.000,00	
Selisih		**(3.091.310.415,28)**
Beban Persediaan-LO		**57.519.484.930,72**

3. Beban Jasa–LO

Rincian Beban Jasa-LO sebesar Rp131.154.476.541,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.8 Beban Jasa-LO

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	**Beban Jasa**	**96.691.027.612,00**	**132.388.342.587,82**
1	Beban Jasa Kantor	72.107.157.167,00	105.848.853.008,82
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	16.514.745.960,00	21.360.982.267,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.725.033.050,00	1.039.170.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.492.249.000,00	1.412.505.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	398.000.000,00	290.000.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	567.432.150,00	492.672.600,00
	Beban Jasa Non Konstruksi	0,00	180.132.000,00
7	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	984.065.285,00	427.545.562,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	366.000.000,00	878.500.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	536.345.000,00	248.300.000,00
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non-ASN	0,00	209.682.150,00
B	**Beban Uang/Jasa diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat**	**8.876.120.000,00**	**2.208.550.000,00**
1	Beban Uang/Jasa diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	8.876.120.000,00	2.208.550.000,00
C	**Beban Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**3.203.128.000,00**
1	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	3.203.128.000,00
D	**Beban Barang dan Jasa BOSP**	**3.653.293.825,00**	**0,00**
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	3.442.467.825,00	0,00
2	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	42.335.000,00	0,00
3	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	168.491.000,00	0,00
E	**Beban Barang dan Jasa BLUD**	**21.393.899.112,00**	**21.014.660.647,00**
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.393.899.112,00	21.014.660.647,00
F	**Beban Barang Ekstra Komptable**	**540.135.992,00**	**0,00**
	Beban Barang Ekstra Komptable	540.135.992,00	0,00
	Jumlah	**131.154.476.541,00**	**158.814.681.234,82**

Terdapat selisih sebesar Rp27.026.495.229,00 antara Beban Jasa–LO dan Realisasi Belanja Jasa–LRA sebagai berikut:

Belanja Jasa-LRA		**104.127.981.312,00**
Penambahan aset tetap GB dari Jasa Konsultan	(1.051.799.005,00)	
Penambahan aset tetap JIJ dari Jasa Konsultan	(1.016.286.890,00)	
Pembayaran Tagihan Hutang Bantuan Iuran PBPU/BP	(2.179.880.600,00)	
Pebayaran Hutang Jasa Tenaga Kesehatan	(399.499.880,00)	
Pembayaran Hutang Honorarium Tenaga Kontrak Bulan Desember Tahun 2024	(2.789.487.325,00)	
Beban uang/jasa diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat	8.876.120.000,00	
Beban Barang dan Jasa BOSP	3.653.293.825,00	
Beban Barang dan Jasa BLUD	21.393.899.112,00	
Beban Barang Ekstrakomptable	540.135.992,00	
	Selisih	**27.026.495.229,00**
Beban Jasa-LO		**131.154.476.541,00**

4. Beban Pemeliharaan–LO

Rincian Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp8.801.769.550,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.9 Beban Pemeliharaan-LO

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.276.773.849,00	3.069.537.146,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.073.323.270,00	199.000.000,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.451.672.431,00	963.210.000,00
	Jumlah	**8.801.769.550,00**	**4.231.747.146,00**

Terdapat selisih sebesar Rp1.857.261.561,00 antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan-LRA		**6.944.507.989,00**
Pengurangan AT- GB (Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar) Yang Merupakan Pemeliharaan Gedung Kantor BPKPD	483.792.443,00	
Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan Yang Merupakan Belanja Pemeliharaan Menara Alva Omega	99.839.000,00	
Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan Yang Merupakan Belanja Pemeliharaan Taman	548.413.919,00	
Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan Yang Merupakan Belanja Pemeliharaan Taman Rumah Dinas	215.665.268,00	
Pengurangan AT - JIJ Jalan Yang Merupakan Pemeliharaan Jalan	299.040.575,00	
Pengurangan AT - JIJ Bangunan Air-Bangunan Air Bersiha Yang Merupakan Rehab Jaringan Air Bersi	60.959.956,00	
Pengurangan AT - JIJ Jaringan Listrik Lainnya Yang Merupakan Pemeliharaan Lampu Hias Sineleyan	149.550.400,00	
	Selisih	**1.857.261.561,00**
Beban Pemeliharaan-LO		**8.801.769.550,00**

5. Beban Perjalanan Dinas–LO

   Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp27.469.989.565,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9.10 Beban Perjalanan Dinas-LO

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.469.989.565,00	46.882.096.647,50
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		0,00
	Jumlah	**27.469.989.565,00**	**46.882.096.647,50**

6. Beban Bunga–LO

   Beban Bunga Tahun 2025 sebesar Rp4.667.167.507,00, dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp5.570.485.843,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.083.318.336,00.

7. Beban Hibah–LO

   Realisasi Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp15.069.201.240,00.

   Rincian Realisasi Beban Hibah Tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.11 Beban Hibah–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000,00	28.545.054.823,92
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	150.000.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	3.765.000.000,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	290.980.000,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	10.581.480.000,00
7	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.960.000.000,00	0,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	574.634.852,00	578.324.213,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	9.899.038.588,00	
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.016.472.800,00	938.313.600,00
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	19.055.000,00	208.900.000,00
Jumlah		**15.069.201.240,00**	**45.058.052.636,92**

Tidak terdapat selisih antara Belanja Hibah LRA sebesar Rp15.069.201.240,00 dengan Beban Hibah LO sebesar Rp15.069.201.240,00.

8. Beban Bantuan Sosial–LO

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 diakui sebesar Rp471.500.000,00.

Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.12 Beban Bantuan Sosial–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	**Beban Bantuan Sosial**		
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	471.500.000,00	3.156.000.000,00
	Jumlah	**471.500.000,00**	**3.156.000.000,00**

Terdapat selisih sebesar Rp907.337.793,00 antara Belanja Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial -LO.

Belanja Bantuan Sosial-LRA		**1.378.837.793,00**
Penambahan Persediaan Barang diserahkan kepada Masyarakat dari bansos barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(907.337.793,00)	
	Selisih	**(907.337.793,00)**
Beban Bantuan Sosial-LO		**471.500.000,00**

9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui sebesar Rp72.750.123.078,43.

Rincian realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.9.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan	72.595.932.961,78	71.156.664.473,98
2	Amortisasi	154.190.116,65	161.173.400,00
Jumlah		**72.750.123.078,43**	**71.317.837.873,98**

Tabel 5.9.13.1 Uraian Beban Penyusutan

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.202.177.866,30	24.453.833.104,25
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.931.692.976,74	10.136.107.992,23
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.445.264.327,07	36.506.769.794,16
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.797.791,67	59.953.583,34
Jumlah		**72.595.932.961,78**	**71.156.664.473,98**

Tabel 5.9.13.2 Uraian Beban Amortisasi

NO	PERANGKAT DAERAH	URAIAN	AMORTISASI 2024	AMORTISASI 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Lisensi	5.424.000,00	5.424.000,00
2	Dinas Perhubungan Daerah	Softwarare	26.382.783,32	24.599.400,00
3	Dinas Kesehatan Daerah	Softwarare	24.750.000,00	33.000.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Softwarare	5.683.333,33	6.200.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Softwarare	62.000.000,00	62.000.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Software	29.950.000,00	29.950.000,00
Jumlah			**154.190.116,65**	**161.173.400,00**

10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 diakui sebesar Rp1.893.954.370,25.

Tabel 5.9.14 Beban Penyisihan Piutang–LO

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	23.622.607,50
2	Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	48.556.782,25
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	250.000,00	250.000,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	117.827.542,75	20.319.461,75
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.727.904.894,00	2.639.539.890,75
6	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.471.933,50	19.485.966,75
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	4.500.000,00	21.000.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00
Jumlah		**1.893.954.370,25**	**2.772.774.709,00**

11. Beban Lain-lain

    Beban Lain-lain Tahun 2025 diakui sebesar Rp0,00.

12. Beban Transfer

    Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp150.000.000,00 merupakan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50.000.000,00, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00, dan kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp50.000.000,00 dalam rangka penanggulangan bencana daerah-daerah tersebut.

5.4.C SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL

Tabel 5.9.15 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Nonlancar-LO	(22.692.431.879,63)	(1.855.550.709,41)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	905.894.716,00	(1.986.666.965,00)
Jumlah		**(21.786.537.163,63)**	**(3.842.217.674,41)**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional sebesar (Rp21.786.537.163,63) terdiri dari:

- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar-LO sebesar Rp22.692.431.879,63 terdiri dari:
  - Surplus dari Penjualan Aset Tetap-Alat Angkutan dari Aset Lainnya secara Lelang dengan perantaraan KPKNL Manado Tahun 2025 sebesar Rp197.249.300,00.
  - Defisit dari Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp22.889.681.179,63.

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp905.894.716,00 terdiri dari:
  - Penambahan Ekuitas atas Laba yang diperoleh dari hasil penyertaan modal PDAM Kota Tomohon Tahun 2025 sesuai Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 sebesar Rp759.282.629,00
  - Penambahan Ekuitas atas Laba yang diperoleh dari hasil penyertaan modal PD Pasar Kota Tomohon Tahun 2025 sesuai Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 sebesar Rp146.612.087,00

5.4.D POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa dari Beban Tidak Terduga sebesar Rp4.513.321.480,00 merupakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang terdiri atas:

- Pemberian Dana Duka sebesar Rp4.115.000.000,00
- Pengembalian Dana Duka sebesar (Rp5.000.000,00)
- Pemberian Dana Bantuan Kebakaran sebesar Rp260.000.000,00
- Pembayaran Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2023 yang dipotong dari DAU bulan April 2025 sebesar Rp38.058.000,00
- Pembayaran Sisa DAK Non Fisik sampai dengan Tahun 2024 yang dipotong dari DAU bulan Oktober 2025 sebesar Rp105.263.480,00.

5.4.E SURPLUS/DEFISIT-LO

Berdasarkan Pendapatan–LO dan Beban Tahun 2025 dihasilkan Surplus–LO diakui sebesar Rp28.545.704.034,93, dibandingkan dengan Pendapatan–LO dan Beban Tahun 2024 dihasilkan Surplus-LO sebesar Rp22.885.352.608,45 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan–LO	671.085.936.971,96
Beban	616.240.374.293,40
SURPLUS / (DEFISIT) Operasi	54.845.562.678,56
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(21.786.537.163,63)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(4.513.321.480,00)
SURPLUS / (DEFISIT)	28.545.704.034,93

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah Laporan Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dan Setara Kas pada Bendahara Umum Daerah.

Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.10 Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk	659.844.025.025,93	700.708.157.335,16
Arus Kas Keluar	557.561.088.762,00	613.676.960.465,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**102.282.936.263,93**	**87.031.196.869,84**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk	197.249.300,00	233.893.100,00
Arus Kas Keluar	74.559.783.931,00	82.188.447.410,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(74.362.534.631,00)**	**(81.954.554.310,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	16.559.091.300,00	16.559.091.300,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(16.559.091.300,00)**	**(16.559.091.300,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk	64.619.037.281,00	72.550.627.319,00
Arus Kas Keluar	64.778.069.999,00	72.618.787.494,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(159.032.718,00)**	**(68.160.175,00)**
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**11.202.277.614,93**	**(11.550.608.915,16)**
Saldo Awal di Kas Daerah	9.540.792.657,21	20.932.368.854,37
Saldo Akhir di Kas Daerah	20.743.070.272,14	9.381.759.939,21
Koreksi SiLPA	68.396.975,00	0,00
Kas di BLUD	141.440.724,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	159.032.718,00
Saldo Akhir Kas	**20.952.907.971,14**	**9.540.792.657,21**

(1) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp102.282.936.263,93 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk sebesar Rp659.844.025.025,93 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp557.561.088.762,00.

Jumlah saldo per 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa terdapat Kenaikan Kas Bersih yang berasal dari aktivitas operasi, yaitu selisih antara Arus Kas Masuk dari Pendapatan Operasi (PAD, Transfer Pusat, maupun Transfer Provinsi) dengan Arus Kas Keluar dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Barang dan Jasa). Hal itu mengartikan pula bahwa Belanja Operasi mampu dibiayai dengan Pendapatan Operasi yang diperoleh selama Tahun 2025.

(2) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp74.362.534.631,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk sebesar Rp197.249.300,00 yang merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dan Arus Kas Keluar sebesar Rp74.559.783.931,00 yang digunakan untuk Realisasi Belanja Modal Tahun 2025.

Jumlah saldo per 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa terdapat penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi, karena Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi berupa Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin lebih kecil dari Arus Kas Keluar berupa Belanja Modal. Hal itu mengartikan pula bahwa arus Kas Keluar berupa Belanja Modal tidak diimbangi dengan Arus Kas Masuk, namun dapat dibiayai dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.

(3) Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp16.559.091.300,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp16.559.091.300,00 yang merupakan Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga.

(4) Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1. Arus Kas Masuk sebesar Rp64.619.037.281,00 yang seluruhnya terdiri dari;
   a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp38.070.389.273,00;
   b. Penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.220.119,00;
   c. Penerimaan sisa Tambah Uang (TU) dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp608.359.794,00;
   d. Penerbitan SP2D GU Nihil sebesar Rp6.110.319.881,00; dan
   e. Penerbitan SP2D TU Nihil sebesar Rp19.754.748.214,00.
2. Arus Kas Keluar sebesar Rp64.778.069.999,00 terdiri dari:
   a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp38.229.421.991,00;
   b. Penerbitan SP2D UP sebesar Rp6.185.540.000,00; dan
   c. Penerbitan SP2D TU sebesar Rp20.363.108.008,00.
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp159.032.718,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk sebesar Rp64.619.037.281,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp64.778.069.999,00.

(5) Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp11.202.277.614,93 merupakan penambahan dari Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp102.282.936.263,93, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar (Rp74.362.534.631,00), Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp16.559.091.300,00), dan Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar (Rp159.032.718,00).

(6) Penjelasan Saldo Awal Kas sebesar Rp9.540.792.657,21 merupakan Saldo Akhir Kas Tahun 2024.

(7) Kas di BLUD sebesar Rp141.440.724,00 merupakan sisa kas pada rekening transitoris dari RSUD Anugerah untuk pembayaran utang PFK.

(8) Kas Lainnya sebesar Rp0,00.

(9) Koreksi SiLPA sebesar Rp68.396.975,00 terdiri dari saldo awal kas Dana BOP PAUD pada TK Pembina Tomohon sebesar Rp236.800,00 dan Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya atas Pembayaran Hutang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp68.160.175,00

(10) Penjelasan Saldo Akhir Kas sebesar Rp20.952.907.971,14 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan/Penurunan Kas	11.202.277.614,93
Saldo Awal Kas	9.540.792.657,21
Koreksi SiLPA	68.396.975,00
Kas di BLUD	141.440.724,00
Kas Lainnya	0,00
	20.952.907.971,14

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	1.588.841.668.862,43	1.614.415.467.324,61
SURPLUS/DEFISIT-LO	28.545.704.034,93	22.885.352.608,45
Koreksi ekuitas lainnya	(3.336.278.836,13)	(48.459.151.070,63)
EKUITAS AKHIR	**1.614.051.094.061,23**	**1.588.841.668.862,43**

Penjelasan:

1. Saldo awal Ekuitas sebesar Rp1.588.841.668.862,43 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2024.
2. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp28.545.704.034,93 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025.
3. Koreksi Ekuitas lainnya yang dilakukan pada tahun 2025 sebesar (Rp3.336.278.836,13) merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan Aset tahun-tahun sebelumnya.

   Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.11.1 Koreksi Ekuitas Tahun 2025

Kode Rekening	SKPD	Jumlah
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	(967.206.559,16)
1.02.01	DINAS KESEHATAN DAERAH	(1.551.516.344,21)
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(3.276.555.340,07)
1.06.01	DINAS SOSIAL DAERAH	(2.511.643,33)
2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	412.715.083,33
2.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.706.415,00
3.26.01	DINAS PARIWISATA DAERAH	(308.515.500,00)
3.27.01	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	(593.611.875,33)
3.30.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	(4.250.000,00)
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.279.442.183,90
4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	(362.404.761,91)
5.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(537.414.648,00)
7.01.01	KECAMATAN TOMOHON UTARA	1.984.786.225,00
7.01.03	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	474.662.296,71
8.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99.395.631,94
	JUMLAH	(3.336.278.836,13)

Tabel 5.11.2 Rincian Koreksi Ekuitas

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	3.1.1.01.02.0002	Selisih Revaluasi Aset Tetap	118.992.000,00
2	3.1.1.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya	(49.177.452.111,63)
3	3.1.1.01.02.0004	Koreksi ekuitas - Kas	(74.637.338,00)
4	3.1.1.01.02.0005	Koreksi ekuitas - Piutang	(137.620.939,00)
5	3.1.1.01.02.0006	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	(26.438.517,25)
6	3.1.1.01.02.0007	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	15.924.899.835,74
7	3.1.1.01.02.0008	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(22.554.486.953,87)
8	3.1.1.01.02.0012	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	0,00
9	3.1.1.01.02.0013	Koreksi ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	11.192.127,57
10	3.1.1.01.02.0014	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD	0,00
11	3.1.1.01.02.0015	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	52.579.273.060,31
Jumlah			**(3.336.278.836,13)**

4. Saldo akhir Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.614.051.094.061,23 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kota Tomohon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273).

Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil pemilihan umum Tahun 2004, menghasilkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon.

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 04 Agustus 2003. Saat ini Kota Tomohon terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan.

Diagram 6.1 Luas wilayah Kota Tomohon per Kecamatan

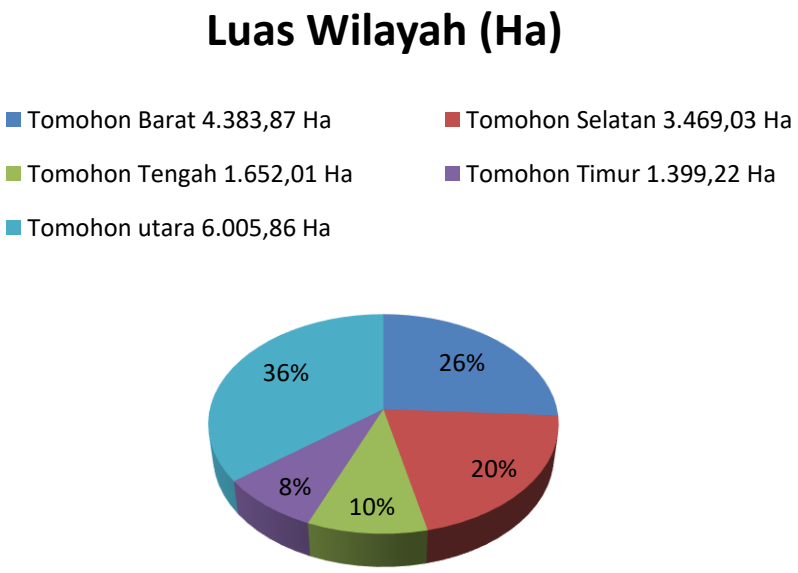

Gambar 3 Luas Wilayah Kota Tomohon

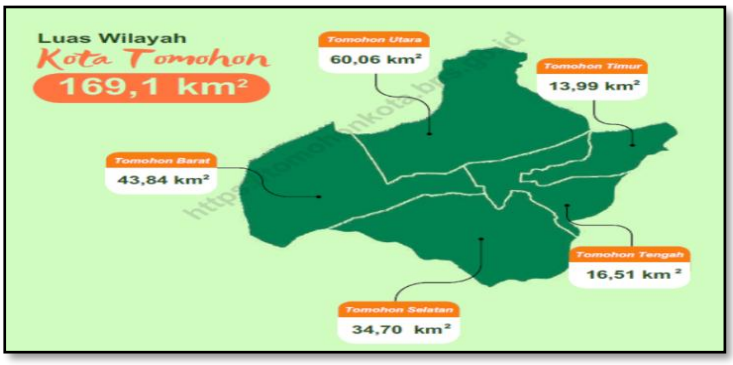

Secara geografis juga Kota Tomohon dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Minahasa. Artinya, dari bagian utara, selatan, timur dan barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa. Secara umum, Kota Tomohon terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan kota-kota lainnya yang berada di Wilayah Kabupaten Minahasa.

Pusat Pemerintahan Kota Tomohon terletak di Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah. Manajemen pemerintah Tahun 2025 dipimpin oleh Wali Kota Caroll Joram Azarias Senduk, S.H dan Wakil Wali Kota Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon, sebagai berikut:

Visi:

"Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera"

Misi:

- Menjaga dan Melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius dan Berbudaya
- Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
- Mewujudkan Tomohon Kota Wisata Dunia
- Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon, sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi rohaniawan.
2. Peningkatan sarana, prasarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga.
3. Melanjutkan pembangunan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Revitalisasi kawasan pasar, terminal dan pusat kota.
5. Peningkatan infrastruktur untuk menunjang ekonomi dan pariwisata.
6. Pengembangan taman bunga tomohon.
7. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan.
8. Melanjutkan dan memperbanyak pelaksanaan event-event pariwisata lokal, nasional, dan internasional.
9. Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi perangkat dan ASN.
10. Tomohon *smart city*.
11. Meningkatkan akses lapangan kerja dalam dan luar negeri.
12. Penguatan kesetaraaan gender, peran perempuan dan perlindungan anak, pemuda, serta penyandang disabilitas.
13. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal.
14. Penyediaan air bersih kepada masyarakat.
15. Melanjutkan dan meningkatkan penyediaan rumah sederhana layak huni, melanjutkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai.
16. Melanjutkan bantuan sosial bagi lansia.
17. Melanjutkan santunan duka.
18. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan.
19. Memperkokoh sinergitas pemerintah kota dengan provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, dan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 34 Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon

NO	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	TETAP
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	TETAP
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	TETAP
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	TETAP
5	DINAS KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN DAERAH	TETAP
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	TETAP
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH	TETAP
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	TETAP
9	DINAS SOSIAL DAERAH	DINAS SOSIAL DAERAH	TETAP
10	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	TETAP
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	TETAP
12	DINAS PANGAN DAERAH	DINAS PANGAN DAERAH	TETAP
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	TETAP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	TETAP
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	TETAP
16	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	TETAP
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	TETAP
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	TETAP
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	TETAP
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	TETAP
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	TETAP
22	DINAS PARIWISATA DAERAH	DINAS PARIWISATA DAERAH	TETAP
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	TETAP
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	TETAP
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TETAP
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TETAP
27	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	TETAP
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
30	KEC. TOMOHON UTARA	KEC. TOMOHON UTARA	TETAP
31	KEC. TOMOHON TENGAH	KEC. TOMOHON TENGAH	TETAP
32	KEC. TOMOHON SELATAN	KEC. TOMOHON SELATAN	TETAP
33	KEC. TOMOHON TIMUR	KEC. TOMOHON TIMUR	TETAP
34	KEC. TOMOHON BARAT	KEC. TOMOHON BARAT	TETAP

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Tomohon tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
    a. tenaga kerja;
    b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    c. pangan;
    d. pertanahan;
    e. lingkungan hidup;
    f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    i. perhubungan;
    j. komunikasi dan informatika;
    k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    l. penanaman modal;
    m. kepemudaan dan olahraga;
    n. statistik;
    o. persandian;
    p. kebudayaan;
    q. perpustakaan; dan
    r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
    a. kelautan dan perikanan;
    b. pariwisata;
    c. pertanian;

d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

4. Untuk Urusan Pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan pendidikan dasar.

   Selama Tahun Anggaran 2025 Kota Tomohon sudah menganggarkan penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS ke dalam APBD maupun Perubahan APBD. Pemerintah Kota Tomohon menyajikan Kas di Bendahara Dana BOS dan Aset tetap yang bersumber dari Dana BOS pada Neraca dan Beban Barang Jasa–LO dan Beban Pegawai–LO pada Laporan Operasional. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satdikdas Negeri dan Swasta sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

5. Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dengan ketentuan lebih lanjut diatur pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Tahun Anggaran 2023 Kota Tomohon sudah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN. Rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan. Pendapatan dana Kapitasi JKN dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dikelola sesuai mekanisme yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Selain itu, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

6. Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
7. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
9. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai Penetapan Harga Patokan dan Penetapan Ijin Usaha Pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
10. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pengelolaan terminal tipe B dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan pengelolaan terminal tipe C dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Kepala Daearh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Kepala Daerah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Parubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Kepala Daerah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Total Realisasi Pendapatan Daerah–LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp660.041.274.325,93 atau 96,99% dari Anggaran Pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp680.553.581.828,00.
2. Total Realisasi Belanja dan Transfer Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp628.120.872.693,00 atau 93,84% dari Anggaran Belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp669.365.341.767,21.
3. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.375.282.776,21 atau 99,93% dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp9.381.759.939,21.
4. Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.559.091.300,00 atau 99,95% dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp20.570.000.000,00 .
5. Total Pendapatan–LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp671.085.936.971,96 menurun sebesar Rp63.275.702.833,78 atau turun 8,62% dari Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp734.361.639.805,74.
6. Total Beban-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp616.240.374.293,40 atau menurun sebesar Rp86.903.695.229,48 atau turun 12,36% dari Beban-LO Tahun Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp703.144.069.522,88.
7. Total Realisasi Pos Luar Biasa-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.513.321.480,00 meningkat sebesar Rp23.321.480,00 atau naik 0,52% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.490.000.000,00.
8. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.711.263.406.020,42 meningkat sebesar Rp2.311.045.542,00 atau naik 0,14% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.708.952.360.478,42.

9. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.212.311.959,19 menurun sebesar Rp22.898.379.656,80 atau turun 19,06% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.110.691.615,99.
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.614.051.094.061,23 meningkat sebesar Rp25.209.425.198,80 atau naik 1,59% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.841.668.862,43.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

Lampiran VIII
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	349.533.655,00	26.232.188,00	10.050.000,00	365.715.843,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	-	-	2.984.625,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	707.605.542,00	73.689.075,00	73.958.500,00	707.336.117,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBB P2	18.617.438.589,00	7.210.518.522,00	4.930.695.487,00	20.897.261.624,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	86.943.867,00	-	-	86.943.867,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBJT-Restoran	116.411.815,00	-	-	116.411.815,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBJT-Hotel	10.411.864,00	-	-	10.411.864,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBJT-Parkir	3.360.000,00	-	-	3.360.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PBJT-Hiburan	230.000,00	-	-	230.000,00
		JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH	**19.894.919.957,00**	**7.310.439.785,00**	**5.014.703.987,00**	**22.190.655.755,00**

No	SKPD	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
10	Rumah Sakit Umum Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	171.907.076,00	-	171.907.076,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah	Retribusi IMB	10.804.179,00	-	-	10.804.179,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
13	Dinas Perhubungan Daerah	Retribusi Ijin Trayek	200.000,00	-	200.000,00	-
14	Sekretariat Daerah	Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	-	-	17.750.000,00
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH			**31.754.179,00**	**171.907.076,00**	**200.000,00**	**203.461.255,00**
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.080.810.919,00	3.690.962.405,00	3.080.810.919,00	3.690.962.405,00
JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			**3.080.810.919,00**	**3.690.962.405,00**	**3.080.810.919,00**	**3.690.962.405,00**
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hasil Pemanfaatan BMD	271.500.000,00	198.000.000,00	90.000.000,00	379.500.000,00
17	Dinas Perhubungan Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	6.515.316,00	-	6.515.316,00
18	Dinas Perhubungan Daerah	Denda Retribusi Ijin Trayek	19.000,00	-	19.000,00	-
19	Rumah Sakit Umum Daerah	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.021.586.056,00	-	1.021.586.056,00	-
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			**1.293.105.056,00**	**204.515.316,00**	**1.111.605.056,00**	**386.015.316,00**
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PKB	3.677.041.600,00	-	3.677.041.600,00	-

No	SKPD	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - BBN-KB	2.370.166.200,00	-	2.370.166.200,00	-
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PBB-KB	5.340.733.165,00	4.582.581.236,68	5.340.733.165,00	4.582.581.236,68
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Atas DBH - PAP	81.080.566,00	10.325.797,32	81.080.566,00	10.325.797,32
JUMLAH PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH			**11.469.021.531,00**	**4.592.907.034,00**	**11.469.021.531,00**	**4.592.907.034,00**
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	2.073.825.427,00	982.847.264,00	2.073.825.427,00	982.847.264,00
JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA			**2.073.825.427,00**	**982.847.264,00**	**2.073.825.427,00**	**982.847.264,00**
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN			**37.843.437.069,00**	**16.953.578.880,00**	**22.750.166.920,00**	**32.046.849.029,00**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran IX

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Pajak Reklame	365.715.843,00	238.145.061,25	127.570.781,75
2	Pajak Air Bawah Tanah	2.984.625,00	2.984.625,00	-
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	707.336.117,00	401.871.757,75	305.464.359,25
4	PBB P2	20.897.261.624,00	11.083.649.356,50	9.813.612.267,50
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	86.943.867,00	86.943.867,00	-
6	PBJT-Restoran	116.411.815,00	116.411.815,00	-
7	PBJT-Hotel	10.411.864,00	10.411.864,00	-
8	PBJT-Parkir	3.360.000,00	3.360.000,00	-
9	PBJT-Hiburan	230.000,00	230.000,00	-

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH	**22.190.655.755,00**	**11.944.008.346,50**	**10.246.647.408,50**
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	171.907.076,00	-	171.907.076,00
11	Retribusi IMB	10.804.179,00	10.804.179,00	-
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
13	Retribusi Ijin Trayek	-	-	-
14	Retribusi Izin Gangguan (HO)	17.750.000,00	17.750.000,00	-
	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	**203.461.255,00**	**31.554.179,00**	**171.907.076,00**
15	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.690.962.405,00	-	3.690.962.405,00
	JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**3.690.962.405,00**	**-**	**3.690.962.405,00**
16	Hasil Pemanfaatan BMD	379.500.000,00	25.500.000,00	354.000.000,00
17	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.515.316,00	-	6.515.316,00
18	Denda Retribusi Ijin Trayek	-	-	-
19	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**386.015.316,00**	**25.500.000,00**	**360.515.316,00**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
20	Piutang Atas DBH - PKB	-	-	-
21	Piutang Atas DBH - BBN-KB	-	-	-
22	Piutang Atas DBH - PBB-KB	4.582.581.236,68	-	4.582.581.236,68
23	Piutang Atas DBH P3AP	10.325.797,32	-	10.325.797,32
	JUMLAH PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH	**4.592.907.034,00**	**-**	**4.592.907.034,00**
24	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	982.847.264,00	-	982.847.264,00
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA	**982.847.264,00**	**-**	**982.847.264,00**
	TOTAL	**32.046.849.029,00**	**12.001.062.525,50**	**20.045.786.503,50**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran X

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
N I H I L				

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XI

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2025	PT. BANK SULUTGO	Berdasarkan Keputusan Walikota No. 100 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PT. Bank SULUTGO TA. 2025 yang terealisasi tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp4.000.000.000,-	Saham	34.854.700.000,00	20.854.700.000,00	4.000.000.000,00	24.854.700.000,00	10.000.000.000,00	3.080.810.919,00	-	24.854.700.000,00
2	2025	PDAM	Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 oleh KAP GRISELA, WISNU & ARUM saldo Ekuitas PDAM sebesar Rp15.713.996.716,00	-	14.954.714.087,00	14.954.714.087,00	-	14.954.714.087,00	-	-	(759.282.629,00)	15.713.996.716,00
3	2025	PD. PASAR	Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 oleh KAP DRS. ABDUL MUNTALIB & YUNUS saldo Ekuitas PD PASAR sebesar Rp4.863.479.575,00	-	4.716.867.488,00	4.716.867.488,00	-	4.716.867.488,00	-	-	(146.612.087,00)	4.863.479.575,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XII

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**TANAH**	**410.218.345.663,08**	**5.669.304.000,00**	**-**	**415.887.649.663,08**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		5.134.312.000,00	-	
	DINAS KESEHATAN DAERAH		534.992.000,00		
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**314.529.108.272,98**	**22.257.823.849,00**	**4.049.674.376,00**	**332.737.257.745,98**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		813.008.161,00	265.268.296,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS KESEHATAN		2.016.527.144,00	389.245.838,00	
	PUSKESMAS KAKASKASEN		56.074.087,00	7.738.087,00	
	PUSKESMAS MATANI		81.878.121,00	3.933.121,00	
	PUSKESMAS LANSOT		106.395.080,00	7.729.080,00	
	PUSKESMAS RURUKAN		98.084.448,00	1.106.448,00	
	PUSKESMAS TARA-TARA		93.268.999,00	7.897.000,00	
	PUSKESMAS TINOOR		61.730.999,00	2.109.000,00	
	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN		52.903.625,00	1.706.625,00	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		5.220.591.499,00	20.308.298,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		160.894.500,00	-	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		2.600.000,00	-	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		12.359.850,00	7.350.000,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		99.839.734,00	50.767.189,00	
	DINAS SOSIAL		201.929.700,00	34.614.000,00	
	DINAS TENAGA KERJA		29.700.000,00	-	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		97.568.600,00	-	
	DINAS PANGAN DAERAH		14.874.000,00	-	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1.620.748.190,00	-	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		193.460.090,00	-	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		93.984.334,00	89.700.000,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PERHUBUNGAN		1.245.164.800,00	990.779.000,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		490.850.902,00	976.822,00	
	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAERAH		29.914.500,00	-	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		260.987.640,00	-	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		196.359.000,00	-	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		19.869.000,00	-	
	DINAS PARIWISATA		314.815.500,00	-	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN		466.766.809,00	1.548.450,00	
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		210.685.850,00	700.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH		3.011.317.850,00	1.111.649.946,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	BAGIAN PEMERINTAHAN		87.429.600,00	-	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		64.724.100,00	-	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN/HUMAS		69.907.800,00	-	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		207.464.552,00	-	
	BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI		9.543.000,00	-	
	BAGIAN UMUM		193.081.000,00	855.584.000,00	
	BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM		63.541.950,00	-	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		40.626.000,00	-	
	SEKRETARIAT DPRD		586.702.500,00	46.965.000,00	
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		224.570.189,00	1.000.000,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		1.787.184.575,00	145.590.035,00	
	INSPEKTORAT		203.540.450,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		13.050.000,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		99.945.000,00	5.408.141,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		499.870.000,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		327.910.967,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		403.579.154,00	-	
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**533.637.951.366,42**	**35.352.645.361,23**	**6.366.275.545,36**	**562.624.321.182,29**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2.777.015.645,00	2.681.000.966,11	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS KESEHATAN		22.461.550.033,23	1.176.888.100,23	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		943.141.470,00	63.577.770,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		3.727.270.401,00	99.839.000,00	
	DINAS SOSIAL		1.259.486.000,00	27.500.000,00	
	DINAS PERHUBUNGAN		130.425.000,00	-	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		176.151.000,00	-	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		210.580.000,00	2.742.660,00	
	DINAS PARIWISATA		548.413.919,00	548.413.919,00	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN		1.274.282.000,00	941.008.304,00	
	SEKRETARIAT DAERAH		215.665.268,00	331.088.820,64	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	SEKRETARIAT DPRD		597.695.382,00	812.534,40	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		831.659.243,00	483.792.443,00	
	INSPEKTORAT		199.310.000,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		-	9.611.027,98	
4	**JALAN IRIGASI DAN JEMBATAN**	**1.388.183.721.093,86**	**64.815.113.727,20**	**14.361.623.058,38**	**1.438.637.211.762,68**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		-	48.738.212,59	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		57.943.456.709,20	11.709.356.347,99	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		449.139.788,00	149.550.400,00	
	DINAS PERHUBUNGAN		1.981.558.000,00	998.412.905,80	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		-	6.800.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH		60.959.956,00	60.959.956,00	
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		999.386.373,00	-	
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		899.641.000,00	99.945.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		1.195.128.265,00	499.870.000,00	
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		787.691.982,00	389.511.082,00	
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		498.151.654,00	398.479.154,00	
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**5.421.350.988,60**	**734.647.400,00**	**511.353.500,00**	**5.644.644.888,60**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		535.447.400,00	312.153.500,00	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH		199.200.000,00	199.200.000,00	
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**20.316.829.939,23**	**10.888.638.937,08**	**16.000.166.366,23**	**15.205.302.510,08**
	DINAS KESEHATAN DAERAH		-	13.983.320.666,23	
	RSUD ANUGERAH		-	680.777.700,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		10.888.638.937,08	1.336.068.000,00	
		2.672.307.307.324,17	**139.718.173.274,51**	**41.289.092.845,97**	**2.770.736.387.752,71**
7	**AKUMULASI PENYUSUTAN**	**(1.263.378.260.052,29)**	**(88.232.298.890,02)**	**(112.412.086,04)**	**(1.351.498.146.856,27)**

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH		(1.841.772.570,12)		
	DINAS KESEHATAN DAERAH		(5.311.937.020,83)		
	RSUD ANUGERAH		(8.742.017.621,03)		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		(53.202.173.498,75)		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		(2.791.374.076,40)		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		(835.377.045,98)		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		(314.739.351,96)		
	DINAS SOSIAL DAERAH		(78.821.878,75)		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		(1.503.823.258,36)		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			(112.412.086,04)	

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH		(250.254.411,26)		
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		(540.942.030,16)		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH		(799.555.888,34)		
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH		(39.607.331,25)		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		(45.753.366,82)		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		(152.381.095,86)		
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		(81.312.222,50)		
	DINAS TENAGA KERJA		(68.331.766,67)		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		(48.823.146,43)		
	DINAS PANGAN DAERAH		(82.829.648,33)		

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	DINAS PARIWISATA DAERAH		(1.486.368.763,96)		
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH		(1.469.029.917,99)		
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH		(812.248.654,14)		
	SEKRETARIAT DAERAH		(971.153.350,50)		
	SEKRETARIAT DPRD		(1.342.646.498,77)		
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		(73.393.798,05)		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		(1.053.438.837,03)		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		(114.131.224,73)		
	INSPEKTORAT DAERAH		(176.121.684,53)		
	KECAMATAN TOMOHON UTARA		(900.778.241,17)		

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH		(710.205.241,32)		
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN		(1.321.619.289,00)		
	KECAMATAN TOMOHON BARAT		(702.813.027,71)		
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR		(308.158.500,95)		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		(58.364.630,37)		
JUMLAH		**1.408.929.047.271,88**	**51.485.874.384,49**	**41.176.680.759,93**	**1.419.238.240.896,44**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XIII

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	410.218.345.663,08	5.669.304.000,00	-	415.887.649.663,08
2	PERALATAN DAN MESIN	314.529.108.272,98	22.257.823.849,00	4.049.674.376,00	332.737.257.745,98
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	533.637.951.366,42	35.352.645.361,23	6.366.275.545,36	562.624.321.182,29
4	JALAN IRIGASI DAN JEMBATAN	1.388.183.721.093,86	64.815.113.727,20	14.361.623.058,38	1.438.637.211.762,68
5	ASET TETAP LAINNYA	5.421.350.988,60	734.647.400,00	511.353.500,00	5.644.644.888,60
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	20.316.829.939,23	10.888.638.937,08	16.000.166.366,23	15.205.302.510,08
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.263.378.260.052,29)	(88.232.298.890,02)	(112.412.086,04)	(1.351.498.146.856,27)
JUMLAH		**1.408.929.047.271,88**	**51.485.874.384,49**	**41.176.680.759,93**	**1.419.238.240.896,44**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XIV

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	SEKRETARIAT DPRD	**72.140.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-		**72.140.000,00**
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	**4.292.320.298,00**	-	627.010.064,00	10.261.628.873,08	-	-	-	1.336.068.000,00	-		**13.844.891.235,08**
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	**561.771.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-		**561.771.300,00**
4	DINAS KESEHATAN DAERAH	**13.983.320.666,23**	-	-	-	-	-	13.983.320.666,23	-	-		**(0,00)**
5	RSUD ANUGERAH	**680.777.700,00**	-	-	-	-	-	680.777.700,00	-	-		**(0,00)**
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	**99.789.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-		**99.789.000,00**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
7	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	150.238.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-		150.238.750,00
8	DINAS PARIWISATA DAERAH	476.472.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-		476.472.225,00
TOTAL		20.316.829.939,23	-	627.010.064,00	10.261.628.873,08	-	-	14.664.098.366,23	1.336.068.000,00	-	-	15.205.302.510,08

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XV

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	**PENAMBAHAN TGR**	**122.718.091.303,26**	**1.528.074.706,41**	**558.600.137,52**	**123.687.565.872,15**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	122.718.091.303,26	1.528.074.706,41	558.600.137,52	123.687.565.872,15
2	**PENAMBAHAN ASET TAK BERWUJUD**	**2.071.893.750,00**	**115.000.000,00**	**-**	**2.186.893.750,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	72.800.000,00	-	-	72.800.000,00
	SMP NEGERI 1 TOMOHON	27.120.000,00	-	-	27.120.000,00
	DINAS KESEHATAN DAERAH	165.000.000,00	-	-	165.000.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	65.650.000,00	-	-	65.650.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	122.997.000,00	115.000.000,00	-	237.997.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	149.750.000,00	-	-	149.750.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	39.930.000,00	-	-	39.930.000,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	31.000.000,00	-	-	31.000.000,00
	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	49.100.000,00	-	-	49.100.000,00
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.140.000,00	-	-	8.140.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.340.406.750,00	-	-	1.340.406.750,00
3	**ASET LAIN-LAIN**	**155.967.441.443,05**	**28.809.389.696,63**	**54.149.553.386,26**	**130.627.277.753,42**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	49.968.582.895,37	139.425.000,00	17.010.449.144,53	33.097.558.750,84
	DINAS KESEHATAN DAERAH	22.118.212.106,00	381.620.295,00	1.004.866.295,00	21.494.966.106,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.045.593.017,63	-	-	6.045.593.017,63
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.403.219.040,00	-	460.721.000,00	1.942.498.040,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	128.207.437,00	-	-	128.207.437,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	220.707.570,00	-	-	220.707.570,00
	DINAS SOSIAL DAERAH	92.427.400,00	-	-	92.427.400,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.442.014.529,50	-	589.209.419,80	4.852.805.109,70

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.110.705.850,00	-	-	1.110.705.850,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.618.103.546,00	89.700.000,00	104.650.000,00	2.603.153.546,00
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	867.749.050,00	-	151.400.000,00	716.349.050,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	265.751.500,00	-	-	265.751.500,00
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	279.449.486,00	-	-	279.449.486,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	243.361.572,00	-	-	243.361.572,00
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	106.568.910,00	-	-	106.568.910,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	80.417.000,00	-	-	80.417.000,00
	DINAS TENAGA KERJA	178.129.800,00	-	-	178.129.800,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	908.174.525,00	-	-	908.174.525,00
	DINAS PANGAN DAERAH	1.015.422.453,00	-	-	1.015.422.453,00
	DINAS PARIWISATA DAERAH	619.375.258,80	-	308.515.500,00	310.859.758,80
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	6.503.592.789,75	-	2.515.506.615,30	3.988.086.174,45
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	634.081.100,00	-	-	634.081.100,00
	SEKRETARIAT DAERAH	10.540.312.164,00	1.967.233.946,00	3.345.514.946,00	9.162.031.164,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	SEKRETARIAT DPRD	1.084.067.750,00	-	-	1.084.067.750,00
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.851.312.000,00	-	1.777.660.000,00	1.073.652.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	37.589.041.299,00	26.231.410.455,63	26.694.060.465,63	37.126.391.289,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	522.082.500,00	-	-	522.082.500,00
	INSPEKTORAT DAERAH	357.939.346,00	-	-	357.939.346,00
	KECAMATAN TOMOHON UTARA	242.886.500,00	-	-	242.886.500,00
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	143.692.500,00	-	-	143.692.500,00
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	286.629.500,00	-	187.000.000,00	99.629.500,00
	KECAMATAN TOMOHON BARAT	152.789.987,00	-	-	152.789.987,00
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	189.104.500,00	-	-	189.104.500,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	157.736.561,00	-	-	157.736.561,00
4	**PENAMBAHAN AMORTISASI**	**(1.696.029.466,66)**	**-**	**154.190.116,65**	**(1.850.219.583,31)**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	(89.976.000,00)	-	5.424.000,00	(95.400.000,00)
	DINAS KESEHATAN DAERAH	(140.250.000,00)	-	24.750.000,00	(165.000.000,00)

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	(65.650.000,00)	-	-	(65.650.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	(100.447.550,00)	-	26.382.783,32	(126.830.333,32)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	(12.479.166,66)	-	29.950.000,00	(42.429.166,66)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	(39.930.000,00)	-	-	(39.930.000,00)
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	(25.316.666,67)	-	5.683.333,33	(31.000.000,00)
	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	(49.100.000,00)	-	-	(49.100.000,00)
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(8.140.000,00)	-	-	(8.140.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(1.164.740.083,33)	-	62.000.000,00	(1.226.740.083,33)
5	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA**	**(61.526.877.538,98)**	**3.772.910.838,13**	**4.249.761.050,26**	**(62.003.727.751,11)**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	(14.501.366.216,54)	215.265.000,00	139.425.000,00	(14.425.526.216,54)
	DINAS KESEHATAN DAERAH	(20.849.553.278,16)	967.561.892,13	1.907.483.784,26	(21.789.475.170,29)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(33.900.420,00)	-	145.918.320,00	(179.818.740,00)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(1.490.073.155,97)	-	-	(1.490.073.155,97)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(119.499.977,00)	-	-	(119.499.977,00)

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(220.707.570,00)	-	-	(220.707.570,00)
	DINAS SOSIAL DAERAH	(91.077.400,00)	-	-	(91.077.400,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(4.308.415.668,93)	-	-	(4.308.415.668,93)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(1.023.213.285,33)	-	-	(1.023.213.285,33)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	(67.195.445,00)	104.650.000,00	89.700.000,00	(52.245.445,00)
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	(538.483.050,00)	-	-	(538.483.050,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	(182.581.500,00)	-	-	(182.581.500,00)
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	(183.064.486,00)	-	-	(183.064.486,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(226.732.349,78)	-	-	(226.732.349,78)
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	(106.568.910,00)	-	-	(106.568.910,00)
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	(54.117.000,00)	-	-	(54.117.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA	(141.196.800,00)	-	-	(141.196.800,00)
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(285.476.525,00)	-	-	(285.476.525,00)
	DINAS PANGAN DAERAH	(335.646.302,00)	-	-	(335.646.302,00)
	DINAS PARIWISATA DAERAH	(283.924.758,30)	-	-	(283.924.758,30)

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	(2.067.104.802,30)	-	-	(2.067.104.802,30)
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	(131.119.500,00)	-	-	(131.119.500,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	(6.397.052.084,00)	2.298.433.946,00	1.967.233.946,00	(6.065.852.084,00)
	SEKRETARIAT DPRD	(1.043.671.166,67)	-	-	(1.043.671.166,67)
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(908.221.000,00)	-	-	(908.221.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	(4.230.954.994,00)	-	-	(4.230.954.994,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(371.975.000,00)	-	-	(371.975.000,00)
	INSPEKTORAT DAERAH	(331.155.346,00)	-	-	(331.155.346,00)
	KECAMATAN TOMOHON UTARA	(242.886.500,00)	-	-	(242.886.500,00)
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	(105.917.500,00)	-	-	(105.917.500,00)
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	(286.629.500,00)	187.000.000,00	-	(99.629.500,00)
	KECAMATAN TOMOHON BARAT	(152.789.987,00)	-	-	(152.789.987,00)
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	(98.724.500,00)	-	-	(98.724.500,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(115.881.561,00)	-	-	(115.881.561,00)

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
6	**PENAMBAHAN DANA TRANSFER *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**	**429.549.000,00**	**0,00**	**429.549.000,00**	**0,00**
		429.549.000,00	-	429.549.000,00	-
Saldo Akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2025		**217.964.068.490,67**	**34.225.375.241,17**	**59.541.653.690,69**	**192.647.790.041,15**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XVI
Daftar Dana Cadangan Daerah

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XVII

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	**159.032.718,00**	141.440.724,00	84.158.580,00	**216.314.862,00**
2	Bagian Lancar Utang jangka Panjang	**16.559.091.300,00**	-	-	**16.559.091.300,00**
3	Pendapatan Diterima Dimuka	**11.192.127,57**	13.097.295,00	11.192.127,57	**13.097.295,00**
4	Utang Belanja	**40.006.618.765,42**	7.353.172.997,00	13.751.648.665,23	**33.608.143.097,19**
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025					**50.396.646.554,19**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XVIII

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**63.374.756.705,00**	0,00	16.559.091.300,00	**46.815.665.405,00**
Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025					**46.815.665.405,00**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XIX

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XX.1

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	**Bidang Perbankan**																	
	1. PT. Bank Sulut Go			22.847.231.058.368,00	651.646.206.841,00	177.519.241.461,00	23.676.396.506.670,00	21.470.494.854.566,00	-	21.470.494.854.566,00	1.400.067.600.000,00	11.965.836.253,00	-	793.868.215.851,00	-	2.205.901.652.104,00	-	-
	Sub Total (1)																	
2	**Bidang Perdagangan**																	
	1. PD. Pasar Tomohon			4.274.989.312,00	1.413.715.594,00	-	5.688.704.906,00	825.225.331,00	-	825.225.331,00	7.764.582.467,00	-	-	-	-	4.863.479.575,00	-	-
	Sub Total (2)																	
3	**Bidang Pelayanan Air Minum**																	
	1. PDAM			10.248.071.258,00	5.836.161.130,00	-	16.084.232.388,00	311.816.976,00	58.418.696,00	370.235.672,00	23.525.150.000,00	400.000.000,00	-	-	-	15.713.996.716,00	-	-
	Sub Total (3)																	
	Total Seluruh Bidang Industri			**22.861.754.118.938,00**	**658.896.083.565,00**	**177.519.241.461,00**	**23.698.169.443.964,00**	**21.471.631.896.873,00**	**58.418.696,00**	**21.471.690.315.569,00**	**1.431.357.332.467,00**	**12.365.836.253,00**	**-**	**793.868.215.851,00**	**-**	**2.226.479.128.395,00**	**-**	**-**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Lampiran XX.2

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Bidang Perbankan**								
	1. PT. Bank Sulut Go			1.508.472.113.757,00	1.121.692.700.632,00	386.779.413.125,00	6.743.805.840,00	12.927.286.139,00	380.595.932.826,00
	Sub Total (1)								
2	**Bidang Perdagangan**								
	1. PD. Pasar Tomohon			5.919.735.311,00	4.547.677.045,00	1.372.058.266,00	(354.367.366,00)	871.078.813,00	146.612.087,00
	Sub Total (2)								
3	**Bidang Pelayanan Air Minum**								
	1. Perusahaan Daerah Air Minum			10.110.098.100,00	4.410.357.815,00	5.699.740.285,00	14.251.871,00	4.954.709.527,00	759.282.629,00
	Sub Total (3)								
Total Seluruh Bidang Industri				**1.524.501.947.168,00**	**1.130.650.735.492,00**	**393.851.211.676,00**	**6.403.690.345,00**	**18.753.074.479,00**	**381.501.827.542,00**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.1
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.1
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	**PELAYANAN UMUM**	**209.884.712.586,00**	**199.597.138.259,00**	**13.107.936.245,00**	**11.056.393.203,00**	**5.828.781.543,21**	**4.581.481.655,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
1 01 2 20	STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 2 24	KEARSIPAN	3.201.318.145,00	2.800.593.171,00	67.692.500,00	-	-	-	-	-
1 03 2 26	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.082.559.174,00	7.811.433.973,00	700.130.500,00	490.850.902,00	-	-	-	-
1 05 5 01	PERENCANAAN	7.793.788.950,00	6.843.776.002,00	410.122.222,00	224.570.189,00	-	-	-	-
1 06 5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	151.366.400,00	92.855.000,00	-	-	-	-	-	-
1 07 5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	964.298.730,00	755.460.591,00	-	-	-	-	-	-
1 08 5 02	KEUANGAN	32.026.508.025,50	31.300.869.590,00	2.082.043.127,50	2.041.294.808,00	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1 09 5 03	KEPEGAWAIAN	6.257.135.581,00	5.893.238.414,00	-	-	-	-	-	-
1 10 4 01	SEKRETARIAT DAERAH	54.228.965.390,50	51.862.189.991,00	3.601.270.640,50	2.348.197.076,00	-	-	-	-
1 11 4 02	SEKRETARIAT DPRD	36.453.793.436,00	34.200.009.255,00	1.324.698.400,00	1.174.445.488,00	-	-	-	-
1 12 6 01	INSPEKTORAT	9.661.010.831,00	8.699.199.324,00	420.392.250,00	402.850.450,00	-	-	-	-
1 13 7 01	KECAMATAN	51.063.967.923,00	49.337.512.948,00	4.501.586.605,00	4.374.184.290,00	-	-	-	-
2	**KETERTIBAN UMUM**	**29.554.917.116,00**	**27.870.845.458,00**	**112.693.445,00**	**112.199.584,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 01 8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	-	-	-	-	-	-
2 02 1 05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.114.484.100,00	19.573.447.728,00	112.693.445,00	112.199.584,00	-	-	-	-

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
3	**EKONOMI**	**47.426.543.739,05**	**43.104.248.574,00**	**2.966.986.534,95**	**2.291.284.099,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 01 2 15	PERHUBUNGAN	9.154.630.220,00	8.066.781.307,00	1.548.256.350,00	1.294.119.800,00	-	-	-	-
3 02 2 07	TENAGA KERJA	9.261.683.776,00	9.062.062.067,00	29.858.100,00	29.700.000,00	-	-	-	-
3 03 2 17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.586.976.208,00	2.919.824.359,00	36.295.600,00	29.914.500,00	-	-	-	-
3 04 2 18	PENANAMAN MODAL	3.929.517.480,00	3.782.479.773,00	441.229.900,00	437.138.640,00	-	-	-	-
3 06 3 27	PERTANIAN	16.487.887.505,05	14.879.753.101,00	689.346.384,95	286.725.510,00	-	-	-	-
3 08 3 29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.078.800,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
3 09 3 25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	312.470.100,00	293.178.156,00	3.000.000,00	2.999.799,00	-	-	-	-
3 10 3 30	PERDAGANGAN	4.076.798.250,00	3.582.134.308,00	175.400.200,00	171.079.850,00	-	-	-	-
3 11 3 31	PERINDUSTRIAN	612.501.400,00	514.147.503,00	43.600.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-
4	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**9.721.205.532,00**	**9.122.932.510,00**	**1.966.234.100,00**	**1.711.823.690,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 01 1 03	PENATAAN RUANG	730.669.250,00	432.354.480,00	97.138.600,00	91.075.500,00	-	-	-	-
4 02 2 11	LINGKUNGAN HIDUP	8.990.536.282,00	8.690.578.030,00	1.869.095.500,00	1.620.748.190,00	-	-	-	-
5	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**17.590.271.487,00**	**16.441.877.811,00**	**38.983.185.409,00**	**37.703.653.123,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 01 1 03	PEKERJAAN UMUM	12.993.244.054,00	12.365.219.088,00	38.524.970.629,00	37.251.913.335,00	-	-	-	-
5 02 1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.597.027.433,00	4.076.658.723,00	458.214.780,00	451.739.788,00	-	-	-	-
6	**KESEHATAN**	**119.192.095.270,25**	**113.189.253.797,00**	**16.530.960.058,75**	**13.084.946.127,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 01 1 02	KESEHATAN	112.540.543.115,25	107.344.475.497,00	16.530.960.058,75	13.084.946.127,00	-	-	-	-
6 02 2 14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	-	-	-	-	-	-
7	**PARIWISATA**	**7.965.401.377,00**	**7.658.744.604,00**	**558.249.400,00**	**554.713.919,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 01 2 22	KEBUDAYAAN	286.359.100,00	247.984.621,00	-	-	-	-	-	-
7 02 3 26	PARIWISATA	7.679.042.277,00	7.410.759.983,00	558.249.400,00	554.713.919,00	-	-	-	-

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
8	**PENDIDIKAN**	**123.619.320.859,00**	**117.853.757.428,00**	**2.453.853.155,00**	**2.304.951.796,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 01 1 01	PENDIDIKAN	118.578.728.028,00	113.911.790.543,00	2.017.446.125,00	1.878.143.796,00	-	-	-	-
8 02 2 19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.238.574.654,00	3.795.734.849,00	416.479.200,00	406.939.000,00	-	-	-	-
8 03 2 23	PERPUSTAKAAN	802.018.177,00	146.232.036,00	19.927.830,00	19.869.000,00	-	-	-	-
9	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**19.935.340.760,00**	**17.990.808.666,00**	**1.816.653.150,00**	**1.739.818.390,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
9 02 2 28	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.126.537.627,00	3.948.866.573,00	221.841.400,00	193.460.090,00	-	-	-	-
9 01 2 12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.704.660.424,00	3.865.408.832,00	97.884.300,00	97.568.600,00	-	-	-	-
9 04 1 06	SOSIAL	6.822.002.672,00	6.288.271.342,00	1.481.997.650,00	1.433.915.700,00	-	-	-	-
9 05 2 09	PANGAN	4.282.140.037,00	3.888.261.919,00	14.929.800,00	14.874.000,00	-	-	-	-
JUMLAH		**584.889.808.726,30**	**552.829.607.107,00**	**78.496.751.497,70**	**70.559.783.931,00**	**5.828.781.543,21**	**4.581.481.655,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.2
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.2
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		**120.596.174.153,00**		**115.768.121.339,00**
	1) Belanja Operasi:	**118.578.728.028,00**		**113.889.290.543,00**	
	a. belanja pegawai;	91.561.759.500,00		90.250.068.699,00	
	b. belanja barang dan jasa;	15.378.018.528,00		12.704.655.456,00	
	c. belanja hibah;	11.038.950.000,00		10.934.566.388,00	
	d. belanja bantuan sosial.	600.000.000,00		-	
	2) Belanja Modal;	2.017.446.125,00		1.878.830.796,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		**286.359.100,00**		**247.984.621,00**
	1) Belanja Operasi:	**286.359.100,00**		247.984.621,00	
	a. belanja pegawai;	-		-	
	b. belanja barang dan jasa;	286.359.100,00		247.984.621,00	
	c. belanja hibah;	-		-	
	d. belanja bantuan sosial.	-		-	
	2) Belanja Modal;	-		-	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		**821.946.007,00**		**166.101.036,00**
	1) Belanja Operasi:	**802.018.177,00**		146.232.036,00	
	a. belanja pegawai;	-		-	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	b. belanja barang dan jasa;	802.018.177,00		146.232.036,00	
	c. belanja hibah;	-		-	
	d. belanja bantuan sosial.	-		-	
	2) Belanja Modal;	19.927.830,00		19.869.000,00	
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		**4.655.053.854,00**		**4.202.673.849,00**
	1) Belanja Operasi:	**4.238.574.654,00**		3.795.734.849,00	
	a. belanja pegawai;	2.038.185.900,00		2.032.367.999,00	
	b. belanja barang dan jasa;	1.600.388.754,00		1.163.366.850,00	
	c. belanja hibah;	600.000.000,00		600.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	-		-	
	2) Belanja Modal;	416.479.200,00		406.939.000,00	
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		**11.011.657.153,00**		**10.467.551.081,00**
	1) Belanja Transfer:	150.000.000,00		150.000.000,00	
	Belanja bantuan keuangan…	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2) Sub Kegiatan….. pada SKPD Dinas….	**10.861.657.153,00**		**10.317.551.081,00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan	**11.000.000,00**		**10.945.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**11.000.000,00**		**10.945.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	11.000.000,00		10.945.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:				

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	**1.742.628.000,00**		**1.689.809.955,00**	
	1) Belanja Operasi:	**1.742.628.000,00**		**1.689.809.955,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	1.742.628.000,00		1.689.809.955,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:				
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	**126.860.341,00**		**92.889.500,00**	
	1) Belanja Operasi:	**121.584.441,00**		**92.889.500,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	121.584.441,00		92.889.500,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**5.275.900,00**		**-**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	**50.000.000,00**		**36.880.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**50.000.000,00**		**36.880.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	50.000.000,00		36.880.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**89.799.900,00**		**79.994.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**89.799.900,00**		**79.994.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	89.799.900,00		79.994.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**35.820.100,00**		-	
	1) Belanja Operasi:	**35.820.100,00**		-	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	35.820.100,00		-	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada Dinas Sosial	**129.877.000,00**		**120.684.800,00**	
	1) Belanja Operasi:	**129.877.000,00**		**120.684.800,00**	
	a. belanja pegawai;				

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	b. belanja barang dan jasa;	129.877.000,00		120.684.800,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja Daerah	**579.048.750,00**		**505.585.952,00**	
	1) Belanja Operasi:	**579.048.750,00**		**505.585.952,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	579.048.750,00		505.585.952,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Dinas Tenaga Kerja Daerah	**249.610,00**		-	
	1) Belanja Operasi:	**249.610,00**		-	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	249.610,00		-	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil pada Dinas Tenaga Kerja Daerah	**250.000,00**		-	
	1) Belanja Operasi:	**250.000,00**		-	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	250.000,00		-	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	**44.200.000,00**		**42.999.800,00**	
	1) Belanja Operasi:	**44.200.000,00**		**42.999.800,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	44.200.000,00		42.999.800,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	**950.000.000,00**		**744.504.337,00**	
	1) Belanja Operasi:	**870.750.000,00**		**665.361.337,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	870.750.000,00		665.361.337,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**79.250.000,00**		**79.143.000,00**	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	**10.964.400,00**		**8.265.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**10.964.400,00**		**8.265.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	10.964.400,00		8.265.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	**45.000.000,00**		**35.663.400,00**	
	1) Belanja Operasi:	**45.000.000,00**		**35.663.400,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	45.000.000,00		35.663.400,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	**9.000.000,00**		**7.125.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**9.000.000,00**		**7.125.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	9.000.000,00		7.125.000,00	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	**24.000.000,00**		**22.338.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**24.000.000,00**		**22.338.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	24.000.000,00		22.338.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	**40.000.000,00**		**37.181.200,00**	
	1) Belanja Operasi:	**40.000.000,00**		**37.181.200,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	40.000.000,00		37.181.200,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Daerah	**4.125.000,00**		-	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	1) Belanja Operasi:	**4.125.000,00**		**-**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	4.125.000,00		-	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah	**41.381.552,00**		**40.775.500,00**	
	1) Belanja Operasi:	**41.381.552,00**		**40.775.500,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	41.381.552,00		40.775.500,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Daerah	**240.000.000,00**		**239.985.100,00**	
	1) Belanja Operasi:	**240.000.000,00**		**239.985.100,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	240.000.000,00		239.985.100,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Daerah	**600.000.000,00**		**597.479.650,00**	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	1) Belanja Operasi:	**600.000.000,00**		**597.479.650,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	600.000.000,00		597.479.650,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI pada Dinas Pariwisata Daerah	**214.996.800,00**		**214.536.800,00**	
	1) Belanja Operasi:	**214.996.800,00**		**214.536.800,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	214.996.800,00		214.536.800,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Daerah	**225.037.300,00**		**223.307.838,00**	
	1) Belanja Operasi:	**225.037.300,00**		**223.307.838,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	225.037.300,00		223.307.838,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Daerah	**249.825.400,00**		**249.640.000,00**	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	1) Belanja Operasi:	**249.825.400,00**		**249.640.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	249.825.400,00		249.640.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	**25.000.000,00**		**24.787.210,00**	
	1) Belanja Operasi:	**25.000.000,00**		**24.787.210,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	25.000.000,00		24.787.210,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah	**143.001.250,00**		**129.075.179,00**	
	1) Belanja Operasi:	**143.001.250,00**		**129.075.179,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	143.001.250,00		129.075.179,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD	**-**		**-**	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	1) Belanja Operasi:	-		-	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	-		-	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD	**4.269.145.000,00**		**4.253.800.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**4.269.145.000,00**		**4.253.800.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	4.269.145.000,00		4.253.800.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**81.727.100,00**		**60.386.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**81.727.100,00**		**60.386.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	81.727.100,00		60.386.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	-		-	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realiasasi (Rp)	
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**41.201.300,00**		**19.078.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**41.201.300,00**		**19.078.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	41.201.300,00		19.078.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	**87.518.350,00**		**80.399.000,00**	
	1) Belanja Operasi:	**87.518.350,00**		**80.399.000,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	87.518.350,00		80.399.000,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	
	Pembentukan Paskibraka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	**750.000.000,00**		**749.434.860,00**	
	1) Belanja Operasi:	**750.000.000,00**		**749.434.860,00**	
	a. belanja pegawai;				
	b. belanja barang dan jasa;	750.000.000,00		749.434.860,00	
	c. belanja hibah;				
	d. belanja bantuan sosial.				
	2) Belanja Modal:	**-**		**-**	

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realiasasi (Rp)
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	137.371.190.267,00	130.852.431.926,00
3.	Total Belanja Daerah	669.215.341.767,21	627.949.059.693,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,53	20,84

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.2
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2025

A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase (%)
1	Total Belanja Daerah	669.215.341.767,21	627.949.059.693,00	93,83
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) Belanja bagi hasil	0,00	0,00	-
	b) Bantuan keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
2	Jumlah (a+b)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
3	Selisih (4-5)	669.065.341.767,21	627.799.059.693,00	93,83
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	267.626.136.706,88	251.119.623.877,20	

B. RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH						
No	**Komponen Perhitungan**	**Anggaran (Rp)**		**Realiasasi (Rp)**		**Persentase (%)**
1	a) Belanja Modal		78.496.751.497,70		70.544.306.831,00	89,87
	1) Tanah	625.000.000,00		416.000.000,00		
	2) Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95		13.517.015.111,00		
	3) Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75		16.441.807.851,00		
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.823.216.984,00		39.497.951.569,00		
	5) Aset tetap lainnya	1.132.081.725,00		671.532.300,00		
	6) Aset lainnya	115.000.000,00		-		
	b) Belanja pemeliharaan	7.490.295.379,60	7.490.295.379,60	6.944.507.989,00	6.944.507.989,00	92,71
2	a) Belanja Hibah		15.263.584.853,38		15.020.094.840,00	98,40
	b) Belanja Bantuan Sosial		2.400.329.223,00		1.378.837.793,00	57,44
	c) Belanja Bantuan Keuangan		0,00		0,00	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		103.650.960.953,68		93.887.747.453,00	90,58
4	Porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (B3/A3 x 100%)		15,49		14,96	

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.2
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)	
1.	a. Urusan bidang Pengawasan:		4.399.566.377,00		3.553.973.979,00
	1) Belanja Operasi:	3.979.174.127,00		3.151.123.529,00	
	a. belanja pegawai;	-		-	
	b. belanja barang dan jasa;	3.979.174.127,00		3.151.123.529,00	
	c. belanja hibah;	-		-	
	d. belanja bantuan sosial.	-		-	
	2) Belanja Modal;	420.392.250,00		402.850.450,00	
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		150.000.000,00		150.000.000,00
	1) Belanja Transfer:	150.000.000,00		150.000.000,00	
	Belanja bantuan keuangan…	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD ….	-		-	
	dst....				
2.	Anggaran Pengawasan (a+b)		4.549.566.377,00		3.703.973.979,00
3.	Total Belanja Daerah		669.215.341.767,21		627.949.059.693,00
	Rasio anggaran pengawasan (2:3) x 100%		0,68		0,59

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.3
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.3
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	**SPM Bidang Pendidikan**			
		Kekhususan PAUD	**Rp1.298.385.500,00**	**Rp1.173.690.750,00**
		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	**Rp1.298.385.500,00**	**Rp1.173.690.750,00**
		1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp105.764.700,00	Rp72.187.700,00
		1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp142.711.800,00	Rp122.383.150,00
		1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp1.049.909.000,00	Rp979.119.900,00
		TOTAL	**Rp1.298.385.500,00**	**Rp1.173.690.750,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan	**Rp1.298.385.500,00**	**Rp1.173.690.750,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
B	SPM Bidang Kesehatan			
		Pelayanan Kesehatan Balita	**Rp1.182.685.000,00**	**Rp646.013.475,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp50.000.000,00**	**Rp34.388.475,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp50.000.000,00	Rp34.388.475,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp140.705.000,00**	**Rp116.065.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp140.705.000,00	Rp116.065.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp129.495.000,00**	**Rp69.500.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp129.495.000,00	Rp69.500.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS MATANI	**Rp273.380.000,00**	**Rp163.825.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp273.380.000,00	Rp163.825.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp135.480.000,00**	**Rp40.800.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp135.480.000,00	Rp40.800.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp208.950.000,00**	**Rp109.195.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp208.950.000,00	Rp109.195.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp136.495.000,00**	**Rp112.240.000,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp136.495.000,00	Rp112.240.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp108.180.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp108.180.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp1.182.685.000,00**	**Rp646.013.475,00**
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**Rp123.255.000,00**	**Rp77.061.475,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp108.555.000,00**	**Rp75.816.475,00**
		1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp108.555.000,00	Rp75.816.475,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp300.000,00	Rp0,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp12.600.000,00**	**Rp1.245.000,00**
		1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp12.600.000,00	Rp1.245.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp1.800.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp123.255.000,00**	**Rp77.061.475,00**
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**Rp146.901.500,00**	**Rp139.059.200,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp127.662.500,00**	**Rp106.134.200,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp127.662.500,00	Rp106.134.200,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp1.950.000,00**	**Rp1.875.000,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp1.950.000,00	Rp1.875.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp3.625.000,00**	**Rp1.200.000,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp3.625.000,00	Rp1.200.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp6.210.000,00**	**Rp375.000,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp6.210.000,00	Rp375.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp4.060.000,00**	**Rp28.275.000,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp4.060.000,00	Rp28.275.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp2.700.000,00**	**Rp1.200.000,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp2.700.000,00	Rp1.200.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp694.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp694.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp146.901.500,00**	**Rp139.059.200,00**
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**Rp1.384.084.500,00**	**Rp782.004.375,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp380.254.500,00**	**Rp324.402.375,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp380.254.500,00	Rp324.402.375,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp186.900.000,00**	**Rp66.705.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp186.900.000,00	Rp66.705.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp83.990.000,00**	**Rp36.380.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp83.990.000,00	Rp36.380.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS MATANI	**Rp130.655.000,00**	**Rp71.100.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp130.655.000,00	Rp71.100.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp138.750.000,00**	**Rp7.625.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp138.750.000,00	Rp7.625.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp195.340.000,00**	**Rp90.420.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp195.340.000,00	Rp90.420.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp185.615.000,00**	**Rp185.372.000,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp185.615.000,00	Rp185.372.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp82.580.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp82.580.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp1.384.084.500,00**	**Rp782.004.375,00**
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	**Rp73.095.000,00**	**Rp73.043.500,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp73.095.000,00**	**Rp73.043.500,00**
		1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp73.095.000,00	Rp73.043.500,00
		TOTAL	**Rp73.095.000,00**	**Rp73.043.500,00**
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**Rp66.200.000,00**	**Rp53.375.000,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp6.300.000,00**	**Rp2.625.000,00**
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp6.300.000,00	Rp2.625.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp1.200.000,00**	**Rp300.000,00**
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp1.050.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp1.050.000,00	Rp0,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp7.200.000,00	Rp0,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp450.000,00**	**Rp450.000,00**
		1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp450.000,00	Rp450.000,00
		TOTAL	**Rp66.200.000,00**	**Rp53.375.000,00**
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	**Rp92.025.000,00**	**Rp63.975.000,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp12.600.000,00**	**Rp11.325.000,00**
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp12.600.000,00	Rp11.325.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp20.025.000,00**	**Rp8.925.000,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp20.025.000,00	Rp8.925.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp16.200.000,00**	**Rp11.325.000,00**
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp16.200.000,00	Rp11.325.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp32.400.000,00**	**Rp32.400.000,00**
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp32.400.000,00	Rp32.400.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp10.800.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp92.025.000,00**	**Rp63.975.000,00**
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**Rp131.945.000,00**	**Rp69.939.000,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp14.720.000,00**	**Rp14.589.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp14.720.000,00	Rp14.589.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp4.800.000,00**	**Rp6.375.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp4.800.000,00	Rp6.375.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp27.900.000,00**	**Rp14.175.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp27.900.000,00	Rp14.175.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS MATANI	**Rp21.975.000,00**	**Rp13.500.000,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp21.975.000,00	Rp13.500.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp28.800.000,00**	**Rp10.275.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp28.800.000,00	Rp10.275.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp15.750.000,00**	**Rp9.225.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp15.750.000,00	Rp9.225.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp1.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp16.200.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp16.200.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp131.945.000,00**	**Rp69.939.000,00**
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**Rp280.780.500,00**	**Rp184.277.100,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp49.355.500,00**	**Rp44.927.100,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp49.355.500,00	Rp44.927.100,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp47.925.000,00**	**Rp35.625.000,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp47.925.000,00	Rp35.625.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp26.400.000,00**	**Rp12.900.000,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp26.400.000,00	Rp12.900.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS MATANI	**Rp43.050.000,00**	**Rp30.525.000,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp43.050.000,00	Rp30.525.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp17.400.000,00**	**Rp17.325.000,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp17.400.000,00	Rp17.325.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp44.400.000,00**	**Rp26.475.000,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp44.400.000,00	Rp26.475.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp16.550.000,00**	**Rp16.500.000,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp16.550.000,00	Rp16.500.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp35.700.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp35.700.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp280.780.500,00**	**Rp184.277.100,00**
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	**Rp841.234.000,00**	**Rp568.225.300,00**
		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	**Rp397.355.500,00**	**Rp365.675.300,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp397.355.500,00	Rp365.675.300,00
		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT	**Rp64.825.000,00**	**Rp43.350.000,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp64.825.000,00	Rp43.350.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	**Rp51.675.000,00**	**Rp29.700.000,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp51.675.000,00	Rp29.700.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS MATANI	**Rp99.628.500,00**	**Rp77.475.000,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp99.628.500,00	Rp77.475.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RURUKAN	**Rp60.025.000,00**	**Rp19.600.000,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp60.025.000,00	Rp19.600.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS TARATARA	**Rp77.925.000,00**	**Rp4.525.000,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp77.925.000,00	Rp4.525.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS KAKASKASEN	**Rp27.900.000,00**	**Rp27.900.000,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp27.900.000,00	Rp27.900.000,00
		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS TINOOR	**Rp61.900.000,00**	**Rp0,00**
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp61.900.000,00	Rp0,00
		TOTAL	**Rp841.234.000,00**	**Rp568.225.300,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan	**Rp4.322.205.500,00**	**Rp2.656.973.425,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp3.310.967.000,00**	**Rp3.098.627.250,00**
		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	**Rp3.310.967.000,00**	**Rp3.098.627.250,00**
		1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp500.000.000,00	Rp336.000.000,00
		1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp1.092.246.000,00	Rp1.092.245.250,00
		1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp1.718.721.000,00	Rp1.670.382.000,00
		TOTAL	**Rp3.310.967.000,00**	**Rp3.098.627.250,00**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Rp13.029.315.666,00**	**Rp12.057.938.150,00**
		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	**Rp13.029.315.666,00**	**Rp12.057.938.150,00**
		1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
		1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp4.906.750.000,00	Rp4.612.276.900,00
		1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
		1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp7.072.565.666,00	Rp6.395.661.250,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		TOTAL	**Rp13.029.315.666,00**	**Rp12.057.938.150,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Rp16.340.282.666,00**	**Rp15.156.565.400,00**
D	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman**			
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	**Rp4.078.000,00**	**Rp2.625.000,00**
		1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	**Rp4.078.000,00**	**Rp2.625.000,00**
		1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Rp4.078.000,00	Rp2.625.000,00
		TOTAL	**Rp4.078.000,00**	**Rp2.625.000,00**
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	**Rp3.912.000,00**	**Rp2.245.000,00**
		1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	**Rp3.912.000,00**	**Rp2.245.000,00**
		1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp3.912.000,00	Rp2.245.000,00
		TOTAL	**Rp3.912.000,00**	**Rp2.245.000,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	**Rp7.990.000,00**	**Rp4.870.000,00**
E	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	**Rp80.481.000,00**	**Rp63.482.000,00**
		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH	**Rp80.481.000,00**	**Rp63.482.000,00**
		1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Rp80.481.000,00	Rp63.482.000,00
		TOTAL	**Rp80.481.000,00**	**Rp63.482.000,00**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Rp688.023.920,00**	**Rp661.659.800,00**
		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH	**Rp688.023.920,00**	**Rp661.659.800,00**
		1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Rp129.124.620,00	Rp124.400.000,00
		1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Rp75.000.000,00	Rp66.000.000,00
		1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Rp20.497.500,00	Rp20.475.000,00
		1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp129.877.000,00	Rp120.684.800,00
		1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp333.524.800,00	Rp330.100.000,00
		TOTAL	**Rp688.023.920,00**	**Rp661.659.800,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial	**Rp768.504.920,00**	**Rp725.141.800,00**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.4
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.4
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	680.553.581.828,00	660.041.274.325,93	(20.512.307.502,07)	96,99
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	76.508.899.806,00	64.479.356.868,93	(12.029.542.937,07)	84,28
4.1.01	**Pajak Daerah**	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	(4.510.659.652,00)	89,50
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.500.262.166,00	17.373.392.882,00	(126.869.284,00)	99,28
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.431.620.478,00	8.938.218.406,00	506.597.928,00	106,01
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.431.620.478,00	8.938.218.406,00	506.597.928,00	106,01
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.156.668.000,00	6.380.342.672,00	(776.325.328,00)	89,15
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	7.156.668.000,00	6.380.342.672,00	(776.325.328,00)	89,15
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.363.365.016,00	1.458.652.602,00	95.287.586,00	106,99
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.363.365.016,00	1.458.652.602,00	95.287.586,00	106,99
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	220.000.000,00	255.071.829,00	35.071.829,00	115,94
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	220.000.000,00	255.071.829,00	35.071.829,00	115,94
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	328.608.672,00	341.107.373,00	12.498.701,00	103,80
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	328.608.672,00	341.107.373,00	12.498.701,00	103,80
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05
4.1.01.20.01	Opsen PKB	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91
4.1.02	**Retribusi Daerah**	25.243.145.000,00	18.860.687.942,00	(6.382.457.058,00)	74,72
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	22.177.000.000,00	17.575.670.359,00	(4.601.329.641,00)	79,25
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	(3.546.514.335,00)	82,25
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.000.000,00	158.706.900,00	151.706.900,00	2267,24
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	19.970.000.000,00	16.271.778.765,00	(3.698.221.235,00)	81,48
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	(89.448.000,00)	55,28
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	(89.448.000,00)	55,28
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.916.145.000,00	920.298.998,00	(995.846.002,00)	48,03
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	251.000.000,00	258.226.166,00	7.226.166,00	102,88
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	251.000.000,00	258.226.166,00	7.226.166,00	102,88
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	152.000.000,00	-	(152.000.000,00)	0,00
4.1.02.02.11.0003	**Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan**	12.400.000,00	-	(12.400.000,00)	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman,Ternak, dan Ikan	745.000,00	-	(745.000,00)	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	4.490.169.160,00	4.072.932.013,93	(417.237.146,07)	90,71
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	284.454.160,00	238.389.180,00	(46.064.980,00)	83,81
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	284.454.160,00	238.389.180,00	(46.064.980,00)	83,81
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	284.454.160,00	238.389.180,00	(46.064.980,00)	83,81
4.1.04.05	Jasa Giro	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	-	5.535.675,00	5.535.675,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	5.535.675,00	5.535.675,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	5.535.675,00	5.535.675,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atauPejabat Lain	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	137.230.460,97	137.230.460,97	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	1.364.114,00	1.364.114,00	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	1.364.114,00	1.364.114,00	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6.000,00	6.000,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	426.012,00	426.012,00	0,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	426.012,00	426.012,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	121.376.943,97	121.376.943,97	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	-	121.376.943,97	121.376.943,97	0,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	14.057.391,00	14.057.391,00	0,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	14.057.391,00	14.057.391,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000,00	30.664.933,00	664.933,00	102,22
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	3.000.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	74,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	3.000.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	74,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	27.000.000,00	28.444.933,00	1.444.933,00	105,35
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	7.000.000,00	4.559.933,00	(2.440.067,00)	65,14
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dariPenjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	20.000.000,00	23.885.000,00	3.885.000,00	119,43
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	593.406.248.022,00	585.396.264.982,00	(8.009.983.040,00)	98,65
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	563.899.138.000,00	559.360.392.123,00	(4.538.745.877,00)	99,20
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	39.757.839.000,00	38.449.827.200,00	(1.308.011.800,00)	96,71
4.2.01.07.01	DBH Pajak	13.900.562.000,00	12.592.550.200,00	(1.308.011.800,00)	90,59
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	8.720.694.000,00	7.916.950.300,00	(803.743.700,00)	90,78
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.165.558.000,00	4.285.124.100,00	(880.433.900,00)	82,96
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.310.000,00	390.475.800,00	376.165.800,00	2728,69
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	25.857.277.000,00	25.857.277.000,00	-	100,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	15.481.898.000,00	15.481.898.000,00	-	100,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	9.538.313.000,00	9.538.313.000,00	-	100,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.261.000,00	3.261.000,00	-	100,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	-	100,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	428.132.711.000,00	426.951.422.834,00	(1.181.288.166,00)	99,72
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	375.311.713.000,00	375.728.253.000,00	416.540.000,00	100,11
4.2.01.08.01.0001	DAU	375.311.713.000,00	375.728.253.000,00	416.540.000,00	100,11
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	52.820.998.000,00	51.223.169.834,00	(1.597.828.166,00)	96,98
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	-	100,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.599.812.000,00	3.001.983.834,00	(1.597.828.166,00)	65,26
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.204.651.000,00	22.204.651.000,00	-	100,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.216.535.000,00	17.216.535.000,00	-	100,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.621.877.000,00	73.572.431.089,00	(2.049.445.911,00)	97,29
4.2.01.09.01	DAK Fisik	16.617.492.000,00	16.346.559.693,00	(270.932.307,00)	98,37
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.049.909.000,00	992.549.000,00	(57.360.000,00)	94,54
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.897.750.000,00	4.854.764.400,00	(42.985.600,00)	99,12

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.801.967.000,00	2.801.963.000,00	(4.000,00)	100,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	7.867.866.000,00	7.697.283.293,00	(170.582.707,00)	97,83
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	59.004.385.000,00	57.225.871.396,00	(1.778.513.604,00)	96,99
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	13.429.980.000,00	13.302.856.588,00	(127.123.412,00)	99,05
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	965.250.000,00	965.250.000,00	-	100,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.607.947.000,00	27.573.081.900,00	(34.865.100,00)	99,87
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	208.750.000,00	105.000.000,00	(103.750.000,00)	50,30
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.132.956.000,00	1.956.104.589,00	(176.851.411,00)	91,71
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00	-	100,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.013.760.000,00	997.421.000,00	(16.339.000,00)	98,39
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	247.420.000,00	247.420.000,00	-	100,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.486.941.000,00	6.192.186.527,00	(294.754.473,00)	95,46
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	379.667.000,00	379.667.000,00	-	100,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.963.124.000,00	4.313.293.792,00	(649.830.208,00)	86,91
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	375.000.000,00	(375.000.000,00)	50,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	267.900.000,00	267.900.000,00	-	100,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.677.041.600,00	3.677.041.600,00	-	100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.370.166.200,00	2.370.166.200,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.629.215.917,00	13.479.588.866,32	(3.149.627.050,68)	81,06
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	96.575.940,00	103.974.783,68	7.398.843,68	107,66
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.734.110.365,00	6.405.101.409,00	(329.008.956,00)	95,11
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	(472.781.525,00)	95,56
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	(472.781.525,00)	95,56
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34
5	**BELANJA DAERAH**	669.365.341.767,21	628.120.872.693,00	(41.244.469.074,21)	93,84
5.1	**BELANJA OPERASI**	584.889.808.726,30	552.829.607.107,00	(32.060.201.619,30)	94,52
5.1.01	Belanja Pegawai	307.247.559.230,00	301.200.368.052,00	(6.047.191.178,00)	98,03
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	193.617.112.034,00	190.051.378.153,00	(3.565.733.881,00)	98,16
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	144.461.263.346,00	142.420.818.952,00	(2.040.444.394,00)	98,59
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	122.257.077.198,00	121.272.639.175,00	(984.438.023,00)	99,19
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	22.204.186.148,00	21.148.179.777,00	(1.056.006.371,00)	95,24
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.568.200.620,00	13.214.828.606,00	(353.372.014,00)	97,40
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.630.177.404,00	11.515.947.842,00	(114.229.562,00)	99,02
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.938.023.216,00	1.698.880.764,00	(239.142.452,00)	87,66
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.835.848.196,00	5.760.065.000,00	(75.783.196,00)	98,70
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.835.848.196,00	5.760.065.000,00	(75.783.196,00)	98,70

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.867.290.200,00	6.801.109.000,00	(66.181.200,00)	99,04
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.853.516.200,00	6.787.375.000,00	(66.141.200,00)	99,03
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.774.000,00	13.734.000,00	(40.000,00)	99,71
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.905.227.234,00	2.765.166.000,00	(140.061.234,00)	95,18
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.515.423.796,00	1.500.756.000,00	(14.667.796,00)	99,03
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.389.803.438,00	1.264.410.000,00	(125.393.438,00)	90,98
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.447.948.348,00	7.268.148.600,00	(179.799.748,00)	97,59
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.087.630.606,00	6.033.890.328,00	(53.740.278,00)	99,12
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.360.317.742,00	1.234.258.272,00	(126.059.470,00)	90,73
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.201.813.497,00	2.002.717.927,00	(199.095.570,00)	90,96
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.201.813.497,00	2.002.717.927,00	(199.095.570,00)	90,96
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.516.010,00	1.974.382,00	(1.541.628,00)	56,15
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.686.019,00	1.591.943,00	(94.076,00)	94,42
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.829.991,00	382.439,00	(1.447.552,00)	20,90
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.039.563.488,00	8.644.646.177,00	(394.917.311,00)	95,63
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.036.723.194,00	7.778.330.099,00	(258.393.095,00)	96,78
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.002.840.294,00	866.316.078,00	(136.524.216,00)	86,39
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	343.364.010,00	293.021.458,00	(50.342.552,00)	85,34
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	257.895.951,00	248.362.107,00	(9.533.844,00)	96,30
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	85.468.059,00	44.659.351,00	(40.808.708,00)	52,25
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	943.077.085,00	878.882.051,00	(64.195.034,00)	93,19
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	758.885.443,00	744.802.132,00	(14.083.311,00)	98,14
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	184.191.642,00	134.079.919,00	(50.111.723,00)	72,79
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.172.467.834,00	100.509.147.634,00	(1.663.320.200,00)	98,37
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	55.744.743.535,00	54.580.732.823,00	(1.164.010.712,00)	97,91

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	55.744.743.535,00	54.580.732.823,00	(1.164.010.712,00)	97,91
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.274.909.500,00	17.218.727.570,00	(56.181.930,00)	99,67
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.274.909.500,00	17.218.727.570,00	(56.181.930,00)	99,67
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.152.814.799,00	28.709.687.241,00	(443.127.558,00)	98,48
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	54.814.096,00	50.362.703,00	(4.451.393,00)	91,88
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	338.993.306,00	311.464.060,00	(27.529.246,00)	91,88
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	13.211.716,00	12.138.803,00	(1.072.913,00)	91,88
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	91.264.846,00	83.528.257,00	(7.736.589,00)	91,52
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	8.850.005,00	8.126.800,00	(723.205,00)	91,83
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.437.309,00	1.272.835,00	(164.474,00)	88,56
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	175.540,00	161.280,00	(14.260,00)	91,88
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.473.634,00	21.567.363,00	(1.906.271,00)	91,88
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	166.594.155,00	166.594.154,00	(1,00)	100,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	209.959.054,00	140.078.030,00	(69.881.024,00)	66,72

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	213.704.498,00	126.989.064,00	(86.715.434,00)	59,42
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	116.139.640,00	61.940.992,00	(54.198.648,00)	53,33
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	0,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	22.100.000,00	(52.900.000,00)	29,47
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.198.697.400,00	25.190.810.100,00	(7.887.300,00)	99,97
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	58.474.000,00	34.500.000,00	(23.974.000,00)	59,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	2.409.249.600,00	2.407.552.800,00	(1.696.800,00)	99,93
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	150.276.000,00	70.500.000,00	(79.776.000,00)	46,91
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.853.000.600,00	9.545.731.056,00	(307.269.544,00)	96,88
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	(1.575.000,00)	99,72
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	(1.575.000,00)	99,72
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	48.039.600,00	(30.576.000,00)	61,11
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	48.039.600,00	(30.576.000,00)	61,11
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	56.415.180,00	(30.488.820,00)	64,92

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	56.415.180,00	(30.488.820,00)	64,92
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	(157.500,00)	99,67
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	(157.500,00)	99,67
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	(2.283.750,00)	99,72
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	(2.283.750,00)	99,72
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.248.500,00	81.484.200,00	(15.764.300,00)	83,79
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.248.500,00	81.484.200,00	(15.764.300,00)	83,79
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	205.537.500,00	37.088.100,00	(168.449.400,00)	18,04
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	205.537.500,00	37.088.100,00	(168.449.400,00)	18,04
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	(6.300.000,00)	99,67
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	(6.300.000,00)	99,67
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	-	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	-	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	560.000,00	513.856,00	(46.144,00)	91,76
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	560.000,00	513.856,00	(46.144,00)	91,76
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00	14.670,00	(15.330,00)	48,90
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00	14.670,00	(15.330,00)	48,90
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.674.800.000,00	2.634.186.700,00	(40.613.300,00)	98,48
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	90.000.000,00	57.581.148,00	(32.418.852,00)	63,98
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00	1.151.388,00	(48.612,00)	95,95

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.600.000,00	3.454.164,00	(145.836,00)	95,95
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.580.000.000,00	2.572.000.000,00	(8.000.000,00)	99,69
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00	2.893.000.000,00	(11.000.000,00)	99,62
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00	2.893.000.000,00	(11.000.000,00)	99,62
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	149.200.000,00	49.200.000,00	(100.000.000,00)	32,98
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	149.200.000,00	49.200.000,00	(100.000.000,00)	32,98
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.376.000,00	2.376.000,00	-	100,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.376.000,00	2.376.000,00	-	100,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	-	100,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	-	100,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.408.565,00	3.403.740,00	(4.825,00)	99,86
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.408.565,00	3.403.740,00	(4.825,00)	99,86
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	649.910,00	647.985,00	(1.925,00)	99,70
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	649.910,00	647.985,00	(1.925,00)	99,70
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.960,00	(10.040,00)	16,33
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.960,00	(10.040,00)	16,33
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.370.240,00	4.924.800,00	(445.440,00)	91,71
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.370.240,00	4.924.800,00	(445.440,00)	91,71
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.040,00	103.680,00	(9.360,00)	91,72
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.040,00	103.680,00	(9.360,00)	91,72
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.120,00	311.040,00	(28.080,00)	91,72
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.120,00	311.040,00	(28.080,00)	91,72

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	467.795.064,00	338.736.004,00	(129.059.060,00)	72,41
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	18.911.267,00	17.384.020,00	(1.527.247,00)	91,92
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	110.116.963,00	107.542.250,00	(2.574.713,00)	97,66
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.291.629,00	4.201.273,00	(90.356,00)	97,89
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	26.106.940,00	26.106.940,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.222.360,00	2.822.949,00	(1.399.411,00)	66,86
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	450.006,00	442.650,00	(7.356,00)	98,37
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	57.020,00	57.020,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan	8.594.347,00	7.524.747,00	(1.069.600,00)	87,55
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan	78.531.661,00	58.898.746,00	(19.632.915,00)	75,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan	49.524.068,00	48.834.236,00	(689.832,00)	98,61
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	112.241.283,00	43.022.165,00	(69.219.118,00)	38,33

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.747.520,00	21.899.008,00	(32.848.512,00)	40,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	285.144.823,00	7.836.000,00	(277.308.823,00)	2,75
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan	216.368.970,00	-	(216.368.970,00)	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananPersampahan/Kebersihan	26.120.000,00	-	(26.120.000,00)	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananParkir di Tepi Jalan Umum	2.612.000,00	-	(2.612.000,00)	0,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.278.060,00	-	(3.278.060,00)	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.019.000,00	-	(15.019.000,00)	0,00
5.1.01.05.11.0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	19.590.000,00	7.836.000,00	(11.754.000,00)	40,00
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.156.793,00	-	(2.156.793,00)	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	-	100,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	-	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	-	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.257.799.266,92	230.514.032.515,00	(24.743.766.751,92)	90,31
5.1.02.01	Belanja Barang	68.689.360.507,67	60.610.795.346,00	(8.078.565.161,67)	88,24
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.623.082.075,67	60.550.018.376,00	(8.073.063.699,67)	88,24
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	419.840.230,00	329.070.466,00	(90.769.764,00)	78,38
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.290.305.500,00	1.241.407.135,00	(48.898.365,00)	96,21
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.533.682.690,79	4.114.136.159,00	(419.546.531,79)	90,75
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	250.145.925,00	216.701.350,00	(33.444.575,00)	86,63
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.222.029.260,60	1.064.745.100,00	(157.284.160,60)	87,13
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	126.145.500,00	125.903.200,00	(242.300,00)	99,81
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.121.900,00	110.072.000,00	(49.900,00)	99,95
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	839.955.110,00	755.404.196,00	(84.550.914,00)	89,93
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	656.836.156,00	631.102.611,00	(25.733.545,00)	96,08
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.670.179.346,00	1.734.815.297,00	(935.364.049,00)	64,97
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.492.500,00	-	(16.492.500,00)	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.866.063.255,68	2.570.943.812,00	(295.119.443,68)	89,70
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.887.098.754,50	1.679.688.998,00	(207.409.756,50)	89,01
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.282.177.914,00	3.717.723.901,00	(564.454.013,00)	86,82
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.147.241.377,00	1.071.897.350,00	(75.344.027,00)	93,43
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.142.077.338,00	1.007.347.181,00	(134.730.157,00)	88,20
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	89.049.650,00	18.707.200,00	(70.342.450,00)	21,01

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	414.112.969,58	264.376.500,00	(149.736.469,58)	63,84
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.226.788.800,00	1.158.012.500,00	(68.776.300,00)	94,39
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.399.938.830,09	2.956.962.116,00	(442.976.714,09)	86,97
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.622.822.158,00	2.379.669.248,00	(243.152.910,00)	90,73
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	43.670.000,00	41.365.100,00	(2.304.900,00)	94,72
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.442.412.991,00	5.485.613.062,00	(956.799.929,00)	85,15
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.683.414.779,00	3.359.690.041,00	(323.724.738,00)	91,21
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.756.766.522,43	3.536.812.218,00	(219.954.304,43)	94,15
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	201.856.357,00	200.680.312,00	(1.176.045,00)	99,42
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.913.950,00	-	(3.913.950,00)	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.471.394.840,00	14.530.239.818,00	(1.941.155.022,00)	88,21
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.554.856.100,00	4.200.381.596,00	(354.474.504,00)	92,22
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	50.400.000,00	44.600.000,00	(5.800.000,00)	88,49
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	117.114.200,00	112.234.000,00	(4.880.200,00)	95,83
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	208.896.100,00	191.925.000,00	(16.971.100,00)	91,88
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	268.799.850,00	239.193.999,00	(29.605.851,00)	88,99
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	394.962.342,00	362.525.000,00	(32.437.342,00)	91,79
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	103.400.975,00	78.800.000,00	(24.600.975,00)	76,21
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	304.466.700,00	296.225.000,00	(8.241.700,00)	97,29
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	45.939.000,00	42.100.000,00	(3.839.000,00)	91,64

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	188.941.900,00	185.115.000,00	(3.826.900,00)	97,97
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	176.562.500,00	101.940.000,00	(74.622.500,00)	57,74
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	364.707.804,00	364.391.910,00	(315.894,00)	99,91
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	66.278.432,00	60.776.970,00	(5.501.462,00)	91,70
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	13.565.500,00	10.850.000,00	(2.715.500,00)	79,98
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	450.000,00	-	(450.000,00)	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	2.157.132,00	-	(2.157.132,00)	0,00
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-BajuPengaman	11.000.000,00	10.999.989,00	(11,00)	100,00
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-TopiKerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-SepatuLapangan	16.577.000,00	16.577.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	15.528.800,00	15.349.981,00	(178.819,00)	98,85
5.1.02.02	Belanja Jasa	116.051.651.312,65	104.127.981.312,00	(11.923.670.000,65)	89,73
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.765.979.286,40	75.296.144.372,00	(10.469.834.914,40)	87,79
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	682.000.000,00	576.940.000,00	(105.060.000,00)	84,60
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.008.668.000,00	3.355.255.000,00	(653.413.000,00)	83,70

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.127.200.000,00	3.822.730.000,00	(304.470.000,00)	92,62
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.400.000,00	10.800.000,00	(21.600.000,00)	33,33
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48.000.000,00	28.800.000,00	(19.200.000,00)	60,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	44.900.000,00	41.000.000,00	(3.900.000,00)	91,31
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	732.350.000,00	707.550.000,00	(24.800.000,00)	96,61
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	652.200.000,00	632.600.000,00	(19.600.000,00)	96,99
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.980.100.000,00	2.749.148.000,00	(230.952.000,00)	92,25
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.216.194.500,00	7.180.926.129,00	(1.035.268.371,00)	87,40
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	157.098.500,00	43.830.000,00	(113.268.500,00)	27,90
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.345.885.750,00	1.148.075.200,00	(197.810.550,00)	85,30
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.030.600.000,00	7.009.600.000,00	(21.000.000,00)	99,70
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	900.000,00	-	(900.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.676.000.000,00	1.671.500.000,00	(4.500.000,00)	99,73
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	150.000.000,00	147.000.000,00	(3.000.000,00)	98,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	485.900.000,00	424.050.000,00	(61.850.000,00)	87,27
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	258.800.000,00	254.300.000,00	(4.500.000,00)	98,26

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.397.312.592,00	6.350.060.304,00	(47.252.288,00)	99,26
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.583.450.000,00	1.548.000.000,00	(35.450.000,00)	97,76
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.627.200,00	25.627.021,00	(179,00)	100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.343.153.000,00	2.426.993.500,00	(916.159.500,00)	72,60
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.177.968.995,40	7.042.700.000,00	(135.268.995,40)	98,12
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.804.000.000,00	1.755.500.000,00	(48.500.000,00)	97,31
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.233.000.000,00	3.105.000.000,00	(128.000.000,00)	96,04
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	2.188.000.000,00	2.188.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.959.000.000,00	1.669.390.000,00	(289.610.000,00)	85,22
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	232.000.000,00	171.250.000,00	(60.750.000,00)	73,81
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	219.000.000,00	219.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	34.444.260,00	17.440.200,00	(17.004.060,00)	50,63
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	960.000,00	-	(960.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.082.400.000,00	2.957.700.000,00	(124.700.000,00)	95,95
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	779.900.000,00	627.250.000,00	(152.650.000,00)	80,43
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga	45.000.000,00	44.890.000,00	(110.000,00)	99,76
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.700.000,00	10.800.000,00	(9.900.000,00)	52,17
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	76.500.000,00	68.753.855,00	(7.746.145,00)	89,87
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	634.500.000,00	629.500.000,00	(5.000.000,00)	99,21
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.393.750.000,00	3.362.346.020,00	(31.403.980,00)	99,07

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.250.000,00	2.117.700,00	(132.300,00)	94,12
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	130.451.260,00	92.590.800,00	(37.860.460,00)	70,98
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	969.583.773,00	712.016.429,00	(257.567.344,00)	73,44
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.542.615.006,00	2.264.775.861,00	(277.839.145,00)	89,07
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	127.730.000,00	94.857.086,00	(32.872.914,00)	74,26
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	425.360.000,00	270.514.700,00	(154.845.300,00)	63,60
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.654.046.450,00	3.112.390.567,00	(541.655.883,00)	85,18
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	225.000.000,00	69.026.000,00	(155.974.000,00)	30,68
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.147.070.000,00	3.109.630.000,00	(37.440.000,00)	98,81
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.025.710.000,00	999.320.000,00	(26.390.000,00)	97,43
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	2.920.900.000,00	-	(2.920.900.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	26.400.000,00	-	(26.400.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	1.131.600.000,00	-	(1.131.600.000,00)	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.983.405.744,00	18.694.626.560,00	(288.779.184,00)	98,48
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.424.110.600,00	11.424.110.600,00	-	100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.441.261.000,00	3.441.261.000,00	-	100,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	238.826.544,00	-	(238.826.544,00)	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.269.283.600,00	2.244.192.560,00	(25.091.040,00)	98,89
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.609.924.000,00	1.585.062.400,00	(24.861.600,00)	98,46
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.089.424.742,00	1.725.033.050,00	(364.391.692,00)	82,56
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	273.750.000,00	146.800.000,00	(126.950.000,00)	53,63
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	329.050.000,00	304.300.000,00	(24.750.000,00)	92,48
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	968.275.742,00	834.686.000,00	(133.589.742,00)	86,20
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	334.840.800,00	299.435.000,00	(35.405.800,00)	89,43
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	53.323.200,00	24.627.050,00	(28.696.150,00)	46,18
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	64.725.000,00	64.725.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0497	Belanja Sewa Approach Light	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.929.400.000,00	3.492.249.000,00	(437.151.000,00)	88,87
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.861.500.000,00	3.444.899.000,00	(416.601.000,00)	89,21
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.900.000,00	47.350.000,00	(20.550.000,00)	69,73
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	509.965.000,00	398.000.000,00	(111.965.000,00)	78,04

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	128.000.000,00	102.000.000,00	(26.000.000,00)	79,69
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	381.965.000,00	296.000.000,00	(85.965.000,00)	77,49
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.758.711.438,25	2.635.518.045,00	(123.193.393,25)	95,53
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	871.246.314,00	854.631.304,00	(16.615.010,00)	98,09
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.189.907.324,25	1.184.806.341,00	(5.100.983,25)	99,57
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi	597.557.800,00	596.080.400,00	(1.477.400,00)	99,75
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.012.184.102,00	984.065.285,00	(28.118.817,00)	97,22
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	1.012.184.102,00	984.065.285,00	(28.118.817,00)	97,22
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	366.000.000,00	366.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	366.000.000,00	366.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	636.581.000,00	536.345.000,00	(100.236.000,00)	84,25
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	235.800.000,00	234.000.000,00	(1.800.000,00)	99,24
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	400.781.000,00	302.345.000,00	(98.436.000,00)	75,44
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.490.295.379,60	6.944.507.989,00	(545.787.390,60)	92,71
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.692.733.001,60	5.276.773.849,00	(415.959.152,60)	92,69
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	220.545.000,00	202.848.940,00	(17.696.060,00)	91,98
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	3.184.127.814,00	3.038.643.559,00	(145.484.255,00)	95,43

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang	1.111.330.000,00	1.108.328.850,00	(3.001.150,00)	99,73
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Angkutan Barang	113.900.073,60	87.730.200,00	(26.169.873,60)	77,02
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	270.763.710,00	189.631.300,00	(81.132.410,00)	70,04
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	792.066.404,00	649.591.000,00	(142.475.404,00)	82,01
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	854.012.300,00	725.612.640,00	(128.399.660,00)	84,97
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	230.012.300,00	146.159.240,00	(83.853.060,00)	63,54
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Olahraga	195.000.000,00	184.991.600,00	(10.008.400,00)	94,87
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	299.515.000,00	(485.000,00)	99,84
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	94.946.800,00	(5.053.200,00)	94,95
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	943.550.078,00	942.121.500,00	(1.428.578,00)	99,85
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air IrigasiLainnya	399.910.078,00	399.886.500,00	(23.578,00)	99,99

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.471.244.194,00	27.469.989.565,00	(2.001.254.629,00)	93,21
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.362.244.194,00	27.469.989.565,00	(1.892.254.629,00)	93,56
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.072.622.194,00	23.656.112.065,00	(1.416.510.129,00)	94,35
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.910.700.000,00	2.446.855.000,00	(463.845.000,00)	84,06
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	219.471.000,00	219.462.000,00	(9.000,00)	100,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.159.451.000,00	1.147.560.500,00	(11.890.500,00)	98,97
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.966.850.000,00	8.876.120.000,00	(1.090.730.000,00)	89,06
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.966.850.000,00	8.876.120.000,00	(1.090.730.000,00)	89,06
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	448.050.000,00	335.550.000,00	(112.500.000,00)	74,89
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.321.600.000,00	346.970.000,00	(974.630.000,00)	26,25
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	8.197.200.000,00	8.193.600.000,00	(3.600.000,00)	99,96
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	3.670.605.275,00	3.653.293.825,00	(17.311.450,00)	99,53
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	3.474.779.275,00	3.442.467.825,00	(32.311.450,00)	99,07
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	3.206.280.675,00	3.161.040.925,00	(45.239.750,00)	98,59
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	268.498.600,00	281.426.900,00	12.928.300,00	104,82
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55
5.1.03	Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
5.1.05	Belanja Hibah	15.263.584.853,38	15.069.201.240,00	(194.383.613,38)	98,73
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.650.000.000,00	3.560.000.000,00	(90.000.000,00)	97,53
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.050.000.000,00	1.960.000.000,00	(90.000.000,00)	95,61
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia	2.050.000.000,00	1.960.000.000,00	(90.000.000,00)	95,61
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	11.038.950.000,00	10.934.566.388,00	(104.383.612,00)	99,05
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.972.320.000,00	9.899.038.588,00	(73.281.412,00)	99,27
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.972.320.000,00	9.899.038.588,00	(73.281.412,00)	99,27
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.400.329.223,00	1.378.837.793,00	(1.021.491.430,00)	57,44
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.400.329.223,00	471.500.000,00	(928.829.223,00)	33,67
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.400.329.223,00	471.500.000,00	(928.829.223,00)	33,67
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.400.329.223,00	471.500.000,00	(928.829.223,00)	33,67

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00	907.337.793,00	(92.662.207,00)	90,73
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00	907.337.793,00	(92.662.207,00)	90,73
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00	907.337.793,00	(92.662.207,00)	90,73
5.2	**BELANJA MODAL**	78.496.751.497,70	70.559.783.931,00	(7.936.967.566,70)	89,89
5.2.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95	13.516.328.111,00	(5.000.758.951,95)	72,99
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	15.235.700,00	13.600.000,00	(1.635.700,00)	89,26
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	15.235.700,00	13.600.000,00	(1.635.700,00)	89,26
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	15.235.700,00	13.600.000,00	(1.635.700,00)	89,26
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.803.111.000,00	2.660.386.599,00	(142.724.401,00)	94,91
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.800.111.000,00	2.657.386.800,00	(142.724.200,00)	94,90
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	415.656.000,00	389.332.500,00	(26.323.500,00)	93,67
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	392.854.000,00	391.974.300,00	(879.700,00)	99,78
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.260.000.000,00	1.226.000.000,00	(34.000.000,00)	97,30
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.845.100,00	48.242.500,00	(12.602.600,00)	79,29
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.204.000,00	31.204.000,00	-	100,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	31.204.000,00	31.204.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	0,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	24.241.100,00	17.038.500,00	(7.202.600,00)	70,29
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	24.241.100,00	17.038.500,00	(7.202.600,00)	70,29
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.441.091.796,00	2.066.691.143,00	(1.374.400.653,00)	60,06
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	978.392.132,00	824.723.496,00	(153.668.636,00)	84,29
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	706.400,00	-	(706.400,00)	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	80.412.191,00	39.004.581,00	(41.407.610,00)	48,51
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	897.273.541,00	785.718.915,00	(111.554.626,00)	87,57
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.138.089.359,00	1.099.541.727,00	(1.038.547.632,00)	51,43
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	954.640.270,00	442.381.467,00	(512.258.803,00)	46,34
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	83.612.650,00	38.170.700,00	(45.441.950,00)	45,65
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	77.029.808,00	32.314.000,00	(44.715.808,00)	41,95
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.002.648.130,00	582.775.560,00	(419.872.570,00)	58,12
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.158.501,00	3.900.000,00	(2.258.501,00)	63,33
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	324.610.305,00	142.425.920,00	(182.184.385,00)	43,88
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	108.516.369,00	23.910.400,00	(84.605.969,00)	22,03
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	43.865.000,00	42.556.000,00	(1.309.000,00)	97,02
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	35.703.936,00	23.678.520,00	(12.025.416,00)	66,32
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	136.525.000,00	52.281.000,00	(84.244.000,00)	38,29
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	826.973.426,00	730.057.037,00	(96.916.389,00)	88,28
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	652.658.559,50	575.359.387,00	(77.299.172,50)	88,16
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	482.210.159,50	416.840.265,00	(65.369.894,50)	86,44
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	137.000.000,00	135.653.122,00	(1.346.878,00)	99,02

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	23.000.000,00	22.866.000,00	(134.000,00)	99,42
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.498.400,00	-	(1.498.400,00)	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.950.000,00	-	(8.950.000,00)	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	174.314.866,50	154.697.650,00	(19.617.216,50)	88,75
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	174.314.866,50	154.697.650,00	(19.617.216,50)	88,75
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	895.454.846,00	834.700.359,00	(60.754.487,00)	93,22
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	895.454.846,00	834.700.359,00	(60.754.487,00)	93,22
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	195.454.846,00	138.700.359,00	(56.754.487,00)	70,96
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	700.000.000,00	696.000.000,00	(4.000.000,00)	99,43
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.440.000,00	1.548.450,00	(1.891.550,00)	45,01
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.440.000,00	1.548.450,00	(1.891.550,00)	45,01
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	0,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.071.515.992,95	3.397.199.799,00	(674.316.193,95)	83,44
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.243.154.444,00	2.877.830.189,00	(365.324.255,00)	88,74
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.243.154.444,00	2.877.830.189,00	(365.324.255,00)	88,74
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	828.361.548,95	519.369.610,00	(308.991.938,95)	62,70
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	588.717.405,95	496.248.010,00	(92.469.395,95)	84,29
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	156.455.000,00	621.600,00	(155.833.400,00)	0,40
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	83.189.143,00	22.500.000,00	(60.689.143,00)	27,05
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	52.860.800,00	49.999.989,00	(2.860.811,00)	94,59
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	47.860.800,00	44.999.989,00	(2.860.811,00)	94,02
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	47.860.800,00	44.999.989,00	(2.860.811,00)	94,02
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	115.000.000,00	106.093.800,00	(8.906.200,00)	92,26
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	115.000.000,00	106.093.800,00	(8.906.200,00)	92,26
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	115.000.000,00	106.093.800,00	(8.906.200,00)	92,26
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	476.981.000,00	502.274.500,00	25.293.500,00	105,30
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	440.482.000,00	465.775.500,00	25.293.500,00	105,74
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	420.682.000,00	445.975.500,00	25.293.500,00	106,01
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75	16.441.807.851,00	(842.557.874,75)	95,13
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.384.365.725,75	15.791.481.789,00	(592.883.936,75)	96,38
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.262.365.725,75	15.669.926.445,00	(592.439.280,75)	96,36
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.331.971.575,75	13.856.173.902,00	(475.797.673,75)	96,68
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	556.327.150,00	505.072.700,00	(51.254.450,00)	90,79
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	257.250.000,00	210.580.000,00	(46.670.000,00)	81,86
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	986.310.000,00	967.674.843,00	(18.635.157,00)	98,11
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	122.000.000,00	121.555.344,00	(444.656,00)	99,64

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	122.000.000,00	121.555.344,00	(444.656,00)	99,64
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	600.000.000,00	387.962.292,00	(212.037.708,00)	64,66
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	600.000.000,00	387.962.292,00	(212.037.708,00)	64,66
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	600.000.000,00	387.962.292,00	(212.037.708,00)	64,66
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.823.216.984,00	39.497.951.569,00	(1.325.265.415,00)	96,75
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.923.171.872,00	16.841.523.140,00	(81.648.732,00)	99,52
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.807.474.797,00	12.725.826.065,00	(81.648.732,00)	99,36
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	10.610.854.739,00	10.542.580.262,00	(68.274.477,00)	99,36
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.196.620.058,00	2.183.245.803,00	(13.374.255,00)	99,39
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.115.697.075,00	4.115.697.075,00	-	100,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.115.697.075,00	4.115.697.075,00	-	100,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.933.094.996,00	9.691.642.467,00	(241.452.529,00)	97,57
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.957.295.469,00	5.914.589.886,00	(42.705.583,00)	99,28
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.053.563.820,00	2.052.014.738,00	(1.549.082,00)	99,92
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.903.731.649,00	3.862.575.148,00	(41.156.501,00)	98,95
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	399.479.527,00	394.459.775,00	(5.019.752,00)	98,74
5.2.04.02.03.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	399.479.527,00	394.459.775,00	(5.019.752,00)	98,74
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.015.320.000,00	1.985.632.850,00	(29.687.150,00)	98,53
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam Lainnya	463.000.000,00	452.615.850,00	(10.384.150,00)	97,76
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.061.000.000,00	1.060.959.956,00	(40.044,00)	100,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.314.050.116,00	8.584.478.462,00	(729.571.654,00)	92,17
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.872.565.666,00	6.196.050.000,00	(676.515.666,00)	90,16
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.872.565.666,00	6.196.050.000,00	(676.515.666,00)	90,16
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.441.484.450,00	2.388.428.462,00	(53.055.988,00)	97,83
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.441.484.450,00	2.388.428.462,00	(53.055.988,00)	97,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.132.081.725,00	687.696.400,00	(444.385.325,00)	60,75
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	514.873.725,00	471.804.400,00	(43.069.325,00)	91,63
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	507.648.725,00	464.579.400,00	(43.069.325,00)	91,52
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	472.447.325,00	441.534.600,00	(30.912.725,00)	93,46

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	35.201.400,00	23.044.800,00	(12.156.600,00)	65,47
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.4	**BELANJA TRANSFER**	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	11.188.240.060,79	31.920.401.632,93	20.732.161.572,14	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05	Penghematan Belanja	9.381.759.939,21	9.381.759.939,21	-	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	9.238.954.665,36	9.238.954.665,36	-	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.945.179,40	1.396.945.179,40	-	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.933.230.635,20	1.933.230.635,20	-	100,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	524.602.350,00	524.602.350,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	15.020.016,00	15.020.016,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD sertaKDH/WKDH	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.356.556.484,76	5.356.556.484,76	-	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	142.805.273,85	142.805.273,85	-	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	142.805.273,85	142.805.273,85	-	100,00
6.1.01.99	Koreksi SiLPA	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	0,00
6.1.01.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	0,00
6.1.01.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	20.570.000.000,00	20.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,95
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
6.2.03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-JangkaPanjang	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.188.240.060,79)	(11.183.808.523,79)	4.431.537,00	-
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**20.736.593.109,14**	**20.736.593.109,14**	**-**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.5
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.5
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN DAERAH	901.061.379,03	733.586.896,00	81,41
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	9.657.550,00	9.582.500,00	99,22
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	489.236.490,00	460.945.987,00	94,22
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	16.107.600,00	15.900.000,00	98,71

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	70.000.000,00	59.830.750,00	85,47
6	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	64.037.700,00	21.185.303,00	33,08
7	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	98.747.340,00	97.590.600,00	98,83
8	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	108.259.521,00	107.166.940,00	98,99
9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	2.017.968.575,00	1.989.837.532,00	98,61

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
10	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	212.140.437,00	107.292.424,00	50,58
11	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	17.173.600,00	14.961.600,00	87,12
12	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	21.778.746.033,00	20.458.003.147,00	93,94
13	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN UMUM	23.181.455.696,00	21.383.067.242,00	92,24

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
14	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
15	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.013.900.700,00	1.006.514.599,00	99,27
16	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	536.568.650,00	529.350.590,00	98,65
17	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PANGAN DAERAH	3.134.153.707,97	2.960.908.343,00	94,47
18	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.883.297.155,00	2.695.040.898,00	93,47

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
19	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	97,40
20	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	67.299.026,00	39.673.100,00	58,95
21	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	309.910.000,00	179.863.900,00	58,04
22	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.933.289.342,00	6.722.217.223,00	96,96

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
23	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.348.790.000,00	1.889.118.302,00	80,43
24	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	132.000.000,00	130.444.700,00	98,82
25	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.517.420.362,62	3.429.156.208,00	97,49
26	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	98,15

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
27	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	612.772.653,38	610.872.652,00	99,69
28	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	99,58
29	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	473.360.000,00	471.839.310,00	99,68

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
30	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	861.393.125,00	739.599.400,00	85,86
31	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	7.990.000,00	4.870.000,00	60,95
32	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	26.479.450,00	7.125.000,00	26,91
33	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	938.258.000,00	931.671.817,00	99,30
34	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	3.907.300,00	-	-

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
35	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	100.000.000,00	98.174.727,00	98,17
36	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	543.941.130,00	458.165.400,00	84,23
37	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	6.632.795,00	5.840.100,00	88,05
38	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	277.224.000,00	211.998.257,00	76,47
39	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	1.514.534.060,00	1.478.936.499,00	97,65
40	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.366.400,00	92.855.000,00	61,34

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
41	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.277.633.460,00	1.262.002.930,00	98,78
42	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	17.649.438.913,21	15.914.451.982,00	90,17
43	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	91,58
44	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	17.409.525.888,00	915.504.443,00	5,26
45	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.800.000,00	5.622.400,00	82,68

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
46	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PANGAN DAERAH	93.909.750,00	89.280.650,00	95,07
47	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.619.539.912,00	6.201.298.825,00	93,68
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	643.106.700,00	629.661.255,00	97,91
49	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.307.147.260,00	655.049.109,00	50,11

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
50	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	28.600.000,00	27.945.000,00	97,71
51	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN RURUKAN	100.000,00	-	-
52	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN RURUKAN SATU	200.000,00	-	-
53	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN PASLATEN DUA	200.000,00	-	-
54	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN KUMELEMBUAY	200.000,00	-	-
55	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON UTARA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
56	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.241.552,00	44.565.500,00	98,51
57	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	187.427.751,00	178.145.040,00	95,05
58	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	4.078.800,00	3.888.000,00	95,32
59	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	3.298.207.243,00	2.564.918.440,00	77,77
60	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.594.753.068,36	1.414.489.550,00	88,70

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
61	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	414.642.750,00	339.364.979,00	81,85
62	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	25.000.000,00	24.987.994,00	99,95
63	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.161.701.861,55	707.032.760,00	60,86
64	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	290.470.100,00	271.189.961,00	93,36
65	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	50.000.000,00	48.046.550,00	96,09

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
66	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	10.070.843.172,09	9.508.414.252,00	94,42
67	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.551.345.655,00	3.461.324.655,00	97,47
68	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.056.975,00	89.057.100,00	89,90
69	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.911.200,00	521.200,00	10,61

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
70	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	97,01
71	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	472.602.726,00	268.080.000,00	56,72
72	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	93,59
73	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	1.242.300,00	-	-

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
74	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	6.220.666.967,00	6.198.340.088,00	99,64
75	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	347.516.100,00	287.005.500,00	82,59
76	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	99,46
77	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	12.979.315.666,00	12.007.938.150,00	92,52

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
78	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	738.940.100,00	735.592.446,00	99,55
79	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	5.076.627.925,00	4.441.225.164,00	87,48
80	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.835.023.193,00	5.479.294.851,00	93,90
81	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	250.740.000,00	740.000,00	0,30

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
82	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	160.067.500,00	91.019.450,00	56,86
83	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	161.427.600,00	161.427.600,00	100,00
84	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	656.101.400,00	553.753.503,00	84,40
85	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	214.000.000,00	-	-

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
86	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	65.457.549,00	37.540.700,00	57,35
87	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	4.113.060,00	1.606.955,00	39,07
88	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.560.144.566,00	3.493.279.680,00	98,12
89	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	4.099.735.250,00	4.071.640.895,00	99,31

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
90	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	1.051.363.700,00	1.021.255.540,00	97,14
91	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	580.298.360,00	505.585.952,00	87,13
92	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	98,35
93	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	10.000.000,00	9.150.000,00	91,50

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
94	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.289.859.500,00	1.284.964.288,00	99,62
95	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAERAH	939.241.516,00	816.272.757,00	86,91
96	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	316.081.207,00	196.170.850,00	62,06
97	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	93,57

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
98	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	950.000.000,00	744.504.337,00	78,37
99	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	270.605.000,00	202.126.554,00	74,69
100	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	145.208.900,00	137.643.486,00	94,79
101	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	190.885.000,00	80.475.000,00	42,16

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
102	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	3.026.779.614,00	2.590.483.355,00	85,59
103	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	212.433.415,00	201.904.600,00	95,04
104	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	2.805.053.854,00	2.742.595.399,00	97,77
105	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	325.000.000,00	201.186.850,00	61,90

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
106	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.706.796.604,00	1.609.962.700,00	94,33
107	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.425.000.000,00	1.158.891.600,00	81,33
108	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
109	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	81.344.000,00	73.942.800,00	90,90

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
110	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	501.828.700,00	313.035.800,00	62,38
111	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	4.109.581.524,00	3.956.650.093,00	96,28
112	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	951.697.034,00	71,41
113	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	1.758.921.497,00	81,87

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
114	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	646.463.850,00	617.629.090,00	95,54
115	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	1.627.287.799,00	79,66
116	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD ANUGERAH	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	85,41
117	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN DAERAH	379.667.000,00	108.181.086,00	28,49

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
118	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.629.049.615,00	82,91
119	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.641.017.990,00	88,75
120	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.096.242.451,00	79,47
121	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	938.638.322,00	82,74

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
122	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	96,97
123	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAERAH	33.633.728.771,00	31.738.650.591,00	94,37
124	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN DAERAH	55.590.421.403,00	55.128.610.796,00	99,17
125	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	1.024.815.600,00	915.451.672,00	89,33

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
126	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR DUA	103.000.000,00	102.811.373,00	99,82
127	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR SATU	103.000.000,00	102.850.000,00	99,85
128	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW	103.000.000,00	102.980.000,00	99,98
129	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	103.000.000,00	102.965.000,00	99,97
130	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	103.000.000,00	102.960.000,00	99,96
131	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TOMOHON UTARA	30.000.000,00	29.165.000,00	97,22

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
132	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAYAWU	103.000.000,00	102.950.000,00	99,95
133	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW SATU	103.000.000,00	102.970.000,00	99,97
134	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67
135	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95
136	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WAILAN	103.000.000,00	102.900.000,00	99,90
137	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
138	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WAILAN	469.900.000,00	469.875.000,00	99,99
139	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL DAERAH	250.000.000,00	242.302.000,00	96,92
140	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	60.304.756,00	59.764.000,00	99,10
141	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR SATU	275.500.000,00	275.475.000,00	99,99
142	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
143	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAYAWU	372.700.000,00	372.675.000,00	99,99
144	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	437.500.000,00	437.475.000,00	99,99
145	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99
146	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	534.700.000,00	534.675.000,00	100,00
147	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR DUA	275.500.000,00	275.475.000,00	99,99
148	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW SATU	469.900.000,00	469.875.000,00	99,99
149	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	820.803.920,00	782.098.800,00	95,28

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
150	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	79,55
151	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL DAERAH	268.000.000,00	265.609.700,00	99,11
152	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	139.471.800,00	120.088.600,00	86,10
153	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN RURUKAN	527.000.000,00	526.330.000,00	99,87
154	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	66.053.200,00	61.666.658,00	93,36
155	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN PASLATEN DUA	588.800.000,00	578.697.723,00	98,28
156	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	70.073.800,00	67.096.300,00	95,75

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
157	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN PASLATEN SATU	429.800.000,00	419.847.749,00	97,68
158	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KUMELEMBUAY	429.800.000,00	420.728.875,00	97,89
159	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN RURUKAN SATU	462.200.000,00	454.210.223,00	98,27
160	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL DAERAH	2.098.064.625,00	2.030.585.950,00	96,78
161	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN PINARAS	28.673.520,00	27.483.900,00	95,85
162	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN ULUINDANO	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
163	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	28.886.700,00	27.710.350,00	95,93
164	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TONDANGOW	30.247.380,00	29.787.280,00	98,48
165	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN ULUINDANO	30.353.650,00	23.216.750,00	76,49
166	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	197.200.000,00	194.081.350,00	98,42
167	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WALIAN	424.000.000,00	422.112.000,00	99,55
168	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TUMATANGTANG	29.549.450,00	26.755.350,00	90,54

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
169	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	32.600.900,00	29.981.800,00	91,97
170	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LANSOT	424.000.000,00	415.320.700,00	97,95
171	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	17.049.182,00	16.111.600,00	94,50
172	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TUMATANGTANG	359.200.000,00	357.132.150,00	99,42
173	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
174	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN WALIAN DUA	30.974.000,00	26.090.700,00	84,23

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
175	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	221.655.092,00	201.641.340,00	90,97
176	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	727.544.245,00	667.268.988,00	91,72
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	147.463.467,00	146.618.700,00	99,43
178	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	405.453.344,00	361.098.903,00	89,06
179	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	72.958.189,00	72.682.100,00	99,62

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
180	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95
181	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN PANGOLOMBIAN	30.967.700,00	28.596.400,00	92,34
182	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN LAHENDONG	30.602.950,00	28.728.000,00	93,87
183	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WALIAN SATU	294.400.000,00	288.163.600,00	97,88
184	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	11.209.294.136,00	10.247.451.954,00	91,42
185	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	4.790.113.200,00	4.139.759.820,00	86,42

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
186	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	11.930.000,00	11.525.000,00	96,61
187	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI	44.969.670,00	42.492.800,00	94,49
188	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	964.298.730,00	755.460.591,00	78,34
189	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN RURUKAN	39.979.445,00	37.955.000,00	94,94
190	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	93.281.899,00	74.690.000,00	80,07

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
191	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.564.879.535,00	5.401.301.374,00	97,06
192	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	567.223.010,00	440.297.040,00	77,62
193	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	11.137.087.900,00	10.720.019.299,00	96,26
194	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	4.430.000,00	-	-
195	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN RURUKAN SATU	40.867.310,00	32.135.000,00	78,63

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
196	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KUMELEMBUAY	40.818.150,00	32.950.000,00	80,72
197	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	10.551.026.600,00	10.182.320.170,00	96,51
198	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI	292.171.200,00	210.034.036,00	71,89
199	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	2.639.152.363,00	2.185.226.800,00	82,80
200	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	481.120.905,00	319.516.720,00	66,41

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
201	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT DAERAH	6.515.531.718,00	6.299.217.764,00	96,68
202	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH	892.087.000,00	582.980.210,00	65,35
203	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON UTARA	14.200.000,00	14.191.000,00	99,94
204	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN	16.481.450,00	16.148.000,00	97,98
205	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN WAILAN	18.100.050,00	17.783.000,00	98,25

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
206	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	16.330.900,00	15.993.000,00	97,93
207	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KINILOW SATU	18.317.450,00	18.004.000,00	98,29
208	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TINOOR DUA	13.458.150,00	13.439.000,00	99,86
209	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TINOOR SATU	15.888.050,00	15.580.000,00	98,06
210	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.902.514.750,00	7.494.914.200,00	94,84

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
211	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON UTARA	6.613.121.200,00	6.516.516.980,00	98,54
212	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KINILOW	13.809.900,00	13.559.000,00	98,18
213	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON UTARA	90.845.000,00	90.830.000,00	99,98
214	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.782.698.670,00	7.979.953.160,00	90,86
215	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAYAWU	17.609.350,00	17.285.000,00	98,16
216	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	18.050.300,00	17.710.000,00	98,11

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
217	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	19.106.650,00	18.710.000,00	97,92
218	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	6.881.389.701,00	6.519.692.150,00	94,74
219	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3.646.100.339,00	3.504.208.120,00	96,11
220	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	172.500.000,00	154.825.000,00	89,75
221	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	50.271.000,00	37.154.200,00	73,91

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
222	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.961.182.725,00	3.751.876.828,00	94,72
223	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	144.914.300,00	92.602.845,00	63,90
224	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	130.000.000,00	116.683.000,00	89,76
225	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	299.067.100,00	243.994.879,00	81,59
TOTAL				**476.844.645.667,71**	**428.407.426.671,00**	**89,84**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.6
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KOTA

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.6
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR DUA	103.000.000,00	102.811.373,00	99,82
2	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	97,01
3	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	861.393.125,00	739.599.400,00	85,86

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
4	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	950.000.000,00	744.504.337,00	78,37
5	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	270.605.000,00	202.126.554,00	74,69
6	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	145.208.900,00	137.643.486,00	94,79
7	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	11.209.294.136,00	10.247.451.954,00	91,42
8	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR SATU	103.000.000,00	102.850.000,00	99,85

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
9	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	472.602.726,00	268.080.000,00	56,72
10	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW	103.000.000,00	102.980.000,00	99,98
11	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	103.000.000,00	102.965.000,00	99,97
12	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	7.990.000,00	4.870.000,00	60,95
13	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	103.000.000,00	102.960.000,00	99,96
14	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	93,59

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
15	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	1.242.300,00	-	-
16	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TOMOHON UTARA	30.000.000,00	29.165.000,00	97,22
17	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	190.885.000,00	80.475.000,00	42,16
18	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	3.026.779.614,00	2.590.483.355,00	85,59
19	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	6.632.795,00	5.840.100,00	88,05

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
20	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	6.220.666.967,00	6.198.340.088,00	99,64
21	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAYAWU	103.000.000,00	102.950.000,00	99,95
22	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	347.516.100,00	287.005.500,00	82,59
23	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	98.747.340,00	97.590.600,00	98,83
24	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	6.881.389.701,00	6.519.692.150,00	94,74

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
25	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3.646.100.339,00	3.504.208.120,00	96,11
26	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW SATU	103.000.000,00	102.970.000,00	99,97
27	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	4.790.113.200,00	4.139.759.820,00	86,42
28	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	26.479.450,00	7.125.000,00	26,91
29	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	99,46

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
30	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	172.500.000,00	154.825.000,00	89,75
31	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	108.259.521,00	107.166.940,00	98,99
32	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67
33	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	50.271.000,00	37.154.200,00	73,91
34	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	12.979.315.666,00	12.007.938.150,00	92,52
35	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
36	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	738.940.100,00	735.592.446,00	99,55
37	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	9.657.550,00	9.582.500,00	99,22
38	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	2.017.968.575,00	1.989.837.532,00	98,61
39	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WAILAN	103.000.000,00	102.900.000,00	99,90
40	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	212.433.415,00	201.904.600,00	95,04

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
41	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	5.076.627.925,00	4.441.225.164,00	87,48
42	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	212.140.437,00	107.292.424,00	50,58
43	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	17.173.600,00	14.961.600,00	87,12
44	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99
45	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WAILAN	469.900.000,00	469.875.000,00	99,99

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
46	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL DAERAH	250.000.000,00	242.302.000,00	96,92
47	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	2.805.053.854,00	2.742.595.399,00	97,77
48	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	11.930.000,00	11.525.000,00	96,61
49	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	325.000.000,00	201.186.850,00	61,90
50	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.706.796.604,00	1.609.962.700,00	94,33

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
51	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI	44.969.670,00	42.492.800,00	94,49
52	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.425.000.000,00	1.158.891.600,00	81,33
53	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	60.304.756,00	59.764.000,00	99,10
54	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR SATU	275.500.000,00	275.475.000,00	99,99

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
55	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	21.778.746.033,00	20.458.003.147,00	93,94
56	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99
57	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAYAWU	372.700.000,00	372.675.000,00	99,99
58	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	437.500.000,00	437.475.000,00	99,99
59	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	340.300.000,00	340.275.000,00	99,99
60	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	534.700.000,00	534.675.000,00	100,00

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
61	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN UMUM	23.181.455.696,00	21.383.067.242,00	92,24
62	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
63	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.835.023.193,00	5.479.294.851,00	93,90
64	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TINOOR DUA	275.500.000,00	275.475.000,00	99,99
65	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	964.298.730,00	755.460.591,00	78,34

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
66	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KINILOW SATU	469.900.000,00	469.875.000,00	99,99
67	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	250.740.000,00	740.000,00	0,30
68	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	160.067.500,00	91.019.450,00	56,86
69	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	161.427.600,00	161.427.600,00	100,00
70	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	656.101.400,00	553.753.503,00	84,40

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
71	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	489.236.490,00	460.945.987,00	94,22
72	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	70.000.000,00	59.830.750,00	85,47
73	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	214.000.000,00	-	-
74	4. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.241.552,00	44.565.500,00	98,51
75	4. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	187.427.751,00	178.145.040,00	95,05

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
76	4. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	65.457.549,00	37.540.700,00	57,35
77	4. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	4.113.060,00	1.606.955,00	39,07
78	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	820.803.920,00	782.098.800,00	95,28
79	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.560.144.566,00	3.493.279.680,00	98,12
80	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	79,55
81	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL DAERAH	268.000.000,00	265.609.700,00	99,11

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
82	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	4.099.735.250,00	4.071.640.895,00	99,31
83	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	1.051.363.700,00	1.021.255.540,00	97,14
84	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	580.298.360,00	505.585.952,00	87,13
85	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	81.344.000,00	73.942.800,00	90,90
86	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	4.078.800,00	3.888.000,00	95,32
87	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAERAH	139.471.800,00	120.088.600,00	86,10

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
88	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	3.298.207.243,00	2.564.918.440,00	77,77
89	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.594.753.068,36	1.414.489.550,00	88,70
90	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	414.642.750,00	339.364.979,00	81,85
91	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	98,35
92	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN DAERAH	901.061.379,03	733.586.896,00	81,41
93	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	25.000.000,00	24.987.994,00	99,95

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
94	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	938.258.000,00	931.671.817,00	99,30
95	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.161.701.861,55	707.032.760,00	60,86
96	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	3.907.300,00	-	-
97	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAERAH	10.000.000,00	9.150.000,00	91,50
98	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.289.859.500,00	1.284.964.288,00	99,62

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
99	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	64.037.700,00	21.185.303,00	33,08
100	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAERAH	939.241.516,00	816.272.757,00	86,91
101	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	290.470.100,00	271.189.961,00	93,36
102	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	50.000.000,00	48.046.550,00	96,09
103	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	16.107.600,00	15.900.000,00	98,71

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
104	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAERAH	100.000.000,00	98.174.727,00	98,17
105	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	10.070.843.172,09	9.508.414.252,00	94,42
106	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.307.147.260,00	655.049.109,00	50,11
107	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN RURUKAN	39.979.445,00	37.955.000,00	94,94
108	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.551.345.655,00	3.461.324.655,00	97,47

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
109	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	93.281.899,00	74.690.000,00	80,07
110	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.564.879.535,00	5.401.301.374,00	97,06
111	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN RURUKAN	527.000.000,00	526.330.000,00	99,87
112	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
113	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	132.000.000,00	130.444.700,00	98,82

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
114	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	567.223.010,00	440.297.040,00	77,62
115	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	17.409.525.888,00	915.504.443,00	5,26
116	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.961.182.725,00	3.751.876.828,00	94,72
117	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.800.000,00	5.622.400,00	82,68

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
118	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.013.900.700,00	1.006.514.599,00	99,27
119	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	11.137.087.900,00	10.720.019.299,00	96,26
120	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	28.600.000,00	27.945.000,00	97,71
121	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	536.568.650,00	529.350.590,00	98,65
122	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	501.828.700,00	313.035.800,00	62,38

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
123	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN RURUKAN	100.000,00	-	-
124	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	66.053.200,00	61.666.658,00	93,36
125	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.517.420.362,62	3.429.156.208,00	97,49
126	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PANGAN DAERAH	93.909.750,00	89.280.650,00	95,07

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
127	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	98,15
128	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	4.430.000,00	-	-
129	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN RURUKAN SATU	40.867.310,00	32.135.000,00	78,63

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
130	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	612.772.653,38	610.872.652,00	99,69
131	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KUMELEMBUAY	40.818.150,00	32.950.000,00	80,72
132	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN RURUKAN SATU	200.000,00	-	-
133	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.366.400,00	92.855.000,00	61,34

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
134	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN PASLATEN DUA	588.800.000,00	578.697.723,00	98,28
135	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	70.073.800,00	67.096.300,00	95,75
136	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	10.551.026.600,00	10.182.320.170,00	96,51
137	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	99,58
138	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI	292.171.200,00	210.034.036,00	71,89

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
139	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN PASLATEN DUA	200.000,00	-	-
140	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KELURAHAN KUMELEMBUAY	200.000,00	-	-
141	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	2.639.152.363,00	2.185.226.800,00	82,80
142	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	4.109.581.524,00	3.956.650.093,00	96,28
143	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.619.539.912,00	6.201.298.825,00	93,68

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
144	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN PASLATEN SATU	429.800.000,00	419.847.749,00	97,68
145	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	481.120.905,00	319.516.720,00	66,41
146	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT DAERAH	6.515.531.718,00	6.299.217.764,00	96,68
147	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH	892.087.000,00	582.980.210,00	65,35
148	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KUMELEMBUAY	429.800.000,00	420.728.875,00	97,89

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
149	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	473.360.000,00	471.839.310,00	99,68
150	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PANGAN DAERAH	3.134.153.707,97	2.960.908.343,00	94,47
151	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	144.914.300,00	92.602.845,00	63,90
152	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN RURUKAN SATU	462.200.000,00	454.210.223,00	98,27
153	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL DAERAH	2.098.064.625,00	2.030.585.950,00	96,78

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
154	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	1.514.534.060,00	1.478.936.499,00	97,65
155	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	316.081.207,00	196.170.850,00	62,06
156	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	277.224.000,00	211.998.257,00	76,47
157	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON UTARA	14.200.000,00	14.191.000,00	99,94
158	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN PINARAS	28.673.520,00	27.483.900,00	95,85

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
159	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN ULUINDANO	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
160	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	543.941.130,00	458.165.400,00	84,23
161	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN	16.481.450,00	16.148.000,00	97,98
162	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	17.649.438.913,21	15.914.451.982,00	90,17
163	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	28.886.700,00	27.710.350,00	95,93
164	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN WAILAN	18.100.050,00	17.783.000,00	98,25

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
165	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TONDANGOW	30.247.380,00	29.787.280,00	98,48
166	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	16.330.900,00	15.993.000,00	97,93
167	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN ULUINDANO	30.353.650,00	23.216.750,00	76,49
168	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.883.297.155,00	2.695.040.898,00	93,47
169	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	197.200.000,00	194.081.350,00	98,42

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
170	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	130.000.000,00	116.683.000,00	89,76
171	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WALIAN	424.000.000,00	422.112.000,00	99,55
172	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TUMATANGTANG	29.549.450,00	26.755.350,00	90,54
173	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	97,40
174	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KINILOW SATU	18.317.450,00	18.004.000,00	98,29

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
175	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	951.697.034,00	71,41
176	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	1.758.921.497,00	81,87
177	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	32.600.900,00	29.981.800,00	91,97
178	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LANSOT	424.000.000,00	415.320.700,00	97,95
179	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	67.299.026,00	39.673.100,00	58,95

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
180	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	646.463.850,00	617.629.090,00	95,54
181	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TINOOR DUA	13.458.150,00	13.439.000,00	99,86
182	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	17.049.182,00	16.111.600,00	94,50
183	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	1.627.287.799,00	79,66
184	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TUMATANGTANG	359.200.000,00	357.132.150,00	99,42
185	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TOMOHON UTARA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
186	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD ANUGERAH	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	85,41
187	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN TINOOR SATU	15.888.050,00	15.580.000,00	98,06
188	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN DAERAH	379.667.000,00	108.181.086,00	28,49
189	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.629.049.615,00	82,91
190	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
191	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.902.514.750,00	7.494.914.200,00	94,84
192	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN WALIAN DUA	30.974.000,00	26.090.700,00	84,23
193	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	309.910.000,00	179.863.900,00	58,04
194	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON UTARA	6.613.121.200,00	6.516.516.980,00	98,54

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
195	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	221.655.092,00	201.641.340,00	90,97
196	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	91,58
197	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	727.544.245,00	667.268.988,00	91,72
198	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	147.463.467,00	146.618.700,00	99,43
199	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KINILOW	13.809.900,00	13.559.000,00	98,18

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
200	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TOMOHON UTARA	90.845.000,00	90.830.000,00	99,98
201	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.641.017.990,00	88,75
202	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	405.453.344,00	361.098.903,00	89,06
203	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.782.698.670,00	7.979.953.160,00	90,86
204	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	72.958.189,00	72.682.100,00	99,62

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
205	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	93,57
206	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAYAWU	17.609.350,00	17.285.000,00	98,16
207	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.056.975,00	89.057.100,00	89,90
208	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.933.289.342,00	6.722.217.223,00	96,96
209	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
210	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.096.242.451,00	79,47
211	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN PANGOLOMBIAN	30.967.700,00	28.596.400,00	92,34
212	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.911.200,00	521.200,00	10,61
213	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.348.790.000,00	1.889.118.302,00	80,43

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
214	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	938.638.322,00	82,74
215	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN LAHENDONG	30.602.950,00	28.728.000,00	93,87
216	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	96,97
217	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN WALIAN SATU	294.400.000,00	288.163.600,00	97,88
218	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	18.050.300,00	17.710.000,00	98,11

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
219	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	643.106.700,00	629.661.255,00	97,91
220	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAERAH	33.633.728.771,00	31.738.650.591,00	94,37
221	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN DAERAH	55.590.421.403,00	55.128.610.796,00	99,17
222	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	1.024.815.600,00	915.451.672,00	89,33
223	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	19.106.650,00	18.710.000,00	97,92

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
224	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.277.633.460,00	1.262.002.930,00	98,78
225	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	299.067.100,00	243.994.879,00	81,59
TOTAL				**476.844.645.667,71**	**428.407.426.671,00**	**89,84**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.7
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.7
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**	**486.092.000,00**	**432.285.543,30**	**88,93%**
	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	90.073.520,00	56.897.460,00	63,17%
	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	53.356.980,00	51.869.900,00	97,21%
	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	0,00%
	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.093.220,00	180.000,00	4,40%
	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	26.441.175,00	18.046.925,00	68,25%
	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	35.677.950,00	30.595.787,50	85,76%
	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	264.690.000,00	266.548.500,00	100,70%
	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	838.880,00	-	0,00%
	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.172.275,00	5.679.770,80	69,50%
	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.748.000,00	2.467.200,00	89,78%
2	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**35.016.301.454,20**	**33.711.883.035,54**	**96,27%**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	278.914.000,00	271.333.125,00	97,28%
	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.730.195.964,00	1.351.767.855,94	78,13%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	380.254.500,00	324.402.375,00	85,31%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	127.662.500,00	106.134.200,00	83,14%
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	108.555.000,00	75.816.475,00	69,84%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	34.388.475,00	68,78%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.484.400,00	35.941.680,00	91,03%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	317.884.400,00	292.540.240,00	92,03%
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.163.400,00	31.343.260,00	91,75%
	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	123.000.000,00	98.556.054,80	80,13%
	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.929.000,00	47.882.900,00	99,90%
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.549.200,00	44.721.950,00	96,07%
	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.248.691.214,40	1.248.691.214,40	100,00%
	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.933.400,00	21.636.217,20	28,49%
	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	435.657.000,00	422.452.488,75	96,97%
	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000,00	7.103.200,00	98,66%
	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.276.550,80	14.276.550,80	100,00%
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.698.800.000,00	22.170.148.918,40	107,11%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186.900.000,00	66.705.000,00	35,69%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.950.000,00	1.875.000,00	96,15%
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300.000,00	-	0,00%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	140.705.000,00	116.065.000,00	82,49%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.340.000,00	28.500.000,00	74,33%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	51.860.000,00	34.680.000,00	66,87%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	1.037.013.900,00	891.086.859,00	85,93%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.990.000,00	36.380.000,00	43,31%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.625.000,00	1.200.000,00	33,10%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	129.495.000,00	69.500.000,00	53,67%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.120.000,00	10.320.000,00	48,86%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	41.340.000,00	23.760.000,00	57,47%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	595.774.500,00	272.808.282,00	45,79%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130.655.000,00	71.100.000,00	54,42%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	273.380.000,00	163.825.000,00	59,93%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.440.000,00	24.420.000,00	70,91%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79.702.800,00	61.980.000,00	77,76%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	1.019.182.125,00	2.390.683.224,75	234,57%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	138.750.000,00	7.625.000,00	5,50%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.210.000,00	375.000,00	6,04%
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000,00	1.245.000,00	9,88%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	135.480.000,00	40.800.000,00	30,12%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.920.000,00	13.860.000,00	99,57%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	48.020.000,00	15.680.000,00	32,65%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	719.282.250,00	386.422.779,00	53,72%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	195.340.000,00	90.420.000,00	46,29%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.060.000,00	28.275.000,00	696,43%
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.800.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	208.950.000,00	109.195.000,00	52,26%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.520.000,00	21.180.000,00	59,63%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	62.340.000,00	3.620.000,00	5,81%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	1.182.075.000,00	589.662.029,25	49,88%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	185.615.000,00	185.372.000,00	99,87%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.700.000,00	1.200.000,00	44,44%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136.495.000,00	112.240.000,00	82,23%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.240.000,00	13.200.000,00	99,70%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.320.000,00	22.320.000,00	100,00%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	1.229.232.900,00	932.289.102,75	75,84%
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.580.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	694.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	108.180.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.560.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.520.000,00	-	0,00%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	757.893.450,00	272.876.578,50	36,00%
3	**1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH**	**4.236.974.341,50**	**3.899.561.382,00**	**92,04%**
	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.226.687.500,00	1.153.069.225,00	94,00%
	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%
	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.768.141.416,50	1.598.915.312,50	90,43%
	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	250.000.000,00	168.000.000,00	67,20%
	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	273.061.500,00	273.061.312,50	100,00%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	429.680.250,00	417.595.500,00	97,19%
	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.475,00	370.000,00	45,37%
	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.088.200,00	26.050.032,00	99,85%
4	**1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH**	**15.818.170,00**	**15.349.677,20**	**97,04%**
	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.476.970,00	1.056.000,00	71,50%
	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.341.200,00	14.293.677,20	99,67%
5	**1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**6.123.800,00**	**6.068.824,00**	**99,10%**
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%
	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.123.800,00	6.068.824,00	99,10%
6	**8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**9.293.680,00**	**9.269.265,00**	**99,74%**
	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.259.880,00	1.258.880,00	99,92%
	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.033.800,00	8.010.385,00	99,71%
7	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**16.647.600,00**	**16.463.144,00**	**98,89%**
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	880.000,00	795.200,00	90,36%
	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.767.600,00	15.667.944,00	99,37%
8	**1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH**	**632.472.761,68**	**533.478.632,40**	**84,35%**
	1.06.02.2.03.0001 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	103.299.696,00	99.520.000,00	96,34%
	1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	725.000,00	-	0,00%
	1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	512.921.400,68	418.451.972,40	81,58%
	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.259.465,00	2.259.200,00	99,99%
	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.267.200,00	13.247.460,00	99,85%
9	**2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**	**14.446.082,00**	**14.115.812,60**	**97,71%**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.387.020,00	1.103.040,00	79,53%
	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.059.062,00	13.012.772,60	99,65%
10	**2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH**	**131.837.934,80**	**122.401.678,00**	**92,84%**
	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000,00	92.046.439,00	92,05%
	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.634.945,40	98,17%
	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.632.134,80	2.587.520,00	98,30%
	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.205.800,00	8.132.773,60	88,34%
11	**2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**	**20.589.040,60**	**19.993.948,00**	**97,11%**
	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.526.540,60	2.026.520,00	80,21%
	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.062.500,00	17.967.428,00	99,47%
12	**2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**	**36.494.430,20**	**35.579.149,80**	**97,49%**
	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.089.353,60	10.339.200,00	93,24%
	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.405.076,60	25.239.949,80	99,35%
13	**2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**	**939.769.300,00**	**830.054.384,00**	**88,33%**
	2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	85.498.000,00	42.331.360,00	49,51%
	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	6.000.000,00	-	0,00%
	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	286.937.000,00	282.217.344,00	98,36%
	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	9.000.000,00	7.132.680,00	79,25%
	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	94.628.000,00	44.210.000,00	46,72%
	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.000.000,00	11.169.000,00	93,08%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60.000.000,00	59.940.000,00	99,90%
	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	369.600.000,00	366.987.000,00	99,29%
	2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	824.300,00	814.000,00	98,75%
	2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.282.000,00	15.253.000,00	99,81%
14	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**	**15.535.600,00**	**12.733.486,00**	**81,96%**
	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	555.000,00	326.000,00	58,74%
	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.980.600,00	12.407.486,00	82,82%
15	**2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH**	**68.285.440,00**	**61.438.384,32**	**89,97%**
	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.095.020,00	962.000,00	87,85%
	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.095.020,00	962.000,00	87,85%
	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.788.000,00	4.764.884,00	99,52%
	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	61.307.400,00	54.749.500,32	89,30%
16	**2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH**	**63.521.600,00**	**13.520.687,80**	**21,29%**
	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,00	-	0,00%
	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	148.000,00	148.000,00	100,00%
	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.337.200,00	1.336.360,00	99,94%
	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.036.400,00	12.036.327,80	100,00%
17	**2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**43.064.820,40**	**40.656.391,40**	**94,41%**
	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.407.600,00	10.195.520,00	89,37%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	8.276.310,40	8.155.100,00	98,54%
	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.291.480,00	2.401.440,00	72,96%
	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.089.430,00	19.904.331,40	99,08%
18	**2.19.0.00.0.00.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH**	**17.337.940,00**	**15.419.248,00**	**88,93%**
	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.859.940,00	1.834.000,00	98,61%
	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.478.000,00	13.585.248,00	87,77%
19	**2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**	**19.686.316,60**	**14.494.344,00**	**73,63%**
	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.373.900,00	575.000,00	41,85%
	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.312.416,60	13.919.344,00	76,01%
20	**3.27.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH**	**11.717.730,40**	**11.196.063,80**	**95,55%**
	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.997.598,80	99,95%
	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	624.030,40	500.000,00	80,12%
	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.093.700,00	5.698.465,00	93,51%
21	**3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH**	**21.127.912,40**	**20.836.208,80**	**98,62%**
	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.284.632,40	2.998.000,00	91,27%
	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.843.280,00	17.838.208,80	99,97%
22	**3.30.3.31.0.00.01.00 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH**	**161.081.468,00**	**140.402.248,60**	**87,16%**
	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	131.220.280,00	110.862.140,60	84,49%
	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.309.988,00	1.006.908,00	76,86%
	3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.551.200,00	28.533.200,00	99,94%
23	**4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH**	**773.295.464,00**	**766.940.479,80**	**99,18%**
	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	145.912.374,00	144.469.679,80	99,01%
	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.496.800,00	606.749.800,00	99,22%
	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.886.290,00	15.721.000,00	98,96%
24	**4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD**	**77.890.750,00**	**77.002.782,80**	**98,86%**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	461.550,00	395.200,00	85,62%
	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.429.200,00	76.607.582,80	98,94%
25	**5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**220.056.588,00**	**109.119.695,80**	**49,59%**
	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4.000.000,00	1.930.000,00	48,25%
	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.625.000,00	3.010.400,00	83,05%
	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	122.522.000,00	26.087.600,00	21,29%
	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	0,00%
	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	0,00%
	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.313.640,00	26.579.452,00	79,79%
	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	0,00%
	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	479.000,00	23,95%
	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.595.948,00	51.033.243,80	93,47%
26	**5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**	**61.922.000,00**	**61.596.757,00**	**99,47%**
	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.130.000,00	2.830.000,00	90,42%
	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.792.000,00	58.766.757,00	99,96%
27	**5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**32.012.295,00**	**30.811.544,80**	**96,25%**
	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.461.095,00	1.406.080,00	96,23%
	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.551.200,00	29.405.464,80	96,25%
28	**6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH**	**28.796.200,00**	**28.459.665,80**	**98,83%**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%
	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.796.200,00	28.459.665,80	98,83%
29	**2.07.3.29.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH**	**21.134.002,00**	**20.917.444,00**	**98,98%**
	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.849.390,00	2.804.140,00	98,41%
	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.284.612,00	18.113.304,00	99,06%
30	**7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOMOHON UTARA**	**1.005.834.500,00**	**1.004.071.047,70**	**99,82%**
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.000.000,00	13.999.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.338.000,00	8.334.000,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	11.666.000,00	97,22%
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.000,00	374.000,00	99,73%
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.940.600,00	20.885.010,40	99,73%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.523.960,00	5.423.600,00	98,18%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.998.000,00	99,98%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.060.000,00	68.055.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.326.980,00	7.201.600,00	98,29%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.997.000,00	99,97%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.980.000,00	93.975.000,00	99,99%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.355.220,00	6.232.000,00	98,06%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.160.000,00	96,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.100.000,00	55.095.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.383.260,00	5.375.600,00	99,86%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.981.137,30	99,81%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.100.000,00	55.095.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.592.580,00	6.459.200,00	97,98%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.060.000,00	68.055.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.220.120,00	7.084.000,00	98,11%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.160.000,00	96,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.500.000,00	87.495.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.642.660,00	7.484.000,00	97,92%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.996.500,00	99,97%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.940.000,00	106.935.000,00	100,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.532.360,00	6.397.200,00	97,93%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.996.000,00	99,96%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.060.000,00	68.055.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.240.020,00	7.113.200,00	98,25%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.980.000,00	93.975.000,00	99,99%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.043.740,00	6.914.000,00	98,16%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	74.540.000,00	74.535.000,00	99,99%
31	**7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH**	**823.159.434,40**	**814.554.208,00**	**98,95%**
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.460.000,00	21.357.600,00	99,52%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	9.967.360,00	99,67%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	0,00%
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.987.880,00	1.550.000,00	77,97%
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.869.200,00	21.512.808,00	94,07%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.594.080,00	9.729.720,00	91,84%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.997.500,00	99,98%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.739.320,00	99,86%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.594.632,00	9.903.840,00	93,48%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.160.000,00	96,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.998.500,00	99,99%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	52.336.440,00	99,88%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.591.100,00	10.014.920,00	94,56%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.996.000,00	99,96%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.360.000,00	65.185.000,00	99,73%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.540.352,00	9.864.760,00	93,59%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.998.500,00	99,99%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.440.000,00	39.212.000,00	99,42%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.548.280,00	10.312.520,00	97,76%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.998.600,00	99,99%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.320.000,00	78.132.000,00	99,76%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.543.040,00	10.050.300,00	95,33%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.994.500,00	99,95%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	52.344.600,00	99,89%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.523.238,40	9.979.760,00	94,84%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.993.000,00	99,93%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	52.212.000,00	99,64%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.528.592,00	10.049.600,00	95,45%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.997.500,00	99,98%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	84.421.960,00	99,55%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.579.040,00	9.969.000,00	94,23%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.784.600,00	99,92%
32	**7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN**	**1.146.435.399,00**	**1.114.083.076,50**	**97,18%**
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.000.000,00	13.419.260,00	95,85%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.520,00	-	0,00%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.580.000,00	12.284.000,00	97,65%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	0,00%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.706.179,00	6.528.400,00	97,35%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.690.700,00	2.577.360,00	95,79%
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.120,00	-	0,00%
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.742.000,00	17.864.268,00	95,32%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.658.180,00	10.949.940,00	86,50%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.391.035,00	93,91%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	84.422.400,00	99,55%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.386.640,00	10.626.500,00	85,79%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.929.000,00	99,29%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.880.000,00	57.632.720,00	97,88%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.389.600,00	10.436.280,00	84,23%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.410.035,00	94,10%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	52.130.200,00	99,49%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.141.460,00	9.286.700,00	76,49%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.499.430,00	94,99%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.880.000,00	58.149.880,00	98,76%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.654.560,00	7.561.120,00	59,75%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.499.715,00	95,00%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	83.064.140,00	97,95%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.819.780,00	10.702.140,00	90,54%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.140.000,00	95,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.849.100,00	98,49%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.426.430,00	99,42%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.040.360,00	11.992.720,00	91,97%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.997.000,00	99,97%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	84.301.790,00	99,41%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.554.680,00	11.084.140,00	95,93%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.972.126,50	99,72%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.440.000,00	38.816.270,00	98,42%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.241.180,00	11.491.200,00	93,87%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.988.000,00	99,88%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.429.380,00	99,43%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.469.408,00	10.993.560,00	95,85%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.490.120,00	94,90%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.610.500,00	99,68%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.098.952,00	11.914.912,00	98,48%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.499.240,00	94,99%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	52.194.360,00	99,61%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.387.080,00	11.438.560,00	92,34%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.499.145,00	94,99%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.320.000,00	77.390.000,00	98,81%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.000,00	-	0,00%
33	**7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TOMOHON BARAT**	**813.305.548,00**	**802.492.471,40**	**98,67%**
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000,00	1.836.400,00	91,82%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	27.484.465,20	98,16%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.400.000,00	12.166.000,00	98,11%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.840.000,00	1.828.000,00	99,35%
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000,00	-	0,00%
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.553.000,00	11.415.648,00	98,81%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.761.776,00	9.292.200,00	86,34%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.490.500,00	94,91%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.776.200,00	99,91%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.724.480,00	10.224.200,00	95,34%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.880.000,00	58.816.200,00	99,89%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.751.300,00	10.318.200,00	95,97%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.884.000,00	98,84%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.280.000,00	91.216.200,00	99,93%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.961.600,00	9.817.400,00	89,56%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	84.736.200,00	99,92%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.824.640,00	9.703.000,00	89,64%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.991.736,70	99,92%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.360.000,00	65.296.200,00	99,90%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.748.144,00	9.920.960,00	92,30%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.978.371,50	99,78%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.776.200,00	99,91%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.976.908,00	9.898.200,00	90,17%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.984.090,00	99,84%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.776.200,00	99,91%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.763.700,00	9.769.000,00	90,76%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.490.500,00	94,91%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.360.000,00	65.056.200,00	99,54%
34	**7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR**	**585.426.431,60**	**560.717.595,00**	**95,78%**
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	760.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.792.759,60	29.876.000,00	83,47%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.000.000,00	7.640.000,00	95,50%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	680.000,00	589.000,00	86,62%
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.905.000,00	95,25%
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.001.200,00	11.944.588,00	99,53%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.382.246,00	16.818.000,00	91,49%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.184.000,00	98,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.454.974,90	94,55%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.360.000,00	64.467.600,00	98,63%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.924.264,00	15.038.000,00	83,90%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.184.000,00	98,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.455.022,30	94,55%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.760.000,00	96.829.500,00	99,05%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.991.778,00	15.182.000,00	94,94%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.184.000,00	98,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000,00	84.694.000,00	99,88%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.346.924,00	12.854.000,00	78,63%

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.184.000,00	98,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.455.022,30	94,55%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.840.000,00	71.340.000,00	99,30%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000,00	-	0,00%
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.327.260,00	13.180.000,00	80,72%
	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.200.000,00	1.184.000,00	98,67%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000,00	9.468.887,50	94,69%
	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.360.000,00	64.616.000,00	98,86%
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000,00	-	0,00%
	Total Belanja *Stunting*	**47.573.488.034,78**	**45.367.968.307,16**	**95,36%**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.8
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.8
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**	**18.116.748.429,00**	**10.873.358.063,00**	**60,02**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**2.415.338.429,00**	**2.197.718.775,00**	**90,99**
	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	98,86
	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	233.966.604,00	203.317.050,00	86,90
	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	258.541.825,00	139.371.325,00	53,91
	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000,00	448.384.750,00	89,68
B	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**15.701.410.000,00**	**8.675.639.288,00**	**55,25**
	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.058.180.000,00	3.494.847.316,00	43,37

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.337.050.000,00	4.028.102.972,00	63,56
	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.058.760.000,00	1.066.194.000,00	100,70
	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	247.420.000,00	86.495.000,00	34,96
2	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**16.565.212.600,00**	**16.367.773.875,00**	**98,81**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**16.565.212.600,00**	**16.367.773.875,00**	**98,81**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	380.254.500,00	324.402.375,00	85,31
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	127.662.500,00	106.134.200,00	83,14
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	108.555.000,00	75.816.475,00	69,84
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	34.388.475,00	68,78
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.355.500,00	44.927.100,00	91,03
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	397.355.500,00	365.675.300,00	92,03
	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.095.000,00	73.043.500,00	99,93
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	47.688.800,00	79,48
	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.817.000,00	156.716.300,00	91,75
	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.746.000,00	223.609.750,00	96,07
	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	100,00
3	**1.02.0.00.0.00.01.0002 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**461.505.000,00**	**277.570.000,00**	**60,14**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**461.505.000,00**	**277.570.000,00**	**60,14**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186.900.000,00	66.705.000,00	35,69
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.950.000,00	1.875.000,00	96,15
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	140.705.000,00	116.065.000,00	82,49
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.925.000,00	35.625.000,00	74,33
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	64.825.000,00	43.350.000,00	66,87
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	11.325.000,00	89,88

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000,00	2.625.000,00	41,67
4	**1.02.0.00.0.00.01.0003 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**296.385.000,00**	**149.980.000,00**	**50,60**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**296.385.000,00**	**149.980.000,00**	**50,60**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.990.000,00	36.380.000,00	43,31
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.625.000,00	1.200.000,00	33,10
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	129.495.000,00	69.500.000,00	53,67
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.400.000,00	12.900.000,00	48,86
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	51.675.000,00	29.700.000,00	57,47
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	300.000,00	25,00
5	**1.02.0.00.0.00.01.0004 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**546.713.500,00**	**342.925.000,00**	**62,72**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**546.713.500,00**	**342.925.000,00**	**62,72**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130.655.000,00	71.100.000,00	54,42
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	273.380.000,00	163.825.000,00	59,93

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.050.000,00	30.525.000,00	70,91
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99.628.500,00	77.475.000,00	77,76
6	**1.02.0.00.0.00.01.0005 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**391.540.000,00**	**95.895.000,00**	**24,49**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**391.540.000,00**	**95.895.000,00**	**24,49**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	138.750.000,00	7.625.000,00	5,50
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.210.000,00	375.000,00	6,04
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000,00	1.245.000,00	9,88
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	135.480.000,00	40.800.000,00	30,12
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.400.000,00	17.325.000,00	99,57
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.025.000,00	19.600.000,00	32,65
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.025.000,00	8.925.000,00	44,57
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.050.000,00	-	-
7	**1.02.0.00.0.00.01.0006 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**555.875.000,00**	**270.215.000,00**	**48,61**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**555.875.000,00**	**270.215.000,00**	**48,61**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	195.340.000,00	90.420.000,00	46,29
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.060.000,00	28.275.000,00	696,43
	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.800.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	208.950.000,00	109.195.000,00	52,26
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.400.000,00	26.475.000,00	59,63
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	77.925.000,00	4.525.000,00	5,81
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000,00	11.325.000,00	69,91
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.200.000,00	-	-
8	**1.02.0.00.0.00.01.0007 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**402.110.000,00**	**376.062.000,00**	**93,52**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**402.110.000,00**	**376.062.000,00**	**93,52**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	185.615.000,00	185.372.000,00	99,87
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.700.000,00	1.200.000,00	44,44

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136.495.000,00	112.240.000,00	82,23
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.550.000,00	16.500.000,00	99,70
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00
	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000,00	450.000,00	100,00
9	**1.02.0.00.0.00.01.0008 - DINAS KESEHATAN DAERAH**	**299.854.000,00**	**-**	**-**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**299.854.000,00**	**-**	**-**
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.580.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	694.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	108.180.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.700.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.900.000,00	-	-
	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	-	-

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
10	**1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH**	**7.839.263.341,00**	**7.496.427.662,00**	**95,63**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**7.839.263.341,00**	**7.496.427.662,00**	**95,63**
	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99.910.078,00	99.901.500,00	99,99
	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	693.882.263,00	693.882.262,00	100,00
	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	299.985.000,00	100,00
	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.906.750.000,00	4.612.276.900,00	94,00
	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	97,19
11	**1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH**	**1.045.862.575,00**	**797.574.374,00**	**76,26**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**1.045.862.575,00**	**797.574.374,00**	**76,26**
	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	4.078.000,00	2.625.000,00	64,37
	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.912.000,00	2.245.000,00	57,39

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	1.110.000,00	1,11
	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	44.869.974,00	89,74
	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	26.479.450,00	7.125.000,00	26,91
	1.04.05.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	861.393.125,00	739.599.400,00	85,86
12	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**133.149.900,00**	**118.438.469,00**	**88,95**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**133.149.900,00**	**118.438.469,00**	**88,95**
	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.350.000,00	38.444.469,00	88,68
	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	89.799.900,00	79.994.000,00	89,08
13	**1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH**	**2.686.985.943,00**	**2.302.279.700,00**	**85,68**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**2.686.985.943,00**	**2.302.279.700,00**	**85,68**
	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.850.000,00	85.667.600,00	82,49
	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.621.800,00	12.421.000,00	91,18
	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	129.124.620,00	124.400.000,00	96,34

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	75.000.000,00	66.000.000,00	88,00
	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	20.497.500,00	20.475.000,00	99,89
	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.877.000,00	120.684.800,00	92,92
	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	333.524.800,00	330.100.000,00	98,97
	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	112.430.000,00	101.539.000,00	90,31
	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	20.350.000,00	18.900.000,00	92,87
	1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	-	-
	1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.665.329.223,00	1.358.610.300,00	81,58
	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	80.481.000,00	63.482.000,00	78,88
14	**2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH**	**701.643.079,03**	**628.223.695,00**	**89,54**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**299.005.379,03**	**257.415.539,00**	**86,09**
	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	86,09
B	**Meningkatkan Pendapatan**	**400.000.000,00**	**368.185.756,00**	**92,05**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	368.185.756,00	92,05
C	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**2.637.700,00**	**2.622.400,00**	**99,42**
	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.637.700,00	2.622.400,00	99,42
15	**2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**	**269.881.958,00**	**258.675.700,00**	**95,85**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**269.881.958,00**	**258.675.700,00**	**95,85**
	2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	88.377.000,00	81.240.000,00	91,92
	2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10.964.400,00	8.265.000,00	75,38
	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.395.000,00	20.165.000,00	98,87
	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	21.215.887,00	21.215.000,00	100,00
	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	99,80
	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.221.319,00	42.220.000,00	100,00
	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.784.770,00	2.718.000,00	97,60
	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.049.182,00	16.111.600,00	94,50

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
16	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**	**24.300.000,00**	**-**	**-**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**24.300.000,00**	**-**	**-**
	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	-
17	**2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH**	**21.935.000,00**	**1.110.000,00**	**5,06**
A	**Meningkatkan Pendapatan**	**21.935.000,00**	**1.110.000,00**	**5,06**
	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.935.000,00	1.110.000,00	5,06
18	**3.27.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH**	**3.526.397.400,00**	**3.060.255.764,00**	**86,78**
A	**Meningkatkan Pendapatan**	**2.217.289.350,00**	**1.868.890.764,00**	**84,29**
	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	99,95
	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	82,32
	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	143.001.250,00	129.075.179,00	90,26
	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.470.100,00	246.402.751,00	92,82
B	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**	**1.309.108.050,00**	**1.191.365.000,00**	**91,01**

No.	Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	90,27
19	**2.07.3.29.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH**	**4.630.722.010,00**	**4.530.693.897,00**	**97,84**
A	**Meningkatkan Pendapatan**	**579.298.360,00**	**505.585.952,00**	**87,28**
	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	579.048.750,00	505.585.952,00	87,31
	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	-
B	**Mengurangi Beban Pengeluaran**	**4.051.423.650,00**	**4.025.107.945,00**	**99,35**
	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	99,35
	Total Belanja Kemiskinan Ekstrem	**58.605.884.635,03**	**48.027.452.199,00**	**81,95**

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.9
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.9
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			KETERANGAN**)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	260.150.000,00	14.638.500,00	5,63	-	-	-	
TOTAL		**260.150.000,00**	**14.638.500,00**	**5,63**	-	-	-	

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.10
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA D.10
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* (Rp)	Persentase (%)	Keterangan*)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.819.975.850,00	1.753.178.823,00	96,33	
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	16.610.363.076,00	11.062.010.474,00	66,60	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	163.431.100,00	160.894.500,00	98,45	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	-	-	-	**Dilakukan melalui proses P/L**
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.853.700,00	12.359.850,00	96,16	
7	DINAS SOSIAL DAERAH	-	-	-	**Dilakukan melalui proses P/L**
8	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	1.941.527.545,00	232.000.025,00	11,95	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	97.884.000,00	97.568.600,00	99,68	
10	DINAS PANGAN DAERAH	906.803.904,00	722.008.219,00	79,62	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.719.982.190,00	1.719.982.190,00	100,00	

No.	SKPD	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* (Rp)	Persentase (%)	Keterangan*)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	331.992.400,00	302.250.293,00	91,04	
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	119.880.000,00	119.880.000,00	100,00	
14	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	2.527.167.000,00	2.015.779.857,00	79,76	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	2.261.818.657,00	1.567.741.092,00	69,31	
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	29.914.500,00	29.914.500,00	100,00	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	441.229.900,00	437.138.640,00	99,07	
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.080.805.125,00	601.667,00	0,06	
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-	-	**Dilakukan melalui proses P/L**
20	DINAS PARIWISATA DAERAH	110.160.000,00	110.160.000,00	100,00	
21	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	6.659.659.930,00	2.535.608.205,00	38,07	
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	2.255.297.900,00	213.832.773,00	9,48	
23	SEKRETARIAT DAERAH	546.801.730,00	2.234.216.852,00	408,60	
24	SEKRETARIAT DPRD	20.334.282.703,00	1.929.155.500,00	9,49	
25	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.619.246.066,00	567.964.800,00	35,08	
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.082.043.127,50	1.997.708.409,50	95,95	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.555.405.249,00	249.666,00	0,01	

No.	SKPD	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* (Rp)	Persentase (%)	Keterangan*)
28	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	**Dilakukan melalui proses P/L**
29	KECAMATAN TOMOHON UTARA	473.300.000,00	473.300.000,00	100,00	
30	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	1.796.931.699,00	42.800.000,00	2,38	
31	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	-	-	-	**Dilakukan melalui proses P/L**
32	KECAMATAN TOMOHON BARAT	68.136.400,00	67.807.563,00	99,52	
33	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	49.725.000,00	49.725.000,00	100,00	
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	894.295.379,00	435.959.639,00	48,75	
TOTAL		**69.510.914.130,50**	**30.891.797.137,50**	**44,44**	